

Perhimpunan Telekomunikasi
Internasional

*Akta Akhir
Konferensi Yang Berkuasa Penuh
(Guadalajara, 2010)*

Instrumen yang mengubah
Konstitusi dan Konvensi
Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992)
sebagaimana telah diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh
(Kyoto, 1994),
pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998),
Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002),
dan pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006)

Aturan Umum Konferensi,
Majelis dan Pertemuan Perhimpunan

Keputusan
Resolusi

CATATAN PENJELASAN

Simbol yang digunakan dalam Akta Akhir

Simbol-simbol yang terdapat pada sisi luar halaman menandakan perubahan-perubahan yang diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) dalam hubungannya terhadap teks-teks dari Konstitusi dan Konvensi (Jenewa, 1992) sebagaimana telah diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), dan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006) dan memiliki arti sebagai berikut:

ADD = penambahan dari suatu ketentuan baru

MOD = modifikasi dari ketentuan yang telah ada

(MOD) = modifikasi editorial dari suatu ketentuan yang telah ada

SUP = penghapusan suatu ketentuan yang telah ada

SUP* = ketentuan dipindahkan ke tempat lain dalam Akta Akhir

ADD* = ketentuan yang telah ada dipindahkan dari tempat lain dalam Akta Akhir ke tempat yang telah ditentukan

Simbol-simbol ini diikuti dengan nomor dari ketentuan yang telah ada. Untuk ketentuan-ketentuan baru (simbol ADD), titik di mana simbol akan disisipkan ditunjukkan dengan nomor dari ketentuan sebelumnya, diikuti dengan suatu huruf.

Penomoran untuk keputusan, resolusi dan rekomendasi

Keputusan-keputusan dan resolusi-resolusi yang baru diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), telah dinomorerkan dimulai dari nomor berikutnya mengikuti nomor terakhir yang digunakan pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006). Keputusan-keputusan dan resolusi-resolusi yang direvisi oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) menggunakan nomor yang sama seperti sebelumnya, diikuti oleh "(Rev. Guadalajara, 2010)".

© ITU 2011

Semua hak cipta dilindungi. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi atau digunakan dalam bentuk apapun atau cara apa pun, elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi dan membuat mikrofilm, tanpa seizin tertulis dari ITU.

Daftar isi

Instrumen yang mengubah Konstitusi
Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992)
sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994),
pada Konferensi Yagn Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998),
pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002),
dan pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006)

(Perubahan yang diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh
(Guadalajara, 2010))

	<i>Halaman</i>
BAGIAN I – Pendahuluan	14
BAB V – Ketentuan Lain Mengenai Pelaksanaan Perhimpunan	
PASAL 28 Keuangan Perhimpunan	14
BAGIAN II – Tanggal Mulai Berlaku	15
Formula Akhir	15
Tanda Tangan.....	16

Instrumen yang mengubah Konstitusi
Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992)
sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994),
pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998),
pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002),
dan pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006)

(Perubahan yang diterima pada Konferensi Berkuasa Penuh (Guadalajara,
2010))

	<i>Halaman</i>
BAGIAN I – Pendahuluan	29
BAB IV – Ketentuan Lain	
PASAL 33 Keuangan	30
BAGIAN II – Tanggal Mulai Berlaku.....	30
Formula Akhir	30
Tanda Tangan.....	16
Pernyataan dan Pensyaratan.....	31

Aljazair (Republik Rakyat Demokratik) (35, 53, 87)
Jerman (Republik Federal) (23, 38, 39, 85)
Andorra (Keharyapatihan) (17)
Angola (Republik) (34)
Arab Saudi (Kerajaan) (24, 35, 87)
Republik Argentina (20)
Armenia (Republik) (28)
Australia (55, 67, 85)
Austria (23, 39, 85)
Bahrain (Kerajaan) (35, 87)
Barbados (73)
Belgia (9, 10, 23, 39, 85)
Botswana (Republik) (59)
Bulgaria (Republik) (23, 39, 85)
Burkina Faso (45)
Burundi (Republik) (16)
Kamerun (Republik) (25)
Kanada (67, 72, 77, 85)
Cile (93)
China (Republik Rakyat) (40)
Siprus (Republik) (11, 23, 39)
Vatikan (19, 39)
Korea (Republik) (51)
Pantai Gading (Republik) (86)
Kroasia (Republik) (39, 50, 85)
Kuba (32)
Denmark (23, 39, 85)
Republik Dominika (15)
Mesir (Republik Arab) (65)
El Salvador (Republik) (4)
Uni Emirat Arab (35, 36, 87)
Spanyol (23, 26, 39)
Estonia (Republik) (23, 29, 39, 85)
Amerika Serikat (67, 68, 84, 85)
Ethiopia (Republik Demokratik Federal) (92)
Federasi Rusia (28)
Finlandia (23, 39, 85)
Perancis (23, 39, 48, 85)
Republik Gabon (74)
Yunani (23, 39, 85)
Guatemala (Republik) (13)
Guinea (Republik) (8)
Honduras (Republik) (41)
Hungaria (Republik) (23, 39, 85)
India (Republik) (76)
Indonesia (Republik) (5)
Iran (Republik Islam) (35, 47, 87)
Irak (Republik) (35, 87)
Irlandia (23)
Islandia (30, 39, 85)
Israel (Negara) (71, 75)
Italia (23, 39, 85)
Jamaika (95)

Jepang (62, 85)
Kazakhstan (Republik) (28)
Kenya (Republik) (63)
Kuwait (Negara) (35)
Lesotho (Kerajaan) (54)
Latvia (Republik) (23, 29, 39, 85)
Lebanon (35, 87)
Liechtenstein (Keharyapatihan) (30, 39, 85)
Lithuania (Republik) (23, 29, 39, 85)
Luksemburg (23, 39, 85)
Malaysia (35)
Malawi (78)
Mali (Republik) (49)
Maroko (Kerajaan) (35, 87)
Mauritania (Republik Islam) (35)
Meksiko (70)
Mikronesia (Negara Federasi) (42)
Moldova (Republik) (28)
Montenegro (Republik) (39, 85)
Mozambique (Republik) (31)
Nikaragua (43)
Niger (Republik) (14)
Nigeria (Republik Federal) (18)
Norwegia (30, 39, 85)
Selandia Baru (56, 85)
Oman (kesultanan) (35, 80, 87)
Uganda (Republik) (66)
Uzbekistan (Republik) (28)
Papua Nugini (46)
Paraguay (Republik) (6)
Belanda (Kerajaan) (23, 39, 85)
Filipina (Republik) (52)
Polandia (Republik) (23)
Portugal (23, 39, 85)
Qatar (Negara) (35, 79)
Republik Arab Syria (35, 61, 87)
Republik Kyrgyztan (28)
Republik Slowakia (23, 39, 85)
Republik Ceko (23, 39, 85)
Rumania (23, 39)
Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (23, 39, 85, 90)
Rwanda (Republik) (3)
San Marino (Republik) (12, 39)
Samoa (Negara Independen) (57)
Singapura (Republik) (7)
Slovenia (Republik) (23, 39, 85)
Republik Demokratik Somalia (88)
Sudan (Republik) (35, 83,87)
Sri Lanka (Republik Sosialis Demokratik) (58)
Afrika Selatan (Republik) (64)
Swedia (23, 39, 85)
Swiss (Konfederasi) (39, 85)
Swaziland (Kerajaan) (37)

Tanzania (Republik Serikat) (60)
Chad (Republik) (33)
Thailand (2)
Republik Togo (82)
Trinidad dan Tobago (44)
Tunisia (21, 35, 87)
Turki (39, 69, 85, 94)
Ukraina (28)
Uruguay (Republik Timur) (1)
Venezuela (Republik Bolivar) (22)
Vietnam (Republik Sosialis) (27)
Yaman (Republik) (35, 89)
Zambia (Republik) (81)
Zimbabwe (Republik) (91)

Halaman

Peraturan Umum Konferensi, Sidang, dan Pertemuan Perhimpunan	78
BAB III Prosedur Pemilihan.....	78
34 Peraturan khusus untuk prosedur pemilihan Negara Anggota dari Dewan.....	78

Keputusan

5 (Rev. Guadalajara, 2010) Pendapatan dan pengeluaran Perhimpunan untuk periode 2012-2015.....	80
11 (Guadalajara, 2010) Pembentukan dan manajemen kelompok kerja Dewan.....	87
12 (Guadalajara, 2010) Akses <i>online</i> bebas untuk Publikasi ITU	89
Daftar KEPUTUSAN yang dicabut oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010	93

Resolusi

Halaman

2 (Rev. Guadalajara, 2010) Forum kebijakan Telekomunikasi Dunia/ teknologi informasi dan komunikasi Dunia	94
4 (Rev. Guadalajara, 2010) Lamanya konferensi yang berkuasa penuh Perhimpunan.....	98
11 (Rev. Guadalajara, 2010) kegiatan ITU TELECOM	99
25 (Rev. Guadalajara, 2010) Memperkuat kehadiran regional	105
30 (Rev. Guadalajara, 2010) Kebijakan-kebijakan khusus untuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi	114

34	(Rev. Guadalajara, 2010) Bantuan dan dukungan kepada negara-negara dengan kebutuhan khusus untuk pembangunan kembali sektor telekomunikasi mereka	117
36	(Rev. Guadalajara, 2010) Telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan bantuan kemanusiaan	121
41	(Rev. Guadalajara, 2010) Tunggakan dan rekening tunggakan khusus	123
48	(Rev. Guadalajara, 2010) Pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber daya Manusia.....	126
58	(Rev. Guadalajara, 2010) Memperkuat hubungan antara ITU dan organisasi telekomunikasi regional dan persiapan regional untuk Konferensi Yang Berkuasa	131
64	(Rev. Guadalajara, 2010) Akses non diskriminasi untuk fasilitas, layanan dan aplikasi telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi modern, termasuk penelitian terapan dan alih teknologi, berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.....	134
66	(Rev. Guadalajara, 2010) Dokumen dan publikasi Perhimpunan	137
68	(Rev. Guadalajara, 2010) Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia	140
70	(Rev. Guadalajara, 2010) Pengarusutamaan gender dalam ITU dan promosi persamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui teknologi informasi dan komunikasi ..	142
71	(Rev. Guadalajara, 2010) Rencana strategis Perhimpunan untuk 2012-2015	148
72	(Rev. Guadalajara, 2010) Menghubungkan perencanaan strategis, keuangan dan operasional dalam ITU.....	204
77	(Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi, sidang dan forum Perhimpunan di masa datang (2011-2014).....	207
91	(Rev. Guadalajara, 2010) Penggantian biaya untuk beberapa produk dan layanan ITU	209
94	(Rev. Guadalajara, 2010) Mengaudit rekening Perhimpunan	214
99	(Rev. Guadalajara, 2010) Status Palestina dalam ITU.....	215
101	(Rev. Guadalajara, 2010) Jaringan Internet berbasis protokol ...	218

102 (Rev. Guadalajara, 2010)	Peran ITU dengan memperhatikan permasalahan kebijakan publik internasional mengenai internet dan pengelolaan sumber Internet dan pengelolaan sumber Internet, termasuk nama dan alamat domain...	223
122 (Rev. Guadalajara, 2010)	Peran pengembangan Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia.	231
123 (Rev. Guadalajara, 2010)	Menjembatani kesenjangan standardisasi antara negara berkembang dan maju	235
125 (Rev. Guadalajara, 2010)	Bantuan dan dukungan kepada Palestina untuk membangun kembali jaringan telekomunikasinya.....	239
126 (Rev. Guadalajara, 2010)	Bantuan dan dukungan kepada Republik Serbia untuk membangun kembali sistem penyiaran publiknya yang hancur	242
130 (Rev. Guadalajara, 2010)	Memperkuat peran ITU dalam membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ..	244
131 (Rev. Guadalajara, 2010)	Indeks teknologi informasi dan komunikasi, dan indikator konektivitas masyarakat	254
133 (Rev. Guadalajara, 2010)	Peran administrasi Negara Anggota dalam pengelolaan nama domain yang internasional (multi bahasa)	259
135 (Rev. Guadalajara, 2010)	Peran ITU dalam pengembangan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi, dalam memberikan bantuan dan nasihat teknis kepada negara berkembang, dan dalam melaksanakan proyek nasional, regional, dan antarregional yang relevan.....	264
136 (Rev. Guadalajara, 2010)	Penggunaan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitor dan pengelolaan dalam keadaan darurat dan keadaan bencana untuk peringatan dini, pencegahan, mitigasi dan pemulihan.	267
137 (Rev. Guadalajara, 2010)	Peluncuran jaringan generasi masa depan di negara berkembang.....	271
139 (Rev. Guadalajara, 2010)	Telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi untuk menjembatani kesenjangan digital dan membangun masyarakat informasi yang terbuka...	275

140 (Rev. Guadalajara, 2010)	Peran ITU dalam melaksanakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi	281
143 (Rev. Guadalajara, 2010)	Memperluas ketentuan dalam dokumen ITU yang terkait dengan negara berkembang untuk memberlakukan pada negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi	289
150 (Rev. Guadalajara, 2010)	Persetujuan rekening Perhimpunan untuk tahun 2006-2009	291
151 (Rev. Guadalajara, 2010)	Pelaksanaan pengelolaan berdasarkan hasil dalam ITU	292
152 (Rev. Guadalajara, 2010)	Perbaikan pengelolaan dan tindak lanjut penggantian pengeluaran ITU oleh Anggota Sektor dan Asosiat	294
153 (Rev. Guadalajara, 2010)	Penjadwalan sesi Dewan dan konferensi yang berkuasa penuh	297
154 (Rev. Guadalajara, 2010)	Penggunaan enam bahasa resmi Perhimpunan berdasarkan kesetaraan	299
157 (Rev. Guadalajara, 2010)	Menguatkan fungsi pelaksanaan proyek dalam ITU	302
158 (Rev. Guadalajara, 2010)	Isu keuangan untuk pertimbangan Dewan	305
159 (Rev. Guadalajara, 2010)	Bantuan dan dukungan bagi Libanon untuk membangun kembali jaringan telekomunikasi (tetap dan bergerak) ..	307
162 (Guadalajara, 2010)	Komite penasihat pengelolaan independen.....	309
163 (Guadalajara, 2010)	Pendirian kelompok kerja Dewan pada Konstitusi ITU yang tetap	322
164 (Guadalajara, 2010)	Pengalokasian kursi dari Negara Anggota Dewan.....	328
165 (Guadalajara, 2010)	Tenggat waktu untuk penyerahan usulan dan prosedur pendaftaran peserta untuk konferensi dan sidang Perhimpunan.....	329
166 (Guadalajara, 2010)	Jumlah wakil ketua dari kelompok penasihat Sektor, kelompok kerja dan kelompok lainnya	331
167 (Guadalajara, 2010)	Memperkuat kemampuan ITU untuk pertemuan elektronik dan cara untuk memajukan tugas Perhimpunan	334
168 (Guadalajara, 2010)	Penerjemahan rekomendasi ITU.....	338

169 (Guadalajara, 2010)	Penerimaan akademisi, universitas dan lembaga penelitiannya yang terkait untuk ikut serta dalam pekerjaan ketiga Sektor Perhimpunan	341
170 (Guadalajara, 2010)	Penerimaan Anggota Sektor dari negara berkembang untuk ikut serta dalam pekerjaan Sektor Komunikasi Radio ITU dan Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU.....	343
171 (Guadalajara, 2010)	Persiapan untuk konferensi dunia mengenai telekomunikasi internasional tahun 2012	345
172 (Guadalajara, 2010)	Peninjauan kembali menyeluruh dari pelaksanaan hasil Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi	349
173 (Guadalajara, 2010)	Pembajakan dan penyerangan terhadap jaringan telepon tetap dan selular di Libanon.....	351
174 (Guadalajara, 2010)	Peran ITU dengan memperhatikan kebijakan publik internasional yang terkait dengan resiko penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang melanggar hukum	353
175 (Guadalajara, 2010)	Aksesibilitas telekomunikasi/ teknologi informasi dan komunikasi untuk penyandang disabilitas, termasuk disabilitas yang terkait dengan umur.....	357
176 (Guadalajara, 2010)	Kerawanan (<i>exposure</i>) manusia terhadap dan pengukuran medan elektromagnetik	362
177 (Guadalajara, 2010)	Kesesuaian dan kemampuan untuk saling beroperasi	364
178 (Guadalajara, 2010)	Peran ITU dalam mengatur kerja pada aspek teknis jaringan telekomunikasi untuk mendukung Internet	368
179 (Guadalajara, 2010)	Peran ITU dalam perlindungan <i>online</i> anak.....	372
180 (Guadalajara, 2010)	Memfasilitasi transisi dari IPv4 menjadi IPv6.....	377
181 (Guadalajara, 2010)	Definisi dan peristilahan yang berhubungan dengan pembangunan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.....	380

182 (Guadalajara, 2010)	Peran telekomunikasi/ teknologi informasi dan komunikasi sehubungan dengan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.....	385
183 (Guadalajara, 2010)	Aplikasi Telekomunikasi/TIK untuk e-kesehatan.....	392
184 (Guadalajara, 2010)	Memfasilitasi inisiatif inklusi digital untuk masyarakat madani.....	395
Daftar KEPUTUSAN yang dicabut oleh Konferensi yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010)		398

**INSTRUMEN YANG MENGUBAH
KONSTITUSI DAN KONVENSI
PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL
(JENEWA, 1992)**

 sebagaimana diubah pada
 Konferensi yang Berkuasa Penuh (Kyoto 1994),
 pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Minneapolis 1998)
 dan pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Marrakesh 2002)
 dan pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006)

**INSTRUMEN YANG MENGUBAH KONSTITUSI
PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL
(JENEWA, 1992)**

 sebagaimana telah diubah pada
 Konferensi yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994),
 pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998),
 pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002)
 dan pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006)

 (Perubahan yang diterima pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010))

**KONSTITUSI
PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL*
(JENEWA, 1992)**

BAGIAN I. Pendahuluan

Berdasarkan atas dan dalam pelaksanaan ketentuan yang relevan dari Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana telah diubah pada Konferensi yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), oleh Konferensi Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), dan oleh Konferensi yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), khususnya tersebut dalam Pasal 55, maka Konferensi yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Antalya, 2006) telah menerima dalam Konstitusi tersebut perubahan-perubahan sebagai berikut:

**BAB V
Ketentuan Lain Mengenai Bekerjanya Perhimpunan**

**PASAL 28
Keuangan Perhimpunan**

* Bahasa yang digunakan dalam instrument dasar dari Perhimpunan (Konstitusi dan Konvensi) harus dianggap sebagai netral gender

MOD 165 5 Pada saat memilih kelas kontribusi, Negara Anggota wajib tidak mengurangi lebih dari 15 persen dari jumlah unit yang telah dipilih oleh Negara Anggota untuk periode sebelum pengurangan, dengan membulatkan kepada jumlah unit di bawahnya dari skala, untuk kontribusi tiga atau lebih unit; atau dengan lebih dari satu kelas kontribusi, untuk kontribusi di bawah tiga unit. Dewan wajib menunjukkannya cara dimana pengurangan wajib dilaksanakan secara bertahap selama periode di antara konferensi-konferensi berkuasa penuh. Namun, dalam keadaan-keadaan luar biasa seperti bencana alam yang mengharuskan program bantuan internasional, Konferensi yang Berkuasa Penuh dapat mengizinkan pengurangan jumlah unit kontribusi lebih besar apabila diminta oleh Negara Anggota yang telah ditentukan tidak dapat mempertahankan kontribusinya pada kelas yang dipilih sebelumnya.

BAGIAN II. Tanggal mulai berlaku

Perubahan-perubahan yang terdapat dalam instrumen sekarang ini wajib, sebagai suatu keseluruhan dan dalam bentuk instrumen yang tunggal, mulai berlaku pada 1 Januari 2012 antara Negara-Negara Anggota yang pada saat pihak pada Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan telah menyerahkan instrumen sebelum tanggal tersebut, instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan dari, atau akses pada, instrumen perubahan ini.

SEBAGAI BUKTI, masing-masing yang diberi kuasa penuh telah menandatangani instrumen ini yang mengubah Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional ini (Jenewa, 1992), sebagaimana telah diubah pada Konferensi yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), pada Konferensi yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), pada Konferensi yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002) dan pada Konferensi yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006).

Dilaksanakan di Guadalajara, 22 Oktober 2010

Untuk Afganistan

Baryalai HASSAM
Abdul Wakil SHERGUL
Nader Shah ARIAN

Untuk Republik Albania

Genc POLLO
Gjergji GJINKO
Alketa MUKAVELATI
Benon PALOKA

Untuk Republik Rakyat Demokratik Aljazair

Mohamed BAÏT

Untuk Republik Federal Jerman

Peter VOSS

Untuk Andorra

Michele GIRI

Untuk Angola

Pedro Sebastião TETA
António Bastos José DIAS
António Pedro BENGGE
Domingos PEDRO ANTÓNIO

Untuk Kerajaan Arab Saudi

Mohammed Jamil AL-MULLA
Fareed Yousef KHASHOGGI
Habeeb K. AL-SHANKITI
Abdullah A. AL-DARRAB
Majed M. AL-MAZYED

Untuk Republik Argentina

Facundo FERNÁNDEZ BEGNI

Untuk Republik Armenia

Albert NALBANDIAN

Untuk Australia

Brenton D. THOMAS
Jason Campbell Mein ASHURST

Untuk Austria

Christian SINGER
Susanna WÖLFER

Untuk Republik Azerbaijan

Ilgar MUKHTAROV

Untuk Persemakmuran Bahamas

Reginald BOURNE

Untuk Kerajaan Bahrain

Jameel J. GHAZWAN
Sayed Kamel ALI MAHFOODH

Untuk Republik Rakyat Bangladesh

Sunil Kanti BOSE
Hasan Mahmood DELWAR
Shameem AL MAMUN
Md. Mohsin UL ALAM
Md. Abdul HALIM
Md. Rakibul HASSAN
Md. Mahboob AHMED
Md. Rezaul QUADER

Untuk Barbados

Reginald BOURNE

Untuk Belgia

Guido POUILLON
Etienne DEFRANCE

Untuk Belize

Rosendo Antonio URBINA

Untuk Republik Benin

Wilfrid A. Serge MARTIN ABOUBAKAR

Untuk Kerajaan Bhutan

Phuntsho TOBGAY

Untuk Negara Plurinasional Bolivia

Waldo REINAGA JOFFRE

Untuk Bosnia dan Herzegovina

Zeljko KNEZEVIC

Untuk Republik Botswana

Thari Gilbert PHEKO
Martin MOKGWARE
Twoba Boikaego KOONTSE
Cecil Otukile MASIGA
Godfrey RADJENG
Tshoganetso KEPALETSWE
Boitshepo Maphoi KOMANYANE

Untuk Republik Federasi Brazil

Jeferson Fued NACIF

Untuk Brunei Darussalam

Haji Zaini HAJI PUNGUT
Siti Nor I. Hasyiyati ROSLI

Untuk Republik Bulgaria

Andreana R. ATANASOVA

Untuk Burkina Faso

Lamoussa OUALBEOGO

Untuk Republik Burundi

Concilie NIBIGIRA

Untuk Kerajaan Kamboja

Khun SO

Untuk Republik Kamerun

Jean-Pierre BIYITI BI ESSAM

Paulette ABENKOU EBA'A

Jean-Louis BEH MENGUE

Julien BARA

Jean-Claude TCHOULACK

Suzy F. V. OWONA NOAH

Pierre MOUNDOU

Lucien NANA YOMBA

Calvin D. BANGA MBOM

Aboubakar ZOURMBA

Untuk Kanada

Kathy FISHER

Bruce A. GRACIE

Untuk Republik Cape Verde

David GOMES

Untuk Republik Afrika Tengah

Thierry Savonarole MALEYOMBO

Paul Vincent MARBOUA

V. Nadège Carla DEA-KOFFEMBA

Syntiche NALIMBI

Untuk Cile

Catalina ACHERMANN U.

Untuk Republik Rakyat China

Yonghong ZHAO

Untuk Republik Siprus

Eleftherios PILAVAKIS

Untuk Negara Kota Vatikan

Sandro PIERVENANZI

Untuk Republik Kongo

Dieudonné BABAKISSINA

Alain Bernard EWENGUE

Untuk Republik Korea

Kyu-Jin WEE
Keounghee LEE

Untuk Kosta Rika

Allan RUÍZ MADRIGAL

Untuk Republik Pantai Gading

Dadié Roger DÉDÉ
Aline MOULARÉ N'Dakon
Simon Koffi
Yapi ATSE
Kakou BI KANVOLI
Héraclès Mayé ASSOKO

Untuk Republik Kroasia

Kreso ANTONOVIC
Drazen LUCIC

Untuk Kuba

Carlos Martínez ALBUERNE
Wilfredo LÓPEZ RODRÍGUEZ

Untuk Denmark

Peter H. Pedersen
Christine MÜLLER ANDREASSEN

Untuk Republik Djibouti

Hussein Ahmed HERSI

Untuk Republik Dominika

Sócrates MARTÍNEZ DE MOYA
Javier GARCIA
Paola J. M. TORRES

Untuk Republik Arab Mesir

Karim ABDELGHANI

Untuk Republik El Salvador

Oscar Atilio ESTRADA VALLE

Untuk Serikat Kesultanan Arab

Tariq AL AWADHI
Nasser BIN HAMMAD
Saad HASSAN
Nasser AL MARZOUQI
Mohammad Al Mazrouei

Untuk Ekuador

Javier VÉLIZ MADINYÁ

Untuk Spanyol

Bernardo LORENZO ALMENDROS
Marta CIMAS HERNANDO
Blanca González GONZÁLEZ
Bárbara FUERTES GONZÁLEZ
Laura PÉREZ MARTOS
Ruth DEL CAMPO BÉCARES K

Untuk Republik Estonia

Mart LAAS

Untuk Amerika Serikat

Philip VERVEER

Untuk Republik Demokratik Federal Etiopia

Balcha REBA

Untuk Federasi Rusia

Igor SHCHEGOLEV

Untuk Republik Fiji

Elizabeth Anne POWELL

Untuk Finlandia

Petri LEHIKONEN
Mervi KULTAMAA
Risto VÄINÄMÖ

Untuk Perancis

Benoît BLARY
Arnaud MIQUEL
Marie-Thérèse ALAJOUANINE

Untuk Republik Gabon

Laure Olga GONDJOUT
Lin Mombo
Claude AHAVI
Stanislas OKOUMA LEKHOUYI
Edgard Brice PONGA
Fabien MBENG EKOOGHA
Jacques EDANE NKWELE
Bernard LIMBONDZI
Florence L-K BIBENDA

Untuk Republik Gambia

Alhaji A. CHAM
Mikheil GOTOSHIA

Untuk Ghana

Yahaya ISSAH

Untuk Yunani

Nissim BENMAYOR
Vassilios CASSAPOGLOU
Elena PLEXIDA

Untuk Republik Guatemala

Rodrigo ROBLES FLORES

Untuk Republik Guinea

Talibé DIALLO
Mamadou Pathé BARRY
Mamadou Cellou DIALLO

Untuk Guyana

Cris SEECHERAN

Untuk Republik Honduras

Lidia Estela CARDONA PADILLA
Gelbin Rafael PONCE

Untuk Republik Hungaria

Emília ULELAY

Untuk Republik India

R. N. JHA
Anuraag KOCHAR
P. K. GARG
Asit KADAYAN
Sadhana DIKSHIT
R. K. GUPTA
Manharsinh YADAV

Untuk Republik Indonesia

Tifatul SEMBIRING
Ikhsan BAIDIRUS

Untuk Republik Islam Iran

Samad MOEMEN BELLAH

Untuk Republik Irak

Amir KHADR

Untuk Irlandia

CAOIMHÍN SMITH

Untuk Islandia

Ari JOHANSSON

Untuk Negara Israel

Eden BAR TAL
Naama HENIG
Ron ADAM
Nati SCHUBERT
Liat GLAZER

Untuk Italia

Luciano BALDACCI

Untuk Jamaika

Clive MULLINGS

Untuk Jepang

Masaaki ONO

Untuk Kerajaan Hashimiah Yordania

Al-Ansari M. ALMASHAKBEH

Untuk Republik Kazakhstan

Karlygash MAUTENBAYEVA

Untuk Republik Kenya

Charles J. K. NJOROGE

Untuk Kerajaan Lesotho

Tseliso MOKELA

Untuk Republik Latvia

Uldis REIMANIS

Untuk Libanon

Charbel NAHAS
Nouhad MAHMOUD
Imad HOBALLAH
Maurice GHAZAL

Untuk Republik Liberia

Jeremiah C. SULUNTEH
Angelique WEEKS
Lamini A. WARITAY
Sekou M. KROMAH

Untuk Keharyapatihan Liechtenstein

Kurt BÜHLER

Untuk Republik Lithuania

Rimvydas VASTAKAS

Untuk Luksemburg

Anne BLAU

Untuk Malaysia

Mohd Ali BIN MOHAMAD NOR

Untuk Malawi

Willie KAMANGA
Esther NG'ONG'OLA
Ben CHITSONGA

Untuk Republik Mali

Mariam Flantié Diallo DIARRA
M'Bodji Sène DIALLO
Choguel K. MAÏGA
Claude Sama TOUNKARA
Moussa OUATTARA
Adama KONATÉ

Untuk Kerajaan Maroko

Mustapha BESSI
Mohammed HAMMOUDA
Brahim KHADIRI
Farid LAABOUDI
Hassan TALIB
Noureddine LASFAR
Rachid EL MOUTARAJJI

Untuk Meksiko

Héctor OLAVARRÍA TAPIA

Untuk Negara-Negara Federasi Mikronesia

Jolden J. JOHNNYBOY

Untuk Republik Moldova

Veaceslav PASCAL

Untuk Keharyapatihan Monako

Robert FILLON

Untuk Montenegro

Srdjan MIHALJEVIC

Untuk Republik Mozambik

Américo F. MUCHANGA
Hilário J. L. TAMELE
Francisco X. GIROTH

Untuk Republik Namibia

Stanley SIMATAA
Henry J. KASSEN
Theodorus G. KLEIN

Untuk Republik Demokratik Federal Nepal

Narayan Prasad REGMI

Untuk Nikaragua

José Pablo DE LA ROCA

Untuk Republik Niger

Abdoulkarim SOUMAÏLA

Untuk Republik Federal Nigeria

Kilyobas Nyobanga BINGA

Okechukwu ITANYI

Nnena O. KALU-UKOHA

Untuk Norwegia

Ottar OSTNES

Christina CHRISTENSEN

Untuk Selandia Baru

Ian R. HUTCHINGS

Tracey Elizabeth BLACK

Keith DAVIDSON

Untuk Kesultanan Oman

Ali Mohamed A. AL-FARSI

Untuk Republik Uganda

Abel KATAHOIRE

Patrick MWESIGWA

Geoffrey SSEBUGGWAWO

Irene KAGGWA-SEWANKAMBO

Joanita NAMPEWO

Untuk Republik Uzbekistan

Asror ISHANKHODJAEV

Untuk Papua Nugini

Kila GULO-VUI

Untuk Republik Paraguay

Ladislao MELLO

Nicolás EVERS

Carlos M. GALEANO DAGOGLIANO

Untuk Kerajaan Belanda

Wim RULLENS

Untuk Peru

José D. HURTADO FUDINAGA

Untuk Republik Filipina

Priscilla F. DEMITION

Nestor S. BONGATO

Untuk Republik Polandia

Anna E. NIEWIADOMSKA
Justyna ROMANOWSKA

Untuk Portugal

Cristina LOURENÇO
Joana SANTOS
Manuel DA COSTA CABRAL

Untuk Negara Qatar

Hassan J. AL-SAYED
Azhari NUREDDEEN

Untuk Republik Arab Syria

Imad SABOUNI
Nadhim BAHASAS
Mohammad AL JALALI

Untuk Republik Kyrgyztan

Baiysh NURMATOV

Untuk Republik Rakyat Demokratik Korea

Ri JUNG WON
Kyong IL SO

Untuk Republik Slovakia

Ján HUDACKÝ
Jaroslav BLASKO
Viliam PODHORSKÝ

Untuk Republik Ceko

Pavel DVORÁK

Untuk Rumania

Aurelian Sorinel CALINCIUC
Ionela ANDRISOI

Untuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara

Nigel HICKSON
Chris WOOLFORD
Paul REDWIN

Untuk Republik Rwanda

Ignace GATARE
Abraham MAKUZA
Charles SEMAPONDO
Vijayakumar KUPPUSAMY

Untuk Republik San Marino

Michele GIRI
Federico VALENTINI

Untuk Negara Independen Samoa

Ian R. HUTCHINGS
Tracey Elizabeth BLACK

Untuk Republik Demokratik Sao Tome dan Principe

Jeferson FUED NACIF

Untuk Republik Senegal

François DA SYLVA
El Hadji Moda SEYE

Untuk Republik Serbia

Jasna MATIC
Irena POSIN
Irina RELJIN
Vladimir STANKOVIC
Momcilo SIMIC

Untuk Republik Singapura

Aileen CHIA
Ka Wei HO
Charmaine CHUA

Untuk Republik Slovenia

Joze UNK

Untuk Republik Demokratik Somalia

Ahmed M. ADEN

Untuk Republik Sudan

Mohamed Abdelmagid ELSADIG

Untuk Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka

Satyaloka S. SAHABANDU
Hapuarachchige P. KARUNARATHNA
Jagath K. B. RATHNAYAKE
Manodha N. GAMAGE

Untuk Republik Afrika Selatan

Siphiwe NYANDA

Untuk Swedia

Anders JONSSON

Untuk Konfederasi Swiss

Frédéric RIEHL
Hassane MAKKI

Untuk Kerajaan Swaziland

Mandla D. S. MOTSA

Untuk Republik Tanzania

John S. NKOMA
Elizabeth M. NZAGI
Joseph S. KILONGOLA
Fortunata B. K. MDACHI
Alinanuswe A. KABUNGO
Victor NKYA
Violet ESEKO
Innocent P. M. MUNGY

Untuk Republik Chad

Ndjerabe NDJEKOUNDADÉ

Untuk Thailand

Thaneerat SIRIPHACHANA

Untuk Republik Demokratik Timor-Leste

Nicolau SANTOS CELESTINO

Untuk Republik Togo

Palouki MASSINA
Kossivi DOKOUE
Essodessewe PIKELI

Untuk Kerajaan Tonga

Paula Pouvalu MA'U

Untuk Trinidad dan Tobago

Shelley-Ann CLARKE-HINDS
Cris SEECHELAN

Untuk Tunisia

Ali GHODBANI
Moez CHAKCHOUK

Untuk Turki

Ahmet Erdiñ CAVUSOGLU

Untuk Ukraina

Olena DOVHALENKO

Untuk Republik Timur Uruguay

Fernando FONTÁN MARTINEZ
Eugenio LLOVET METHOL

Untuk Republik Bolivar Venezuela

Alcides GONZÁLEZ

Untuk Republik Sosialis Vietnam

Quan Duy NGAN HA

Untuk Republik Yaman

Kamal Hassan MOHAMMAD

Omer Awadh O. ALI

Untuk Republik Zambia

Luwani SOKO

Untuk Republik Zimbabwe

Partson I. MBIRIRI

**INSTRUMEN YANG MENGUBAH KONVENSI
PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL
(Jenewa, 1992)**

sebagaimana telah diubah pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994),
pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998),
pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002)
dan pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006)

(Perubahan yang diterima pada
Konferensi yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010))

**KONVENSI PERHIMPUNAN
TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL*
(JENEWA, 1992)**

BAGIAN I. Pendahuluan

Berdasarkan atas dan dalam pelaksanaan ketentuan yang relevan dari Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana telah diubah pada Konferensi yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), oleh Konferensi yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), oleh Konferensi yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), dan oleh Konferensi yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), khususnya tersebut dalam Pasal 42, maka Konferensi yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) telah menerima dalam Konvensi tersebut perubahan-perubahan sebagai berikut:

* Bahasa yang digunakan dalam instrumen-instrumen dasar Perhimpunan (Konstitusi dan Konvensi) harus dianggap sebagai netral gender.

BAB IV
Ketentuan Lain

PASAL 33
KEUANGAN

MOD 468 1 1) Skala di mana setiap Negara Anggota, tunduk
PP-98 pada ketentuan-ketentuan No. 468A di bawah, dan Anggota
PP-06 Sektor, tunduk pada ketentuan-ketentuan No. 468B di
bawah, akan memilih kelas kontribusinya, sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang relevan dari Pasal 28 pada
Konstitusi, wajib sebagai berikut:
Dimulai dari 40 kelas unit hingga 2 kelas unit:
Dalam tingkatan satu unit
Di bawah 2 kelas unit, adalah sebagai berikut:
1 1/2 kelas unit
1 kelas unit
1/2 kelas unit
1/4 kelas unit
1/8 kelas unit
1/16 kelas unit

BAGIAN II. Tanggal Mulai Berlaku

Perubahan-perubahan yang terdapat dalam instrumen ini wajib, sebagai suatu keseluruhan dan dalam bentuk instrumen tunggal, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, antara Negara-Negara Anggota yang pada saat pihak pada Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan telah menyampaikan instrumen sebelum tanggal tersebut, instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan dari, atau akses pada, instrumen perubahan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang diberi kuasa penuh telah menandatangani instrumen ini yang mengubah Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional ini (Jenewa 2006), sebagaimana telah diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), dan pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006)

Dibuat di Guadalajara, 22 Oktober 2010

PERNYATAAN DAN PENSYARATAN

PERNYATAAN DAN PENSYARATAN

**dibuat pada akhir
Konferensi Yang Berkuasa Penuh
Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia
(Guadalajara, 2010)***

Para wakil yang berkuasa penuh yang menandatangani menegaskan, melalui penandatanganan dokumen tersebut, yang mana membentuk bagian dari Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), bahwa mereka telah mencatat pernyataan dan persyaratan sebagai berikut yang dibuat pada akhir konferensi.

* Catatan dari Sekretariat Jenderal – naskah-naskah pernyataan dan persyaratan diperlihatkan secara urutan kronologis di mana mereka disampaikan. Pada daftar isi, naskah-naskah ini dikelompokkan menurut urutan alfabet Perancis nama-nama Negara Anggota yang membuatnya.

1

Asli: Spanyol

Untuk Republik Timur Uruguay:

Delegasi dari Republik Timur Uruguay memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk:

- mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila anggota-anggota lain gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi-Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010), dan lampiran-lampiran serta protokol-protokol dari instrumen-instrumen tersebut, atau apabila persyaratan yang dibuat oleh anggota-anggota lain membahayakan hak berdaulat penuhnya atau penyelenggaraan yang tepat dari layanan-layanan telekomunikasinya;
- membuat persyaratan-persyaratan tambahan terhadap Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), dengan kebijaksanaan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, kapan pun dinilai sesuai antara tanggal penandatanganan dan tanggal ratifikasi dari instrumen-instrumen internasional yang mendirikan Akta-akta Akhir tersebut.

2

Asli: Inggris

Untuk Thailand:

Delegasi Thailand memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota yang gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), seperti yang diubah oleh Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), atau lampiran-lampiran dan protokol-protokol yang dilampirkan daripadanya, atau apabila ada persyaratan yang dibuat oleh setiap Negara Anggota yang membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau mengakibatkan kepada kenaikan saham untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

3

Asli: Inggris

Untuk Republik Rwanda:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU 2010 (PP-10), delegasi Republik Rwanda memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, sesuai dengan legislasi nasional dan traktat-traktat internasional di mana Rwanda merupakan

anggota, apabila ada Negara Anggota ITU manapun gagal untuk menjalankan, dengan cara bagaimanapun, ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional atau apabila persyaratan-persyaratan yang dinyatakan oleh negara-negara lain merugikan kepentingan-kepentingannya.

4

Asli: Spanyol

Untuk Republik El Salvador:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik El Salvador menyatakan memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk:

- tidak menerima kebijakan keuangan apapun yang dapat membawa kenaikan yang tidak pada tempatnya dalam kontribusi terhadap pembayaran biaya Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
- mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila anggota lain gagal untuk memenuhi ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi-Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara 2010), dan lampiran-lampiran serta protokol-protokol untuk instrumen-instrumen tersebut, atau apabila persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain membahayakan hak berdaulat penuhnya atau penyelenggaraan yang tepat dari layanan-layanan telekomunikasinya;
- membuat, sesuai Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, persyaratan tambahan terhadap Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) pada setiap saat yang dinilai sesuai antara tanggal penandatanganan dan tanggal ratifikasi instrumen internasional yang mendirikan Akta-akta Akhir.

5

Asli: Inggris

Untuk Republik Indonesia:

Perwakilan Berkuasa Penuh yang menandatangani menegaskan, melalui penanda tangan kami atas dokumen tersebut, yang membentuk bagian dari Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), bahwa delegasi Republik Indonesia telah memperhatikan pernyataan dan persyaratan berikut yang dibuat pada akhir Konferensi tersebut.

Atas nama Republik Indonesia, delegasi Republik Indonesia untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010):

- memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun dan pemeliharaan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya apabila ada ketentuan dari Konstitusi, Konvensi dan Resolusi, maupun keputusan apapun dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU (Guadalajara, 2010), secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi kedaulatannya atau bertentangan dengan Konstitusi, Hukum dan Aturan Republik Indonesia maupun hak-hak yang ada yang diperoleh oleh Republik Indonesia sebagai kelompok dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi serta prinsip-prinsip hukum internasional apapun lainnya;

- lebih lanjut memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun dan pemeliharaan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya apabila ada Anggota dengan cara apapun gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) atau apabila konsekuensi persyaratan-persyaratan pada Anggota manapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau mengakibatkan kenaikan saham kontribusi untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan yang tidak dapat diterima.

6

Asli: Spanyol

Untuk Republik Paraguay:

Delegasi Republik Paraguay memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat, di bawah Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, Persyaratan terhadap Akta-akta Akhir ini setiap saat dinilai sesuai antara tanggal penandatanganan dan tanggal ratifikasi dari instrumen-instrumen internasional yang membuat Akta-akta Akhir tersebut.

7

Asli: Inggris

Untuk Republik Singapura:

Delegasi Republik Singapura memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila ada Anggota Perhimpunan yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Guadalajara, 2010, dan lampiran-lampiran serta protokol-protokol yang dilampirkan daripadanya, atau apabila persyaratan oleh Anggota Perhimpunan manapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasi Republik Singapura, mempengaruhi kedaulatannya atau mengakibatkan kepada kenaikan saham kontribusinya untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

8

Asli: Perancis

Untuk Republik Guinea:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Guinea memiliki untuk Pemerintahnya hak berdaulat untuk mengambil kebijakan atau tindakan apapun yang dinilai perlu untuk

mengamankan hak-hak dan kepentingan nasional apabila ada anggota Perhimpunan gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan Akta-akta tersebut, atau secara langsung atau tidak langsung membahayakan kepentingan layanan-layanan TIK/telekomunikasinya atau menempatkan keamanan kedaulatan negaranya dalam bahaya.

9

Asli: Perancis

Untuk Belgia:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Berkuasa Penuh dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Belgia memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota yang tidak berbagi dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan atau gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah dalam Akta-akta Akhir dari Konferensi-Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006), dan diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), atau apabila terdapat persyaratan yang dibuat oleh Negara Anggota manapun yang membahayakan jasa layanan-layanan telekomunikasinya atau mengakibatkan kepada kenaikan saham kontribusinya untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

10

Asli: Perancis

Untuk Belgia:

Tandatangan anggota-anggota delegasi wajib mengikat setara bagi masyarakat Perancis, masyarakat *Flemish*, dan masyarakat berbahasa Jerman.

11

Asli: Inggris

Untuk Republik Cyprus:

Delegasi Republik Cyprus memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota Perhimpunan tidak berbagi dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan atau apabila Anggota Perhimpunan gagal secara apapun untuk memenuhi ketentuan dalam Konstitusi dan Konvensi (Jenewa 1992) dan/atau lampiran-lampiran dan protokol-protokol padanya, sebagaimana diubah oleh Instrumen Kyoto 1994, Instrumen Minneapolis 1998, Instrumen Marrakesh 2002, Instrumen Antalya 2006 dan Instrumen Guadalajara 2010 atau apabila persyaratan-persyaratan oleh negara-negara lain kemungkinan menyebabkan kenaikan dalam saham kontribusi untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan, atau membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya, atau apabila tindakan

lain apapun yang diambil atau bermaksud untuk diambil atau kelalaian apapun oleh siapapun, secara fisik atau yuridis langsung atau tidak langsung mempengaruhi kedaulatannya.

Delegasi Republik Cyprus lebih lanjut memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan lain apapun hingga dan sampai pada waktu Instrumen Guadalajara 2010 yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), Instrumen Kyoto 1994, Instrumen Minneapolis 1998, Instrumen Marrakesh 2002 dan Instrumen Antalya 2006 diratifikasi oleh Republik Cyprus.

12

Asli: Inggris

Untuk Republik San Marino:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konstitusi dan Konvensi Konferensi Yang Berkuasa Penuh dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik San Marino memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk mengambil semua kebijakan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota Perhimpunan yang gagal memenuhi ketentuan Konstitusi dan Konvensi atau lampiran-lampiran, protokol-protokol tambahan, dan Peraturan-peraturan Administratif Republik San Marino.

Hak-hak yang sama juga dimiliki Pemerintah Republik San Marino terhadap persyaratan yang dibuat oleh Anggota-Anggota lain yang dapat mengganggu, membatasi, atau membahayakan fungsi yang benar dari layanan telekomunikasi Republik San Marino.

13

Asli: Spanyol

Untuk Republik Guatemala:

Delegasi Republik Guatemala memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk tidak menerima kebijakan keuangan apapun yang dapat membawa kenaikan yang tidak pada tempatnya dalam kontribusi terhadap pembayaran biaya-biaya Perhimpunan Telekomunikasi Internasional. Republik Guatemala lebih lanjut memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila persyaratan-persyaratan dari Negara Anggota lainnya membahayakan operasi sistem telekomunikasinya, atau apabila Negara Anggota lain gagal memenuhi ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992),

sebagaimana diubah oleh Konferensi-Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010), dan instrumen-instrumen terkait lainnya, sebagaimana juga hak untuk memasukkan persyaratan dan pernyataan sebelum ratifikasi dan penyampaian Akta-Akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010).

14

Asli: Perancis

Untuk Republik Niger:

Dalam menandatangani Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Niger memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota yang membuat persyaratan-persyaratan terhadap dan/atau tidak menerima ketentuan-ketentuan dari Akta-Akta Akhir atau gagal untuk memenuhi satu atau lebih ketentuan-ketentuan dari Akta-Akta Akhir.

15

Asli: Spanyol

Untuk Republik Dominika:

Delegasi Republik Dominika memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk tidak menerima kebijakan keuangan apapun yang dapat membawa kenaikan yang tidak pada tempatnya dalam kontribusi terhadap pembayaran biaya-biaya Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU). Republik Dominika lebih lanjut memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila persyaratan-persyaratan dari Negara Anggota lainnya membahayakan operasi sistem telekomunikasinya, atau apabila Anggota Negara lain gagal memenuhi ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992),

sebagaimana diubah oleh Konferensi-Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010), dan instrumen-instrumen terkait lainnya, sebagaimana juga hak untuk memasukkan persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan sebelum ratifikasi dan penyampaian Akta-Akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010).

16

Asli: Perancis

Untuk Republik Burundi:

Delegasi Republik Burundi telah mengambil bagian dalam Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara 2010) dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, dengan diberikan kuasa penuh oleh Yang Dimuliakan Presiden Republik, dan telah mempergunakan hak-hak yang telah diakui oleh Negara-Negara Anggota sesuai dengan instrumen-instrumen Perhimpunan.

Kepala delegasi Burundi telah menandatangani Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara 2010) sementara menyediakan Pemerintah Burundi hak untuk menghentikan dan menolak ketentuan apapun yang dapat melanggar Konstitusi Republik Burundi, membahayakan dan/atau merintang perkembangan dan penyelenggaraan yang tepat dari sektor telekomunikasi/TIK-nya.

17

Asli: Spanyol

Untuk Kepangeranan Andorra:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), delegasi dari Kepangeranan Andorra secara resmi menyatakan Kepangeranan Andorra mempertahankan pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang dibuat pada saat penandatanganan Akta-Akta Akhir Konferensi pembuatan perjanjian Perhimpunan yang lalu, apabila pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan tersebut dibuat secara lengkap pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh ini.

Delegasi Kepangeranan Andorra memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota Perhimpunan yang gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi atau lampiran-lampirannya, protokol-protokol tambahan dan Peraturan-peraturan Administratif, atau apabila ketentuan yang dibuat oleh Anggota lain membahayakan penyelenggaraan yang tepat dari layanan telekomunikasi atau membawa kenaikan pada kewajiban keuangan.

18

Asli: Inggris

Untuk Republik Federal Nigeria:

Delegasi Republik Federal Nigeria untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) (Guadalajara, 2010) dalam menandatangani Akta-akta Akhir konferensi ini, memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pernyataan-pernyataan dan/atau persyaratan-persyaratan hingga dan sampai pada waktu penyampaian instrumen ratifikasi dari perubahan-perubahan terhadap Konstitusi dan Konvensi (Jenewa, 1992) sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto 1994; Minneapolis 1998; Marrakesh 2002; Antalya 2006; dan Guadalajara 2010) serta lampiran-lampiran dan protokol-protokol daripadanya.

Pemerintah Republik Federal Nigeria selanjutnya memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lainnya gagal menjalankan ketentuan-ketentuan dalam instrumen (Guadalajara, 2010) yang mengubah Konstitusi dan Konvensi ITU tersebut, atau, apabila persyaratan dan kegagalan yang berkesinambungan membahayakan atau menghalangi operasi layanan-layanan telekomunikasi/TIK Nigeria.

19

Asli: Inggris

Untuk Negara Kota Vatikan:

Negara Kota Vatikan memiliki hak untuk mengambil semua kebijakan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila ada anggota yang gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) sebagaimana diubah oleh Konferensi-Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006 and Guadalajara, 2010) atau apabila persyaratan-persyaratan yang dinyatakan negara-negara lain membahayakan kepentingan-kepentingannya.

20

Asli: Spanyol

Untuk Republik Argentina:

Republik Argentina mengingat persyaratan yang dibuat ketika meratifikasi Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, ditandatangani di kota Jenewa, Swiss, pada 22 Desember 1992, dan menegaskan kembali kedaulatannya terhadap Kepulauan Malvinas, Kepulauan Georgia Selatan, Kepulauan Sandwich Selatan dan Antartika Argentina, yang membentuk bagian integral dari wilayah nasionalnya.

Selanjutnya mengingat bahwa, sehubungan dengan "Pertanyaan mengenai Kepulauan Malvinas", resolusi-resolusi yang diterima sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 dan 43/25, mengakui keberadaan sengketa terhadap kedaulatan dan meminta Pemerintah Republik Argentina dan

Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara untuk melanjutkan negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Republik Argentina selanjutnya menunjuk bahwa Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Dekolonisasi telah membuat pernyataan ulang sepanjang kalimat-kalimat yang sama, baru-baru ini melalui resolusi yang diterima pada 24 Juni 2010, dan bahwa Sidang Umum dari Organisasi Negara-negara Amerika menerima perkataan yang sama atas pertanyaan pada 8 Juni 2010.

21

Asli: Arab/Perancis

Untuk Tunisia:

Dalam menandatangani Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh kedelapan belas Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Tunisia menyatakan bahwa Pemerintah Tunisia memiliki hak:

- 1) untuk mengambil kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingannya apabila ada anggota Perhimpunan yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan Konstitusi dan/atau Konvensi Perhimpunan (Guadalajara, 2010), pada satu sisi, atau, sebaliknya, apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah lain membahayakan fungsi yang benar dari layanan-layanan telekomunikasinya atau membawa pada kenaikan saham untuk kontribusi untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan;
- 2) untuk menolak ketentuan apapun dari Konstitusi dan Konvensi tersebut atau lampiran-lampiran dan protokol-protokol daripadanya yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kedaulatan Republik Tunisia atau bertentangan dengan Konstitusi atau hukumnya;
- 3) untuk membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan lain apapun pada Akta-Akta Akhir yang diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) sampai pada tanggal dimana instrumen ratifikasi masing-masing disampaikan.
- 4) untuk memohon diterapkannya Pasal 56 dari Konstitusi dengan bertatap muka dengan Negara Anggota manapun bila terjadi sengketa antara Tunisia dan Anggota Sektor tersebut bukan di bawah kekuasaannya melainkan di bawah kekuasaan Negara Anggota yang bersangkutan.
- 5) Penandatanganan Akta-Akta Akhir dari Konferensi (Guadalajara, 2010) oleh delegasi Tunisia tidak akan dengan cara apapun mewakili pengakuan tersamar dari suatu anggota Perhimpunan yang tidak diakui oleh Pemerintah Republik Tunisia, atau seluruh atau sebagian dari perjanjian internasional yang Tunisia belum secara tegas mengaksesinya.

22

Asli: Spanyol

Untuk Republik Bolivar Venezuela:

Delegasi Republik Bolivar Venezuela memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya, apabila ada anggota lain di masa kini atau mendatang gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Instrumen (Guadalajara, 2010) pengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi-Konferensi (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; dan Marrakesh, 2002, dan Antalya, 2006), atau lampiran-lampiran atau protokol-protokol daripadanya, atau apabila persyaratan-persyaratan pada anggota-anggota lain membahayakan ketepatangunaan operasi layanan- layanan telekomunikasinya.

Lebih lanjut lagi, Republik Bolivar Venezuela menyatakan persyaratan-persyaratannya dengan memperhatikan setiap pasal-pasal dari Instrumen (Guadalajara, 2010) yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002, dan Antalya, 2006), terkait dengan arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa, dalam persesuaian dengan memperhatikan kebijaksanaan internasional Pemerintah Republik Bolivar Venezuela.

23

Asli: Inggris/Perancis/Spanyol

Untuk Austria, Belgia, Republik Bulgaria, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Republik Estonia, Finlandia, Perancis, Republik Federal Jerman, Yunani, Republik Hungaria, Irlandia, Italia, Republik Latvia, Republik Lithuania, Luksemburg, Kerajaan Belanda, Republik Polandia, Portugal, Rumania, Republik Slovakia, Republik Slovenia, Spanyol, Swedia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara:

Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota Uni Eropa dan Negara-negara yang Ikut Serta Bulgaria dan Rumania menyatakan bahwa Negara-negara Anggota Uni Eropa dan Negara-negara yang Ikut Serta Bulgaria dan Rumania akan mempergunakan instrumen-instrumen yang diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan Traktat mengenai Uni Eropa dan Traktat mengenai Pelaksanaan Uni Eropa.

24

Asli: Arab/Inggris

Untuk Kerajaan Saudia Arabia:

Delegasi Kerajaan Saudia Arabia untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) menyatakan bahwa Kerajaan Saudia Arabia memiliki hak untuk mengambil kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain gagal menjalankan ketentuan yang

diterima oleh konferensi ini untuk mengubah Konstitusi dan Konvensi (Jenewa, 1992) serta perubahannya (Kyoto, 1994), (Minneapolis, 1998), (Marrakesh, 2002), (Antalya, 2006), dan lampiran-lampirannya, atau apabila persyaratan-persyaratan oleh Negara Anggota manapun, sekarang atau di masa depan, atau kegagalan oleh Negara Anggota manapun untuk memenuhi Konstitusi dan Konvensi, membahayakan operasi yang benar dari jaringan-jaringan dan layanan- layanan telekomunikasi di Kerajaan Saudia Arabia.

Kerajaan Saudia Arabia selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat persyaratan tambahan apapun yang dinilai perlu bagi Akta-akta Akhir yang diterima dalam konferensi ini sampai pada waktu penyampaian instrumen ratifikasi dari Akta-akta Akhir.

25

Asli: Perancis

Untuk Republik Kamerun:

Dalam menandatangani Akta Akhir ini, Republik Kamerun memiliki hak:

- 1 untuk mengambil semua kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengamankan kepentingannya apabila:
 - a) Suatu Negara Anggota gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) serta perubahan-perubahan setelahnya yang diterima daripadanya oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006 dan Guadalajara, 2010);
 - b) persyaratan-persyaratan yang dimasukkan oleh Negara-negara Anggota lain mengganggu kepentingan-kepentingan tersebut;
- 2 untuk memasuki, sampai saat penyampaian instrumen ratifikasi, persyaratan-persyaratan tambahan apapun yang dinilai perlu.

26

Asli: Spanyol

Untuk Spanyol:

- 1 Delegasi Spanyol menyatakan, atas nama Pemerintahnya, tidak menerima pernyataan atau persyaratan apapun yang dinyatakan oleh pemerintah lain yang secara tidak langsung dapat menaikkan kewajiban-kewajiban keuangannya.
- 2 Delegasi Spanyol memiliki hak untuk Kerajaan, di bawah Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 23 Mei 1969, untuk menyatakan persyaratan- persyaratan terhadap Akta-akta Akhir yang diterima oleh konferensi tersebut sampai saat penyampaian instrumen ratifikasi yang sesuai.

27

Asli: Inggris

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diwakili oleh delegasi Vietnam untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh 2010 (PP-10) menyatakan:

- 1 Vietnam mempertahankan persyaratan- persyaratan yang dibuat oleh Vietnam pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Nairobi (1982) dan ditegaskan kembali pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Nice (1989), Jenewa (1992), Kyoto (1994), Minneapolis (1998), Marrakesh (2002) dan Antalya (2006);
- 2 Vietnam memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun, bila diperlukan, untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Anggota-Anggota Negara lain dengan cara apapun gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi, Konvensi, atau Peraturan-peraturan Administratif dan Apendiks-apendiks daripadanya dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau apabila persyaratan oleh Negara-negara Anggota lainnya membahayakan kedaulatan, kepentingan, dan layanan-layanan telekomunikasi/TIK dari R. S. Vietnam.
- 3 Vietnam memiliki hak untuk menyatakan persyaratan-persyaratan tambahan pada waktu ratifikasi perubahan dari Konstitusi dan Konvensi yang diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU kedelapan belas yang diselenggarakan di Guadalajara, Meksiko.

28

Asli: Rusia

Untuk Republik Armenia, Republik Kazakhstan, Republik Kyrgystan, Republik Moldova, Federasi Rusia, Republik Uzbekistan dan Ukraina:

Delegasi-delegasi dari negara-negara yang disebut di atas memiliki hak untuk masing-masing Pemerintahnya untuk membuat pernyataan atau persyaratan apapun pada saat meratifikasi instrumen yang mengubah Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), dan hak untuk mengambil setiap tindakan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan mereka apabila terdapat Negara Anggota Perhimpunan yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh negara-negara lain membahayakan operasi layanan-layanan telekomunikasi negara-negara yang disebut di atas atau membawa kenaikan pada kontribusi-kontribusi tahunan mereka untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

29

Asli: Inggris

Untuk Republik Estonia, Republik Latvia dan Republik Lithuania:

Pada saat penandatanganan Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi-delegasi dari negara-negara yang disebut di atas:

- 1 memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan mereka apabila terdapat Anggota Perhimpunan yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara 2010), atau lampiran-lampiran atau protokol-protokol dilampirkan padanya, atau apabila persyaratan yang dibuat oleh setiap Anggota Perhimpunan membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya;
- 2 bahwa mereka juga memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk menyatakan persyaratan-persyaratan khusus sebagai tambahan dari Akta-akta Akhir sebagaimana tersebut sebelumnya atau kepada instrumen lain manapun yang muncul dari konferensi-konferensi ITU yang relevan lainnya yang belum diratifikasi sampai pada waktu masing-masing instrumen ratifikasi telah disampaikan.

30

Asli: Inggris

Untuk Islandia, Kepangeranan Liechtenstein dan Norwegia:

Delegasi-delegasi dari Negara-negara Anggota dari Kawasan Ekonomi Eropa yang disebut di atas menyatakan bahwa mereka akan menggunakan instrumen yang diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Traktat pembentukan Kawasan Ekonomi Eropa.

31

Asli: Inggris

Untuk Republik Mozambik:

Delegasi Republik Mozambik memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara Anggota manapun gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah dalam Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006) dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), atau lampiran-lampiran dan protokol-protokol yang terlampir padanya, atau apabila persyaratan yang dibuat Negara Anggota manapun membahayakan atau merugikan layanan-layanan

telekomunikasi Republik Mozambik atau membawa pada kenaikan sahamnya dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

Lebih lanjut, Republik Mozambik memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan khusus tambahan pada saat penyampaian notifikasinya terhadap Perhimpunan Telekomunikasi Internasional mengenai persetujuan untuk terikat pada revisi Konstitusi dan Konvensi dan pada keputusan-keputusan yang diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010).

32

Asli: Spanyol

Untuk Kuba:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Kuba menyatakan sebagai berikut:

- Dalam menghadapi praktek kebijaksanaan intervensi yang berkesinambungan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mengarahkan transmisi radio dan televisi menuju wilayah Kuba untuk tujuan politik dan membuat tidak stabil, dalam pelanggaran terbuka dari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang mengatur telekomunikasi di seluruh dunia, khususnya yang bertujuan untuk memudahkan hubungan damai, kerja sama internasional di antara rakyat dan pembangunan ekonomi dan sosial, serta terhadap kerugian operasi normal dan pengembangan dari layanan-layanan komunikasi radio milik Kuba yang merupakan korban dari gangguan yang merugikan yang disebabkan oleh pancaran-pancaran tersebut, Administrasi Kuba memiliki hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu dan sesuai.
- Konsekuensi dari tindakan apapun yang dinilai oleh Administrasi Kuba harus diambil dalam mempertahankan kedaulatan nasionalnya yang disebabkan tindakan curang dari Pemerintah Amerika Serikat akan menjadi tanggung jawab semata-mata dari Pemerintah tersebut.
- Kuba sama sekali tidak mengakui pemberitahuan, registrasi atau penggunaan frekuensi oleh Pemerintah Amerika Serikat di bagian wilayah Kuba di Provinsi Guantanamo dimana Amerika Serikat menempati secara ilegal dengan kekerasan, berlawanan dengan pernyataan keinginan rakyat dan Pemerintah Kuba, dan dimana telah menjadi pusat penahanan sewenang-wenang para narapidana yang merupakan salah satu pelanggaran massal atas hak asasi manusia secara sistematis paling buruk di era modern telah dilakukan.
- Kuba memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingannya apabila ada Negara Anggota lain gagal untuk memenuhi dengan cara apapun dengan ketentuan dari Instrumen (Guadalajara, 2010) yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya 2006) atau dengan Peraturan-peraturan Administratif, atau apabila persyaratan-persyaratan oleh Negara-negara Anggota lain dengan cara apapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasi

Kuba atau mengakibatkan kenaikan dalam kontribusinya untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

- Kuba tidak menerima Protokol Fakultatif terhadap penyelesaian sengketa dengan memperhatikan Konstitusi, Konvensi dan Peraturan-peraturan Administratif ini.
- Kuba memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pernyataan atau persyaratan lebih lanjut apapun yang mungkin diperlukan pada saat penyampaian instrumen ratifikasi perubahan Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010).

33

Asli: Perancis

Untuk Republik Chad:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Chad memiliki hak kedaulatan dari Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan apapun yang mungkin diperlukan untuk mengamankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ada Negara Anggota atau Anggota Sektor yang gagal dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, untuk menghormati kepentingan-kepentingannya dan layanan-layanan telekomunikasi/TIK-nya atau menyebabkan keamanan nasionalnya terancam.

34

Asli: Inggris

Untuk Republik Angola:

Delegasi Republik Angola untuk Konferensi yang Berkuasa Penuh dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), dalam menandatangani Akta-akta Akhir dari konferensi ini, menyatakan atas nama Pemerintahnya, bahwa untuk Pemerintahnya memiliki hak :

- 1 untuk mengambil semua kebijakan yang dinilai perlu untuk mengamankan kedaulatan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota lain yang gagal untuk memenuhi persyaratan dalam Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagai diubah dalam Konferensi-Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006) dan lampiran-lampiran dan protokol-protokol dari instrumen tersebut, atau apabila ada persyaratan yang dibuat oleh Negara Anggota lain dipertanyakan hak penuh kedaulatannya atau operasi yang benar dari infrastruktur dan layanan-layanan dari teknologi telekomunikasi dan informasi;
- 2 untuk membuat persyaratan-persyaratan tambahan kepada Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), di bawah Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, kapan pun

dinilai sesuai dari tanggal penandatanganan dan ratifikasi dari Akta-akta Akhir dari konstituen-konstituen tersebut, secara berurutan;

- 3 tidak menerima konsekuensi apapun dari persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh pemerintah lain yang secara tidak langsung menyatakan kenaikan saham kontribusi untuk membayar biaya-biaya Perhimpunan;
- 4 untuk mengajukan persyaratan-persyaratan mengenai ketentuan dari Konstitusi atau Konvensi yang dapat bertolak belakang terhadap hukum dasarnya.

35

Asli: Arab/Inggris

Untuk Republik Demokratik Aljazair, Kerajaan Bahrain, Republik Islam Iran, Republik Irak, Negara Kuwait, Lebanon, Malaysia, Republik Islam Mauritania, Kerajaan Maroko, Kesultanan Oman, Negara Qatar, Kerajaan Saudia Arabia, Republik Sudan, Republik Arab Siria, Tunisia, Uni Emirat Arab dan Republik Yaman:

Delegasi-delegasi yang disebutkan di atas untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) menyatakan bahwa tandatangan dan ratifikasi yang dimungkinkan oleh masing-masing Pemerintah dari Akta-akta Akhir konferensi ini, harus tidak berlaku untuk Anggota Perhimpunan di bawah nama "Israel", dan tidak akan dengan cara apapun masuk dalam pengakuan oleh Pemerintah-Pemerintah ini.

36

Asli: Inggris

Untuk Uni Emirat Arab:

Ketika menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) tersebut, Uni Emirat Arab menyatakan bahwa dikarenakan kurangnya ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi dan Konvensi yang menegaskan hubungan antar Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor yang bukan di bawah kekuasaannya, apabila ada sengketa antara salah satu dari Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor yang telah bertanda tangan, bahwa Uni Emirat Arab memiliki hak untuk menggunakan Pasal 56 Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa.

Delegasi Uni Emirat Arab untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) menyatakan bahwa Pemerintah Uni Emirat Arab memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain gagal memenuhi ketentuan-ketentuan yang diterima oleh konferensi ini untuk mengubah Konstitusi dan Konvensi (Jenewa, 1992) dan perubahan-perubahan berikutnya (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006) dan lampiran-lampiran daripadanya, atau apabila mereka gagal dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan, atau apabila persyaratan-persyaratan mereka, sekarang atau di masa datang, atau kegagalan mereka

memenuhi Konstitusi dan Konvensi, membahayakan operasi yang benar dari layanan-layanan telekomunikasi Uni Emirat Arab.

Delegasi Uni Emirat Arab selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat persyaratan-persyaratan tambahan apapun terhadap Akta-akta Akhir yang diterima pada konferensi ini sampai saat instrumen ratifikasi Akta-akta Akhir telah disampaikan.

37

Asli: Inggris

Untuk Kerajaan Swaziland:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Kerajaan Swaziland memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan serupa yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Anggota-anggota tertentu tidak berbagi dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan, atau apabila ada Anggota yang gagal dengan cara lain apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Instrumen (Guadalajara, 2010) yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006) atau lampiran-lampiran terlampir daripadanya, atau apabila konsekuensi persyaratan dari negara-negara lain membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya.

Delegasi Kerajaan Swaziland selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat persyaratan-persyaratan tambahan serupa yang mungkin perlu untuk Akta-akta Akhir yang diterima pada konferensi tersebut sampai dengan waktu penyampaian instrumen ratifikasi yang sesuai.

38

Asli: Inggris

Untuk Republik Federal Jerman:

- 1 Delegasi Republik Federal Jerman memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan serupa yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya, apabila ada Negara Anggota gagal dalam pembayaran bagiannya untuk biaya-biaya Perhimpunan, atau gagal dengan cara lain apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Instrumen (Guadalajara, 2010) yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi-Konferensi (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006), atau apabila persyaratan-persyaratan oleh Negara-negara Anggota lain ada kemungkinan untuk menaikkan bagiannya untuk mengkontribusikan terhadap pembayaran biaya-biaya Perhimpunan atau membahayakan operasi yang benar dari layanan-layanan telekomunikasinya.

- 2 Dengan memperhatikan Pasal 4 Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), delegasi untuk Republik Federal Jerman menyatakan bahwa Republik Federal Jerman mempertahankan persyaratan-persyaratan yang dibuat atas nama Republik Federal Jerman pada saat penandatanganan Peraturan-peraturan Administratif yang disebut dalam Pasal 4 tersebut.

39

Asli: Inggris/Perancis/Spanyol

Untuk Austria, Belgia, Republik Bulgaria, Republik Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Republik Estonia, Finlandia, Perancis, Republik Federal Jerman, Yunani, Republik Hungaria, Islandia, Italia, Republik Latvia, Kepangeranan Liechtenstein, Republik Lithuania, Luksemburg, Montenegro, Kerajaan Belanda, Norwegia, Portugal, Rumania, Republik San Marino, Republik Slovakia, Republik Slovenia, Spanyol, Swedia, Konfederasi Swiss, Turki, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dan Negara Kota Vatikan:

Pada saat penandatanganan Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), delegasi dari Negara-negara yang disebutkan secara resmi menyatakan bahwa mereka mempertahankan pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-negaranya pada saat penandatanganan Akta-akta Akhir dari Konferensi-konferensi pembuatan perjanjian Perhimpunan sebelumnya seolah-olah dibuat secara lengkap pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh.

40

Asli: Inggris/China

Untuk Republik Rakyat China:

Delegasi Republik Rakyat China, dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila ada Negara-negara Anggota yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Antalya, 2006) dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Guadalajara, 2010) atau lampiran-lampiran daripadanya, atau apabila persyaratan-persyaratan dari Negara-negara lain membahayakan kepentingannya.

41

Asli: Spanyol

Untuk Honduras:

Delegasi Republik Honduras menyatakan bahwa untuk Pemerintahnya memiliki hak untuk:

- tidak menerima kebijakan keuangan apapun yang dapat membawa kenaikan yang tidak pada tempatnya dalam kontribusi terhadap pembayaran biaya-biaya Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
- mengambil kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Anggota-anggota lain gagal memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006, dan Guadalajara, 2010), dan lampiran-lampiran serta protokol-protokol dari Instrumen tersebut, atau apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain membahayakan hak kedaulatan penuhnya atau penyelenggaraan yang tepat dari layanan-layanan telekomunikasinya.
- membuat, sesuai Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, persyaratan-persyaratan tambahan terhadap Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) pada setiap saat yang dinilai sesuai antara tanggal penandatanganan dan tanggal ratifikasi dari instrumen internasional yang mendirikan Akta-akta Akhir.

42

Asli: Inggris

Untuk Negara-Negara Federasi Mikronesia:

Negara-negara Federasi Mikronesia memiliki hak untuk mengambil tindakan-tindakan serupa yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya dengan memperhatikan penerapan ketentuan-ketentuan perubahan pada Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006), yang diterapkan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010). Negara-negara Federasi Mikronesia memiliki hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya dalam menanggapi tindakan-tindakan serupa.

43

Asli: Spanyol

Untuk Nikaragua:

Delegasi Nikaragua, dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) (Guadalajara, 2010), untuk Pemerintahnya memiliki hak untuk:

- 1) mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk melindungi dan mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya sesuai dengan hukum domestik dan hukum internasionalnya apabila ada Negara Anggota gagal dengan cara apapun untuk memenuhi atau berhenti untuk menerapkan ketentuan yang dimuat dalam Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional atau dalam resolusi-resolusi, keputusan-keputusan, rekomendasi-rekomendasi, lampiran-lampiran dan protokol-protokol yang membuat Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Guadalajara, 2010);
- 2) menolak pembentukan dan penggunaan setiap tambahan beban keuangan untuk Nikaragua selain dari yang disetujui oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010);
- 3) membuat persyaratan-persyaratan tambahan terhadap modifikasi yang dibuat terhadap naskah-naskah dasar dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Guadalajara, 2010) dan terhadap resolusi-resolusi, keputusan-keputusan, lampiran-lampiran dan protokol-protokol lainnya yang menyusun Akta-akta Akhir konferensi ini, antara tanggal penandatanganan dan tanggal ratifikasi dimaksud oleh Pemerintah Nikaragua.

44

Asli: Inggris

Untuk Trinidad dan Tobago:

Delegasi Republik Trinidad dan Tobago dengan ini mengajukan persyaratan sebagai berikut:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Trinidad dan Tobago memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan nasionalnya apabila ada Anggota Perhimpunan gagal untuk memenuhi dengan cara apapun ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010) atau ketentuan-ketentuan, lampiran-lampiran dan Peraturan-peraturan Administratif yang dilampirkan padanya; atau apabila konsekuensi persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain secara langsung atau tidak langsung membahayakan layanan-layanan telekomunikasi Trinidad dan Tobago atau mengganggu hak kedaulatannya.

Delegasi Trinidad dan Tobago selanjutnya memiliki hak untuk Negara dan Pemerintahnya untuk membuat pernyataan atau persyaratan apapun atau tindakan apapun sesuai lainnya, sebagaimana mungkin diperlukan, sebelum ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Guadalajara, 2010).

45

Asli: Perancis

Untuk Burkina Faso:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Burkina Faso memiliki hak untuk Pemerintahnya hak berdaulat untuk:

- 1 mengambil semua kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ada anggota Perhimpunan gagal, dengan cara apapun, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Akta tersebut, atau membahayakan layanan-layanan telekomunikasi/TIK negaranya secara langsung atau tidak langsung, atau menempatkan kedaulatan negaranya dalam resiko;
- 2 membuat persyaratan-persyaratan tambahan sebagaimana diperlukan hingga pada waktu penyampaian instrumen-instrumen ratifikasi.

46

Asli: Inggris

Untuk Papua Nugini:

Setelah mempelajari pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain, delegasi Negara Papua Nugini Merdeka menyatakan bahwa dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), memiliki :

- 1 untuk Pemerintahnya hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) dan perubahan-perubahan apapun daripadanya;
- 2 untuk Pemerintahnya hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan tambahan serupa sebagaimana diperlukan sebelum ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010).

47

Asli: Inggris

Untuk Republik Islam Iran:

Dengan Nama Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Delegasi Republik Islam Iran, dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan ke-18 Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) untuk Pemerintahnya memiliki hak untuk:

- 1 mengambil tindakan serupa yang dinilai perlu atau untuk mengambil setiap kebijakan yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak dan kepentingan-kepentingannya, apabila Negara-negara Anggota lain gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Akta-akta

- Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh ke-18 Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010);
- 2 melindungi kepentingan-kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain tidak berbagi dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan atau apabila persyaratan-persyaratan pada Negara-negara Anggota membahayakan layanan-layanan telekomunikasi Republik Islam Iran;
 - 3 tidak terikat oleh setiap ketentuan Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh ke-18 Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kedaulatannya dan bertentangan dengan Konstitusi, Hukum dan Peraturan-peraturan Republik Islam Iran;
 - 4 masalah atau hal apapun yang berkaitan dengan penerapan dan/atau pelaksanaan dari persyaratan-persyaratan Konstitusi ITU dan Konvensi ITU dan Peraturan-peraturan Administratif, sesuai dengan kasus, akan diperlakukan di dalam ITU dan di bawah naungan dan tujuan dari Perhimpunan sebagaimana dimuat dalam Preambul Konstitusi, ketentuan yang relevan dari Konstitusi ITU dan Konvensi ITU serta Peraturan-peraturan Administratifnya.

48

Asli: Perancis

Untuk Perancis:

- 1 Delegasi Perancis memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara-negara Anggota tertentu tidak melaksanakan sahamnya dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan atau gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari perubahan-perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006), diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan ini (Guadalajara, 2010), atau apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara lain membahayakan penyelenggaraan yang tepat dari layanan-layanan telekomunikasi Perancis atau membawa kenaikan pada saham kontribusinya untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.
- 2 Delegasi Perancis secara resmi menyatakan bahwa, yang berkenaan dengan Perancis, pelaksanaan sementara atau tetap dari perubahan Peraturan-Peraturan Administratif Perhimpunan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 54 pada Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010), wajib dipahami sepanjang diizinkan berdasarkan hukum nasional.

49

Asli: Perancis

Untuk Republik Mali:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Mali:

- a) memiliki hak berdaulat dari Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan apapun yang mungkin perlu untuk mengamankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ada Negara Anggota atau Anggota Sektor dari Perhimpunan gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan Akta-akta tersebut, atau secara langsung atau tidak langsung membahayakan kepentingan layanan-layanan telekomunikasinya atau memberi resiko bagi keamanan kedaulatan nasionalnya, atau bila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain membawa perubahan kepada kewajiban-kewajiban yang lain terhadap Perhimpunan.
- b) juga memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk menyatakan persyaratan-persyaratan khusus tambahan terhadap Akta-akta Akhir atau terhadap instrumen lain yang timbul dari konferensi-konferensi ITU yang relevan lainnya yang belum diratifikasi sampai saat masing-masing instrumen ratifikasi telah disampaikan.

50

Asli: Inggris

Untuk Republik Kroasia:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Kroasia menyatakan bahwa Republik Kroasia, sebagai negara kandidat untuk keanggotaan Uni Eropa di masa depan, akan menggunakan Instrumen-instrumen yang diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), tetapi dari tanggal aksesinya kepada Uni Eropa, penggunaan Akta-akta tersebut akan tunduk pada kewajiban-kewajiban berdasarkan Traktat mengenai Uni Eropa dan Traktat mengenai Pelaksanaan Uni Eropa.

51

Asli: Inggris

Untuk Republik Korea:

Delegasi Republik Korea, dalam menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, sebagaimana diubah oleh Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), atau lampiran-

lampiran daripadanya, atau apabila persyaratan-persyaratan oleh negara-negara lain membahayakan kepentingan-kepentingannya dengan cara apapun.

52

Asli: Inggris

Untuk Republik Filipina:

Delegasi Republik Filipina memiliki hak untuk Negara dan Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu, sesuai dan konsisten dengan hukum nasionalnya untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh perwakilan Negara-negara Anggota yang lain membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau merugikan hak berdaulat negara Republik Filipina.

Delegasi Filipina selanjutnya memiliki hak untuk Negara dan Pemerintahnya untuk membuat setiap pernyataan, persyaratan, atau tindakan lain apapun yang sesuai, bila perlu, sebelum penyampaian instrumen ratifikasi Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

53

Asli: Perancis

Untuk Republik Rakyat Demokratik Aljazair:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir, delegasi Aljazair memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), atau apabila ada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Anggota-anggota lain membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau membawa kepada kenaikan kontribusinya untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

54

Asli: Inggris

Untuk Kerajaan Lesotho:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) delegasi Kerajaan Lesotho memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan-tindakan serupa yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila ada Anggota yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Instrumen, atau apabila akibat-akibat dari persyaratan-persyaratan oleh negara-negara lain membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya.

Delegasi dari Kerajaan Lesotho selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya membuat persyaratan-persyaratan tambahan serupa yang

dinilai perlu pada Akta-akta Akhir yang diterima pada konferensi ini sampai dengan waktu penyampaian dari instrumen ratifikasi yang sesuai.

55

Asli: Inggris

Untuk Australia:

Delegasi Australia untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh dengan ini menyatakan memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk Pemerintah Australia membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan sebelum atau pada saat penyampaian instrumen ratifikasinya untuk Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang diselenggarakan di Guadalajara dari 4 sampai dengan 22 Oktober 2010, sesuai dengan Pasal 32B pada Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang dibuat di Jenewa pada tanggal 22 Desember 1992.

56

Asli: Inggris

Untuk Selandia Baru:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Selandia Baru memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada negara lain dengan cara apapun gagal untuk memperhatikan kondisi yang telah ditentukan dalam Akta-akta Akhir atau apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh negara lain manapun merugikan atau mengganggu kepentingan-kepentingan Selandia Baru. Tambahan pula, Selandia Baru memiliki hak untuk membuat persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan khusus yang sesuai sebelum ratifikasi dari perubahan-perubahan pada Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

57

Asli: Inggris

Untuk Negara Merdeka Samoa:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) delegasi Selandia Baru memiliki untuk Pemerintah Negara Merdeka Samoa hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada negara lain dengan cara apapun gagal untuk memperhatikan kondisi-kondisi yang telah ditentukan dalam Akta-akta Akhir atau apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh negara lain manapun merugikan atau mengganggu kepentingan-kepentingan Negara Merdeka Samoa. Tambahan pula, Selandia Baru memiliki hak untuk Negara Merdeka Samoa untuk membuat persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan khusus yang sesuai

sebelum ratifikasi dari perubahan-perubahan pada Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

58

Asli: Inggris

Untuk Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk:

1. mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota ITU lain yang secara apapun gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan lampiran-lampiran daripadanya, sebagaimana diubah oleh Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh setelahnya sampai dengan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), atau apabila ada persyaratan-persyaratan oleh Negara-negara Anggota lain yang membahayakan penyelenggaraan yang tepat dari jaringan-jaringan dan layanan-layanan telekomunikasi/TIK;
- 2 tidak terikat oleh ketentuan apapun dari Konstitusi atau Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan lampiran-lampiran daripadanya, sebagaimana diubah oleh Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh setelahnya sampai dengan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), yang dapat secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kedaulatannya dan bertentangan dengan konstitusi, hukum atau peraturan-peraturan dari Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka;

Delegasi Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka lebih lanjut memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk membuat setiap persyaratan-persyaratan tambahan pada Akta-akta Akhir yang diterima konferensi ini sampai saat instrumen ratifikasi Akta-akta Akhir telah disampaikan.

59

Asli: Inggris

Untuk Republik Botswana:

Delegasi Republik Botswana dengan ini menyatakan atas nama Pemerintah Republik Botswana bahwa Republik Botswana:

- 1 memiliki hak untuk mengambil tindakan tertentu yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila negara lain tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan perubahan-perubahan apapun yang dibuat daripadanya oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) dan/atau instrumen-instrumen lain apapun yang berhubungan yang ada;

- 2 tidak akan menerima konsekuensi-konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh persyaratan yang dibuat oleh negara manapun, dan memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai sesuai.

60

Asli: Inggris

Untuk Republik Serikat Tanzania:

Delegasi Republik Serikat Tanzania dengan ini menyatakan atas nama Pemerintah Republik Serikat Tanzania bahwa Republik Serikat Tanzania:

- 1 memiliki hak untuk mengambil tindakan tertentu yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila suatu negara tidak menjalankan ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan perubahan-perubahan apapun yang dibuat daripadanya oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) dan/atau instrumen-instrumen lain apapun yang berhubungan yang ada;
- 2 tidak akan menerima konsekuensi-konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh persyaratan yang dibuat oleh negara manapun, dan memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai sesuai;
- 3 membuat persyaratan-persyaratan tambahan pada Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) antara tanggal penanda tangan dan tanggal ratifikasi.

61

Asli: Inggris

Untuk Republik Arab Syria:

Delegasi Republik Arab Syria pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) menyatakan, atas nama Pemerintah Republik Arab Syria, memiliki hak untuk mengambil tindakan tertentu yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingannya apabila suatu Anggota gagal dengan cara apapun untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998) dan Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006) atau apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Anggota tertentu, sekarang atau kemudian, bila menyetujui atau meratifikasi instrumen-instrumen yang telah disebut di atas, membahayakan layanan-layanan telekomunikasi Syria atau mengakibatkan pada kenaikan saham Syria untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan. Sebagai tambahan dari pernyataan-pernyataan oleh delegasi Republik Arab Syria pada sidang-sidang Pleno dari konferensi dan pernyataan-pernyataan bersama dengan delegasi Arab pada konferensi ini, Republik Arab Syria lebih lanjut memiliki hak untuk membuat persyaratan-persyaratan

tambahan yang dinilai perlu pada Akta-akta Akhir yang diterima oleh konferensi ini sampai pada waktu penyampaian ratifikasi Akta-akta Akhir.

62

Asli: Inggris

Untuk Jepang:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), tunduk pada ratifikasi, penerimaan dan persetujuan, delegasi Jepang memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010), atau lampiran-lampiran daripadanya, atau apabila persyaratan-persyaratan oleh Negara-negara Anggota lain membahayakan kepentingan-kepentingannya dengan cara apapun.

63

Asli: Inggris

Untuk Republik Kenya:

Delegasi Republik Kenya memiliki, atas nama Pemerintah Republik Kenya, hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan apabila dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) dan perubahan berturut-turut daripadanya, dan Peraturan-peraturan Administratif, termasuk lampiran-lampiran dan protokol-protokol Instrumen ini, atau apabila persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh anggota-anggota lain membahayakan hak berdaulat penuhnya atau penyelenggaraan yang tepat dari layanan-layanan telekomunikasi di Republik Kenya.

Lebih lanjut, Republik Kenya memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan khusus tambahan pada saat penyampaian notifikasinya terhadap Perhimpunan Telekomunikasi Internasional mengenai persetujuan untuk terikat pada revisi Konstitusi dan Konvensi dan pada keputusan-keputusan yang diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010).

64

Asli: Inggris

Untuk Republik Afrika Selatan:

Delegasi Republik Afrika Selatan, dalam menandatangani Akta-akta Akhir dari Guadalajara, 2010, memiliki hak dari Pemerintahnya:

- 1 untuk mengambil tindakan tertentu apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila ada Anggota

Perhimpunan gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Instrumen (Guadalajara, 2010) yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002, dan Antalya, 2006 atau apabila persyaratan-persyaratan oleh Anggota-anggota tertentu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi operasi layanan-layanan telekomunikasi atau kedaulatannya;

- 2 untuk membuat persyaratan-persyaratan tambahan tertentu yang dinilai perlu sampai dengan dan termasuk pada saat ratifikasi instrumen-instrumen oleh Republik Afrika Selatan (Guadalajara, 2010) yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) sebagaimana diubah oleh Konferensi Berkuasa Penuh Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006;
- 3 lebih lanjut, dalam mengakui dan menghormati prinsip-prinsip dasar dari hak-hak azasi manusia, kebebasan berbicara, kebebasan penyaluran informasi, dan perlindungan dari keamanan nasional Republiknya, delegasi Republik Afrika Selatan memiliki hak untuk Pemerintahnya mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk melindungi dan memajukan hak-hak ini bila Republik Afrika Selatan dikompromikan, terancam atau dibatasi sebagai akibat dari setiap kegiatan atau tindakan dalam lingkup kejahatan maya atau kompromi dari keamanan maya, baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kejahatan atau kompromi dari keamanan tersebut.

65

Asli: Inggris

Untuk Republik Arab Mesir:

Dengan Nama Tuhan, Maha Pengampun, Maha Penyayang:

Delegasi Republik Arab Mesir untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), untuk Pemerintahnya memiliki hak untuk:

- 1 mengambil tindakan atau kebijakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan hak dan kepentingan-kepentingannya, apabila ada anggota lain yang gagal memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta-akta Akhir (Guadalajara, 2010) atau apabila ada persyaratan oleh perwakilan-perwakilan Negara lain membahayakan layanan-layanan telekomunikasi atau layanan-layanan TIK Republik Arab Mesir, keamanan nasionalnya atau hak berdaulat penuhnya atau mengakibatkan pada kenaikan dalam saham kontribusinya dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
- 2 tidak terikat pada ketentuan apapun dari Konstitusi atau Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) yang dapat secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi kedaulatannya dan bertentangan dengan konstitusi, hukum atau Peraturan-peraturan Republik Arab Mesir.

- 3 membuat, berdasarkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan lain terhadap Akta-akta Akhir yang disebut di atas yang diterima oleh konferensi ini (Guadalajara, 2010) sampai pada waktu masing-masing instrumen ratifikasi telah disampaikan.
- 4 memberlakukan Pasal 56 dari Konstitusi dalam hal ada sengketa antara
- 5 Mesir dan Anggota-anggota Sektor ITU manapun; yang disebabkan oleh kekurangan ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi dan Konvensi yang menentukan hubungan-hubungan antara Negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor yang tidak berada dalam kewenangannya.

66

Asli: Inggris

Untuk Republik Uganda:

Delegasi Republik Uganda dengan ini menyatakan atas nama Pemerintah Republik Uganda bahwa:

- 1 memiliki hak untuk mengambil tindakan tertentu yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila negara lain tidak menjalankan ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan perubahan-perubahan yang dibuat daripadanya oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), dan/atau instrumen-instrumen lain yang berhubungan yang ada;
- 2 tidak akan menerima akibat apapun sebagai akibat dari persyaratan apapun yang dibuat oleh negara manapun, dan memiliki hak untuk mengambil tindakan yang dinilai sesuai.

67

Asli: Inggris

Untuk Amerika Serikat, Kanada dan Australia:

Delegasi-delegasi dari Negara-negara tersebut di atas sangat memprihatinkan persetujuan dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh 2010 Perhimpunan Telekomunikasi Internasional dari [Corrigendum 1 to Document 16(Add.6)-E] mengenai Lebanon. Resolusi ini sungguh tidak sesuai untuk dipertimbangkan oleh ITU. Resolusi ini tentang isu-isu politik yang seharusnya ditangani dalam arena-arena politik lain. Resolusi ini tidak konsisten dengan maksud dari Perhimpunan yang disusun dalam Pasal 1 dari Konstitusi ITU dan yang penerimaannya adalah tidak konsisten dengan dasar dari perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif di Timur Tengah. Kami juga mencatat bahwa Resolusi hanya disetujui setelah dua putaran pemungutan suara oleh minoritas delegasi-delegasi yang hadir dengan mayoritas dari delegasi-delegasi abstain. Delegasi-delegasi tersebut di atas oleh karena itu melepaskan diri dari keputusan yang menerima Resolusi ini dan dari Resolusi tersebut.

68

Asli: Inggris

Untuk Amerika Serikat:

- 1 Amerika Serikat menunjuk pada ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan Pasal 32B pada Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan mencatat bahwa dalam menimbang Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), Amerika Serikat mungkin merasa perlu untuk membuat persyaratan-persyaratan atau pernyataan-pernyataan tambahan. Demikian, Amerika Serikat juga memiliki hak untuk membuat persyaratan-persyaratan atau pernyataan-pernyataan tambahan pada saat penyampaian instrumen-instrumen ratifikasinya dari perubahan-perubahan terhadap Konstitusi dan Konvensi (Jenewa, 1992) yang diterima pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010)

Amerika Serikat mengulangi pernyataan dan menggabungkan dengan referensi semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat pada konferensi-konferensi administratif sedunia dan konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia sebelum penandatanganan Akta-akta Akhir tersebut.

Amerika Serikat tidak, dengan tandatangan atau dengan ratifikasi setelahnya apapun dari perubahan-perubahan Konstitusi dan Konvensi yang diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), menyetujui untuk terikat oleh Peraturan-peraturan Administratif yang diterima sebelum tanggal penandatanganan Akta-akta Akhir ini. Amerika Serikat juga tidak akan mempertimbangkan untuk menyetujui terikat oleh revisi dari Peraturan-peraturan Administratif, sebagian atau seluruhnya, yang diterima setelah tanggal penandatanganan Akta-akta Akhir ini, tanpa pemberitahuan khusus kepada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional untuk menyetujui keterikatannya.

- 2 Amerika Serikat menunjuk pada Pernyataan 92 Amerika Serikat yang dibuat pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998) dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengartikan Resolusi 99 (Rev. Guadalajara, 2010) sesuai dengan persetujuan-persetujuan internasional yang relevan, termasuk persetujuan-persetujuan antara Israel dan Palestina.

69

Asli: Inggris

Untuk Turki:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir dari Perhimpunan Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), delegasi dari Republik Turki:

- 1 memiliki untuk Pemerintahnya hak mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila Negara Anggota manapun, dengan cara apapun, gagal untuk memenuhi dengan Konstitusi dan Konvensi dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana telah diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), dan sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), dan

sebagaimana lebih lanjut diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), dan sebagaimana selanjutnya diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), dan sebagaimana selanjutnya diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), atau lampiran-lampiran atau protokol-protokol daripadanya, atau apabila persyaratan apapun dibuat oleh Negara Anggota manapun membahayakan operasi dari layanan-layanan telekomunikasinya yang tepat atau mengakibatkan pada kenaikan dari kontribusinya untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan

- 2 memiliki untuk Pemerintahnya hak, bila perlu, membuat lebih lanjut persyaratan-persyaratan pada Akta-akta Akhir tersebut;
- 3 menyatakan atas Pemerintahnya bahwa Turki tidak menerima akibat-akibat dari persyaratan apapun yang akan membawa pada kenaikan dari saham kontribusinya untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan;
- 4 secara resmi menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan yang dibuat sebelumnya terhadap Konstitusi, Konvensi dan Peraturan-peraturan Administratif dari Perhimpunan wajib berlaku kecuali dinyatakan sebaliknya.

70

Asli: Spanyol

Untuk Meksiko:

Delegasi Meksiko, dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang diterima di Guadalajara, Mexico, 2010, memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk:

- 1 menerima dan mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dinilai sesuai untuk mengamankan keputusan-keputusan berdaulatnya apabila ada Negara Anggota lain dengan cara apapun gagal memenuhi atau gagal untuk menggunakan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam naskah-naskah dasar Perhimpunan, Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional;
- 2 menyatakan, sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, persyaratan-persyaratan lebih lanjut dari Akta-akta ini pada setiap saat dinilai sesuai pada tanggal antara penandatanganan Akta-akta ini dan ratifikasinya, sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan domestiknya;
- 3 tidak menganggap dirinya terikat oleh ketentuan apapun dari Akta-akta ini yang membatasi atau dapat membatasi haknya untuk menyatakan persyaratan-persyaratan tertentu yang dinilai relevan;
- 4 menolak pendirian dan penggunaan dari beban tambahan apapun, termasuk keuangan, di atas dan di bawah unit kontribusi yang diterima konferensi ini dan yang akan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan nasional;
- 5 lebih lanjut, Pemerintah Meksiko mempertahankan dan menegaskan, sebagaimana diulang disini oleh Pemerintah Meksiko secara penuh, persyaratan-persyaratan yang dibuatnya pada saat penandatanganan Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Jenewa, 1992), Konferensi Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006); persyaratan-persyaratan yang dibuat Pemerintah Meksiko

terhadap penerimaan dan revisi Peraturan-peraturan Administratif seperti dalam Pasal 4 pada Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional; dan semua persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Pemerintah Meksiko dengan memperhatikan traktat-traktat lainnya yang langsung terkait dengan telekomunikasi

71

Asli: Inggris

Untuk Negara Israel:

- 1 Pemerintah Negara Israel dengan ini menyatakan hak untuk:
 - a) mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya dan untuk mengamankan operasi layanan-layanan telekomunikasinya, apabila Negara Israel terpengaruh oleh keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi dari konferensi ini atau oleh pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lain;
 - b) mengambil tindakan apapun untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara Anggota gagal memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi ITU (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), atau lampiran-lampiran dan protokol-protokol yang dilampirkan daripadanya; atau apabila pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota lainnya ternyata mengganggu operasi dari layanan-layanan telekomunikasinya.
- 2 Pemerintah Negara Israel menunjuk pada Resolusi 99 ITU (Rev. Guadalajara, 2010) dan menyatakan kedudukannya bahwa penafsiran dan penggunaan resolusi ini oleh semua yang berkepentingan harus sesuai dengan dan tunduk pada perjanjian atau pengaturan bilateral apapun yang ada atau akan datang antara pihak Israel dan Palestina. Lebih lanjut lagi, Israel wajib menerjemahkan dan menerapkan resolusi ini sesuai dengan dan tunduk pada hukum Israel yang berlaku.
- 3 Pemerintah Negara Israel menunjuk pada [Corrigendum 1 to Document 16(Add.6)-E] mengenai Lebanon, dan menyatakan posisinya bahwa Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU adalah BUKAN tempat untuk mendiskusikan dan menerima usulan-usulan mengenai hal-hal perdamaian dan keamanan perbatasan. Israel lebih lanjut menyatakan bahwa Pemerintah Lebanon tidak pernah memasukkan keluhan apapun pada Biro Komunikasi Radio menurut Peraturan Radio, yang merupakan proses yang sesuai di ITU untuk mengangkat isu-isu mengenai gangguan atau interupsi komunikasi yang berasal dari yurisdiksi administrasi lain. Israel berpendapat bahwa resolusi tersebut adalah sungguh bermotivasi politis dan tidak memiliki tempat di Konferensi PP-10. Delegasi Israel oleh karena itu melepaskan diri dari penerimaan keputusan Resolusi ini dan dari Resolusi tersebut.
- 4 Pemerintah Negara Israel memiliki hak untuk mengubah persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang terdahulu dan untuk membuat persyaratan-persyaratan dan pernyataan berikutnya yang

dinilai perlu sampai pada waktu penyampaian instrumen ratifikasi dari Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010).

72

Asli: Inggris/Perancis

Untuk Kanada:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Kanada memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan ketika menyampaikan suatu instrumen ratifikasi untuk perubahan-perubahan yang diterima pada konferensi pada Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) dan perubahan-perubahan daripadanya. Kanada selanjutnya mengulangi pernyataan dan memasukkan atas dasar referensi semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat pada konferensi-konferensi komunikasi radio sedunia sebelum penandatanganan Akta-akta Akhir ini.

73

Asli: Inggris

Untuk Barbados:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) dan setelah mempelajari pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang dimuat dalam Dokumen 194-E, delegasi Barbados memiliki untuk Pemerintahnya hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada negara lain manapun yang dengan cara apapun gagal untuk mematuhi **kondisi-kondisi** yang ditentukan dalam Akta-akta Akhir atau apabila persyaratan-persyaratan setelahnya yang dibuat oleh negara lain manapun merugikan atau mengganggu kepentingan-kepentingan Barbados. Tambahan pula, Barbados memiliki hak untuk membuat persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai yang mungkin diperlukan terhadap Akta-akta Akhir yang diterima pada Konferensi ini sampai pada penyampaian instrumen ratifikasi yang sesuai.

74

Asli: Perancis

Untuk Republik Gabon:

Delegasi Republik Gabon pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional ke-18 (Guadalajara, 2010) , mencatat deklarasi-deklarasi yang dibuat dalam Dokumen 194, untuk Pemerintahnya mensyaratkan hak untuk:

- 1 mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara-negara Anggota gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi

Internasional (Jenewa, 1992), atau instrumen-instrumen yang mengubah yang diterima pada Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya 2006), atau apabila persyaratan-persyaratan oleh Negara-negara Anggota lainnya mungkin membahayakan operasi layanan-layanan telekomunikasi atau informasi dan teknologi komunikasinya;

- 2 menerima atau tidak menerima konsekuensi-konsekuensi keuangan yang dapat timbul dari persyaratan-persyaratan tertentu.
- 3 membuat persyaratan-persyaratan lebih lanjut sampai dengan waktu penyampaian instrumen- instrumen diterima oleh konferensi ini berlaku.

75

Asli: Inggris

Untuk Negara Israel:

Pernyataan No. 35 dibuat oleh Negara-negara Anggota tertentu dengan memperhatikan Akta-akta Akhir, bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, dan oleh karena itu tanpa keabsahan hukum.

Pemerintah Negara Israel mengharap untuk dicatat bahwa Negara Israel menolak pernyataan yang telah disebut terdahulu, yang mempolitisasi dan merusak kerja ITU.

Apabila Negara Anggota manapun yang telah membuat akta pernyataan terdahulu terhadap Israel dalam suatu cara yang mengganggu hak-hak Israel sebagai Negara Anggota ITU, atau melanggar kewajiban-kewajiban Negara Anggota tertentu terhadap Israel, Negara Israel memiliki haknya untuk bertindak terhadap Negara Anggota tersebut dengan cara timbal balik.

76

Asli: Inggris

Untuk Republik India:

Menelaah deklarasi-deklarasi dan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Dokumen 194:

- 1 Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik India tidak menerima akibat-akibat keuangan apapun untuk Pemerintahnya akibat dari setiap persyaratan-persyaratan yang mungkin dibuat oleh setiap Negara Anggota mengenai hal-hal yang menyinggung keuangan Perhimpunan.
- 2 Delegasi Republik India selanjutnya memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan dan melindungi kepentingan-kepentingannya dalam keadaan dimana ada Anggota yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi satu atau lebih ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) dan perubahan-perubahan yang dibuat daripadanya oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh,

2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006) dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) atau Peraturan-peraturan Administratif.

77

Asli: Inggris/Perancis

Untuk Kanada:

Setelah mencatat pernyataan-pernyataan dan persyaratan- persyaratan yang dimuat dalam Dokumen 194 pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Kanada lebih lanjut memiliki hak atas nama Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang mungkin dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain gagal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992) dan perubahan-perubahan berturut-turut daripadanya, atau Peraturan-peraturan Administratif khususnya mengenai penggunaan frekuensi-frekuensi radio dan orbit-orbit yang berhubungan, termasuk orbit satelit geostasioner.

78

Asli: Inggris

Untuk Republik Malawi:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), dan setelah mencatat Dokumen 194, delegasi Republik Malawi dengan ini menyatakan sebagai berikut untuk:

- 1 memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila negara lain gagal, dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010) , dan lampiran-lampiran serta protokol-protokol terlampir daripadanya, apabila persyaratan oleh Negara Anggota Perhimpunan manapun membahayakan atau merugikan layanan-layanan telekomunikasi Republik Malawi;
- 2 memiliki hak untuk tidak menerima konsekuensi apapun akibat dari setiap persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Pemerintah lain yang secara tidak langsung mengarah pada kenaikan saham dalam pembiayaan Perhimpunan.
- 3 memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat persyaratan-persyaratan tambahan apapun yang dianggap perlu terhadap Akta-akta Akhir yang diterima konferensi ini sampai saat penyampaian instrumen ratifikasi yang sesuai.

Untuk Negara Qatar:

lebih lanjut untuk mendokumentasikan Dokumen PP-10/194, ketika menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), Negara Qatar menyatakan bahwa dikarenakan kurangnya ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi dan Konvensi yang menegaskan hubungan antar Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor yang bukan di bawah kekuasaannya, apabila ada perselisihan antara salah satu dari Negara-negara Anggota yang telah bertanda tangan dan Anggota-anggota Sektor, bahwa Negara Qatar memiliki hak untuk menggunakan Pasal 56 Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan.

Delegasi Negara Qatar untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) menyatakan bahwa Pemerintah Negara Qatar memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dinilai perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain gagal memenuhi ketentuan-ketentuan yang diterima oleh konferensi ini untuk mengubah Konstitusi dan Konvensi (Jenewa, 1992) dan perubahan-perubahan daripadanya (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006) dan lampiran-lampiran daripadanya, atau apabila mereka gagal dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan, atau apabila persyaratan-persyaratan mereka, sekarang atau di masa datang, atau kegagalan mereka memenuhi Konstitusi dan Konvensi, membahayakan operasi yang benar dari layanan-layanan telekomunikasi Negara Qatar.

Delegasi Negara Qatar lebih lanjut memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat persyaratan-persyaratan tambahan apapun terhadap Akta-akta Akhir yang diterima pada konferensi ini sampai saat instrumen ratifikasi Akta-akta Akhir telah disampaikan.

Untuk Kesultanan Oman:

Ketika menandatangani Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), Kesultanan Oman menyatakan bahwa dikarenakan kurangnya ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi dan Konvensi yang menegaskan hubungan antar Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor yang bukan di bawah kekuasaannya, apabila ada perselisihan antara salah satu dari Negara-negara Anggota yang telah bertanda tangan dan Anggota Sektor, bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk menggunakan Pasal 56 Konstitusi dengan memperhatikan Negara Anggota yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan.

Delegasi Kesultanan Oman untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) menyatakan bahwa Pemerintah Kesultanan Oman memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang dirasa perlu untuk mengamankan kepentingannya apabila Negara-negara Anggota lain gagal memenuhi ketentuan-ketentuan yang diterima oleh konferensi ini untuk mengubah

Konstitusi dan Konvensi (Jenewa, 1992) dan perubahan-perubahan berikutnya (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006) dan lampiran-lampiran daripadanya, atau apabila mereka gagal dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan, atau apabila persyaratan-persyaratan mereka, sekarang atau di masa datang, atau kegagalan mereka memenuhi Konstitusi dan Konvensi, membahayakan operasi yang benar dari layanan-layanan telekomunikasi Kesultanan Oman.

Delegasi Kesultanan Oman lebih lanjut memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat ketentuan-ketentuan tambahan apapun terhadap Akta-akta Akhir yang diterima pada konferensi ini sampai saat instrumen ratifikasi Akta-akta Akhir telah disampaikan.

81

Asli: Inggris

Untuk Republik Zambia:

Delegasi Republik Zambia, telah mencatat semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 194, dengan ini mengajukan persyaratan sebagai berikut :

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), delegasi Republik Zambia memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Negara-negara Anggota yang gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi atau Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana telah diubah pada Konferensi-konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010) atau ketentuan-ketentuan, lampiran-lampiran dan Peraturan-peraturan Administratif daripadanya, atau apabila konsekuensi persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh negara-negara lain secara langsung atau tidak langsung membahayakan layanan-layanan telekomunikasi Zambia atau membahayakan hak kedaulatannya.

Delegasi Zambia lebih lanjut memiliki hak untuk Negara dan Pemerintahnya untuk membuat setiap pernyataan atau persyaratan atau tindakan apapun lainnya yang sesuai, sebagaimana perlu, sebelum ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010).

82

Asli: Perancis

Untuk Republik Togo:

Dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh berbagai Negara Anggota dalam Dokumen 194, delegasi Togo, dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh yang diadakan di Guadalajara dari tanggal 4 sampai 22 Oktober 2010, memiliki hak untuk tidak menerapkan ketentuan-ketentuan apapun yang dapat bertentangan dengan Konstitusi, legislasi nasional atau tugas-tugas internasional Republik Togo.

Mereka juga memiliki hak untuk tidak menerapkan persyaratan-persyaratan apapun dari Akta-akta Akhir ini dengan memperhatikan

negara atau institusi lain manapun, baik Akta-akta tersebut telah ditandatangani maupun belum, yang tidak sesuai dengan mereka.

83

Asli: Inggris

Untuk Republik Sudan:

Atas nama Republik Sudan, delegasi Republik Sudan untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) dengan hati-hati telah membaca pernyataan-pernyataan dalam Dokumen 194 :

- memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun dan kebijakan-kebijakan pemeliharaan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila ada ketentuan dari Konstitusi, Konvensi dan Resolusi-resolusi, maupun keputusan apapun dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU (Guadalajara, 2010), secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kedaulatannya atau bertentangan dengan Konstitusi, Hukum dan Aturan Republik Sudan maupun hak-hak yang ada yang diperoleh oleh Republik Sudan sebagai pihak dari perjanjian-perjanjian dan konvensi- konvensi dan prinsip hukum internasional apapun lainnya;

- lebih lanjut memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun dan kebijakan-kebijakan pemeliharaan yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasionalnya apabila suatu Anggota gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010) atau apabila konsekuensi dari persyaratan-persyaratan oleh Anggota manapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasinya atau mengakibatkan kenaikan bagian kontribusinya dalam pembayaran biaya Perhimpunan yang tak dapat diterima;
- Lebih lanjut, Republik Sudan memiliki hak untuk membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan khusus tambahan pada saat penyampaian pemberituannya terhadap Perhimpunan Telekomunikasi Internasional mengenai persetujuan untuk dibatasi pada revisi Konstitusi dan Konvensi dan pada keputusan yang telah diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010).

84

Asli: Inggris

Untuk Amerika Serikat:

- 1 Amerika Serikat merujuk pada pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh berbagai Negara-negara Anggota memiliki hak untuk mengambil tindakan serupa sebagaimana dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mereka dengan memperhatikan penggunaan ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan perubahan-perubahan apapun daripadanya. Amerika Serikat memiliki hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dirasa perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan A.S. sebagai tanggapan atas tindakan-tindakan serupa.
- 2 Amerika Serikat, memperhatikan Pernyataan 32 yang diajukan oleh delegasi Kuba, mengingat kembali hak mereka untuk melakukan siaran radio ke Kuba pada frekuensi tepat yang bebas gangguan atau campur tangan yang melanggar undang-undang dan memiliki hak dengan memperhatikan campur tangan yang telah ada dan setiap campur tangan di masa yang akan datang oleh Kuba terhadap siaran radio A.S. Lebih lanjut lagi, Amerika Serikat mencatat bahwa kehadirannya di Guantanamo adalah berdasarkan suatu perjanjian internasional yang berlaku dan bahwa Amerika Serikat memiliki hak untuk memenuhi persyaratan-persyaratan komunikasi radio mereka kini sebagaimana di masa lalu.

85

Asli: Inggris

Untuk Australia, Austria, Belgia, Republik Bulgaria, Kanada, Republik Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Republik Estonia, Finlandia, Perancis, Republik Federal Jerman, Yunani, Republik Hungaria, Islandia, Italia, Jepang, the Republik Latvia, Kepangeranan Liechtenstein, Republik Lithuania, Luksemburg, Montenegro, Kerajaan Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, republik Slowakia, Republik Slovenia, Swedia, Konfederasi Swiss, Turki, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat:

Delegasi dari Negara-negara yang telah disebutkan, menunjuk pada pernyataan yang dibuat oleh Meksiko (No. 70), dikarenakan hal ini dan pernyataan apapun yang serupa yang menunjuk pada Pernyataan Bogota 3 Desember 1976 oleh negara-negara ekuator dan pada tuntutan dari negara-negara tersebut untuk menjalankan hak kedaulatan atas segmen-segmen orbit satelit geostasioner, atau terhadap setiap tuntutan yang terkait, menimbang bahwa tuntutan yang dipertanyakan tidak dapat diakui oleh Konferensi ini.

Delegasi-delegasi yang disebut di atas juga berkeinginan untuk menyatakan bahwa referensi dalam Pasal 44 Konstitusi dari “situasi geografis negara-negara tertentu” tidak termasuk pengakuan terhadap tuntutan untuk setiap hak istimewa orbit satelit geostasioner.

86

Asli: Inggris

Untuk Republik Pantai Gading:

- 1 Setelah memperhatikan persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan di dalam Dokumen 194, delegasi Pantai Gading untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, khususnya bilamana Negara-negara Anggota tertentu tidak melaksanakan bagian mereka dalam pembayaran biaya-biaya Perhimpunan atau gagal dengan cara apapun untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; dan Antalya, 2006), diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010).
- 2 Delegasi Pantai Gading juga memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat persyaratan-persyaratan tambahan apapun yang dianggap perlu sebelum ratifikasi Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010).
- 3 Terakhir, yang menyangkut Pantai Gading, pelaksanaan sementara atau tetap dari perubahan Peraturan-peraturan Administratif Perhimpunan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 54 pada Konstitusi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998;

Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010), wajib dipahami sepanjang diizinkan sesuai hukum nasional.

87

Asli: Inggris

Untuk Republik Rakyat Demokratik Aljazair, Kerajaan Bahrain, Republik Islam Iran, Republik Irak, Lebanon, Kerajaan Maroko, Kesultanan Oman, Kerajaan Saudi Arabia, Republik Sudan, Republik Arab Syria, Tunisia dan Uni Emirat Arab:

Delegasi dari Negara-negara yang disebutkan di atas, dalam menanggapi pernyataan No. 67 dan 71, sepantasnya menyatakan bahwa persetujuan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional 2010, mengenai Resolusi yang terdapat dalam Dokumen 16 (Add.6) “adalah dan wajib tetap berlaku” sepenuhnya mematuhi bagian 21.5 dan semua ketentuan-ketentuan terkait dari Aturan Umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 “Aturan-aturan dari Prosedur Konferensi, Sidang-sidang dan Pertemuan- pertemuan”. Dengan demikian delegasi-delegasi dengan sendirinya merasa wajib untuk mengabaikan pernyataan yang dibuat dalam pernyataan No. 67 sejauh sampai persetujuan dari Resolusi yang disebutkan di atas terkait.

88

Asli: Inggris

Untuk Republik Demokratik Somalia:

Delegasi Somalia dengan ini menyatakan atas nama Pemerintah Republik Somalia bahwa setelah mencatat semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 194, mereka:

- 1 memiliki hak untuk mengambil tindakan serupa yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila negara lain tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan perubahan-perubahan apapun yang dibuat daripadanya pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), dan/atau instrumen terkait lain yang ada;
- 2 tidak akan menerima konsekuensi-konsekuensi apapun sebagai akibat dari setiap persyaratan yang dibuat oleh negara manapun, dan memiliki hak untuk mengambil setiap tindakan yang dinilai tepat.

89

Asli: Inggris

Untuk Yaman:

Delegasi Yaman dengan ini menyatakan atas nama Pemerintah Republik Yaman bahwa setelah mencatat semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 194, mereka:

- 1 memiliki hak untuk mengambil tindakan serupa yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya apabila negara lain tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), dan perubahan-perubahan apapun yang dibuat daripadanya pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010), dan/atau instrumen-instrumen terkait lain yang ada;
- 2 tidak akan menerima konsekuensi-konsekuensi apapun sebagai akibat dari setiap persyaratan yang dibuat oleh negara manapun, dan memiliki hak untuk mengambil setiap tindakan yang dinilai tepat.

90

Asli: Inggris

Untuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara:

Delegasi Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara setelah mencatat semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 194 tanggal 22 Oktober 2010; menyatakan atas nama Pemerintahnya, dalam menanggapi Pernyataan 20 yang diajukan oleh delegasi Republik Argentina bahwa Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tidak memiliki keraguan terhadap kedaulatannya atas Kepulauan Falkland, Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan dan dalam konteks ini memberikan perhatian terhadap Pasal IV dari Traktat Antartika dimana Kerajaan Inggris dan Argentina merupakan pihak. Kerajaan Inggris dengan tegas menolak klaim kedaulatan Pemerintah Argentina atas kepulauan tersebut dan wilayah lautnya.

Prinsip penentuan nasib sendiri, diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggarisbawahi posisi kami atas kedaulatan Kepulauan Falkland. Tidak akan ada negosiasi terhadap kedaulatan atas Kepulauan Falkland kecuali dan sampai pada saat Kepulauan Falkland sendiri menginginkannya. Penduduk kepulauannya secara berkala menjelaskan bahwa mereka menginginkan Kepulauan Falkland untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris.

91

Asli: Inggris

Untuk Republik Zimbabwe:

Delegasi Republik Zimbabwe, setelah mencatat semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 194, memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya apabila ada Anggota dari Perhimpunan gagal dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Akta-akta Akhir dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh Marrakesh 2002, Konferensi Yang Berkuasa Penuh Antalya 2006 dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh Guadalajara 2010, dan lampiran-lampiran dan protokol-protokol yang dilampirkan daripadanya, atau apabila

pensyaratan oleh Anggota Perhimpunan manapun membahayakan layanan-layanan telekomunikasi atau penyiaran atau TIK Zimbabwe, mempengaruhi kedaulatan atau membawa pada kenaikan saham kontribusi untuk pembayaran biaya-biaya Perhimpunan.

Republik Zimbabwe juga memiliki hak untuk membuat persyaratan-persyaratan tambahan yang dianggap perlu terhadap Akta-akta Akhir yang diterima pada konferensi tersebut sampai saat disampaikan instrumen ratifikasi Akta-akta Akhir.

92

Asli: Inggris

Untuk Republik Federal Demokratik Ethiopia:

Dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010), setelah mencatat semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 194, delegasi Republik Federal Demokratik Ethiopia memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya dan mengamankan operasi layanan-layanan telekomunikasinya di bawah konstitusi nasional dan perjanjian internasional dimana Republik Federal Demokratik Ethiopia telah mendaftar, jika Negara Anggota ITU manapun tidak mematuhi, dengan cara bagaimanapun, ketentuan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, atau jika keputusan atau resolusi konferensi ini, atau pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh negara-negara lain berlawanan dengan kepentingan-kepentingan dan kedaulatannya.

93

Asli: Inggris

Untuk Republik Cile:

Republik Cile, setelah mencatat persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 194, memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat, di bawah Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian 1969, persyaratan-persyaratan untuk Akta-akta Akhir ini pada tiap saat dinilai tepat, antara tanggal penandatanganan dan tanggal ratifikasi dari instrumen internasional yang membuat Akta-akta Akhir tersebut.

94

Asli: Inggris

Untuk Turki:

Setelah mempelajari pernyataan-pernyataan dan persyaratan-persyaratan yang dimuat dalam Dokumen 194 Konferensi tanggal 22 Oktober 2010, delegasi Republik Turki, dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) menyatakan bahwa mereka akan

menjalankan ketentuan-ketentuan Akta-akta Akhir hanya terhadap Negara-negara pihak dimana mereka memiliki hubungan diplomatik.

95

Asli: Inggris

Untuk Jamaika:

Setelah mencatat semua persyaratan-persyaratan dan pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Dokumen 194, dalam menandatangani Akta-akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Guadalajara, 2010) Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, delegasi Jamaika memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mempertanyakan tindakan atau resolusi apapun yang dapat bertentangan terhadap Konstitusi, kedaulatan nasional, kepentingan-kepentingan mendasar atau layanan-layanan telekomunikasinya.

Delegasi Jamaika juga memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya, apabila Anggota lain gagal dengan cara apapun untuk memenuhi Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), sebagaimana diubah oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994; Minneapolis, 1998; Marrakesh, 2002; Antalya, 2006; dan Guadalajara, 2010) atau ketentuan-ketentuan, lampiran-lampiran protokol-protokol dan Peraturan Administratif yang dilampirkan daripadanya atau apabila konsekuensi persyaratan yang dibuat oleh Negara-negara Anggota secara langsung atau tidak langsung membahayakan layanan-layanan telekomunikasi Jamaika atau mengganggu hak kedaulatannya.

Delegasi Jamaika juga memiliki hak untuk Pemerintahnya untuk membuat pernyataan-pernyataan atau persyaratan-persyaratan lain untuk Akta-akta Akhir Konferensi ini hingga dan sampai pada waktu Instrumen-instrumen Guadalajara 2010 yang mengubah Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Jenewa, 1992), Instrumen Kyoto 1994, Instrumen Minneapolis 1998, Instrumen Marrakesh 2002, dan Instrumen Antalya 2006 yang diratifikasi dan disampaikan oleh Jamaika.

PERATURAN UMUM KONFERENSI, SIDANG DAN PERTEMUAN PERHIMPUNAN

BAB III Prosedur Pemilihan

34 Peraturan khusus untuk prosedur pemilihan Negara- Negara Anggota Dewan

- MOD 207 1) Jumlah keseluruhan Negara Anggota untuk dipilih dan jumlah kursi per wilayah di dunia akan ditentukan sesuai dengan Konstitusi No. 61 dan Konvensi No. 50A dan metodologi yang diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh.

KEPUTUSAN
RESOLUSI

**KEPUTUSAN 5 (Rev. Guadalajara, 2010)
Pendapatan dan Pengeluaran Perhimpunan
untuk periode 2012-2015**

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

rencana dan tujuan strategis yang dibuat untuk Perhimpunan dan Sektor-Sektornya untuk periode 2012 sampai 2015, dan prioritasnya diidentifikasi sebagai berikut,

menimbang lebih lanjut

- a) Resolusi 91 (Rev. Guadalajara, 2010) dari konferensi ini, mengenai prinsip umum untuk penggantian biaya;
- b) bahwa, dengan pertimbangan rancangan rencana finansial Perhimpunan untuk 2012-2015, tantangan untuk meningkatkan pendapatan untuk mendukung permintaan peningkatan program adalah besar,

memperhatikan

bahwa konferensi ini telah menerima Resolusi 151 (Rev. Guadalajara, 2010) mengenai pelaksanaan manajemen yang berdasarkan-hasil dalam ITU, sebuah komponen penting yang menyangkut perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran belanja, pengawasan dan evaluasi, dan seharusnya mengarahkan, antara lain, untuk memperkuat lebih lanjut sistem pengelolaan finansial Perhimpunan,

memperhatikan lebih lanjut

bahwa Resolusi 48 (Rev. Guadalajara, 2010) pada konferensi ini menekankan pentingnya sumber daya manusia Perhimpunan untuk memenuhi maksud dan tujuan,

memutuskan

- 1 bahwa Dewan diberi kuasa untuk menyusun rancangan anggaran dua tahunan Perhimpunan sedemikian rupa sehingga pengeluaran total Sekretariat Jenderal dan tiga Sektor Perhimpunan seimbang dengan pendapatan yang telah diantisipasi, berdasarkan Lampiran 1 terhadap keputusan ini, dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - 1.1. bahwa jumlah unit sumbangan Negara-negara Anggota untuk tahun 2012-2015 adalah CHF 318000;
 - 1.2. bahwa pengeluaran untuk interpretasi, penerjemahan, dan pemrosesan naskah dengan menghormati bahasa-bahasa resmi Perhimpunan tidak melebihi CHF 85 juta untuk tahun 2012-2015;
 - 1.3. bahwa, bila menetapkan rancangan anggaran keuangan dua tahunan Perhimpunan, Dewan dapat memutuskan untuk memberi Sekretaris Jenderal kemungkinan, untuk memenuhi

- permintaan tak terduga, untuk meningkatkan rencana anggaran keuangan untuk produk atau layanan yang mengacu pada penggantian biaya, di dalam batas pendapatan dari penggantian biaya untuk kegiatan itu;
- 1.4. bahwa Dewan wajib setiap tahun meninjau pengeluaran dan pendapatan dalam anggaran keuangannya, serta kegiatan-kegiatan yang berbeda serta pengeluaran terkaitnya;
 - 2 bahwa, bila tidak diadakan Konferensi Yang Berkuasa Penuh pada tahun 2014, Dewan akan membuat anggaran belanja dua tahunan Perhimpunan untuk tahun 2016-2017 dan 2018-2019 dan sesudahnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk nilai tahunan yang dibuat anggaran belanja dari unit kontribusi dari mayoritas Negara-negara Anggota Perhimpunan;
 - 3 bahwa Dewan dapat mengizinkan pengeluaran melebihi batas-batas untuk konferensi, pertemuan dan seminar bila kelebihan tersebut dapat dikompensasi dengan jumlah dalam batas pengeluaran yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya atau dibebankan pada tahun berikutnya;
 - 4 bahwa Dewan wajib, selama periode anggaran, menaksir perubahan-perubahan yang telah dilakukan dan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan dilakukan pada periode anggaran sekarang dan yang akan datang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. skala gaji, iuran pensiun dan tunjangan, termasuk penyesuaian-penyesuaian setelahnya, dibuat oleh sistem bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dapat diterima kepada staff yang dipekerjakan Perhimpunan;
 - 4.2. kurs penukaran antara franc Swiss dan dollar Amerika Serikat sejauh ini dikarenakan hal ini mempengaruhi biaya staf untuk anggota staf di skala Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - 4.3. Daya beli dalam mata uang franc Swiss berkenaan dengan pokok-pokok pengeluaran non staf;
 - 5 bahwa Dewan wajib memiliki tugas untuk mengefektifkan setiap penghematan yang memungkinkan, khususnya dengan memperhitungkan pilihan-pilihan untuk mengurangi pengeluaran yang terdapat pada Lampiran 2 terhadap keputusan ini, dan menimbang penerapan konsep kegiatan wajib tanpa dukungan dana (UMACs)¹, dan, sampai sekarang, bahwa hal tersebut akan membuat tingkatan terendah yang paling mungkin dari tingkat pengeluaran yang diizinkan yang sepadan dengan keperluan Perhimpunan, di dalam batasan yang dibuat dalam *keputusan 1*, bila perlu dengan memperhitungkan ketetapan dalam *keputusan 7* di bawah; seperangkat opsi untuk mengurangi pengeluaran diberikan dalam Lampiran 2 terhadap keputusan ini;
 - 6 bahwa pedoman minimal berikut seharusnya diterima sehubungan dengan pengurangan pengeluaran apapun:
 - a) fungsi audit internal Perhimpunan seharusnya dipertahankan dengan teguh dan efektif;

¹ Konsep UMAC dapat diberlakukan, apabila perlu, sebagai sarana untuk menunjukkan berbagai kegiatan dalam program kerja menyeluruh yang ditugaskan oleh badan pengelola terkait dalam Perhimpunan, juga kegiatan dukungan yang dianggap penting untuk pelaksanaan tugas, yang tidak dapat ditampung dalam batasan keuangan yang ditetapkan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh. Sekretaris Jenderal akan diberi kewenangan menggunakan pengeluaran untuk kegiatan tersebut, dengan syarat bahwa tercapai penyimpanan atau telah diperoleh pendapatan tambahan.

- b) seharusnya tidak ada pengurangan pengeluaran yang akan mempengaruhi pendapatan biaya penggantian;
 - c) biaya-biaya tetap sebagaimana terkait dengan pembayaran kembali atas pinjaman atau asuransi kesehatan pasca layanan seharusnya tidak menjadi persoalan pengurangan pengeluaran;
 - d) seharusnya tidak ada pengurangan pengeluaran terhadap biaya pemeliharaan rutin untuk bangunan-bangunan ITU yang akan mempengaruhi keamanan atau kesehatan staf;
 - e) fungsi layanan informasi dalam Perhimpunan seharusnya dipertahankan secara efektif;
- 7 bahwa Dewan, dalam menetapkan jumlah penarikan dari atau alokasi Rekening Cadangan, seharusnya ditujukan untuk keadaan normal untuk mempertahankan Rekening Cadangan setelah penggabungan dari penyediaan yang tidak terpakai pada tingkat di atas enam persen dari keseluruhan pengeluaran tahunan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal, dengan bantuan Komite Koordinasi

- 1 untuk menyiapkan rencana anggaran keuangan dua tahunan untuk tahun 2012-2013, maupun 2014-2015, dengan berlandaskan pada pedoman yang berhubungan dengan keputusan-keputusan di atas, Lampiran-lampiran untuk keputusan ini, dan semua dokumen terkait yang disampaikan kepada Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- 2 untuk memastikan bahwa, dalam setiap anggaran dua tahunan, pendapatan dan pengeluaran adalah seimbang;
- 3 untuk menyusun dan melaksanakan suatu program peningkatan pendapatan yang sesuai, efisiensi biaya dan pengurangan meliputi seluruh operasi ITU untuk memastikan anggaran yang seimbang;
- 4 untuk melaksanakan program tersebut di atas secepat mungkin,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk menyediakan bagi Dewan, tidak kurang dari tujuh minggu sebelum sesi-sesi biasa 2011 dan 2013, data yang lengkap dan akurat seperlunya untuk pengembangan, pertimbangan dan penyusunan anggaran dua tahunan;
- 2 wajib melakukan kajian mengenai status terkini dari dan perkiraan mengenai stabilitas finansial dan rekening-rekening cadangan terkait Perhimpunan sesuai keadaan yang berubah-ubah setelah pengenalan Standar Akuntansi Internasional untuk Sektor Publik (IPSAS), dengan maksud untuk mengembangkan strategi-strategi untuk stabilitas finansial jangka panjang, dan untuk melapor setiap tahun kepada Dewan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-Direktur Biro

untuk memberikan kepada Dewan, setiap tahun, laporan yang menggarisbawahi pengeluaran setiap hal yang terkait dalam Lampiran 2 pada keputusan ini, dan untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan sesuai yang wajib dilakukan untuk mengurangi pengeluaran di setiap bidang,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk meninjau kembali dan menyetujui anggaran dua tahunan untuk 2012-2013 dan 2014-2015, dengan memberikan pertimbangan terhadap pedoman yang berhubungan dalam *keputusan-keputusan* di atas, Lampiran-lampiran pada keputusan ini dan semua dokumen yang disampaikan kepada Konferensi Yang Berkuasa Penuh.
- 2 untuk memastikan bahwa, dalam setiap anggaran dua tahunan, pendapatan dan pengeluaran adalah seimbang;
- 3 untuk menimbang lebih lanjut pengalokasian-pengalokasian dalam hal sumber-sumber pendapatan tambahan yang diidentifikasi atau penyimpanan yang tercapai;
- 4 untuk memeriksa program efisiensi-biaya dan pengurangan-biaya sebagaimana disusun oleh Sekretaris Jenderal;
- 5 untuk memperhitungkan dampak program pengurangan biaya manapun terhadap staf Perhimpunan, termasuk pelaksanaan rencana pengunduran diri sukarela dan pensiun dini, dimana hal ini dapat dibiayai dari penyimpanan anggaran atau melalui penarikan dari Rekening Simpanan;
- 6 sebagai tambahan untuk *memerintahkan Dewan 5* di atas, dengan memperhatikan pengurangan pemasukan secara tidak terduga yang disebabkan turunnya kelas kontribusi dari Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, untuk memberikan kewenangan satu kali penarikan dari Rekening Simpanan, di dalam batas yang ditentukan dalam *keputusan 7* di atas, untuk meminimalisasi dampak tingkatan-tingkatan staf dalam anggaran dua tahunan ITU untuk 2012-2013 dan 2014-2015; dana yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada Rekening Simpanan di akhir setiap periode anggaran;
- 7 untuk mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal yang terkait dengan hal-hal yang disebutkan dalam *memerintahkan Sekretaris Jenderal 2* di atas, dan melapor kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya, apabila diperlukan.

ANNEKS 1 UNTUK KEPUTUSAN 5 (Rev. Guadalajara, 2010)

RENCANA KEUANGAN UNTUK 2012 - 2015: PENDAPATAN DAN BIAYA

	Anggaran 2008-09	Anggaran 2010-11	Anggaran 2008-11	Prakiraan 2012-2015	Penyimpa	%
PENDAPATAN						
A. Perkiraan kontribusi						
A.1 Kontribusi Negara Anggota	217.194	221.328	438.522	431.367	-7.155	-1,6%
A.2 Kontribusi Anggota Sektor	36.833	35.162	71.995	62.932	-9.063	-12,6%
A.3 Asosiat	2.867	3.358	6.225	6.428	203	3,3%
Perkiraan Total kontribusi	256.894	259.848	516.742	500.727	-16.015	-3,1%
B. Penggantian biaya						
B.1 Biaya pendukung proyek	2.000	2.700	4.700	7.000	2.300	48,9%
B.2 Penjualan Publikasi	24.000	30.000	54.000	69.000	15.000	27,8%
B.3 ITU TELECOM	7.452	6.285	13.737	10.000	-3.737	-27,2%
B.4 Pendaftaran jaringan satelit	14.000	16.000	30.000	28.000	-2.000	-6,7%
B.5 Lain-lain (pendaftar...)	1.149	698	1.847	2.000	153	8,3%
Biaya Total penggantian	48.601	55.683	104.284	116.000	11.716	11,2%
C. Pendapatan dari bunga	5.000	5.000	10.000	12.000	2.000	20,0%
D. Pendapatan lain	2.000	2.000	4.000	3.280	-720	-18,0%
E. Rekening Cadangan	10.108	10.108	20.216	0	-20.216	n/a
PENDAPATAN TOTAL	322.603	332.639	655.242	632.007	-23.235	-3,5%
BIAYA *						
1 Biaya staf	206.351	206.093	412.444	389.032	-23.412	-5,7%
2 Biaya staf lain	58.330	67.310	125.640	126.519	879	0,7%
3 Perjalanan Dinas	10.060	10.674	20.734	20.734	0	0,0%
4 Layanan kontraktual	11.634	14.142	25.776	27.770	1.994	7,7%
5 Sewa & pemeliharaan	13.051	11.065	24.116	22.013	-2.103	-8,7%
6 Bahan & persediaan	4.045	3.454	7.499	6.779	-720	-9,6%
7 Akuisisi	7.121	6.799	13.920	13.430	-490	-3,5%
8 Keperluan umum	6.564	5.979	12.543	11.728	-815	-6,5%
9 Audit & lain-lain	5.447	7.123	12.570	14.002	1.432	11,4%
BIAYA TOTAL	322.603	332.639	655.242	632.007	-23.235	-3,5%

* Proyeksi Biaya untuk 2012-2015 termasuk inflasi 1.5 persen pertahun

LAMPIRAN 2 PADA KEPUTUSAN 5 (Rev. Guadalajara, 2010)
Kebijakan untuk mengurangi pengeluaran

- 1) Identifikasi dan penghapusan terhadap kemungkinan duplikasi-duplikasi (fungsi, kegiatan, lokakarya, seminar) dan pemusatan tugas keuangan dan administratif.
- 2) Koordinasi dan harmonisasi seminar-seminar dan lokakarya yang dikelola oleh Sekretaris Jenderal atau ketiga sektor dalam rangka menghindari duplikasi dari subyek-subyek yang dicakup dan untuk mengoptimalkan keberadaan sekretariat.
- 3) Koordinasi dengan organisasi regional dengan maksud untuk berbagi sumber daya organisasi-organisasi regional yang tersedia dan meminimalkan biaya ikut serta (lokakarya, seminar, pertemuan-pertemuan persiapan untuk konferensi-konferensi dunia).
- 4) Penghematan yang memungkinkan dari pemekaran kembali staf serta peninjauan kembali dan pengurangan tingkat pos kosong.
- 5) Kegiatan baru atau tambahan harus dilaksanakan melalui pemekaran ulang staf.
- 6) Pengurangan biaya dokumentasi konferensi-konferensi dan pertemuan-pertemuan dengan cara:
 - a) mengajukan permintaan pada saat registrasi apakah salinan kertas diperlukan;
 - b) pengaturan jumlah maksimum salinan-salinan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh atau oleh Dewan untuk semua konferensi, majelis dan pertemuan Perhimpunan;
 - c) pengaturan maksimum dua rangkap per delegasi;
 - d) mengurangi jumlah salinan-salinan kertas yang dikirim ke administrasi-administrasi dari yang sekarang lima menjadi maksimum dua.
- 7) Pertimbangan untuk penghematan dalam bahasa-bahasa (penerjemahan, interpretasi) untuk pertemuan-pertemuan kelompok studi dan publikasi, tanpa mengurangi tujuan-tujuan Resolusi 154 (Rev. Guadalajara, 2010).
- 8) Pelaksanaan kegiatan WSIS melalui pemekaran ulang staf yang bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan serupa di dalam batas sumber-sumber yang sudah ada dan, sebagaimana sesuai, melalui penggantian biaya dan kontribusi sukarela.
- 9) Meninjau kembali biaya-biaya kelompok studi dan kelompok terkait lainnya.
- 10) Pembatasan jumlah pertemuan dan jangka waktu kelompok studi.
- 11) Pembatasan jumlah hari pertemuan untuk kelompok-kelompok penasihat menjadi maksimal tiga hari per tahun dengan interpretasi.
- 12) Mengurangi jumlah dan jangka waktu pertemuan tatap muka kelompok-kelompok kerja Dewan, dimana memungkinkan.
- 13) Inkorporasi pertemuan persiapan pertama untuk [2015] [2016] konferensi komunikasi radio dunia di dalam periode konferensi.

- 14) Identifikasi terhadap tingkat pencapaian dari program-program berbeda dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan baru lainnya.
- 15) Untuk program-program baru atau yang mensyaratkan implikasi sumber finansial tambahan, suatu “pernyataan dampak nilai-tambah” seharusnya membenarkan bagaimana program-program yang diusulkan berbeda dari yang sekarang dan/atau program-program yang serupa dalam rangka menghindari tumpang tindih dan duplikasi.
- 16) Pertimbangan suara dari sumber-sumber daya yang dialokasikan pada inisiatif-inisiatif regional, program-program dan bantuan regional untuk para anggota, atas kehadiran regional di wilayah maupun kantor pusat, serta sumber yang dihasilkan dari hasil-hasil WTDC dan Rencana Tindakan Hyderabad, dan dibiayai langsung sebagai kegiatan dari anggaran Sektor.
- 17) Mengurangi biaya perjalanan dinas, dengan membatasi waktu tugas maupun partisipasi dalam pertemuan-pertemuan, dan mengambil keuntungan dari penurunan biaya perjalanan udara.
- 18) Dengan memperhatikan No. 145 dari Konvensi, jajaran penuh metode kerja elektronik perlu dijelajahi untuk kemungkinan penurunan biaya-biaya, jumlah dan lamanya pertemuan Badan Regulasi Radio di masa mendatang, misalnya pengurangan jumlah pertemuan-pertemuan dalam satu tahun kalender dari empat menjadi tiga.
- 19) Mengenalkan program-program insentif, seperti pajak-pajak efisiensi, dana-dana inovasi dan metode-metode lain dalam rangka menemukan kebijakan yang merupakan terobosan inovatif untuk meningkatkan produktivitas Perhimpunan.
- 20) Bergerak, sepanjang dapat dipraktikkan, dari komunikasi di masa sekarang yang menggunakan faksimili antara Perhimpunan dan Negara-negara Anggota menjadi metode-metode komunikasi elektronik modern.
- 21) Setiap kebijakan tambahan apapun yang diterima oleh Dewan.

KEPUTUSAN 11 (Guadalajara, 2010)
Pembentukan dan manajemen kelompok kerja Dewan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) bahwa tujuan-tujuan Perhimpunan sebagaimana disusun dalam Pasal 1 Konstitusi ITU;
- b) bahwa Pasal 7 Konstitusi menyatakan bahwa Dewan bertindak atas nama Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- c) bahwa Pasal 10 Konstitusi menyatakan bahwa, dalam jeda antara konferensi-konferensi yang berkuasa penuh, Dewan wajib bertindak, sebagai badan pemerintahan Perhimpunan, atas nama Konferensi Yang Berkuasa Penuh di dalam batas kekuasaan yang didelegasikan kepadanya;
- d) bahwa Resolusi 71 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, mengenai rencana strategis Perhimpunan untuk tahun 2012-2015, mengidentifikasi permasalahan, sasaran, strategi dan prioritas kunci untuk Perhimpunan sebagai kesatuan utuh, untuk setiap Sektor dan Sekretariat Jenderal,

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa jadwal Dewan dan kelompok kerja di masa sekarang telah menyebabkan tekanan cukup banyak pada sumber daya Negara Anggota dan Anggota Sektor;
- b) bahwa kendala pada situasi ekonomi dunia juga lebih lanjut meningkatkan pertumbuhan permintaan terhadap kegiatan-kegiatan Perhimpunan dan untuk menyoroti sumber daya terbatas yang tersedia dari Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor;
- c) bahwa, akibat krisis ekonomi yang dihadapi Perhimpunan, Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, ada kebutuhan mendesak untuk mencari cara-cara inovatif untuk merasionalisasi biaya-biaya internal, mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi,

memutuskan

- 1 bahwa Dewan seharusnya memutuskan untuk membentuk kelompok-kelompok kerja berdasarkan permasalahan, sasaran, strategi dan prioritas kunci yang diidentifikasi dalam Resolusi 71 (Rev. Guadalajara, 2010)¹;
- 2 bahwa Dewan seharusnya memutuskan mandat dari kelompok-kelompok kerja, dan prosedur kerja konsisten dengan Tata Cara Dewan;
- 3 bahwa Dewan seharusnya memutuskan kepemimpinan kelompok-kelompok kerja;
- 4 bahwa Dewan seharusnya, berdasarkan kriteria untuk diterima pada sesi biasa 2011, memutuskan mengenai pemberhentian kelompok-

¹ dengan mempertimbangkan keputusan-keputusan Konferensi Yang Berkuasa Penuh.

kelompok kerja, sesuai dengan keadaan pengakhiran yang wajar, termasuk penyelesaian tugas-tugas sesuai mandat mereka, persyaratan-persyaratan yang berubah, perlunya menghindari upaya duplikasi, dan alasan-alasan anggaran;

- 5 bahwa, sejauh mungkin, Dewan seharusnya mengintegrasikan pertemuan-pertemuan kelompok kerja ke dalam agenda dan pengalokasian waktu untuk sesi-sesi tahunan Dewan.

**KEPUTUSAN 12 (Guadalajara, 2010)
Akses online bebas untuk publikasi ITU**

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) bahwa Pasal 4 Konstitusi ITU menetapkan Peraturan-peraturan Administratif (yaitu Peraturan-peraturan Telekomunikasi dan Regulasi Radio Internasional) sebagai instrumen Perhimpunan, dan bahwa Negara-negara Anggota terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan naskah-naskah tersebut;
- b) Resolusi 123 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, dalam menjembatani kesenjangan standarisasi antara negara-negara berkembang¹ dan negara-negara maju, yang mengakui bahwa pelaksanaan rekomendasi Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) dan Sektor Standadisasi Telekomunikasi (ITU-T) merupakan suatu langkah dasar menuju penjembatanan kesenjangan standarisasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang;
- c) Resolusi 64 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, dan Resolusi 20 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi dunia (WTDC), mengenai akses non diskriminasi terhadap fasilitas dan layanan-layanan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern, yang mencatat bahwa:
 - fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan telekomunikasi/TIK modern telah didirikan, terutama, pada landasan rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan ITU-T;
 - rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan ITU-T adalah hasil dari upaya-upaya bersama dari semua yang mengambil bagian dalam proses standarisasi dalam ITU dan diterima oleh kesepakatan oleh para anggota Perhimpunan;
 - pembatasan akses pada fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan telekomunikasi/TIK yang pengembangan telekomunikasi/TIK nasional bergantung dan dimana dibangun berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan ITU-T menyebabkan hambatan bagi pengembangan dan kesesuaian yang serasi dari telekomunikasi/TIK sedunia;
- d) Resolusi 9 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC, mengenai partisipasi negara-negara, khususnya negara-negara berkembang, dalam manajemen spektrum, yang mengakui pentingnya memfasilitasi akses terhadap pendokumentasian yang terkait dengan komunikasi radio untuk memudahkan tugas manajer-manajer spektrum frekuensi-radio;
- e) Resolusi 47 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC, mengenai peningkatan pengetahuan dan pelaksanaan efektif rekomendasi-rekomendasi ITU di negara-negara berkembang, yang berketetapan untuk mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pelaksanaan efektif rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan ITU-R di negara-negara berkembang;

f) bahwa akses bebas untuk naskah-naskah dasar Perhimpunan membantu untuk memenuhi tujuan-tujuan inti Perhimpunan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Konstitusi,

mengakui

- a) kesulitan yang dihadapi banyak negara, khususnya di negara-negara berkembang, dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kelompok studi ITU-R;
- b) berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh Dewan sejak tahun 2000 untuk mengizinkan semacam akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU dan untuk naskah-naskah dasar Perhimpunan;
- c) sejumlah permohonan dibuat oleh Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dengan memperhatikan akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan ITU-T dan untuk naskah-naskah dasar Perhimpunan;
- d) bahwa, menuruti Keputusan Dewan 542, yang menyetujui masa percobaan akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-T, terdapat peningkatan pengunduhan lebih dari 7 000 persen, menurut Dokumen C07/32;
- e) bahwa Dewan telah menyetujui, pada sesinya tahun 2008, masa percobaan akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan naskah-naskah dasar Perhimpunan dari Januari 2009 sampai dengan Juni 2009;
- f) bahwa, sehubungan dengan suksesnya meningkatkan jumlah pengunduhan rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan dampak finansial yang dapat dikendalikan berkenaan dengan memperhatikan masa percobaan yang disebutkan dalam *mengakui d)* di atas, Dewan menyetujui, pada sesinya tahun 2009, perpanjangan masa percobaan gratis sampai dengan konferensi yang berkuasa penuh 2010, dan menunda keputusan mengenai penyediaan akses bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-R untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- g) bahwa perpanjangan masa percobaan akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-R sampai dengan konferensi yang berkuasa penuh 2010, disetujui oleh Dewan pada sesinya tahun 2009, dan hasil-hasil positif yang didapat dari keputusan tersebut menunjukkan bahwa menyediakan akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-R telah berhasil dalam meningkatkan kuantitas pengunduhan rekomendasi-rekomendasi ini dan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi kerja yang diemban ITU-R;
- h) bahwa Peraturan-peraturan Administratif, sebagai instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum yang didiskusikan dan dijabarkan oleh Negara-negara Anggota Perhimpunan, dapat disediakan online bebas biaya,

mengakui lebih lanjut

- a) bahwa terdapat kecenderungan umum menuju akses online bebas untuk standar-standar yang terkait dengan TIK;
- b) kebutuhan strategis untuk meningkatkan pandangan dan ketersediaan keluaran-keluaran ITU;
- c) bahwa kedua objektif yang dicari oleh masa-masa percobaan dan kebijakan-kebijakan akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU dan naskah-naskah dasar Perhimpunan telah diperoleh, sebagai contoh: ITU telah mencapai peningkatan besar dalam penjangkauan, dan pelaksanaan finansial untuk pendapatan ITU adalah kurang dari yang seharusnya diperkirakan;
- d) bahwa akses online bebas untuk naskah-naskah dasar Perhimpunan memiliki dampak finansial terbatas;
- e) bahwa menyediakan akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-R memudahkan kesadaran dan partisipasi negara-negara berkembang dalam kerja ITU-R;
- f) bahwa, mengenai instrumen-instrumen ITU yang dimaksudkan untuk digabungkan dengan hukum nasional, Negara-negara Anggota memiliki kebebasan *de facto* untuk menyalin, menerjemahkan dan mempublikasikan naskah-naskah tersebut dalam situs-situs departemen pemerintah yang resmi serta dalam jurnal-jurnal resmi atau publikasi-publikasi serupa, sesuai dengan hukum nasional masing-masing,

memperhatikan

- a) peningkatan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ITU adalah langkah mendasar menuju peningkatan pembangunan kapasitas dan potensial pengembangan TIK di negara-negara berkembang, yang akan membawa kepada pengurangan kesenjangan digital;
- b) bahwa, dalam rangka meningkatkan, memperbaiki dan memfasilitasi partisipasi Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dari negara-negara berkembang dalam kegiatan-kegiatan ITU, anggota-anggota ini perlu mampu menafsirkan dan melaksanakan publikasi teknis ITU, naskah-naskah dasar Perhimpunan dan instrumen-instrumen Perhimpunan;
- c) bahwa cara yang efisien untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki akses untuk publikasi-publikasi ITU adalah untuk menyediakan mereka online bebas biaya,

memperhatikan lebih lanjut

bahwa menyediakan akses online bebas untuk publikasi-publikasi ITU akan mengurangi permintaan salinan kertas dokumen-dokumen tersebut, yang sesuai dengan kecenderungan ITU terkini yaitu format lunak dan mengatur pertemuan-pertemuan tanpa kertas, dan dengan sasaran keseluruhan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengurangi penggunaan kertas dan emisi gas rumah kaca (GHG);

memutuskan

- 1 untuk menyediakan akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-R, laporan-laporan ITU-R, naskah-naskah dasar Perhimpunan (Konstitusi, Konvensi dan Aturan Umum konferensi, sidang dan pertemuan Perhimpunan) dan akta-akta akhir konferensi yang berkuasa penuh kepada masyarakat umum;
- 2 bahwa salinan kertas rekomendasi-rekomendasi ITU-R, laporan-laporan ITU-R naskah-naskah dasar Perhimpunan dan akta-akta akhir dari konferensi yang berkuasa penuh akan terus dikenakan biaya berdasarkan kebijaksanaan harga dua tingkat, dimana Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-Asosiat membayar berdasarkan penggantian biaya, dimana yang lain, yaitu bukan-anggota membayar "harga pasar"²;
- 3 untuk menegaskan secara permanen, kebijakan terkini mengenai akses online bebas untuk rekomendasi-rekomendasi ITU-T,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk mempersiapkan laporan yang sedang berjalan mengenai penjualan publikasi-publikasi ITU (dengan pengecualian terhadap naskah-naskah dibawah *memutuskan* 1, 2 dan 3 di atas), piranti lunak dan basis data, dan untuk memberikan laporan ini kepada Dewan, menguraikan aspek-aspek berikut:

- total penjualan setiap tahun, dimulai dari tahun 2007;
- perbandingan antara penjualan salinan kertas dan salinan elektronik, setiap tahun;
- penjualan oleh negara dan oleh kategori anggota;
- perbandingan salinan yang terjual dan tidak terjual,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk memeriksa laporan Sekretaris Jenderal dan untuk memutuskan mengenai kebijakan-kebijakan berikutnya untuk memperbaiki akses untuk publikasi, piranti lunak dan basis data ITU;
- 2 untuk melakukan kajian menyeluruh mengenai biaya-biaya /manfaat-manfaat dari penyediaan naskah-naskah Perhimpunan lain, termasuk Peraturan-peraturan Administratif Perhimpunan, secara online bebas.

² Istilah "harga pasar" ditentukan sebagai harga yang ditentukan oleh Divisi Sales dan Marketing, yang didirikan untuk memaksimalkan pemasukan dengan tidak terlalu tinggi sehingga menurunkan penjualan

RESOLUSI 2 (REV. GUADALAJARA, 2010)
Forum kebijakan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi
Dunia

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

Resolusi 2 (Rev. Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

menimbang

- a) bahwa lingkungan telekomunikasi telah mengalami perubahan yang berarti berdasarkan kombinasi pengaruh kemajuan-kemajuan teknologi, globalisasi pasar dan meningkatnya permintaan pengguna untuk layanan-layanan lintas batas terpadu yang semakin meningkat sesuai dengan kebutuhannya;
- b) bahwa merestrukturisasi sektor telekomunikasi, khususnya pemisahan pengaturan dan pengoperasian fungsi, pembebasan layanan-layanan dan penampilan para regulator baru, adalah mungkin dari mayoritas Negara-negara Anggota ITU;
- c) bahwa masih ada kebutuhan mendesak dalam kerangka global untuk pertukaran informasi mengenai strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d) bahwa kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan telekomunikasi/TIK nasional harus diakui dan dimengerti, sehingga mengizinkan pengembangan pasar-pasar global yang dapat mendukung pengembangan serasi layanan-layanan telekomunikasi;
- e) kontribusi-kontribusi penting yang diberikan oleh Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor kepada forum-forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia sebelumnya, dan hasil-hasil yang telah dicapai pada forum-forum tersebut,

menyadari

- a) bahwa tujuan-tujuan Perhimpunan adalah, *antara lain*, untuk memajukan, pada tingkat internasional, diterimanya pendekatan lebih luas terhadap permasalahan-permasalahan telekomunikasi/TIK dalam informasi ekonomi dan masyarakat global, untuk memajukan perpanjangan manfaat-manfaat dari teknologi-teknologi telekomunikasi baru kepada semua penduduk dunia dan untuk menyelaraskan tindakan-tindakan Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dalam mencapai hasil-hasil akhir tersebut (bandingkan hasil-hasil Sidang Dunia mengenai Masyarakat Informasi);
- b) bahwa ITU tetap diposisikan secara khas dan merupakan forum tunggal untuk koordinasi dari, pertukaran informasi mengenai, diskusi tentang dan penyelarasan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan telekomunikasi/TIK nasional, regional dan internasional;
- c) bahwa forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia, yang didirikan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994) dan telah sukses diselenggarakan pada tahun 1996, 1998 dan 2001, telah memberikan

tempat untuk diskusi mengenai permasalahan-permasalahan global dan lintas sektor oleh peserta-peserta tingkat tinggi, sehingga memberikan kontribusi kepada kemajuan telekomunikasi dunia, sebagaimana juga kepada penyusunan prosedur-prosedur untuk melaksanakan forum itu sendiri;

- d) bahwa Forum Kebijakan Telekomunikasi/TIK dunia yang diselenggarakan di Lisbon, Portugal, di bawah Keputusan 9 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh adalah yang paling sukses dari forum serupa, dihadiri oleh 118 Negara-negara Anggota ITU dan tidak kurang dari 850 delegasi, dan berpuncak pada suatu kesepakatan yang tiada bandingannya,

menekankan

- a) bahwa Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, menyadari kebutuhan untuk meninjau kembali secara konstan kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan telekomunikasi/TIKnya sendiri, dan untuk koordinasi dalam lingkungan telekomunikasi/TIK yang berubah secara cepat, sebagaimana telah diterima oleh forum-forum sebagai mekanisme untuk mendiskusikan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan;
- b) bahwa perlu bagi Perhimpunan, sebagai suatu organisasi internasional yang memainkan peran pemimpin dan khas di bidang telekomunikasi/TIK, untuk terus menyelenggarakan forum-forum untuk memfasilitasi perubahan informasi oleh para peserta tingkat tinggi mengenai kebijakan-kebijakan telekomunikasi/TIK;
- c) bahwa maksud dari forum-forum ini adalah untuk menyediakan tempat untuk bertukar pandangan dan informasi dan oleh karenanya menciptakan pandangan bersama di antara para pembuat kebijakan di seluruh dunia mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dari adanya layanan-layanan dan teknologi-teknologi telekomunikasi/TIK baru, dan untuk mempertimbangkan permasalahan kebijakan lainnya dalam telekomunikasi/TIK yang akan mendapat manfaat dari pertukaran pandangan global, dengan tambahan terhadap diterimanya pendapat-pendapat yang mencerminkan sudut pandang bersama;
- d) bahwa forum-forum seharusnya terus memberikan perhatian khusus bagi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang¹, dimana teknologi-teknologi dan layanan-layanan modern dapat memberikan kontribusi secara signifikan bagi perkembangan infrastruktur telekomunikasi;
- e) kesinambungan kebutuhan untuk mengizinkan penyiapan waktu yang memadai untuk forum-forum tersebut;
- f) pentingnya persiapan dan konsultasi regional sebelum penyelenggaraan forum-forum,

¹ Termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi.

memutuskan

- 1 bahwa forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia, sebagaimana dibentuk oleh Resolusi 2 (Kyoto, 1994) Konferensi Yang Berkuasa Penuh yang kemudian direvisi dalam Resolusi 2 (Rev. Marrakesh, 2002), wajib dipelihara, agar dapat terus berdiskusi dan bertukar pandangan dan informasi mengenai permasalahan kebijakan dan perundang-undangan telekomunikasi/TIK, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan global dan lintas sektoral;
- 2 bahwa forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia wajib tidak menghasilkan keluaran-keluaran yang bersifat mengatur ; bagaimanapun, forum wajib menyiapkan laporan-laporan dan menerima pendapat-pendapat berdasarkan kesepakatan untuk mendapatkan pertimbangan dari Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan pertemuan-pertemuan ITU yang relevan;
- 3 bahwa forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia wajib terbuka untuk semua Negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor; bagaimanapun, apabila sesuai, berdasarkan keputusan mayoritas wakil Negara-negara Anggota, suatu sesi khusus dapat diselenggarakan hanya untuk Negara-Negara Anggota;
- 4 bahwa forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia wajib diselenggarakan berdasarkan ad hoc untuk menanggapi secara cepat terhadap permasalahan-permasalahan kebijakan yang ada dari timbulnya perubahan lingkungan telekomunikasi/TIK;
- 5 bahwa forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia seharusnya diselenggarakan berdasarkan sumber-sumber anggaran yang ada dan sejauh mungkin bersamaan dengan satu dari konferensi-konferensi atau pertemuan-pertemuan Perhimpunan dalam rangka meminimalisasi dampak terhadap anggaran Perhimpunan;
- 6 bahwa Dewan wajib terus memutuskan mengenai jangka waktu dan tanggalnya, mengizinkan cukup banyak waktu untuk persiapan-persiapan, dan mengenai tempat, agenda dan tema- tema forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia;
- 7 bahwa agenda dan tema-tema wajib terus didasarkan pada laporan oleh Sekretaris Jenderal , termasuk masukan dari setiap konferensi, sidang atau pertemuan Perhimpunan, dan berdasarkan kontribusi dari Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor;
- 8 bahwa, dalam rangka memastikan bahwa sidang-sidang akan memfokuskan dengan baik, diskusi-diskusi pada forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia wajib didasarkan pada suatu laporan tunggal oleh Sekretaris Jenderal, dan kontribusi-kontribusi dari para peserta berdasarkan laporan tersebut, yang dipersiapkan sesuai dengan suatu prosedur yang telah diterima oleh Dewan dan berdasarkan pandangan dari Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor;
- 9 bahwa partisipasi luas dalam forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia dan efisiensi operasional selama forum tersebut wajib difasilitasi,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

Untuk membuat persiapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan forum telekomunikasi/TIK dunia berdasarkan *memutuskan* di atas,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk terus memutuskan mengenai jangka waktu, tanggal, tempat, agenda dan tema-tema dari setiap forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia manapun di masa mendatang;
- 2 untuk menerima suatu prosedur untuk penyiapan laporan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dirujuk pada *memutuskan* 7 di atas,

lebih lanjut memerintahkan Dewan

untuk menyampaikan pada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya suatu laporan mengenai forum kebijakan telekomunikasi/TIK dunia untuk setiap tindakan yang diperlukan.

RESOLUSI 4 (Rev. Guadalajara, 2010)
Lamanya konferensi yang berkuasa penuh Perhimpunan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

memperhatikan

- a) bahwa Pasal 8 Konstitusi ITU menyatakan bahwa konferensi-konferensi yang berkuasa penuh Perhimpunan wajib diselenggarakan setiap empat tahun dan hal ini dimungkinkan untuk diperpendek jangka waktunya;
- b) meningkatnya permintaan terhadap sumber daya Perhimpunan, terhadap administrasi-administrasi dan delegasi-delegasi yang terlibat dalam konferensi-konferensi internasional mengenai subyek-subyek telekomunikasi,

memutuskan

bahwa konferensi-konferensi yang berkuasa penuh di masa mendatang wajib, kecuali terdapat kebutuhan lain yang mendesak, dibatasi jangka waktunya antara tiga sampai empat minggu,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk memfasilitasi penggunaan waktu dan sumber daya seefisien mungkin selama konferensi-konferensi serupa.

RESOLUSI 11 (Rev. Guadalajara, 2010)
Kegiatan ITU TELECOM

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) bahwa tujuan-tujuan Perhimpunan, sebagaimana dicerminkan dalam Pasal 1 Konstitusi ITU, termasuk untuk memajukan perluasan manfaat teknologi telekomunikasi baru kepada semua penduduk dunia dan untuk menyelaraskan tindakan-tindakan Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dalam mencapai hasil-hasil tersebut;
- b) bahwa lingkungan telekomunikasi sedang melewati perubahan cukup banyak dibawa gabungan pengaruh kemajuan-kemajuan dalam teknologi, globalisasi pasar dan pertumbuhan permintaan pengguna untuk layanan-layanan lintas batas terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka;
- c) bahwa kebutuhan untuk suatu kerangka kerja global untuk bertukar informasi mengenai strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan telekomunikasi telah nyata selama bertahun-tahun;
- d) bahwa kegiatan-kegiatan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah cukup penting dalam mempertahankan keanggotaan Perhimpunan dan masyarakat telekomunikasi/TIK lebih luas mengetahui kemajuan mutakhir dalam semua bidang telekomunikasi/TIK dan kemungkinan untuk menerapkan capaian-capaiannya bagi kemanfaatan semua Negara Anggota dan Anggota Sektor, khususnya negara-negara berkembang¹;
- e) bahwa kegiatan-kegiatan ITU TELECOM memenuhi mandat untuk tetap memberitahu Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, dan menawarkan kesempatan universal untuk menampilkan, teknologi paling mutakhir dari semua aspek telekomunikasi/TIK dan bidang kegiatan terkait, dan menyediakan forum untuk bertukar pandangan antara Negara-negara Anggota dan industri;
- f) bahwa keikutsertaan ITU dalam pameran-pameran nasional, regional dan global mengenai telekomunikasi/TIK dan kegiatan dalam bidang-bidang terkait akan berfungsi untuk memajukan dan meningkatkan citra terhadap ITU dan memungkinkan, tanpa pengeluaran finansial yang signifikan, untuk memperluas pengenalan capaian-capaiannya kepada pengguna akhir, sementara pada waktu bersamaan menarik Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat baru untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatannya;
- g) komitmen- komitmen yang dibuat oleh Swiss dan **Negara** Jenewa (kantor pusat ITU) terhadap kegiatan-kegiatan ITU TELECOM, khususnya dukungan luar biasa nya kepada kegiatan-kegiatan Dunia ITU TELECOM sejak 1971 dalam rupa menjadi tuan rumah dari sebagian besar kegiatan-kegiatannya dengan sukses,

¹ Termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi.

menekankan

- a) bahwa adalah perlu untuk Perhimpunan, sebagai organisasi internasional memainkan peran pemimpin dalam bidang telekomunikasi/TIK, untuk terus mengorganisasi kegiatan tahunan untuk memfasilitasi pertukaran informasi oleh peserta-peserta tingkat tinggi mengenai kebijakan-kebijakan telekomunikasi;
- b) bahwa pengaturan pameran bukan merupakan tujuan utama ITU dan, apabila diputuskan untuk mengatur pameran serupa bersama dengan kegiatan-kegiatan TELECOM, seharusnya diatur oleh perusahaan luar,

memperhatikan

- a) bahwa suatu Badan ITU TELECOM telah didirikan untuk memberikan nasehat kepada Sekretaris Jenderal dalam manajemen kegiatan-kegiatan ITU TELECOM, dan akan bertindak sesuai dengan keputusan-keputusan Dewan;
- b) bahwa kegiatan-kegiatan ITU TELECOM juga menghadapi tantangan-tantangan, seperti kenaikan biaya pameran dan kecenderungan terhadap pengecilan ukurannya, jangkauan spesialisasi mereka dan kebutuhan untuk memberikan nilai terhadap industri;
- c) bahwa kegiatan-kegiatan ITU TELECOM perlu untuk memberikan nilai dan kesempatan-kesempatan bagi para peserta untuk memperoleh keuntungan sewajarnya dari investasi-investasi mereka;
- d) bahwa fleksibilitas operasional yang telah diberikan oleh manajemen ITU TELECOM agar dapat menghadapi semua tantangan dalam bidang kegiatannya dan bersaing dalam lingkungan komersial telah terbukti berguna;
- e) bahwa ITU TELECOM memerlukan waktu transisi untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi pasar baru;
- f) bahwa ITU telah berperan serta sebagai peserta dalam pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain,

memperhatikan lebih lanjut

- a) bahwa para peserta, dan khususnya anggota-anggota industri, sedang mencari kemungkinan memperkirakan waktu dan tempat yang wajar untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM dan peluang-peluang untuk memperoleh keuntungan sewajarnya dari investasi mereka;
- b) bahwa ada peningkatan kepentingan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ITU TELECOM lebih lanjut sebagai landasan kunci bagi diskusi-diskusi di antara para pembuat kebijakan, pembuat perundang-undangan dan pemimpin-pemimpin industri;
- c) bahwa ada permintaan-permintaan untuk biaya ruangan dan biaya keikutsertaan yang lebih bersaing, harga istimewa atau potongan harga hotel dan jumlah kamar-kamar hotel yang memadai, agar dapat membuat kegiatan lebih dapat diakses dan terjangkau;
- d) bahwa merek ITU TELECOM harus diperkuat oleh peralatan komunikasi yang layak agar dapat tetap menjadi satu dari kegiatan-kegiatan telekomunikasi/TIK yang paling disegani;

- e) bahwa ada kebutuhan untuk memastikan kelangsungan finansial kegiatan-kegiatan ITU TELECOM;
- f) bahwa kegiatan ITU TELECOM tahun 2009 menggabungkan kebijakan-kebijakan panggilan dalam Resolusi Dewan ITU 1292 (2008), dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap kecenderungan untuk forum-forum yang timbul, kebutuhan untuk mencari keikutsertaan dari spektrum yang lebih lebar dari industri-industri/bisnis-bisnis, kebutuhan untuk secara aktif mendorong Kepala-kepala Negara, Kepala-kepala Pemerintahan, Kementerian, keikutsertaan CEO dan VIP, dan kebutuhan untuk penyebaran lebih luas dari diskusi-diskusi forum dan hasil-hasil,

memutuskan

- 1 bahwa Perhimpunan seharusnya, dalam kolaborasi dengan Negara-negara Anggota Perhimpunan dan Anggota-anggota Sektor Perhimpunan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ITU TELECOM yang terkait dengan isu-isu penting utama dalam lingkungan telekomunikasi/TIK terkini dan membahas kecenderungan-kecenderungan pasar, perkembangan teknologi dan isu-isu perundang-undangan;
- 2 bahwa Sekretaris Jenderal bertanggung jawab penuh untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM (termasuk perencanaan, pengaturan dan keuangan);
- 3 bahwa ITU TELECOM harus diselenggarakan pada waktu yang dapat diperkirakan dan secara teratur, sebaiknya di waktu yang sama setiap tahun, dengan memperhatikan kebutuhan untuk memastikan bahwa harapan semua pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan serupa dapat dicapai, dan, tambahan pula, untuk memastikan bahwa mereka tidak tumpang tindih dengan konferensi-konferensi atau sidang-sidang utama ITU;
- 4 bahwa setiap kegiatan ITU TELECOM wajib dapat berlangsung secara finansial dan wajib tidak memiliki dampak negatif terhadap anggaran ITU berdasarkan sistem alokasi biaya yang ada sebagaimana ditentukan oleh Dewan;
- 5 bahwa Perhimpunan, dalam proses penyeleksian tempat untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM, wajib memastikan:
 - 5.1 proses penawaran yang terbuka dan transparan, berdasarkan model perajakan negara tuan rumah sebagaimana disetujui oleh Dewan, dalam konsultasi dengan Negara-negara Anggota, kecuali untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM pada tahun 2011 dan 2012, dengan kriteria tujuan-termasuk kelangsungan finansial;
 - 5.2 bahwa hasil awal studi pasar dan kelayakan sedang dilakukan, termasuk konsultasi -konsultasi dengan peserta-peserta yang berminat dari semua wilayah;
 - 5.3 aksesibilitas dan keterjangkauan untuk para peserta;
 - 5.4 penghasilan pendapatan positif dari kegiatan-kegiatan ITU TELECOM;
 - 5.5 bahwa seleksi tempat untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM berdasarkan prinsip perputaran antara wilayah-wilayah, dan

- sedapat mungkin antara Negara-negara Anggota di dalam wilayah , secara bergiliran setiap tahun dengan kegiatan tetap;
- 5.6 bahwa tempat-tempat tetap dirundingkan untuk tiga kegiatan berturut-turut, dimana setelah pengumuman lelang baru, akan dilaksanakan untuk tiga kegiatan tetap selanjutnya;
 - 6 bahwa pengauditan rekening ITU TELECOM wajib dilaksanakan oleh Auditor Eksternal Perhimpunan;
 - 7 bahwa, segera sesudah semua biaya-biaya telah dilunasi, suatu bagian signifikan dari semua kelebihan pendapatan melalui biaya-biaya yang didapat dari kegiatan-kegiatan ITU TELECOM wajib ditransfer kepada Dana Pengembangan TIK di bawah Biro Pengembangan Telekomunikasi ITU, terutama di negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara berkembang dengan ekonomi dalam masa transisi;
 - 8 bahwa resolusi ini wajib dimulai secara efektif dengan kegiatan ITU TELECOM yang dijadwalkan pada tahun 2012,

Memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk menentukan dan mengusulkan mandat, prinsip-prinsip dan komposisi Badan ITU TELECOM kepada Dewan untuk persetujuan, dengan mempertimbangkan untuk memastikan transparansi dan untuk menunjuk beberapa individual yang berpengalaman dalam mengorganisasi kegiatan-kegiatan telekomunikasi/TIK;
- 2 untuk memastikan manajemen yang tepat untuk semua kegiatan dan sumber-sumber ITU TELECOM, sejalan dengan peraturan-peraturan Perhimpunan;
- 3 untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dan membantu Negara-negara Anggota yang mampu dan bersedia untuk melakukannya, khususnya negara-negara berkembang, untuk menyelenggarakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan ITU TELECOM;
- 4 untuk berkonsultasi dengan Badan ITU TELECOM, pada suatu dasar yang sedang berlangsung, dengan topik-topik yang luas;
- 5 untuk mengembangkan rencana bisnis untuk setiap kegiatan yang diusulkan ;
- 6 untuk memastikan transparansi dari kegiatan-kegiatan ITU TELECOM dan memberi laporan mengenai nya dalam suatu laporan tahunan kepada Dewan, termasuk:
 - semua kegiatan bisnis ITU TELECOM;
 - semua kegiatan Badan ITU TELECOM, termasuk usulan-usulan mengenai tema-tema dan tempat-tempat untuk kegiatan-kegiatan;
 - alasan-alasan untuk penyeleksian tempat-tempat untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM mendatang;
 - dampak dan resiko-resiko finansial untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM mendatang, sebaiknya dua tahun sebelumnya;
 - tindakan diambil dengan memperhatikan penggunaan setiap pendapatan positif yang diperoleh;
- 7 menyusun mekanisme untuk melaksanakan *memutuskan 5*;

- 8 untuk mengembangkan suatu model perjanjian negara tuan rumah dan penggunaan semua cara yang memungkinkan untuk dapat disetujui oleh Dewan secepat mungkin, dengan model perjanjian negara tuan rumah tersebut untuk memasukkan klausula-klausula yang mengizinkan Perhimpunan dan negara tuan rumah untuk membuat perubahan-perubahan yang dianggap perlu akibat dari keadaan memaksa atau kriteria kinerja lainnya;
- 9 bahwa kegiatan ITU TELECOM diadakan setiap tahun, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak bersamaan waktu dengan konferensi-konferensi atau sidang-sidang besar ITU manapun, sesuai dengan frekuensi berikut:
 - suatu kegiatan ITU TELECOM yang diselenggarakan di tempat yang ditetapkan setiap dua tahun;
 - suatu kegiatan ITU TELECOM yang diselenggarakan di tempat lain pada tahun saat kegiatan tersebut tidak diadakan di tempat yang ditetapkan;

Untuk kedua kasus, penetapan tempat wajib didasarkan penyeleksian yang kompetitif; perundingan kontrak wajib didasarkan pada model perjanjian negara tuan rumah yang telah disetujui Dewan;

- 10 untuk mengidentifikasi tempat-tempat untuk lima kegiatan-kegiatan ITU TELECOM berikutnya (tiga tetap dan dua rotasi) mulai tahun 2012, dan mengusulkan suatu mekanisme kepada Dewan untuk mendapatkan persetujuannya sehingga memungkinkan identifikasi tempat-tempat bagi kegiatan-kegiatan ITU TELECOM berikutnya setelah tahun 2016;
- 11 untuk memastikan bahwa ada pengawasan internal dan bahwa audit-audit internal dan eksternal pada rekening-rekening untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM yang berbeda dilaksanakan secara rutin;
- 12 untuk melaporkan setiap tahun kepada Dewan mengenai pelaksanaan resolusi ini dan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai perkembangan kegiatan-kegiatan ITU TELECOM di masa mendatang,

memerintahkan Sekretaris Jenderal, dengan koordinasi dari Direktur-direktur Biro

- 1 untuk memberikan cukup pertimbangan, dalam merencanakan kegiatan-kegiatan ITU TELECOM, terhadap adanya kemungkinan sinergi dengan konferensi-konferensi dan pertemuan-pertemuan utama ITU, dan sebaliknya, apabila sesuai;
- 2 untuk mendorong keikutsertaan ITU dalam kegiatan-kegiatan telekomunikasi/TIK nasional, regional dan global, sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber finansial,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk meninjau kembali laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatan ITU TELECOM sebagaimana dijelaskan berdasarkan *memerintahkan Sekretaris Jenderal 6* di atas dan memberi panduan mengenai kecenderungan kegiatan-kegiatan tersebut di masa datang ;

- 2 untuk meninjau kembali dan menyetujui alokasi bagian dari pendapatan positif yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ITU TELECOM untuk proyek-proyek pengembangan dalam kerangka kerja Dana Pengembangan TIK;
- 3 untuk meninjau kembali dan menyetujui usulan-usulan Sekretaris Jenderal mengenai prinsip-prinsip untuk suatu proses pengambilan keputusan transparan terhadap tempat-tempat untuk kegiatan-kegiatan ITU TELECOM, termasuk kriteria yang berfungsi sebagai dasar untuk proses tersebut; kriteria tersebut wajib memasukkan elemen-elemen biaya, serta sebagaimana juga sistem rotasi sebagaimana telah dirujuk dalam *memutuskan 5* dan *memerintahkan Sekretaris Jenderal 9* di atas, dan biaya-biaya tambahan yang mungkin dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di luar kota dari kantor pusat Perhimpunan;
- 4 untuk meninjau kembali dan menyetujui usulan-usulan Sekretaris Jenderal mengenai mandat dan susunan badan ITU TELECOM, dengan memperhatikan *memerintahkan Sekretaris Jenderal 1* di atas;
- 5 untuk meninjau kembali dan menyetujui model perjanjian negara tuan rumah, secepat mungkin;
- 6 untuk meninjau kembali, yang sesuai, frekuensi-frekuensi dan tempat kegiatan-kegiatan ITU TELECOM berdasarkan hasil-hasil finansial dari kegiatan-kegiatan tersebut;
- 7 untuk melapor mengenai masa depan kegiatan-kegiatan ini kepada konferensi yang berkuasa penuh berikut, termasuk usulan-usulan untuk suatu studi baru mengenai berbagai pilihan dan mekanisme dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan.

RESOLUSI 25 (Rev. Guadalajara, 2010)
Memperkuat kehadiran regional

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) kebutuhan bagi negara-negara berkembang untuk mengikuti laju peningkatan perkembangan teknologi baru yang bermanfaat bagi penduduknya;
- b) bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional akan mempersempit kesenjangan digital nasional dan global;
- c) bahwa ketiga Sektor Perhimpunan dapat membantu Negara-negara Anggota dalam berbagai isu berkenaan dengan, terutama, negara-negara berkembang, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Aksi Hyderabad yang diterima oleh Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC),

mengingat

- a) laporan Unit Inspeksi Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (JIU) 2009 mengenai keefektifan kehadiran regional ITU;
- b) Resolusi 123 (Rev. Guadalajara, 2010) dari konferensi ini, mengenai penjembitan kesenjangan standardisasi antara negara berkembang dan negara maju;
- c) Resolusi 5 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC, mengenai peningkatan keikutsertaan negara-negara berkembang dalam kegiatan-kegiatan Perhimpunan;
- d) Resolusi 48 (WRC-95) Konferensi Komunikasi Radio Dunia, mengenai penguatan kehadiran regional dalam kelompok kerja studi komunikasi radio;
- e) Resolusi 17 (Rev. Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA), mengenai standardisasi telekomunikasi terkait dengan kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang;
- f) Resolusi 44 (Rev. Johannesburg, 2008) WTSA, mengenai penjembitan kesenjangan standardisasi antara negara berkembang dan negara maju;
- g) Resolusi 57 (Johannesburg, 2008) WTSA, mengenai penguatan koordinasi dan kerjasama antara Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R), Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) dan Sektor Pengembangan Telekomunikasi (ITU-D) mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama,

mengakui

- a) kesulitan yang dihadapi banyak negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi, sebagaimana juga

negara-negara yang mempunyai kendala anggaran ketat, dalam keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ITU, termasuk konferensi-konferensi dan pertemuan-pertemuan ketiga Sektor;

- b) kebutuhan mendesak untuk menerapkan mandat, prioritas, metode keahlian dan kerja dari kehadiran regional menuju pada kerja sama dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan-kegiatan, yang mengharuskan melibatkan penguatan hubungan antara ITU dan organisasi-organisasi telekomunikasi regional, sebagaimana telah diperkirakan dalam Resolusi 58 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini;

meyakini

- a) pentingnya kehadiran regional dalam memungkinkan ITU untuk bekerja seerat mungkin dengan Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektornya, dengan memperbaiki penyebarluasan informasi mengenai kegiatan-kegiatannya dan membangun hubungan yang lebih erat dengan organisasi-organisasi regional dan subregional;
- b) pentingnya terus memperkuat koordinasi antara Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT), Biro-Biro lainnya dan Sekretariat Jenderal;
- c) pentingnya meningkatkan keahlian teknis dan pengetahuan sumber daya manusia yang ditempatkan di kantor-kantor regional dan wilayah;
- d) bahwa kantor-kantor regional dan wilayah memungkinkan ITU untuk lebih menyadari dan lebih tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus regional;
- e) bahwa kantor-kantor regional dan wilayah seharusnya menyediakan peningkatan bantuan teknis kepada negara-negara yang membutuhkan pembangunan;
- f) bahwa sumber-sumber daya terbatas, dan bahwa efisiensi dan efektivitas merupakan kunci pertimbangan-pertimbangan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh ITU;
- g) bahwa, agar efektif, kehadiran regional harus memiliki tingkat kewenangan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang beragam dari Negara-negara Anggota;
- h) bahwa akses *online* yang memadai antara kantor pusat dan kantor-kantor lapangan meningkatkan kegiatan-kegiatan kerja sama teknik secara signifikan;
- i) bahwa semua informasi elektronik yang relevan yang tersedia di kantor pusat seharusnya juga tersedia di kantor-kantor regional;
- j) bahwa penguatan kehadiran regional akan menciptakan efisiensi dan kenyamanan yang lebih baik untuk Negara-negara Anggota,

memperhatikan

- a) bahwa proyek-proyek bersama yang melibatkan upaya-upaya kolaboratif dari kantor-kantor regional ITU dan organisasi-organisasi telekomunikasi regional tertentu telah dijalankan dengan sangat sukses di beberapa wilayah;

- b) bahwa baik Konferensi Yang Berkuasa Penuh maupun Dewan ITU telah mengesahkan prinsip bahwa kantor-kantor regional dan wilayah seharusnya diberikan kepercayaan dengan fungsi-fungsi yang jelas dan spesifik;
- c) bahwa seharusnya terdapat kerja sama yang lebih baik antar BDT, Biro-Biro lainnya dan Sekretariat Jenderal untuk mendorong keikutsertaan kantor-kantor regional dalam bidangnya masing-masing;
- d) bahwa terdapat suatu kebutuhan untuk mengevaluasi persyaratan kepegawaian untuk kantor-kantor regional dan wilayah;
- e) bahwa laporan JIU yang membuat beberapa rekomendasi mengenai cara-cara meningkatkan kehadiran regional ITU, yang juga menemukan bahwa para anggota memberikan penghargaan terhadap kerja dari kantor-kantor dimaksud, khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia, bantuan negara langsung, penyebaran informasi dan penyiapan untuk kegiatan-kegiatan besar ITU dan dalam merumuskan kedudukan-kedudukan dengan memperhatikan isu-isu besar regional dan kecenderungan-kecenderungan telekomunikasi,

juga memperhatikan

bahwa kantor-kantor regional dan wilayah mewakili kehadiran keseluruhan Perhimpunan, bahwa kegiatan-kegiatannya seharusnya melibatkan kantor pusat ITU dan seharusnya mencerminkan tujuan-tujuan yang terkoordinasi dari ketiga Sektor, dan kegiatan-kegiatan regional tersebut seharusnya meningkatkan keikutsertaan efektif dari semua anggota dalam kerja ITU,

memutuskan

- 1 untuk melaksanakan evaluasi yang menyeluruh dari kehadiran regional ITU dalam jeda antara dua konferensi yang berkuasa penuh berturut-turut;
- 2 bahwa, dalam sumber-sumber Perhimpunan yang ada dan langka, kehadiran regional wajib lebih lanjut diperkuat dan tetap dilakukan peninjauan kembali dalam kepentingan-kepentingan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan prioritas-prioritas yang berkembang secara terus menerus di setiap daerah, dengan tujuan pertama untuk memaksimalkan manfaat atas kehadiran regional untuk keseluruhan keanggotaan Perhimpunan;
- 3 bahwa perluasan fungsi-fungsi penyebaran informasi dari kehadiran regional dipersyaratkan dalam rangka memastikan bahwa semua kegiatan dan program Perhimpunan terwakili, seraya menghindari duplikasi fungsi-fungsi tersebut antara kantor-kantor pusat dan regional;
- 4 bahwa kantor-kantor regional dan wilayah wajib diberdayakan untuk membuat keputusan-keputusan sesuai mandatnya, sementara fungsi koordinasi dan keseimbangan antara kantor pusat ITU dan kantor regional seharusnya difasilitasi dan ditingkatkan, sesuai dengan Rencana Strategis untuk Perhimpunan Tahun 2012-2015, dalam rangka mencapai suatu keseimbangan kerja yang lebih baik antara kantor-kantor pusat dan regional;

- 5 bahwa prioritas wajib diberikan untuk melaksanakan semua elemen rencana strategis untuk Perhimpunan Tahun 2012-2015 dengan maksud untuk memperkuat kehadiran regional, terutama:
- i) untuk memperluas dan memperkuat kantor-kantor regional dan wilayah dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasi dan melaksanakannya sesegera mungkin;
 - ii) untuk meninjau kembali prosedur-prosedur administratif internal yang sesuai dengan pekerjaan kantor-kantor regional, dengan maksud untuk menyederhanakan dan transparansi serta peningkatan efisiensi kerja;
 - iii) untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan proyek-proyek sebagaimana ditentukan dalam Resolusi 17 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC;
 - iv) untuk menyusun prosedur yang jelas untuk berkonsultasi Negara-negara Anggota, dengan memberikan Negara-negara Anggota kesempatan untuk meninjau kembali usulan-usulan regional yang dikonsolidasikan dan memberikan tanggapan untuk membantu memprioritaskannya dan menjaga negara-negara anggota tetap berinformasi mengenai penyeleksian proyek dan pendanaannya;
 - v) untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada kantor-kantor regional dan wilayah baik dalam pengambilan keputusan maupun memenuhi kebutuhan mendesak dari Negara-negara Anggota di wilayah tersebut, termasuk, tapi tidak terbatas pada:
 - fungsi-fungsi yang terkait dengan penyebarluasan informasi, pemberian saran ahli dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan, kursus-kursus dan seminar-seminar;
 - setiap fungsi dan tugas yang dapat didelegasikan kepadanya terkait dengan penyiapan dan pelaksanaan anggarannya sendiri;
 - memastikan keikutsertaan efektif dalam diskusi-diskusi mengenai masa depan Perhimpunan dan mengenai isu-isu strategis berkenaan dengan sektor telekomunikasi/TIK;
- 6 bahwa kerja sama antara kantor-kantor regional dan wilayah ITU, organisasi-organisasi regional yang relevan dan organisasi-organisasi internasional lainnya yang berhubungan dengan hal-hal pengembangan dan finansial seharusnya terus ditingkatkan, untuk kepentingan mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya dan menghindari duplikasi, dan bahwa Negara-negara Anggota seharusnya tetap diberitahu perkembangan terbaru melalui BDT, apabila perlu, dalam rangka memastikan bahwa kebutuhan mereka sedang dipenuhi dengan cara yang terkoordinasi dan konsultatif;
- 7 bahwa pertemuan-pertemuan regional seharusnya diselenggarakan di berbagai wilayah oleh Sektor-sektor yang relevan, terutama ITU-D, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi regional, dalam rangka meningkatkan efektifitas pertemuan global yang terkait dan memudahkan keikutsertaan yang lebih baik;
- 8 bahwa sumber-sumber daya substansial harus tersedia dalam rangka BDT dapat beroperasi secara efektif dengan maksud mempersempit kesenjangan telekomunikasi antara negara berkembang dan negara maju, dengan mendukung upaya-upaya penjemabatan kesenjangan digital, karena itu kantor regional seharusnya, melalui koordinasi

dengan kantor pusat ITU, mengambil kebijakan-kebijakan dengan maksud untuk:

- mendukung proyek-proyek percontohan untuk pelaksanaan layanan elektronik (e-layanan)/penerapan, menganalisa dan menyebarluaskan hasil-hasilnya dan mengatur lebih lanjut adaptasi dan pengembangan dalam wilayahnya;
 - menciptakan suatu mekanisme untuk dengan maksud:
 - i) mengembangkan suatu model usaha yang sesuai dan berkelanjutan yang akan menyebabkan keikutsertaan sektor swasta (perusahaan dan masyarakat akademis);
 - ii) membantu penentuan suatu teknologi yang sesuai dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan masyarakat pedesaan;
 - iii) merumuskan suatu strategi pemekaran pedesaan dengan memperhatikan masyarakat pedesaan mengenai kesadaran TIK dan relevan dengan kondisi dan kebutuhannya;
 - membantu secara aktif Negara-negara Anggota di bidang proyek-proyek dana perwalian atau proyek-proyek yang dibiayai dari Dana Pengembangan TIK;
- 9 bahwa indikator-indikator kunci kinerja operasional dan finansial(OKPIs dan FKPIs) yang diidentifikasi oleh Direktur BDT,berkolaborasi dengan para direktur kantor regional, wajib digunakan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan BDT yang terkait dengan kehadiran regional, dan bahwa, apabila kantor-kantor regional dan wilayah tidak menemui kriteria evaluasi yang telah disepakati tersebut, Dewan seharusnya menilai alasan-alasan dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan apabila dinilai perlu, berkonsultasi dengan negara-negara terkait,

memerintahkan Dewan

- 1 agenda dari setiap sesi Dewan untuk memeriksa perkembangannya dan menerima keputusan-keputusan untuk keberlangsungan penerapan dan pengoperasian strukturalnya, dengan maksud untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan keanggotaan Perhimpunan dan memberlakukan terhadap keputusan-keputusan sebagaimana yang diterima pada pertemuan-pertemuan Perhimpunan, dan mengonsolidasikan aspek-aspek koordinasi dan kelengkapan dari kegiatan-kegiatan antara ITU dengan organisasi-organisasi telekomunikasi regional dan subregional;
- 2 untuk mengalokasikan sumber-sumber daya finansial di dalam batas-batas finansial yang ditetapkan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- 3 untuk melaporkan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai kemajuan yang telah dilakukan dalam melaksanakan resolusi ini,
- 4 untuk menganalisa kinerja kantor-kantor regional dan wilayah berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal dan berdasarkan evaluasi OKPIs dan FKPIs sebagaimana ditentukan dalam rencana operasional ITU-D, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kehadiran regional ITU;

- 5 untuk memutuskan, sebesar mungkin, mengenai pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi dari laporan JIU 2009 pada <http://www.itu.int/md/S09-CL-C-005/en>;
- 6 untuk melakukan suatu analisa manfaat dan biaya yang membandingkan OKPIs dan FKPIs, dengan mempertimbangkan *memutuskan 9* di atas,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk memfasilitasi tugas Dewan dengan menyediakan semua dukungan yang diperlukan untuk memperkuat kehadiran regional seperti yang diuraikan dalam resolusi ini,
- 2 untuk menerapkan, apabila diperlukan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dari perjanjian-perjanjian negara tuan rumah terhadap perubahan lingkungan di negara tuan rumah masing-masing, setelah sebelumnya berkonsultasi dengan negara-negara yang bersangkutan dan perwakilan-perwakilan dari organisasi-organisasi antarpemerintah regional dari negara-negara yang terkena dampak;
- 3 untuk mempertimbangkan elemen-elemen untuk dievaluasi yang tercantum dalam lampiran resolusi ini;
- 4 untuk menyampaikan kepada Dewan setiap tahun suatu laporan mengenai kehadiran regional yang memuat, untuk setiap kantor regional dan wilayah spesifik, uraian informasi mengenai:
 - i) kepegawaian;
 - ii) keuangan;
 - iii) perubahan dan perkembangan kegiatan-kegiatan, termasuk, diantaranya, perluasan kegiatan-kegiatan terhadap ketiga Sektor, pelaksanaan proyek-proyek dan usulan-usulan regional, penyelenggaraan seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan persiapan regional dan penarikan Anggota-anggota Sektor baru, berkoordinasi dengan organisasi-organisasi antarpemerintah regional;

lebih lanjut memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk menyarankan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk memastikan keefektifan kehadiran regional ITU, termasuk pengevaluasian oleh JIU atau dengan merujuk kepadanya untuk setiap entitas mandiri lainnya, dengan memperhatikan elemen-elemen yang ditentukan dalam lampiran resolusi ini,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi, berkonsultasi erat dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro Komunikasi Radio serta Biro Standardisasi Telekomunikasi

- 1 untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat lebih lanjut kehadiran regional, sebagaimana diuraikan dalam resolusi ini;

- 2 untuk mendukung pengevaluasian efektifitas kehadiran regional ITU, dengan memperhatikan elemen-elemen sebagaimana tercantum dalam lampiran resolusi ini;
- 3 untuk mengembangkan rencana-rencana operasional dan finansial yang spesifik untuk kehadiran regional, berkolaborasi dengan kantor-kantor regional, yang akan dimasukkan sebagai bagian dari rencana-rencana operasional dan finansial tahunan ITU;
- 4 untuk menjabarkan uraian OKPIs dan FKPIs yang mengenai kegiatan-kegiatan setiap kantor regional dan wilayah, yang akan dimasukkan sebagai bagian dari rencana-rencana operasional dan finansial tahunan ITU, dengan mempertimbangkan *memutuskan 9* di atas;
- 5 untuk meninjau kembali dan menentukan pos-pos yang sesuai, termasuk pos-pos tetap, di kantor-kantor regional dan wilayah, dan menyediakan staf khusus berbasis keperluan untuk menemui kebutuhan-kebutuhan tertentu;
- 6 untuk mengisi pos-pos kosong pada waktu yang sesuai di kantor-kantor regional dan wilayah, apabila sesuai, merencanakan ketersediaan staf dan memberikan pertimbangan terhadap pendistribusian regional atas posisi staf;
- 7 untuk memastikan bahwa kantor-kantor regional dan wilayah diberikan prioritas yang mencukupi diantara kegiatan-kegiatan dan program-program Perhimpunan secara keseluruhan, dan bahwa, untuk mengawasi pelaksanaan proyek-proyek dana perwalian dan proyek-proyek yang dibiayai dari Dana Pengembangan TIK, mereka telah memiliki otonomi yang dipersyaratkan, otoritas pengambilan keputusan dan cara-cara yang sesuai;
- 8 untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan pertukaran informasi antara kantor-kantor pusat dan lapangan;
- 9 untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan menyediakan kantor-kantor regional dan wilayah dengan kebijakan fleksibilitas dalam syarat-syarat perekrutan staf profesional serta staf pendukung;
- 10 untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memastikan penggabungan yang efektif atas kegiatan-kegiatan Biro Komunikasi Radio dan Biro Standardisasi Telekomunikasi di kantor-kantor regional dan wilayah,

memerintahkan Direktur Biro Komunikasi Radio dan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

untuk terus bekerja sama dengan Direktur BDT dalam meningkatkan kemampuan kantor-kantor regional dan wilayah untuk menyediakan informasi pada kegiatan-kegiatan Sektornya, serta keahlian yang diperlukan, untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan organisasi-organisasi regional relevan dan untuk memfasilitasi keikutsertaan semua Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dalam kegiatan-kegiatan ketiga Sektor Perhimpunan.

LAMPIRAN RESOLUSI 25 (Rev. Guadalajara, 2010)
Elemen-elemen untuk pengevaluasian kehadiran regional ITU

Pengevaluasian kehadiran regional ITU seharusnya didasarkan pada fungsi-fungsi sebagaimana ditugaskan pada kantor-kantor regionalnya berdasarkan Lampiran A: “Kegiatan-kegiatan rutin yang diharapkan dari kehadiran regional” dari Resolusi 1143 sebagaimana diterima oleh Dewan ITU pada sesinya tahun 1999, dalam *memutuskan* 2 sampai 9 Resolusi 25 (Rev. Guadalajara, 2010) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh dan dalam keputusan-keputusan lain yang tepat.

Pengevaluasian kehadiran regional seharusnya memperhatikan, tetapi tidak terbatas pada, elemen-elemen berikut ini:

- a) perluasan pemenuhan ketentuan-ketentuan Resolusi 25 (Rev. Guadalajara, 2010) oleh BDT, Sekretariat Jenderal dan dua Biro lainnya, sebagaimana diperlukan;
- b) bagaimana desentralisasi lebih lanjut dapat memastikan efisiensi yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah, dengan mempertimbangan akuntabilitas dan transparansi;
- c) suatu survei dua tahunan yang memenuhi tingkat kepuasan Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan organisasi telekomunikasi regional dengan kehadiran regional ITU;
- d) perluasan duplikasi yang memungkinkan antara fungsi-fungsi kantor-kantor pusat ITU dan regional;
- e) tingkat otonomi dalam pengambilan keputusan terkini sebagaimana diberikan kepada kantor-kantor regional, dan apakah otonomi yang lebih besar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya;
- f) efektifitas kolaborasi antara kantor-kantor ITU regional, organisasi – organisasi telekomunikasi regional dan organisasi-organisasi pengembangan dan finansial regional dan internasional lainnya;
- g) bagaimana kehadiran regional dan penyelenggaraan kegiatan dalam regional dapat meningkatkan keikutsertaan efektif semua negara dalam kerja ITU;
- h) sumber-sumber daya saat ini yang disediakan kantor regional untuk mengurangi kesenjangan digital;
- i) pengidentifikasian fungsi dan kewenangan yang mungkin ditugaskan pada kehadiran regional dalam melaksanakan Rencana Aksi yang diterima dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi;
- j) struktur optimal dari kehadiran regional ITU, termasuk lokasi dan jumlah kantor-kantor regional dan wilayah.

Dalam mempersiapkan evaluasi ini, masukan seharusnya disuarakan dari Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor yang mendapatkan manfaat dari kehadiran regional ITU, sebagaimana juga dari kantor-kantor regional, dari organisasi-organisasi regional dan internasional dan dari setiap entitas relevan lainnya.

Suatu laporan mengenai pelaksanaan evaluasi ini seharusnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Dewan pada sesinya tahun 2012. Dewan kemudian seharusnya mempertimbangkan tindakan sesuai yang akan diambil, dengan maksud untuk melaporkan kepada konferensi yang berkuasa penuh tahun 2014 mengenai hal tersebut.

RESOLUSI 30 (Rev. Guadalajara, 2010)
Kebijakan-kebijakan khusus untuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

Resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai program-program tindakan untuk negara-negara terbelakang (LDCs), negara-negara berkembang kepulauan kecil (SIDS), negara-negara berkembang daratan (LLDCs) dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi,

mengakui

Pentingnya telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembangunan negara-negara yang bersangkutan,

telah memperhatikan

- a) Resolusi 49 terdahulu (Doha 2006) pada Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai kebijakan-kebijakan khusus untuk LDCs dan SIDS;
- b) Resolusi 16 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC dan Rencana Aksi Hyderabad, yang mengatur untuk memperluas kebijakan-kebijakan untuk memasukkan LDCs, SIDS, LLDCs dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi;
- c) Program 5 Rencana Aksi Hyderabad untuk LDCs, negara-negara dengan kebutuhan khusus, telekomunikasi darurat dan penyesuaian perubahan iklim,

memperhatikan

- a) bahwa jumlah LDCs tetap tinggi meskipun kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir dan bahwa perlu untuk menanggapi situasi tersebut;
- b) bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh LDCs, SIDS, LLDCs dan negara-negara ekonomi dalam masa transisi terus menjadi ancaman terhadap agenda pembangunan dari negara-negara tersebut;
- c) bahwa LDCs, SIDS dan LLDCs rentan terhadap kehancuran yang disebabkan oleh bencana-bencana alam, dan kurangnya sumber-sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi secara efektif bencana-bencana tersebut,

menyadari

bahwa perbaikan jaringan-jaringan telekomunikasi di negara-negara ini akan memberikan suatu dorongan ke arah pemulihan sosial dan ekonomi dan keseluruhan pembangunan, serta memberikan kesempatan untuk menciptakan masyarakat-masyarakat berpengetahuan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk terus meninjau kembali keadaan layanan-layanan telekomunikasi/TIK di LDCs, SIDS, LLDCs dan negara-negara ekonomi dalam masa transisi, sebagaimana telah diidentifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk pengembangan telekomunikasi/TIK, serta untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang terlemah yang memerlukan tindakan prioritas;
- 2 untuk mengusulkan kepada Dewan ITU kebijakan-kebijakan kongkrit yang dimaksudkan untuk memberikan perbaikan-perbaikan yang tepat dan memberikan bantuan yang efektif bagi negara-negara tersebut, dari Program Sukarela Khusus untuk Kerja Sama Teknik, sumber-sumber Perhimpunan sendiri, dan sumber-sumber keuangan lainnya;
- 3 untuk bekerja untuk menuju penyediaan struktur administratif dan operasional yang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan negara-negara tersebut dan untuk administrasi yang layak atas sumber-sumber daya yang ditujukan untuk LDCs, SIDS, LLDCs dan negara-negara ekonomi dalam masa transisi, yang berjumlah hampir setengah dari jumlah negara-negara berkembang dalam Perhimpunan;
- 4 untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan baru dan inovatif yang dapat menghasilkan dana-dana tambahan untuk digunakan dalam pengembangan telekomunikasi/TIK di negara-negara tersebut, dalam rangka mendapat manfaat-manfaat dari peluang-peluang yang mekanisme finansialnya menawarkan penyelesaian TIK untuk isu-isu pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi;
- 5 untuk melaporkan setiap tahun mengenai hal ini kepada Dewan,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk mempertimbangkan laporan-laporan sebagaimana tersebut di atas dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai sehingga Perhimpunan dapat terus menunjukkan perhatian dan bekerja sama secara aktif dalam pengembangan layanan-layanan telekomunikasi/TIK di negara-negara tersebut;
- 2 menyediakan untuk maksud ini dari Program Sukarela Khusus untuk Kerja Sama Teknik, sumber-sumber Perhimpunan sendiri dan setiap sumber keuangan lainnya, dan meningkatkan kemitraan-kemitraan diantara semua pemangku kepentingan mengenai hal ini;
- 3 untuk menjaga situasi dalam peninjauan kembali secara terus menerus dan untuk memberikan laporan mengenai hal ini kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya,

mendorong negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara ekonomi dalam masa transisi

Untuk terus memberikan prioritas yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan telekomunikasi/TIK dan proyek-proyek yang meningkatkan pengembangan sosial ekonomi secara keseluruhan, dengan menetapkan kegiatan-kegiatan kerja sama teknik yang didanai dari sumber-sumber bilateral atau multilateral, yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

RESOLUSI 34 (Rev. Guadalajara, 2010)
Bantuan dan dukungan kepada negara-negara dengan kebutuhan khusus untuk membangun kembali sektor telekomunikasi mereka

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) prinsip-prinsip, maksud dan tujuan-tujuan luhur yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia, serta dalam Pernyataan Prinsip-Prinsip yang diterima oleh Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi;
- b) usaha-usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan;
- c) maksud-maksud Perhimpunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konstitusi ITU,

mengingat lebih lanjut

- a) Resolusi 127 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) Resolusi 160 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- c) Resolusi 161 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- d) Resolusi 25 dan 26 (Rev. Doha, 2006) dan 51 serta 57 (Doha, 2006) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia,

mengakui

- a) bahwa sistem telekomunikasi yang handal sangat diperlukan untuk meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi negara-negara, khususnya negara-negara dengan kebutuhan khusus, yaitu negara-negara yang telah terkena bencana-bencana alam, konflik-konflik dalam negeri atau peperangan;
- b) bahwa, berdasarkan kondisi-kondisi saat ini dan di masa depan yang dapat diperkirakan, negara-negara tersebut tidak akan dapat memastikan pelaksanaan efektif dari sektor telekomunikasi mereka tanpa bantuan dari masyarakat internasional, dilakukan secara bilateral atau melalui organisasi-organisasi internasional,

memperhatikan

bahwa kondisi ketertiban dan keamanan yang dicari oleh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya tercapai sebagian dan oleh karena itu Resolusi 34 (Rev. Minneapolis, 1998) Konferensi Yang Berkuasa Penuh hanya dilaksanakan sebagian,

memutuskan

bahwa tindakan khusus yang diambil oleh Sekretaris Jenderal dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi, dengan bantuan khusus dari Sektor Komunikasi Radio ITU dan Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU, seharusnya dilanjutkan atau dimulai untuk menyediakan bantuan dan dukungan yang sesuai kepada negara-negara dengan kebutuhan khusus sebagaimana dirujuk dalam lampiran resolusi ini dengan membangun kembali sektor telekomunikasi mereka,

menyerukan kepada Negara-negara Anggota

untuk menawarkan semua bantuan dan dukungan yang memungkinkan kepada negara-negara dengan kebutuhan khusus, baik secara bilateral atau melalui tindakan khusus Perhimpunan sebagaimana tersebut di atas, dan, dalam segala hal, dengan koordinasi dengan tindakan tersebut,

memerintahkan Dewan

untuk mengalokasikan dana-dana yang diperlukan untuk tindakan dimaksud, dalam batasan finansial yang diatur oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh, dan dilanjutkan dengan pelaksanaannya,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk melaksanakan **penaksiran** kebutuhan-kebutuhan khusus masing-masing negara-negara tersebut;
- 2 untuk memastikan mobilisasi sumber-sumber daya yang memadai, termasuk berdasarkan anggaran internal dan Dana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk pelaksanaan tindakan-tindakan yang diusulkan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk mengoordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tiga Sektor Perhimpunan sesuai dengan *keputusan* di atas, untuk memastikan bahwa tindakan Perhimpunan untuk menolong negara-negara dengan kebutuhan khusus seefektif mungkin, dan melaporkan setiap tahun mengenai hal tersebut kepada Dewan;
- 2 dengan persetujuan Dewan, atas permintaan dari negara-negara terkait, untuk memperbaharui lampiran pada resolusi ini apabila diperlukan.

LAMPIRAN RESOLUSI 34 (Rev. Guadalajara, 2010)

Afganistan

Sebagai akibat dari perang di Afganistan 24 tahun yang lalu, sistem telekomunikasi telah hancur dan memerlukan perhatian mendesak untuk rekonstruksi dasarnya.

Dalam kerangka kerja Resolusi 34 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, bantuan dan dukungan yang sesuai wajib diberikan kepada Pemerintah Afganistan dalam membangun kembali sistem telekomunikasinya.

Burundi, Timor Leste, Eritrea, Etiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Rwanda, Sierra Leone

Dalam kerangka kerja Resolusi 34 (Rev. Guadalajara, 2010), bantuan dan dukungan yang sesuai wajib diberikan kepada negara-negara tersebut dalam membangun kembali jaringan telekomunikasi mereka.

Republik Demokratik Kongo

Prasarana telekomunikasi dasar dari Republik Demokratik Kongo telah rusak parah akibat konflik-konflik dan peperangan yang telah diderita negara tersebut selama lebih dari satu dekade.

Sebagai bagian dari reformasi sektor telekomunikasi yang dilakukan oleh Republik Demokratik Kongo, dengan melibatkan pemisahan fungsi-fungsi pelaksanaan dan pengaturan, dua badan pengatur yang telah didirikan sejalan dengan jaringan telekomunikasi dasar, yang mensyaratkan sumber-sumber daya finansial yang memadai agar dapat dibangun.

Dalam kerangka kerja Resolusi 34 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, bantuan dan dukungan yang sesuai wajib diberikan kepada Republik Demokratik Kongo untuk membangun kembali jaringan telekomunikasi dasarnya.

Irak

Prasarana telekomunikasi di Republik Irak telah hancur karena perang selama dua setengah dekade dan sistem yang sekarang sedang digunakan telah menjadi usang melalui penggunaan selama bertahun-tahun.

Irak belum menerima bantuan apapun dari ITU sejak dahulu disebabkan kondisi perang yang telah dialaminya.

Dalam kerangka kerja Resolusi 34 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, Irak wajib terus diberi dukungan dalam mengejar pembangunan kembali dan memperbaharui prasarana telekomunikasinya, mendirikan lembaga-lembaga, mengembangkan sumber-sumber daya manusia dan menetapkan tarif, melalui penyusunan operasi pelatihan di dalam dan di luar wilayah Irak sebagaimana diperlukan, didukung para ahli untuk menanggapi kekurangan keahlian di beberapa bagian, permohonan-permohonan untuk rapat dari Administrasi Irak untuk spesialis-spesialis yang diperlukan dan menyediakan bentuk bantuan lain, termasuk bantuan teknis.

Lebanon

Fasilitas-fasilitas telekomunikasi Lebanon telah mengalami kerusakan parah disebabkan oleh peperangan di negara tersebut.

Dalam kerangka kerja Resolusi 34 (Rev. Guadalajara, 2010) dari konferensi ini, Lebanon wajib diberikan bantuan dan dukungan yang sesuai dalam membangun kembali jaringan telekomunikasinya. Karena Lebanon belum menerima bantuan finansial apapun, Lebanon wajib terus didukung di dalam kerangka kerja Resolusi 34 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini dengan maksud untuk mengejar pekerjaan untuk Lebanon untuk mendapatkan bantuan finansial yang diperlukan.

Somalia

Prasarana telekomunikasi di Republik Demokratik Somalia telah rusak total karena perang selama satu setengah dekade dan, tambahan pula, kerangka kerja regulasi dalam negerinya perlu disusun kembali.

Somalia sudah lama sekali tidak mendapatkan manfaat yang memadai dari bantuan Perhimpunan karena perang di negara tersebut dan lemahnya pemerintahan.

Dalam kerangka kerja Resolusi 34 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, dan penggunaan dana-dana yang dialokasikan kepada program bantuan untuk negara-negara terbelakang, suatu inisiatif khusus wajib diluncurkan, dimaksudkan untuk menyediakan bantuan dan dukungan kepada Somalia, dalam membangun kembali dan memodernisasi prasarana telekomunikasinya, pembentukan kembali kementerian telekomunikasi yang lengkap dan mendirikan lembaga-lembaga, dan mengembangkan kebijakan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi, pengaturan dan peraturan, termasuk suatu rencana penomoran, pengelolaan spektrum, pengembangan sumber daya manusia, dan semua bentuk bantuan yang diperlukan lainnya.

RESOLUSI 36 (Rev. Guadalajara, 2010)
Telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan
bantuan kemanusiaan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengesahkan

- a) Resolusi 644 (Rev. WRC-07) Konferensi Komunikasi Radio Dunia (WRC), mengenai sumber-sumber daya telekomunikasi untuk mitigasi bencana dan operasi pemulihan;
- b) Resolusi 646 (WRC-03) WRC, mengenai perlindungan publik dan pemulihan bencana;
- c) Resolusi 673 (WRC-07) WRC, mengenai penggunaan komunikasi radio untuk aplikasi-aplikasi observasi Bumi;
- d) Resolusi 34 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia, mengenai peran telekomunikasi/teknologi informasi dan telekomunikasi dalam kesiapan untuk bencana, peringatan dini, penyelamatan, mitigasi, pemulihan dan tanggapan-tanggapan;
- e) Agenda Tunis butir 91 tentang Masyarakat Informasi yang diterima pada fase kedua Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi,

menimbang

- a) bahwa Konferensi Antarpemerintah mengenai Telekomunikasi Darurat (Tampere, 1998) menerima Konvensi Tampere mengenai penyediaan sumber daya telekomunikasi untuk mitigasi bencana dan operasi pemulihan, yang mulai berlaku pada 8 Januari 2005;
- b) bahwa Konferensi Tampere kedua mengenai Komunikasi Bencana (Tampere, 2001) mengundang ITU untuk mempelajari penggunaan jaringan-jaringan bergerak publik untuk peringatan dini dan penyebaran informasi darurat, dan aspek operasional telekomunikasi darurat seperti prioritas panggilan;
- c) bahwa Konferensi Tampere ketiga mengenai Komunikasi Bencana (Tampere, 2006) mendorong pemahaman lebih luas dan kerja sama antara para pemerintah dalam pelaksanaan Konvensi Tampere;
- d) bahwa Konferensi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pengurangan Bencana (Kobe, Hyogo, 2005) mendorong semua Negara, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan hukum dalam negeri mereka, untuk mempertimbangkan, yang sesuai, akses, menyetujui atau meratifikasi instrumen hukum internasional yang relevan dengan pengurangan bencana, seperti Konvensi Tampere,

mengakui

- a) keseriusan dan kekuatan bencana yang potensial dapat menyebabkan penderitaan manusia yang dramatis;
- b) bahwa peristiwa tragis terkini yang terjadi di dunia secara jelas menunjukkan kebutuhan layanan komunikasi kualitas yang tinggi untuk membantu keselamatan publik dan badan-badan pemulihan bencana dalam meminimalisasi resiko kehidupan manusia dan untuk mencakup informasi publik umum yang diperlukan dan kebutuhan komunikasi dalam situasi-situasi tersebut,

meyakini

- a) bahwa telekomunikasi/TIK memainkan suatu peran penting dalam pendeteksian bencana, peringatan dini, persiapan, tanggapan dan pemulihan;
- b) bahwa penggunaan perlengkapan dan layanan telekomunikasi/TIK yang tidak terganggu sangat diperlukan untuk penyediaan bantuan kemanusiaan yang efektif dan layak,

lebih lanjut meyakini

bahwa Konvensi Tampere menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk penggunaan sumber-sumber daya telekomunikasi/TIK tersebut,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk bekerja erat dengan Koordinator Pemulihan Keadaan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung Negara-negara Anggota yang meminta demikian dalam kerja mereka menuju akses nasionalnya terhadap Konvensi Tampere;
- 2 untuk membantu Negara-negara Anggota yang meminta demikian dengan pengembangan pangaturan praktis mereka untuk pelaksanaan Konvensi Tampere, berkolaborasi erat dengan Koordinator Pemulihan Keadaan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa,

mengundang Negara-negara Anggota

untuk bekerja menuju aksesinya terhadap Konvensi Tampere, sebagai hal yang diprioritaskan,

mendesak Negara-negara Anggota Pihak pada Konvensi Tampere

untuk mengambil semua langkah praktis untuk pemberlakukan Konvensi Tampere dan untuk bekerja erat dengan koordinator operasional sebagaimana diatur untuk hal tersebut .

RESOLUSI 41 (Rev. Guadalajara, 2010)
Tunggakan dan rekening tunggakan khusus

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

dengan memperhatikan

laporan Dewan Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU pada situasi tersebut dengan memperhatikan jumlah piutang Perhimpunan oleh Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat,

menyayangkan

kenaikan tingkat hutang dan penyelesaian yang lamban dari rekening-rekening hutang khusus,

menimbang

bahwa merupakan kepentingan semua Negara Anggota, Anggota Sektor dan Asosiat-asosiat untuk mempertahankan keuangan Perhimpunan dengan landasan suara,

telah memperhatikan

bahwa sejumlah Negara Anggota dan Anggota Sektor dimana telah dibuat rekening hutang khusus, meskipun ketentuan Nomor 168 Konstitusi ITU, hingga kini tidak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk menyerahkan jadwal pembayaran kembali kepada Sekretaris Jenderal, dan untuk menyetujui suatu jadwal serupa dengan Sekretaris Jenderal, dan bahwa rekening khusus mereka dengan demikian telah dibatalkan,

mendesak

semua Negara Anggota yang berhutang, khususnya mereka yang rekening hutang khusus nya telah dibatalkan, sebagaimana juga Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat yang berhutang, untuk menyerahkan jadwal pembayaran kembali kepada Sekretaris Jenderal, dan untuk menyetujui suatu jadwal serupa dengan Sekretaris Jenderal,

menegaskan

keputusan untuk membuka setiap rekening hutang khusus yang baru hanya setelah kesimpulan suatu perjanjian dengan Sekretaris Jenderal untuk menyusun suatu jadwal pembayaran kembali tertentu selambatnya satu tahun setelah penerimaan permohonan untuk rekening hutang khusus yang serupa,

memutuskan

bahwa jumlah yang harus dibayarkan tidak akan diperhitungkan apabila menggunakan Nomor 169 Konstitusi asalkan Negara-negara Anggota yang terkait telah menyerahkan jadwal pembayaran kembali mereka kepada Sekretaris Jenderal, dan menyetujui jadwal-jadwal tersebut dengan Sekretaris Jenderal, dan selama mereka menurut secara ketat dengannya dan dengan kondisi terkait, dan bahwa apabila gagal untuk menuruti

jadwal pembayaran kembali dan kondisi terkait akan berakibat pada pembatalan rekening hutang khusus,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk meninjau kembali pedoman untuk jadwal pembayaran kembali, termasuk jangka waktu maksimal, adalah hingga lima tahun untuk negara-negara maju, hingga sepuluh tahun untuk negara-negara berkembang dan hingga limabelas tahun untuk negara-negara terbelakang, sebagaimana juga hingga lima tahun untuk Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat;
- 2 untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan tambahan yang sesuai seperti dalam keadaan istimewa:
 - Pengurangan sementara dalam kelas kontribusi dalam persesuaian dengan Nomor 165A Konstitusi dan Nomor 480B Konvensi
 - Penghapusan bunga pada pembayaran yang telah melewati batas, tunduk pada setiap Negara Anggota, Anggota Sektor dan Asosiat yang terkait secara ketat memenuhi jadwal pembayaran kembali yang disetujui untuk penyelesaian kontribusi yang tidak terbayar
 - Jadwal pembayaran kembali sampai maksimal tigapuluh tahun untuk negara-negara dengan kebutuhan khusus yang disebabkan oleh bencana-bencana alam, konflik-konflik sipil atau kesulitan ekonomi yang parah
 - Penyesuaian jadwal pembayaran kembali dalam fase awalnya untuk mengizinkan pembayaran dengan jumlah tahunan yang lebih rendah, dengan syarat bahwa jumlah yang dikeluarkan sama dengan jadwal akhir pembayaran kembali;
- 3 untuk mengambil kebijakan-kebijakan tambahan dengan memperhatikan tidak terpenuhinya syarat-syarat penyelesaian yang disetujui dan/atau hutang dalam pembayaran saham kontribusi tahunan yang tidak termasuk dalam jadwal pembayaran kembali, khususnya, termasuk, menghentikan keikutsertaan Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat dalam kerja Perhimpunan,

lebih lanjut memerintahkan Dewan

untuk meninjau kembali tingkat yang sesuai dari Rekening Cadangan untuk Pemegang Hutang, untuk menyediakan pencakupan sesuai dan untuk melapor kepada konferensi yang berkuasa penuh berikut mengenai hasil yang didapat menurut resolusi ini,

memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal

untuk bernegosiasi dan menyetujui, dengan semua Negara Anggota yang berhutang, khususnya mereka yang rekening hutang khususnya telah dibatalkan, sebagaimana juga dengan Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat yang berhutang, jadwal-jadwal untuk pembayaran kembali hutang mereka sesuai dengan pedoman yang disusun oleh Dewan, dan, dimana sesuai, menyerahkan untuk keputusan oleh Dewan usul untuk kebijakan-kebijakan tambahan sebagaimana dikemukakan di bawah *memerintahkan Dewan* di atas, termasuk yang berhubungan dengan tidak terpenuhinya,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk memberitahu semua Negara Anggota, Anggota Sektor dan Asosiasi-asosiasi yang berhutang atau yang memiliki rekening hutang khusus atau rekening hutang khusus yang telah dibatalkan dari resolusi ini dan untuk melapor kepada Dewan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil dan kemajuan yang dibuat untuk penyelesaian hutang dengan memperhatikan rekening hutang khusus atau rekening hutang khusus yang dibatalkan, sebagaimana juga mengenai setiap tidak terpenuhinya dengan persyaratan penyelesaian yang telah disetujui,

mendesak Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiasi-asosiasi

untuk membantu Sekretaris Jenderal dan Dewan dalam penggunaan resolusi ini

RESOLUSI 48 (Rev. Guadalajara, 2010)
Pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber daya manusia

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengakui

Konstitusi ITU Nomor 154

mengingat

- a) Resolusi 48 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai manajemen dan pengelolaan sumber-sumber daya manusia;
- b) Resolusi 47 (Rev. Minneapolis, 1998) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai isu perlindungan daya beli bagi para pensiunan dan daya saing skema kompensasi bagi staf untuk semua kategori;
- c) Resolusi 49 (Kyoto, 1994) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai kebutuhan untuk memastikan penerapan yang benar dari standar klasifikasi kerja sistem bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pos-pos manajemen senior, dengan memperhatikan tingkat pertanggungjawaban dan pendelegasian kewenangan,

memperhatikan

- a) rencana strategis untuk Perhimpunan sebagaimana dijelaskan dalam Resolusi 71 (Rev. Guadalajara, 2010) dari konferensi ini dan kebutuhan untuk tenaga kerja yang berketerampilan dan bermotivasi tinggi untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum di dalamnya;
- b) berbagai kebijakan¹ yang berdampak pada staf ITU termasuk, antara lain, Standar Perilaku untuk Layanan Sipil Internasional sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Layanan Sipil Internasional (ICSC), Peraturan Staf dan Aturan Staf ITU serta kebijakan-kebijakan etika ITU;
- c) Keputusan 517, sebagaimana diterima oleh Dewan ITU pada sesinya tahun 2004, mengenai memperkuat dialog antara Sekretaris Jenderal dan Dewan Staf ITU;
- d) Resolusi 1253, sebagaimana yang diterima oleh Dewan pada sesinya tahun 2006, menetapkan Kelompok Tripartit mengenai Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan berbagai laporan kelompok kepada Dewan berkenaan capaian-capaiannya, seperti penjabaran rencana strategis, penyusunan kebijakan etika, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- e) rencana strategis sumber-sumber daya manusia yang telah diterima oleh Dewan pada sesinya tahun 2009 (Dokumen C09/56) sebagai suatu dokumen hidup,

¹ seperti kebijakan kontrak, perencanaan penggantian, pelatihan dan pengembangan sumber-sumber daya manusia, dsb.

menimbang

- a) nilai sumber-sumber daya manusia Perhimpunan bagi pemenuhan sasaran-sasarannya.
- b) bahwa strategi-strategi sumber daya manusia ITU seharusnya menekankan kelanjutan pentingnya mempertahankan tenaga kerja yang terlatih baik dan menyediakan lebih banyak pelatihan yang ditargetkan untuk melayani anggota-anggota staf, dengan mengakui keterbatasan anggaran keuangan,
- c) nilai, baik untuk Perhimpunan maupun untuk staf, dari pengembangan sumber-sumber daya tersebut sampai seluas mungkin melalui berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia, termasuk kegiatan pelatihan dalam jabatan dan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan tingkatan kepegawaian;
- d) dampak terhadap Perhimpunan dan stafnya mengenai perubahan kegiatan yang berkesinambungan dalam bidang telekomunikasi dan kebutuhan untuk Perhimpunan dan sumber daya manusianya untuk menyesuaikan terhadap perubahan ini melalui pelatihan dan pengembangan staf;
- e) pentingnya pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung orientasi dan sasaran strategis ITU,
- f) kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan penerimaan pegawai yang sesuai dengan persyaratan Perhimpunan, termasuk penempatan kembali pos-pos dan penerimaan tenaga spesialis pada awal kariernya,
- g) kebutuhan untuk terus memperbaiki pendistribusian secara geografis atas staf yang ditunjuk oleh Perhimpunan;
- h) kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan tenaga kerja perempuan lebih banyak untuk kategori Profesional dan lebih tinggi, khususnya untuk tingkat-tingkat senior;
- i) kemajuan-kemajuan tetap yang telah dicapai di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi dan pengoperasian serta kebutuhan yang sesuai untuk menerima tenaga spesialis dengan standar kompetensi tertinggi;

memutuskan

- 1 bahwa pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia ITU seharusnya sesuai dengan tujuan dan kegiatan Perhimpunan dan dengan sistem bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- 2 bahwa rekomendasi ICSC yang disetujui oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya terus dilaksanakan;
- 3 bahwa, dengan dampak langsung, dalam sumber daya finansial yang tersedia, dan sampai sejauh yang dapat dipraktikkan, kekosongan jabatan seharusnya diisi melalui mobilitas yang lebih tinggi dari staf yang sudah ada;
- 4 bahwa mobilitas internal seharusnya, sepanjang dapat dipraktikkan, dapat digabungkan dengan pelatihan sehingga staf dapat diberdayakan dimana mereka paling diperlukan;

- 5 bahwa mobilitas internal seharusnya diterapkan, sepanjang memungkinkan, untuk memenuhi kebutuhan ketika staf pensiun atau meninggalkan ITU dalam rangka mengurangi struktur kepegawaian tanpa mengakhiri kontrak,
- 6 bahwa, sesuai dengan *mengakui* di atas², staf untuk kategori Profesional atau lebih tinggi wajib terus direkrut secara internasional dan pos-pos yang diidentifikasi untuk penerimaan eksternal wajib diiklankan seluas mungkin dan dikomunikasikan kepada lembaga administrasi semua Negara Anggota Perhimpunan, namun demikian, kemungkinan promosi yang layak harus terus ditawarkan bagi staf yang telah ada,
- 7 bahwa, pada saat mengisi pos-pos kosong penerimaan tenaga kerja internasional, dalam memilih antara kandidat yang memenuhi persyaratan kualifikasi untuk suatu pos, preferensi wajib diberikan bagi para calon dari regional-regional di dunia yang kurang terwakili dalam kepegawaian Perhimpunan, dengan memperhatikan keseimbangan yang diharapkan antara staf perempuan dan laki-laki,
- 8 bahwa, ketika mengisi pos-pos kosong penerimaan tenaga kerja internasional dan ketika tidak ada calon yang memenuhi semua persyaratan kualifikasi, penerimaan tenaga kerja dapat dilakukan dengan menurunkan satu tingkat di bawahnya, dengan pemahaman bahwa dikarenakan tidak semua persyaratan untuk pos terpenuhi, para calon akan harus memenuhi ketentuan tertentu sebelum diberikan tanggung jawab penuh untuk pos dimaksud dan promosi terhadap tingkatan pos,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia membantu ITU mencapai tujuan pengelolaannya;
- 2 untuk terus mempersiapkan, dengan bantuan Komite Koordinasi, dan melaksanakan rencana-rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia jangka menengah dan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan Perhimpunan, keanggotaannya dan stafnya, termasuk penetapan acuan di dalam rencana-rencana tersebut;
- 3 untuk mengkaji bagaimana kebiasaan yang terbaik dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat diterapkan dalam Perhimpunan, dan melaporkan kepada Dewan mengenai hubungan antara pengelola dan staf Perhimpunan;
- 4 untuk mengembangkan secara penuh suatu kebijakan perekrutan jangka panjang yang disusun untuk meningkatkan perwakilan wilayah dan gender di antara staf yang ditunjuk;
- 5 untuk merekrut, apabila sesuai dengan sumber finansial yang tersedia, dan memperhatikan distribusi secara wilayah dan keseimbangan antara staf perempuan dan laki-laki, para tenaga ahli yang memulai karier mereka ditingkat P.1/P.2;

² No. 154 Konstitusi: "2 pertimbangan puncak dalam perekrutan staf dan dalam menentukan konsisi-kondisi layanan adalah kebutuhan untuk mengamankan untuk Perhimpunan standar tertinggi efisiensi, kompetensi dan integritas. Perhatian akan diberikan kepada pentingnya merekrut staff pada landasan geografis yang seluas mungkin."

- 6 dengan maksud pelatihan lebih lanjut dalam rangka memperkuat kompetensi profesional dalam Perhimpunan, atas dasar konsultasi-konsultasi dengan anggota-anggota staf, sebagaimana sesuai, untuk memeriksa dan melaporkan kepada Dewan bagaimana suatu program pelatihan baik untuk para manajer maupun staf mereka dapat dilaksanakan dengan sumber finansial yang tersedia di Perhimpunan sepenuhnya;
- 7 untuk melanjutkan mengajukan kepada Dewan laporan tahunan mengenai permasalahan staf dan perekrutan secara umum, termasuk hal-hal dalam lampiran pada resolusi ini, dan mengenai kebijakan-kebijakan yang diterima menurut resolusi ini,

memerintahkan Dewan

- a) untuk memastikan, sepanjang memungkinkan dalam batas anggaran yang disetujui, tersedia staf dan sumber finansial yang diperlukan untuk penyelesaian isu-isu terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam ITU saat hal itu terjadi;
- b) untuk memeriksa laporan Sekretaris Jenderal mengenai hal ini dan memutuskan tindakan-tindakan yang akan diambil;
- c) untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk pelatihan internal sesuai dengan program yang telah disusun, mewakili, sepanjang dapat dipraktikkan, tiga persen dari anggaran yang dialokasikan untuk biaya staf;
- d) untuk mengikuti dengan perhatian yang sangat besar permasalahan perekrutan dan menerima, sumber-sumber daya yang tersedia dan konsisten dengan sistem bersama Perhimpunan Bangsa-Bangsa, kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk mengamankan jumlah yang memadai dari para calon yang memenuhi syarat untuk pos-pos Perhimpunan, khususnya dengan memperhatikan *menimbang b)* dan *c)* di atas.

LAMPIRAN RESOLUSI 48 (Rev. Guadalajara, 2010)

Hal-hal untuk pelaporan kepada Dewan mengenai isu-isu staf, termasuk staf di kantor-kantor regional dan wilayah, dan perekrutan

- Perwakilan berdasarkan wilayah
- Kebijakan karier staf
- Moral staf
- Keseimbangan antara perekrutan eksternal dan internal
- Keseimbangan gender
- Kebijakan kontrak
- Pelaksanaan rencana pengembangan sumber daya manusia
- Peningkatan layanan sumber daya manusia
- Penyetaraan antara prioritas strategis serta fungsi staf dan pos-pos Perhimpunan
- Pelatihan jabatan
- Proses perekrutan dan promosi
- Program pemisahan sukarela dan pensiun dini
- Pos-pos jangka pendek
- Fleksibilitas kondisi bekerja
- Hubungan antara pengelola dan staf
- Keanekaragaman tempat kerja
- Isu-isu pelecehan
- Keselamatan kerja
- Pemenuhan kebijakan/rekomendasi sistem bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Evaluasi dan penilaian kinerja
- Perencanaan penggantian
- Orang-orang berkebutuhan khusus, termasuk layanan-layanan dan fasilitas-fasilitas untuk staf yang berkebutuhan khusus
- Penggunaan survei-survei dan kuesioner-kuesioner untuk meyakinkan pandangan-pandangan semua staf, sebagaimana diperlukan

RESOLUSI 58 (Rev. Guadalajara, 2010)
Memperkuat hubungan antara ITU dengan organisasi-organisasi telekomunikasi regional dan penyiapan regional untuk Konferensi Yang Berkuasa Penuh

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 58 (Kyoto, 1994) Konferensi Yang Berkuasa Penuh
- b) Resolusi 112 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- c) resolusi-resolusi sebagai berikut:
 - Resolusi 72 (Rev. WRC-07) Konferensi Komunikasi Radio Dunia (WRC), mengenai persiapan-persiapan dunia dan regional untuk WRC;
 - Resolusi 43 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia, mengenai persiapan-persiapan untuk WTSA;
 - Resolusi 31 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai penyiapan-penyiapan regional untuk WTDC, resolusi ini telah diterima pertama kali pada tahun 2006, oleh WTDC-06 di Doha, Qatar,

mengetahui

bahwa Pasal 43 Konstitusi ITU menyatakan bahwa: “*Anggota-anggota memiliki hak untuk menyelenggarakan konferensi-konferensi regional, untuk menyusun pengaturan-pengaturan regional dan untuk membentuk organisasi-organisasi regional, untuk maksud menyelesaikan permasalahan-permasalahan telekomunikasi yang rentan terhadap ancaman di tingkat regional...*”,

menimbang

- a) bahwa Perhimpunan dan organisasi-organisasi regional berbagi suatu keyakinan bersama bahwa bekerja sama secara erat dapat memajukan pengembangan telekomunikasi regional melalui, antara lain, sinergi organisasi;
- b) bahwa keenam organisasi¹ telekomunikasi regional utama, yaitu Telekomunitas Asia Pasifik (APT), Konferensi Eropa untuk Administrasi-Administrasi Pos dan Telekomunikasi (CEPT), Antar-Komisi Telekomunikasi Amerika (CITEL), Perhimpunan Telekomunikasi Afrika (ATU), Dewan Menteri Arab bidang Telekomunikasi dan Informasi yang diwakili oleh Sekretariat Jenderal Liga Negara-Negara Arab (LAS) dan Negara-negara Persemakmuran Regional di bidang Komunikasi (RCC), mencari kerja sama erat dengan Perhimpunan;
- c) bahwa terdapat suatu kebutuhan bagi Perhimpunan untuk memperkuat kerja sama erat dengan organisasi-organisasi telekomunikasi regional

¹ Ada sebelas organisasi telekomunikasi regional sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 43 Konstitusi. Daftar nya dapat ditemukan dalam Resolusi 925 Dewan. Kelima organisasi regional diluar keenam yang utama dapat memilih untuk turut serta dalam pertemuan-pertemuan persiapan regional dan kegiatan-kegiatan lain Perhimpunan.

tersebut, dengan adanya pentingnya peningkatan organisasi-organisasi regional yang terkait dengan isu-isu regional, dan bekerja sama dengan mereka untuk berkenaan konferensi-konferensi dan sidang-sidang dari ketiga Sektor serta konferensi-konferensi yang berkuasa penuh, melalui enam pertemuan persiapan dalam tahun sebelum konferensi tersebut;

- d) bahwa Konvensi ITU mendorong keikutsertaan organisasi-organisasi telekomunikasi regional dalam kegiatan-kegiatan Perhimpunan dan mengatur kehadirannya pada konferensi-konferensi Perhimpunan sebagai pengamat;
- e) bahwa seluruh enam organisasi telekomunikasi regional telah mengkoordinasikan persiapan-persiapan mereka untuk konferensi ini;
- f) bahwa banyak usulan bersama yang telah disampaikan dalam konferensi ini telah dikembangkan oleh administrasi yang telah ikut serta dalam kerja persiapan yang dilaksanakan oleh keenam organisasi telekomunikasi regional;
- g) bahwa konsolidasi dari pandangan-pandangan ini di tingkat regional, bersamaan dengan kesempatan untuk diskusi-diskusi antar regional sebelum konferensi-konferensi, telah memudahkan tugas untuk mencapai kesepakatan selama konferensi-konferensi tersebut;
- h) bahwa terdapat kebutuhan untuk koordinasi secara keseluruhan dari konsultasi-konsultasi antarregional dimaksud;
- i) manfaat-manfaat dari koordinasi regional telah dialami dalam persiapan WRCs dan WTDCs, dan terakhir WTSAs,

memperhatikan

- a) bahwa laporan Sekretaris Jenderal berdasarkan Resolusi 16 sebelumnya (Jenewa, 1992) Konferensi Yang Berkuasa Penuh Tambahan, apabila ada, seharusnya memfasilitasi pengevaluasian oleh Dewan ITU dari kehadiran regional Perhimpunannya sendiri;
- b) bahwa hubungan antara kantor-kantor regional ITU dan organisasi-organisasi telekomunikasi regional telah membuktikan akan memberikan manfaat yang besar;
- c) bahwa beberapa Negara-negara Anggota ITU adalah bukan anggota dari organisasi-organisasi telekomunikasi regional tersebut disebutkan dalam *menimbang b)* di atas,

memperhatikan

manfaat-manfaat efisiensi dari konferensi-konferensi yang berkuasa penuh tersebut serta konferensi-konferensi dan sidang-sidang Sektor lainnya yang akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan jumlah dan tingkat penyiapan sebelumnya oleh Negara-negara Anggota tersebut,

memutuskan

- 1 bahwa Perhimpunan seharusnya terus mengembangkan hubungan lebih kuat dengan organisasi-organisasi telekomunikasi regional, termasuk organisasi dari enam pertemuan penyiapan regional untuk konferensi-

konferensi yang berkuasa penuh ITU, sebagaimana juga konferensi-konferensi Sektor dan sidang-sidang lainnya, apabila diperlukan;

- 2 bahwa Perhimpunan, dalam memperkuat hubungannya dengan organisasi-organisasi telekomunikasi regional dan melalui persiapan-persiapan regional ITU untuk konferensi-konferensi yang berkuasa penuh, konferensi-konferensi komunikasi radio dan sidang-sidang, WTDCs dan WTSAs wajib, dengan bantuan kantor-kantor regionalnya apabila diperlukan, mencakup semua Negara Anggota tanpa pengecualian, meskipun apabila negara-negara tersebut tidak tergabung dari keenam organisasi telekomunikasi regional manapun sebagaimana tersebut dalam *menimbang b)* di atas,

memerintahkan Sekretaris Jenderal, bekerja sama dengan erat dengan Direktur-direktur dari ketiga Biro

- 1 untuk terus berkonsultasi dengan Negara-negara Anggota serta organisasi-organisasi telekomunikasi regional dan subregional dengan cara-cara melalui bantuan dapat diberikan dalam mendukung penyiapannya untuk konferensi-konferensi yang berkuasa penuh di masa mendatang;
- 2 untuk menindaklanjuti terhadap penyampaian suatu laporan mengenai hasil-hasil konsultasi kepada Dewan yang telah disebutkan sebelumnya untuk pertimbangan mereka, dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman serupa, dan untuk melapor secara rutin kepada Dewan setelahnya;
- 3 berdasarkan konsultasi dimaksud, dan memastikan bahwa semua Negara Anggota terkait dengan proses ini, untuk membantu Negara-negara Anggota serta organisasi-organisasi telekomunikasi regional dan subregional untuk mengerjakan persiapan, khususnya untuk negara-negara berkembang, di bidang-bidang seperti:
 - penyelenggaraan pertemuan-pertemuan persiapan ITU resmi (enam pertemuan dalam hal untuk Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU dan Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU Sektor Komunikasi Radio ITU memiliki lebih sedikit)
 - mengusulkan pengembangan metode-metode koordinasi untuk pertemuan-pertemuan persiapan ITU, apabila diperlukan,

memerintahkan Dewan

untuk menimbang laporan-laporan yang telah dilaporkan dan mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama ini, termasuk mengatur penyebaran temuan-temuan dalam laporan-laporan dimaksud dan kesimpulan-kesimpulan Dewan kepada negara-negara bukan anggota Dewan dan kepada organisasi-organisasi telekomunikasi regional,

mengundang Negara-negara Anggota

untuk ikut serta serta secara aktif dalam melaksanakan resolusi ini

RESOLUSI 64 (Rev. Guadalajara, 2010)
Akses non diskriminasi untuk fasilitas, layanan dan aplikasi telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi modern, termasuk penelitian terapan dan alih teknologi, berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati bersama

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) hasil-hasil fase Jenewa (2003) dan Tunis (2005) pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi, khususnya butir-butir 15, 18 dan 19 Komitmen Tunis, dan butir-butir 90 dan 107 Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi;
- b) Resolusi 64 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- c) hasil-hasil Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), khususnya Resolusi 15 (Rev. Hyderabad, 2010), mengenai riset terapan dan alih teknologi, 20 (Rev. Hyderabad, 2010), mengenai akses non diskriminasi untuk fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi terkait dari telekomunikasi/TIK modern dan 37 (Rev. Hyderabad, 2010), mengenai penjemabatan kesenjangan digital,

memperhatikan

pentingnya telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kemajuan politik, ekonomi, sosial dan budaya,

memperhatikan juga

- a) bahwa ITU memainkan peranan penting dalam peningkatan pengembangan global telekomunikasi/TIK dan aplikasi-aplikasi TIK, sesuai mandat ITU, khususnya berkenaan Garis-Garis Aksi C2, C5 dan C6 dari Agenda Tunis, sebagai tambahan dalam keikutsertaan pelaksanaan garis-garis aksi lain, khususnya Garis-Garis Aksi C7 dan C8 Agenda Tunis;
- b) bahwa, untuk tujuan ini, Perhimpunan mengoordinasikan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mengamankan pengembangan selaras dari fasilitas-fasilitas telekomunikasi/TIK, yang mengizinkan akses non diskriminasi kepada fasilitas-fasilitas tersebut dan untuk layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi modern;
- c) bahwa akses ini akan membantu menjembatani kesenjangan digital,

memperhatikan lebih lanjut

kebutuhan untuk menyusun usulan-usulan mengenai isu-isu dengan menetapkan strategi pengembangan telekomunikasi/TIK sedunia dan aplikasi-aplikasi TIK, dalam mandat ITU, dan untuk memfasilitasi mobilisasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk tujuan akhir tersebut,

memperhatikan

- a) bahwa fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK modern didirikan, terutama, berdasarkan rekomendasi dari Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) dan Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R);
- b) bahwa rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan ITU-R merupakan hasil usaha bersama dari seluruh yang mengambil bagian dalam proses standardisasi dalam ITU dan diterima berdasarkan kesepakatan oleh para anggota Perhimpunan;
- c) bahwa pembatasan akses terhadap fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK dimana pengembangan telekomunikasi nasional tergantung dan didirikan berdasarkan rekomendasi ITU-T dan ITU-R yang merupakan kendala dalam pengembangan dan kesesuaian dari telekomunikasi sedunia yang harmonis;
- d) Resolusi 15 (Rev. Hyderabad, 2010), mengenai penelitian terapan dan alih teknologi;
- e) Resolusi 20 (Rev. Hyderabad, 2010) mengenai akses non diskriminasi untuk fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi terkait dengan telekomunikasi/TIK modern;
- f) rencana strategis untuk Perhimpunan dijabarkan dalam Resolusi 71 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini,

mengakui

bahwa harmonisasi penuh jaringan telekomunikasi adalah tidak mungkin kecuali semua negara ikut serta dalam kerja Perhimpunan, tanpa terkecuali, memiliki akses non diskriminasi pada teknologi-teknologi telekomunikasi baru dan fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi terkait dengan telekomunikasi/TIK modern, termasuk penelitian terapan dan alih teknologi, pada syarat-syarat yang telah disepakati bersama, tanpa mengesampingkan peraturan-peraturan nasional dan komitmen-komitmen internasional dalam kompetensi organisasi-organisasi internasional lain,

memutuskan

- 1 untuk terus, sesuai mandat ITU, mengisi kebutuhan untuk meningkatkan akses non diskriminasi terhadap teknologi-teknologi telekomunikasi dan informasi, fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi terkait, termasuk penelitian terapan dan alih teknologi, berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, sebagaimana ditetapkan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan ITU-R;
- 2 bahwa ITU seharusnya memfasilitasi akses non diskriminasi terhadap teknologi-teknologi telekomunikasi dan informasi, fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan ITU-R;
- 3 bahwa ITU seharusnya mendorong sebesar mungkin kerja sama antara para Anggota Perhimpunan mengenai permintaan akses non diskriminasi terhadap teknologi telekomunikasi dan informasi, fasilitas-

fasilitas, dan layanan-layanan yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari ITU-T dan ITU-R dengan pandangan untuk memuaskan permintaan pengguna dibidang layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK modern,

memerintahkan Direktur-direktur dari ketiga Biro

sesuai bidang kompetensinya masing-masing, untuk melaksanakan resolusi ini dan mencapai sasaran-sasarannya,

mengundang para pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan

- 1 untuk membantu para pabrikan peralatan dan para penyedia layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK dalam memastikan bahwa fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK yang disusun berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari ITU-T dan ITU-R dapat disediakan secara umum bagi publik tanpa diskriminasi apapun, dan dalam memfasilitasi penelitian terapan dan alih teknologi;
- 2 untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan resolusi ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk mengirimkan naskah resolusi ini kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan maksud untuk memberikan perhatian pada masyarakat dunia mengenai sudut pandang ITU, sebagai suatu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai isu akses non diskriminasi terhadap teknologi-teknologi telekomunikasi dan informasi baru serta telekomunikasi/TIK modern, layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi terkait, sesuai mandat ITU, sebagai suatu faktor penting untuk kemajuan teknologi dunia, dan berdasarkan penelitian terapan dan alih teknologi antara Negara-negara Anggota, berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, sebagai suatu faktor yang dapat membantu menjembatani kesenjangan digital.

**RESOLUSI 66 (Rev. Guadalajara, 2010)
Dokumen dan publikasi Perhimpunan**

Konferensi Yang Berkuasa Penuh dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

Resolusi 66 (Rev. Minneapolis, 1998) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

menimbang

- a) No. 484 Konvensi ITU dan Resolusi 1 (Kyoto, 1994) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai pemanfaatan efektif atas sumber-sumber daya informasi;
- b) kebutuhan untuk pemasaran dan distribusi yang efisien dari dokumentasi dan publikasi Perhimpunan dalam rangka untuk mempromosikan peningkatan penggunaan rekomendasi-rekomendasi dan publikasi-publikasi ITU lainnya;
- c) perubahan penanganan elektronik dan pengiriman informasi;
- d) pembangunan yang berkelanjutan teknologi-teknologi penerbitan baru dan metode-metode pendistribusian;
- e) keinginan kerja sama dengan badan-badan yang terlibat dalam pengembangan standar-standar yang relevan ;
- f) melanjutkan pentingnya hak cipta Perhimpunan atas publikasi-publikasinya;
- g) kebutuhan untuk memperoleh pendapatan dari publikasi-publikasi;
- h) kebutuhan untuk menyediakan proses standardisasi global yang tepat waktu dan efisien;
- i) kebijakan-kebijakan penetapan harga dari badan-badan standardisasi relevan lainnya,

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa tujuan utama Perhimpunan adalah untuk memperluas manfaat-manfaat dari teknologi-teknologi telekomunikasi baru kepada semua penduduk dunia;
- b) kebutuhan untuk mempertahankan suatu kebijakan pembiayaan dan pemberian harga yang layak yang mencerminkan biaya-biaya produksi, pemasaran dan distribusi, seraya memastikan kelanjutan publikasi-publikasi, termasuk pengembangan produk-produk baru dan penggunaan saluran-saluran/metode-metode distribusi yang modern,

memutuskan

- 1 bahwa dokumen-dokumen yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan rekomendasi-rekomendasi yang tepat waktu dari Perhimpunan wajib disediakan juga dalam bentuk elektronik dan dapat di akses ke Negara Anggota manapun, Anggota Sektor dan Asosiat ;

- 2 bahwa, meskipun terdapat tujuan-tujuan akses *online* bebas, publikasi Perhimpunan, termasuk semua rekomendasi Sektor-Sektor, wajib, apabila sesuai, juga disediakan kepada Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-Asosiat, serta kepada publik dalam format elektronik dan melalui penjualan atau distribusi elektronik, dengan ketentuan yang sesuai untuk pembayaran kepada Perhimpunan untuk suatu publikasi khusus atau seperangkat publikasi yang diminta;
- 3 bahwa suatu permintaan untuk publikasi apapun dari Perhimpunan, tanpa memandang bentuknya, mewajibkan bagi siapa yang menerima atau membeli publikasi untuk menghormati hak cipta Perhimpunan sebagaimana yang diatur dalam publikasi tersebut;
- 4 bahwa publikasi yang memuat rekomendasi dari Sektor ITU yang diperoleh dari ITU, tanpa memandang bentuknya, dapat dimanfaatkan oleh entitas atau pembeli yang menerima untuk penggunaan-penggunaannya termasuk pekerjaan lebih lanjut dari Perhimpunan atau badan atau forum standar-standar yang relevan yang sedang mengembangkan standar-standar terkait, yang memberikan panduan untuk pengembangan dan pelaksanaan produk atau layanan serta sebagai pendukung untuk dokumentasi yang termasuk dalam suatu produk atau layanan;
- 5 bahwa tidak satupun dari hal di atas dimaksudkan untuk melanggar hak cipta yang dimiliki oleh Perhimpunan, sehingga setiap orang atau entitas yang ingin untuk mereproduksi atau menggandakan semua atau sebagian dari publikasi-publikasi ITU untuk dijual kembali harus memperoleh persetujuan khusus untuk maksud tersebut;
- 6 bahwa kebijakan penetapan harga dua lapis akan ditetapkan apabila Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat membayar berdasarkan pemulihan biaya, dimana yang lainnya, seperti negara bukan anggota, seharusnya membayar “harga pasar”,¹

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan resolusi ini;
- 2 untuk memastikan bahwa publikasi dalam bentuk cetakan tersedia secepat mungkin sehingga tidak merugikan Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-Asosiat yang tidak memiliki fasilitas-fasilitas elektronik untuk mengakses publikasi Perhimpunan;
- 3 untuk melaksanakan, sesuai dengan keterbatasan finansial Perhimpunan, strategi-strategi dan mekanisme-mekanisme yang memungkinkan semua Negara Anggota, Anggota Sektor dan Asosiat untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mengakses dokumen-dokumen dan publikasi-publikasi Perhimpunan dalam bentuk elektronik;
- 4 untuk memastikan bahwa harga-harga untuk semua bentuk publikasi Perhimpunan adalah wajar dalam rangka meningkatkan distribusi yang luas;

¹ Istilah “harga pasar” dijelaskan sebagai harga yang ditentukan oleh Divisi Sales dan Marketing, yang didirikan untuk memaksimalkan pendapatan dengan tidak terlalu tinggi hingga memperkecil penjualan.

- 5 untuk mengupayakan konsultasi dengan kelompok-kelompok penasehat dari ketiga Sektor ITU untuk membantu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan-kebijakan mengenai dokumen-dokumen dan publikasi-publikasi;
- 6 untuk melapor setiap tahun kepada Dewan ITU,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

untuk melaksanakan, sebagai prioritas, berkoordinasi erat dengan Direktur-Direktur Komunikasi Radio dan Biro Standardisasi Telekomunikasi, strategi-strategi dan mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan dan memfasilitasi penggunaan efisien atas dokumen-dokumen dan publikasi-publikasi yang berbasis situs oleh negara-negara berkembang, dan khususnya untuk di negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi.

RESOLUSI 68 (Rev. Guadalajara, 2010)
Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Dunia

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) nilai dari perayaan tahunan Hari Telekomunikasi Sedunia dan Hari Masyarakat Informasi Sedunia dalam mendukung orientasi strategi utama Perhimpunan;
- b) kenaikan dan evolusi yang cepat dari masyarakat informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dimana informasi dalam semua bentuknya adalah elemen penting dari kehidupan sehari-hari,

meyakini

- a) Resolusi 46 (Malaga-Torremolinos, 1973) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, menetapkan suatu Hari Telekomunikasi Dunia dirayakan setiap tahun pada 17 Mei, tanggal penandatanganan dari Konvensi Telegraf Internasional pertama yang menandai pendirian ITU;
- b) Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 60/252 pada 27 Maret 2006, yang menetapkan Hari Masyarakat Informasi Dunia akan dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Mei;
- c) Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi yang diterima oleh Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi, dimana diakui suatu kebutuhan untuk membangun kesadaran terhadap Internet yang lebih besar;
- d) pertumbuhan eksponensial yang dialami oleh Negara-Negara Anggota Perhimpunan selama lebih dari satu dekade dalam penggunaan telekomunikasi dan TIK,

memutuskan untuk mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

untuk merayakan hari tersebut secara tahunan dengan mengadakan program-program nasional yang sesuai dengan maksud untuk:

- menstimulasi refleksi dan pertukaran gagasan mengenai tema yang diterima oleh Dewan ITU;
- mendiskusikan berbagai aspek dari tema tersebut dengan semua kalangan dalam masyarakat;
- memformulasikan suatu laporan yang mencerminkan diskusi nasional mengenai isu-isu yang menggarisbawahi tema tersebut, untuk memberikan umpan balik kepada ITU dan sisa keanggotaan lainnya;
- menimbulkan kesadaran mengenai penggunaan mekanisme pencegahan untuk mencegah pertumbuhan resiko dan ancaman di dunia maya,

mengundang Dewan

untuk menerima, pada setiap Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Dunia, suatu tema spesifik yang berkaitan dengan tantangan utama di mana lingkungan telekomunikasi/TIK yang berubah yang dihadapi baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang,

mengundang Negara-negara Anggota

untuk menyediakan laporan kepada Sekretaris Jenderal laporan-laporan yang dapat dikeluarkan mengenai isu-isu utama yang didiskusikan di tingkat nasional,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk mengedarkan kepada seluruh anggota suatu gabungan dokumen yang berdasarkan laporan-laporan nasional yang disampaikan sesuai dengan resolusi ini untuk maksud mempercepat pertukaran informasi dan pandangan antar dan dengan anggota pada penyelenggara isu-isu strategis terpilih;
- 2 untuk berhubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkonsultasi dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

RESOLUSI 70 (Rev.Guadalajara, 2010)

Pengarusutamaan gender dalam ITU dan promosi persamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui teknologi informasi dan komunikasi

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) inisiatif yang diambil oleh Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) pada Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC) dalam menerima Resolusi 7 (Valletta, 1998), diteruskan kepada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998), yang memutuskan bahwa suatu gugus tugas mengenai isu-isu gender untuk dibentuk;
- b) pengesahan resolusi itu oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh dalam Resolusi 70 nya (Minneapolis, 1998), dimana konferensi tersebut memutuskan, antara lain, untuk memasukkan suatu perspektif gender dalam pelaksanaan semua program dan rencana ITU;
- c) Resolusi 44 (Istanbul, 2002) WTDC mengubah gugus tugas suatu isu-isu gender menjadi suatu kelompok kerja mengenai isu-isu gender;
- d) Resolusi 1187 yang diterima oleh Dewan ITU pada sesinya tahun 2001, mengenai perspektif gender¹ dalam pengelolaan sumber daya manusia, kebijakan dan kebiasaan ITU, dimana Dewan meminta Sekretaris Jenderal untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang sesuai, dalam batas anggaran yang telah ada, untuk membentuk suatu perspektif gender apa staf yang berdedikasi penuh waktu;
- e) Resolusi 2001/41 Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC), dimana ECOSOC memutuskan untuk membentuk, di bawah pokok agenda reguler “Koordinasi, program dan permasalahan lain”, sub-pokok reguler “Pengarusutamaan perspektif gender kepada semua kebijakan dan program dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa” dalam rangka, antara lain, memantau dan mengevaluasi pencapaian-pencapaian yang dibuat dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mempertimbangkan lebih lanjut kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk memperkuat pelaksanaan dan pemantauan pengarusutamaan gender dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- f) Resolusi 55 (Florianópolis, 2004) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia, yang mendorong pengarusutamaan gender dalam kegiatan-kegiatan Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU;
- g) Resolusi 55 (Doha, 2006) WTDC, mengesahkan suatu rencana tindakan spesifik untuk meningkatkan kesetaraan gender menuju masyarakat informasi secara menyeluruh,

¹ “Perspektif gender”. Pengarusutamaan suatu perspektif gender adalah proses penilaian penerapan untuk perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk pengaturan, kebijakan atau program diseluruh area dan pada semua tingkatan. Ini adalah suatu strategi yang menjadi perhatian dan pengalaman perempuan maupun laki-laki pada dimensi terpadu mengenai perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian sehingga para perempuan dan laki-laki dapat manfaat secara seimbang dan ketidaksetaraan bukan yang dimaksud terus menerus. Tujuan tertinggi adalah untuk mencapai kesetaraan gender. (Sumber: Laporan dari Komite Antar-Badan mengenai Perempuan dan Kesetaraan Gender, sesi ketiga, New York, 25-27 February 1998).

- h) Resolusi 64/289 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai kesatuan sistem luas, diterima pada 21 Juli 2010, menetapkan Entitas untuk Kesetaraan Gender dan Pendayagunaan Wanita dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan dikenal sebagai “Wanita PBB”, dengan mandat untuk memajukan persetaraan gender dan pendayagunaan wanita,

mengakui

- a) bahwa masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam konteks masyarakat informasi dan pengetahuan, akan mendapatkan manfaat dari ikut serta yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam pembuatan kebijakan dan pembuatan keputusan serta akses yang seimbang pada layanan komunikasi untuk perempuan maupun laki-laki;
- b) bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan alat dimana kesetaraan gender dan pendayagunaan perempuan dapat ditingkatkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perwujudan masyarakat dimana baik perempuan dan laki-laki dapat menyumbang dan ikut serta dengan sebenarnya;
- c) bahwa hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS), yaitu Pernyataan Prinsip Jenewa, Rencana Aksi Jenewa, Komitmen Tunis dan Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi, yang menggambarkan konsep masyarakat informasi dan upaya berkesinambungan seharusnya dilakukan dalam konteks menjembatani kesenjangan digital gender,
- d) bahwa ada pertumbuhan jumlah wanita dalam bidang TIK yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, termasuk dalam kementerian-kementerian terkait, otoritas regulasi nasional dan industri, yang dapat memajukan kerja ITU sedemikian hingga mendorong anak-anak perempuan untuk memilih karir dalam bidang TIK dan memelihara penggunaan TIK untuk pendayagunaan sosial dan ekonomi wanita dan anak-anak perempuan,

mengakui lebih lanjut

- a) kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan kesadaran, baik dalam ITU maupun antara Negara-negara Anggota, pentingnya penyatuan perspektif gender dalam semua program kerja ITU dan meningkatkan sejumlah tenaga perempuan profesional di ITU, khususnya pada tingkat manajemen senior, sementara pada saat yang sama bekerja untuk kesetaraan akses yang setara antara perempuan dan laki-laki terhadap pos-pos dalam kategori Layanan Umum;
- b) pengakuan yang besar diberikan terhadap hasil kerja ITU dalam gender dan TIK dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa,

menimbang

- a) kemajuan yang dibuat oleh ITU, dan khususnya Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT), dalam pengembangan dan pelaksanaan aksi-aksi dan proyek-proyek yang menggunakan TIK untuk pendayagunaan ekonomi dan sosial wanita dan anak-anak perempuan, sebagaimana juga dalam meningkatkan kesadaran dari hubungan antara permasalahan gender dan TIK dalam Perhimpunan dan antara Negara-Negara Anggota dan Anggota-Anggota Sektor;
- b) hasil-hasil yang dicapai pada Kelompok Kerja mengenai Permasalahan Gender dalam memajukan kesetaraan gender,

mencatat

- a) bahwa ada kebutuhan bagi ITU untuk melakukan investigasi, menganalisa dan mengerti lebih jauh dampak dari teknologi telekomunikasi/TIK terhadap wanita dan pria;
- b) bahwa ITU harus mengambil pimpinan dalam menyusun indikator relevan-gender untuk sektor telekomunikasi/TIK;
- c) bahwa perlu lebih banyak bekerja untuk memastikan bahwa perspektif gender termasuk dalam semua kebijakan, program kerja, kegiatan penyebaran informasi, publikasi, kelompok kerja, seminar, bengkel pelatihan dan konferensi-konferensi ITU,
- d) bahwa ada kebutuhan untuk memelihara keikutsertaan wanita dan anak-anak perempuan pada domain TIK di usia awal dan untuk memberikan masukan untuk pengembangan-pengembangan kebijakan lebih lanjut,

mendorong Negara-Negara Anggota dan Anggota-Anggota Sektor

- 1 untuk meninjau dan merevisi, sebagaimana diperlukan, kebijakan dan praktek masing-masing untuk memastikan bahwa perekrutan, pekerjaan, pelatihan dan kemajuan yang sama dari wanita dan pria dilakukan atas landasan yang adil dan sesuai
- 2 untuk memudahkan pekerjaan wanita dan pria secara seimbang dalam bidang telekomunikasi termasuk pada tingkat tanggung jawab senior dalam administrasi telekomunikasi, pemerintah dan badan pengatur serta organisasi antar pemerintah dan dalam sektor swasta;
- 3 untuk meninjau kebijakan-kebijakan mereka yang berhubungan dengan masyarakat informasi untuk memastikan pemasukan perspektif gender dalam semua kegiatan,
- 4 untuk memajukan dan meningkatkan minat dari, dan kesempatan untuk, wanita dan anak-anak perempuan dalam karier-karier TIK selama pendidikan dasar, menengah dan tinggi,

memutuskan

- 1 untuk mengesahkan Resolusi 55 (Doha, 2006) mengenai memajukan kesetaraan gender untuk masyarakat informasi seluruhnya;
- 2 untuk melanjutkan pekerjaan yang dilakukan di ITU, dan khususnya dalam BDT, untuk memajukan kesetaraan gender dalam TIK dengan merekomendasikan kebijakan-kebijakan pada tingkat internasional, regional dan nasional mengenai kebijakan dan program yang meningkatkan kondisi sosial-ekonomi untuk wanita, khususnya di negara-negara berkembang;
- 3 untuk memberikan prioritas tinggi kepada penyatuan kebijakan gender dalam manajemen, susunan kepegawaian dan operasi ITU;
- 4 untuk menyatukan perspektif gender dalam pelaksanaan rencana strategis dan rencana finansial ITU untuk 2012-2015 sebagaimana juga dalam rencana-rencana operasional Biro dan Sekretariat Jenderal,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk melanjutkan dan memperluas inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan selama empat tahun terakhir dan untuk mempercepat proses pengarusutamaan gender dalam ITU sebagai suatu keseluruhan, di dalam sumber-sumber anggaran yang ada, untuk memastikan pembangunan kapasitas dan promosi wanita untuk posisi-posisi tingkat senior
- 2 untuk mempertimbangkan menerima tema “Perempuan dan anak perempuan dalam TIK” untuk menandai Hari Masyarakat Informasi dan Telekomunikasi Dunia pada 2012.

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk melanjutkan untuk memastikan bahwa perspektif gender disatukan dalam program-program kerja, pendekatan manajemen dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia ITU, dan untuk mengajukan suatu laporan tertulis tahunan kepada Dewan mengenai kemajuan yang dibuat pada pengarusutamaan gender dalam ITU, termasuk statistik mengenai gender pada tingkat staff ITU dan partisipasi wanita dan pria dalam konferensi dan pertemuan ITU;
- 2 untuk memastikan inklusi perspektif gender dalam semua kontribusi ITU kepada pelaksanaan garis aksi WSIS
- 3 untuk memberikan perhatian khusus kepada keseimbangan gender untuk pos-pos pada tingkat profesional dan khususnya yang lebih tinggi dalam ITU dan, pada saat memilih antara kandidat yang memiliki kualifikasi seimbang untuk suatu pos, dengan memperhatikan distribusi geografis (No. 154 Konstitusi ITU) dan keseimbangan antara staf wanita dan pria, untuk memberi prioritas yang sesuai kepada keseimbangan gender;
- 4 untuk melapor kepada konferensi yang berkuasa penuh mendatang mengenai hasil-hasil dan kemajuan yang dibuat pada inklusi suatu perspektif gender dalam kerja ITU, dan mengenai pelaksanaan resolusi ini;

- 5 untuk membuat upaya-upaya untuk memobilisasi kontribusi sukarela dari Negara-Negara Anggota, Anggota-Anggota Sektor dan lainnya untuk tujuan ini;
- 6 untuk mendorong administrasi untuk memberi kesempatan yang sama kepada kandidatur pria dan wanita untuk pos-pos resmi terpilih dan untuk keanggotaan Badan Regulasi Radio;
- 7 untuk mendorong peluncuran “Jaringan Global wanita pembuat keputusan TIK”,
- 8 untuk mengumumkan seruan aksi selama setahun, dengan berfokus pada tema “Wanita dan anak-anak perempuan dalam TIK”,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk mengarahkan perhatian agen-agen Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya terhadap kebutuhan untuk memajukan dan meningkatkan minat dari, dan kesempatan untuk, wanita dan anak-anak perempuan dalam karier-karier TIK selama pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk dengan menetapkan hari “Perempuan dalam TIK” internasional, untuk diadakan setiap tahun pada hari Kamis ke empat bulan April, ketika perusahaan-perusahaan TIK, perusahaan-perusahaan lain dalam departemen TIK, institusi-institusi pelatihan TIK, universitas-universitas, pusat-pusat riset dan semua institusi yang berhubungan dengan TIK diundang untuk mengadakan hari terbuka untuk anak-anak perempuan;
- 2 untuk melanjutkan kerja BDT dalam memajukan penggunaan TIK untuk pendayagunaan ekonomi dan sosial wanita dan anak-anak perempuan,

mengundang Negara-Negara Anggota dan Anggota-Anggota Sektor

- 1 untuk membuat kontribusi sukarela kepada ITU untuk memudahkan pelaksanaan resolusi ini dengan segala kekuasaan yang mungkin;
- 2 untuk menetapkan dan mengamati setiap tahun hari “Perempuan dalam TIK” internasional, untuk diadakan pada hari Kamis ke empat bulan April, ketika perusahaan-perusahaan TIK, perusahaan-perusahaan lain dalam departemen TIK, institusi-institusi pelatihan TIK, universitas-universitas, pusat-pusat riset dan semua institusi yang berhubungan dengan TIK diundang untuk mengadakan hari terbuka untuk anak-anak perempuan;
- 3 untuk secara aktif mendukung dan ikut serta dalam kerja BDT dalam memajukan penggunaan TIK untuk pendayagunaan ekonomi dan sosial wanita dan anak-anak perempuan;
- 4 untuk secara aktif mendukung dan ikut serta dalam kerja “Jaringan Global wanita pembuat keputusan TIK” ditujukan untuk memajukan kerja ITU dalam menggunakan TIK untuk pendayagunaan sosial dan ekonomi wanita dan anak-anak perempuan, termasuk dengan membangun kemitraan dan membangun sinergi-sinergi antara jaringan-jaringan yang ada pada tingkat-tingkat nasional, regional dan internasional, sebagaimana juga dengan memelihara strategi-strategi sukses untuk memperbaiki keseimbangan gender pada posisi-posisi

tingkat senior dalam administrasi-administrasi telekomunikasi/TIK, pemerintah, badan-badan regulasi dan organisasi-organisasi inter pemerintah, termasuk ITU, dan pada sektor swasta;

- 5 untuk menggarisbawahi perspektif gender dalam Pertanyaan-Pertanyaan di bawah studi dalam kelompok studi ITU-D dan kelima program dari Rencana Aksi Hyderabad.

RESOLUSI 71 (Rev. Guadalajara, 2010)
Rencana Strategis Perhimpunan untuk 2012-2015

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) ketentuan-ketentuan Konstitusi ITU dan Konvensi ITU yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana strategis:
- b) Pasal 19 Konvensi mengenai keikutsertaan Anggota-anggota Sektor dalam kegiatan-kegiatan Perhimpunan,

memperhatikan

tantangan-tantangan yang dihadapi Perhimpunan dalam mencapai tujuan-tujuannya dalam lingkungan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terus berubah,

mengakui

bahwa sasaran-sasaran/tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan terkait yang berasal dari rencana strategis Perhimpunan untuk 2008-2011 masih relevan untuk periode 2012-2015,

memutuskan

- 1 untuk menerima rencana strategis untuk 2012-2015, dimuat dalam lampiran resolusi ini;
- 2 untuk melengkapi rencana strategis ini dengan tujuan-tujuan dan keluaran-keluaran Sektor dan yang berasal dari Sekretariat Jenderal dari rencana untuk 2008-2011,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 apabila memberi laporan tahunan kepada Dewan ITU, untuk memaparkan laporan kemajuan mengenai rencana strategis untuk 2012-2015 dan mengenai kinerja Perhimpunan terhadap pencapaian-pencapaian dari tujuan-tujuannya, termasuk rekomendasi-rekomendasi untuk menyesuaikan rencana sesuai dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan telekomunikasi/TIK dan/atau sebagai hasil dari evaluasi kinerja, khususnya dalam:
 - 1.1 memperbaharui bagian-bagian rencana strategis yang berhubungan dengan evaluasi kemajuan terhadap tujuan-tujuan Sektor dan Sekretariat Jenderal; pembaharuan ini dapat mencakup modifikasi-modifikasi yang dimungkinkan pada hasil-hasil yang diharapkan dan indikator-indikator kinerja penentu pada Tabel-tabel 4.2, 5.2, 6.2 dan 7.2, dalam lampiran resolusi ini;
 - 1.2 membuat semua modifikasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa rencana strategis memudahkan pencapaian misi ITU, dengan memperhatikan usulan-usulan oleh kelompok-kelompok penasihat Sektor yang berkompeten, keputusan-keputusan oleh

konferensi-konferensi dan oleh sidang-sidang dari Sektor-Sektor serta perubahan-perubahan pada kegiatan-kegiatan Perhimpunan dan keadaan keuangannya;

- 1.3 memastikan pertautan antara rencana-rencana strategis, keuangan dan operasional di ITU, dan mengembangkan rencana sumber-sumber daya manusia yang sesuai;
- 2 untuk mendistribusikan laporan-laporan ini kepada semua Negara Anggota, setelah pertimbangan oleh Dewan, mendesak mereka untuk mengedarkannya kepada Anggota-anggota Sektor, sebagaimana juga kepada entitas-entitas dan organisasi-organisasi yang disebutkan dalam No. 235 Konvensi yang telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ini,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk mengawasi perkembangan lebih lanjut dan pelaksanaan rencana strategis untuk 2012-2015 dalam lampiran resolusi ini, berdasarkan pada laporan tahunan Sekretaris Jenderal;
- 2 untuk mengajukan suatu taksiran hasil-hasil rencana strategis untuk 2012-2015 kepada konferensi yang berkuasa penuh berikut, bersamaan dengan rencana strategis yang diusulkan untuk periode 2016-2019,

mengundang Negara-negara Anggota

untuk mengontribusikan pandangan nasional dan regional mengenai kebijakan, permasalahan regulasi dan operasional terhadap proses perencanaan strategis yang dijalankan oleh Perhimpunan dalam periode sebelum konferensi yang berkuasa penuh berikutnya, dalam rangka untuk:

- memperkuat keefektifan Perhimpunan dalam memenuhi tujuannya sebagaimana dijabarkan dalam instrumen-instrumen Perhimpunan dengan bekerja sama dalam pelaksanaan rencana strategis;
- membantu Perhimpunan dalam memenuhi pengharapan yang berubah dari semua pemilihnya sebagai struktur nasional untuk penyediaan layanan telekomunikasi/TIK yang terus berubah,

mengundang Anggota-anggota Sektor

untuk mengomunikasikan pandangan mereka mengenai rencana strategis Perhimpunan melalui Sektor-sektor yang relevan dan kelompok-kelompok penasihat yang bersangkutan.

Lampiran: Rencana strategis Perhimpunan untuk 2012-2015

**LAMPIRAN RESOLUSI 71 (Rev. Guadalajara, 2010)
Rencana Strategis Perhimpunan untuk 2012-2015**

1 Pengenalan

- 1.1 Sekarang, lebih dari sebelumnya, industri telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sedang mengalami transformasi yang sangat besar dengan konsekuensi-konsekuensi yang luas jangkauannya. Pengembangan TIK yang baru dan yang baru muncul, penyebaran jaringan-jaringan generasi mendatang (NGNs) yang berbasis Protokol Internet (IP), konvergensi peralatan dan jaringan, berkembangnya jaringan-jaringan sosial dan kebutuhan-kebutuhan yang berubah dari para pelanggan berarti bahwa TIK sekarang berintegrasi secara penuh terhadap kehidupan modern.
- 1.2 Para operator telekomunikasi, penyedia layanan, pembuat kebijakan, pelanggan, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya semua menanggapi dan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan lain-lainnya yang didorong oleh percepatan perubahan teknologi dan konvergensi dalam cakrawala komunikasi yang bertransformasi.
- 1.3 Di antara perkembangan-perkembangan teknologi, kebijakan-kebijakan nasional dan internasional, dan beragam kepentingan dari para pemangku kepentingan yang berlainan, pandangan ITU adalah untuk berusaha keras melindungi hak fundamental setiap orang untuk berkomunikasi dengan menghubungkan dunia. Di saat transformasi sangat cepat dari industri, Perhimpunan membutuhkan rencana strategis yang kuat dan efektif untuk membantunya memberikan tanggapan secara lebih tepat pada kebutuhan-kebutuhan yang berubah-ubah anggota-anggotanya dan untuk membuktikan relevansi yang berlangsung di dunia yang serba-IP.

2 Lingkungan telekomunikasi/TIK yang berubah dan dampaknya terhadap Perhimpunan

- 2.1 Sejak konferensi yang berkuasa penuh Perhimpunan yang terakhir, banyak perkembangan penentu telah terjadi pada lingkungan telekomunikasi dan TIK yang lebih luas yang memiliki dampak signifikan untuk ITU sebagai keseluruhan. Perkembangan-perkembangan ini meliputi (tidak ditulis berdasarkan urutan tertentu):
 - 2.1.1 timbulnya teknologi-teknologi penentu, yang memungkinkan layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi baru serta memajukan pembangunan masyarakat informasi;
 - 2.1.2 pertumbuhan yang berkelanjutan, meskipun tidak merata di semua negara, dari Internet dan landasan berdasarkan IP lain serta layanan-layanan terkait, dan pengembangan jaringan tulang-punggung yang berdasarkan IP di tingkat internasional, regional dan nasional;
 - 2.1.3 konvergensi landasan-landasan teknologi untuk telekomunikasi, pengiriman informasi, penyiaran dan

penghitungan dan pengembangan prasarana jaringan terpadu umum untuk berbagai layanan dan aplikasi komunikasi ;

- 2.1.4 perkembangan cepat yang berkelanjutan dari komunikasi-komunikasi radio nirkabel dan bergerak, dan konvergensinya baik dengan layanan- layanan telefoni tetap maupun penyiaran;
- 2.1.5 pertumbuhan yang cepat mengenai permintaan layanan-layanan TIK, yang disebabkan oleh perkembangan dan permintaan untuk peralatan dan lebar pita yang baru, yang menghendaki untuk menguatkan dan memajukan kolaborasi regional dan seluruh dunia menuju ekonomi pita lebar, yang seharusnya ditandai dengan rezim kebijakan dan peraturan yang sesuai;
- 2.1.6 dampak-dampak pertumbuhan dari perubahan iklim, yang menimbulkan resiko-resiko berat terhadap kelanjutan sumber-sumber daya global dan pertahanan hidup penduduk dunia, khususnya masyarakat-masyarakat di lingkungan-lingkungan yang rentan dan ekosistem-ekosistem yang paling beresiko;
- 2.1.7 kebutuhan untuk standar internasional yang berkualitas tinggi, berdasarkan permintaan, yang seharusnya dikembangkan secara cepat, sejajar dengan prinsip-prinsip konektivitas global, keterbukaan, kemampuan, dapat diandalkan, dapat kemampuan saling beroperasi dan keamanan;
- 2.1.8 peran TIK sebagai alat efektif untuk memajukan perdamaian dan pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan demokrasi, kerekatan sosial, pemerintahan yang baik dan peraturan hukum pada tingkat-tingkat nasional, regional dan internasional (sebagaimana diakui oleh naskah-naskah hasil Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS));
- 2.1.9 kebutuhan untuk adanya kepercayaan dari para pemangku kepentingan untuk mengizinkan pelaksanaan prasarana telekomunikasi/TIK yang sukses: para pengguna akhir, pemasok, penanam modal, dan pemerintah perlu memiliki kepercayaan bahwa telekomunikasi/TIK yang digunakan dalam interaksi bisnis dan sosial mereka sehari-hari serta untuk peningkaan mata pencaharian yang dapat diandalkan dan aman;
- 2.1.10 kebutuhan untuk prasarana telekomunikasi/TIK dalam ekonomi pita lebar agar “lebih hijau” dan lebih ramah lingkungan;
- 2.1.11 Kecenderungan yang berkelanjutan terhadap pemisahan fungsi-fungsi operasional dan regulasi, dan pembentukan badan-badan regulasi telekomunikasi independen, sebagaimana juga pertumbuhan peran organisasi-organisasi regional, untuk memastikan konsistensi dan

dapat diperkirakan kerangka-kerangka kerja peraturan, dan mendorong kepercayaan dalam penanaman modal;

- 2.1.12 pembebasan pasar yang berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang¹, termasuk pembukaan pasar-pasar untuk persaingan, melalui lisensi pendatang-pendatang pasar baru dan keikutsertaan sektor swasta yang lebih besar, termasuk kemitraan-kemitraan swasta-publik;
 - 2.1.13 kecenderungan pada sejumlah Negara Anggota untuk mengatur telekomunikasi/TIK dengan mengurangi ketergantungan pada regulasi sektoral dalam pasar-pasar kompetitif, menimbulkan tantangan-tantangan yang berbeda bagi pembuat-pembuat kebijakan dan peraturan;
 - 2.1.14 kebutuhan untuk penggunaan telekomunikasi/TIK yang efektif serta teknologi-teknologi modern selama keadaan-keadaan darurat kritis, sebagai bagian sangat penting dari prediksi, pendeteksian, peringatan dini, mitigasi, pengelolaan dan strategi-strategi pemulihan dari bencana;
 - 2.1.15 tantangan-tantangan yang sedang berlangsung yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk negara-negara berkembang, sesuai dengan penemuan teknologi yang cepat dan meningkatkan keterpaduan;
- 2.2 tantangan-tantangan berkelanjutan yang dihadapi ITU adalah untuk tetap menjadi organisasi antarpemerintah yang unggul apabila Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat bekerja bersama untuk memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi yang terus-menerus, dan untuk memudahkan akses universal sehingga orang dimanapun dapat ikut serta dalam, dan mendapatkan manfaat dari, timbulnya masyarakat informasi. Dalam konteks ini, Perhimpunan seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
- 2.2.1 kebutuhan untuk mendorong perwakilan-perwakilan dari para pemangku kepentingan baru untuk mengambil keuntungan dari keikutsertaan dalam kerja Perhimpunan, sebagaimana sesuai, khususnya karena hal tersebut terkait dengan timbulnya masyarakat informasi;
 - 2.2.2 kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap mandat Perhimpunan, peran dan kegiatan-kegiatan, sebagaimana juga memberikan akses lebih luas bagi kegiatan-kegiatan dan sumber-sumber daya Perhimpunan bagi publik pada umumnya dan pelaku-pelaku lain yang terlibat dengan timbulnya masyarakat informasi.
 - 2.2.3 kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya finansial dan manusia yang langka tersedia

¹ Ini termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi.

untuk kegiatan-kegiatan Perhimpunan, dan membuat setiap upaya untuk meningkatkan sumber-sumber daya ini yang dibutuhkan agar ITU untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan tantangannya untuk manfaat keanggotaannya, khususnya negara-negara berkembang.

- 2.2.4 tekanan yang meningkat terhadap Perhimpunan untuk memberikan tanggapan secara kreatif terhadap tantangan-tantangan internal dengan meningkatkan keeratan dalam perencanaan dan penggunaan sumber-sumber daya, memperbesar kesempatan-kesempatan untuk kerja sama-kerja sama konstruktif, dan menarik dukungan internasional yang meningkat dengan memperkuat kapasitas sumber-sumber daya manusia dan landasan pemasukan, kapasitas lembaga dan kemampuan untuk mengatur dan membagi informasi, sebagaimana juga memenuhi persyaratan untuk transparansi dan akuntabilitas;
 - 2.2.5 dengan kesadaran yang lebih besar terhadap pemerintahan yang baik antara Negara-negara Anggota dan publik pada umumnya, ITU, seperti juga dengan badan-badan internasional lainnya, sedang menghadapi tantangan-tantangan penting untuk menjadi organisasi yang berlandaskan hasil dan bertanggung jawab, dan harus terus bekerja menuju pendirian mekanisme-mekanisme yang sesuai untuk memantau dan mengevaluasi fungsi-fungsi.
- 2.3 kebutuhan untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK untuk perkembangan dan pertumbuhan masyarakat informasi yang akan mengharuskan membangun pada kerja dan kerja sama keamanan dunia maya yang ada yang terkait dengan pembangunan kepercayaan dan keamanan untuk penggunaan telekomunikasi/TIK, yang memerlukan kolaborasi internasional untuk memenuhi tugas ini.

3 Orientasi dan sasaran yang strategis

- 3.1 Misi utama ITU – sebagai organisasi antarpemerintah yang unggul dimana Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat bekerja bersama-sama untuk memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi yang berkelanjutan, dan untuk memfasilitasi akses universal sehingga orang dimanapun dapat ikut serta dalam, dan mendapatkan manfaat dari, timbulnya masyarakat informasi. ITU dapat mencapai misi keseluruhan ini dengan memenuhi sasaran-sasaran sebagai berikut:

3.1.1 Sasaran strategis Sektor Komunikasi Radio (ITU-R)

Sasaran strategis Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) adalah tiga lipatan, dan mencakup:

- untuk memastikan operasi bebas gangguan dari sistem-sistem komunikasi radio dengan menjalankan Regulasi-

regulasi Radio dan persetujuan-persetujuan regional, sebagaimana dengan memperbaharui instrumen-instrumen ini dengan cara yang efisien dan tepat waktu melalui proses-proses konferensi-konferensi komunikasi radio dunia dan regional

- untuk membuat Rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan untuk memastikan kinerja dan kualitas yang diperlukan dalam menjalankan sistem-sistem komunikasi radio
- untuk mencari jalan dan cara untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sumber-sumber orbit satelit yang rasional, adil, efisien dan ekonomis serta untuk memajukan fleksibilitas untuk perluasan di kemudian hari dan pengembangan-pengembangan teknologi baru.

3.1.2 Sasaran strategis Sektor Standardisasi Telekomunikasi (ITU-T)

Sasaran strategis Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) adalah tiga lipatan, dan mencakup:

- Untuk mengembangkan standar-standar internasional yang dapat saling beroperasi, dan tanpa diskriminasi (Rekomendasi-rekomendasi ITU-T)
- Untuk membantu dalam menjembatani kesenjangan standardisasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang
- Untuk memperluas dan memfasilitasi kerja sama internasional antara badan-badan standardisasi internasional dan regional.

3.1.3 Sasaran strategis Sektor Pengembangan Telekomunikasi (ITU-D)

Sasaran strategis Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) adalah tiga lipatan, dan mencakup:

- Untuk memajukan ketersediaan prasarana dan memelihara lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan prasarana telekomunikasi/TIK dan penggunaannya dengan cara yang aman dan terjamin
- Untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam menjembatani kesenjangan digital dengan mencapai pengembangan telekomunikasi/sosial ekonomi yang memungkinkan penggunaan-TIK yang lebih luas
- Untuk memperluas manfaat-manfaat masyarakat informasi kepada keanggotaan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan publik dan swasta, dan untuk memajukan integrasi penggunaan telekomunikasi/TIK dalam ekonomi dan masyarakat yang lebih luas sebagai pendorong pengembangan, inovasi, kesejahteraan, pertumbuhan dan produktivitas secara global.

3.1.4 Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal (GS)

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal ITU (GS) adalah untuk mencapai keefektifan dan efisiensi dalam perencanaan, pengelolaan, koordinasi dan penyampaian layanan-layanan untuk mendukung Perhimpunan¹ dan keanggotaannya, memastikan pelaksanaan rencana-rencana finansial dan strategis Perhimpunan serta mengoordinasi kegiatan-kegiatan antarsektor sebagaimana diidentifikasi dalam naskah-naskah dasar ITU.

BAGIAN 1 – Tujuan dan keluaran sektoral

4 Sektor Komunikasi Radio (ITU-R)

4.1 Analisa situasi

- 4.1.1 Untuk membangun dasar yang kuat untuk melandasi strategi-strategi Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) untuk tahun-tahun mendatang, suatu analisa terhadap ITU-R dan lingkungannya, baik sekarang maupun di masa datang, yang merupakan kepentingan utama. Suatu analisa demikian memerlukan pandangan jelas terhadap faktor-faktor yang berpengaruh, internal maupun eksternal ITU, yang akan mengizinkan ITU-R untuk mengambil manfaat dari kesempatan-kesempatan yang timbul, untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- 4.1.2 Tantangan paling besar untuk ITU-R adalah untuk tetap mengikuti perubahan-perubahan yang cepat dan kompleks yang terjadi dalam dunia komunikasi radio internasional, disertai dengan tanggapan yang tepat waktu terhadap kebutuhan-kebutuhan industri komunikasi radio dan penyiaran khususnya dan terhadap keanggotaan secara keseluruhan. Dalam lingkungan yang sedang mengalami perubahan terus-menerus dan dengan permintaan-permintaan yang makin besar dari anggota-anggotanya untuk produk-produk dan layanan-layanan, Sektor-sektor seharusnya memastikan bahwa mereka tetap dapat menyesuaikan dan tanggap sedapat mungkin untuk memenuhi tantangan-tantangan ini.
- 4.1.3 Sesuai Pasal 1 Konstitusi ITU, ITU-R memiliki komitmen untuk membangun lingkungan yang memungkinkan melalui pengelolaan sumber-sumber daya spektrum frekuensi radio internasional dan orbit satelit. Oleh karena pengelolaan global dari sumber-sumber daya frekuensi dan orbit memerlukan kerja sama internasional tingkat tinggi, salah satu dari tugas utama kita di ITU-R adalah untuk memfasilitasi perundingan-perundingan antar pemerintah yang kompleks yang diperlukan untuk mengembangkan persetujuan-persetujuan yang mengikat secara hukum antara negara-negara yang berkedaulatan.

Persetujuan-persetujuan ini dimuat dalam Regulasi-regulasi Radio dan dalam rencana-rencana dunia dan regional yang diterima untuk layanan-layanan angkasa dan terestrial (bumi) yang berbeda.

- 4.1.4 Bidang komunikasi radio menanggapi layanan-layanan terestrial (bumi) dan angkasa yang kritis dan semakin penting untuk perkembangan ekonomi global di abad kedua puluh satu. Dunia sedang menyaksikan peningkatan fenomenal pada penggunaan sistem-sistem nirkabel dalam aplikasi yang banyak sekali. Standar-standar komunikasi radio internasional (seperti yang dimuat dalam Rekomendasi-rekomendasi ITU-R) mendukung keseluruhan kerangka kerja komunikasi global – dan akan terus menjadi landasan untuk seluruh rangkaian aplikasi-aplikasi nirkabel baru.
- 4.1.5 Cakupan komunikasi radio juga mencakup sistem-sistem telemetri dan telekomando aeronautik, layanan-layanan satelit, komunikasi bergerak, sinyal-sinyal keadaan berbahaya dan keamanan untuk maritim, penyiaran digital, satelit-satelit untuk meteorologi, serta prediksi dan deteksi untuk bencana-bencana alam.
- 4.1.6 Sesuai dengan Regulasi-regulasi Radio, pencatatan dari notifikasi - notifikasi angkasa dan terestrial (bumi) beserta publikasi-publikasi yang berhubungan adalah sangat penting bagi misi ITU-R.
- 4.1.7 Kebutuhan untuk pengembangan berkesinambungan dari sistem-sistem komunikasi radio yang digunakan dalam mitigasi bencana dan operasi pemulihan telah meningkat dan akan menjadi tantangan penentu di masa depan. Telekomunikasi adalah kritis pada semua fase pengelolaan bencana. Aspek-aspek layanan-layanan komunikasi radio darurat yang berhubungan dengan bencana termasuk, antara lain, prediksi, pendeteksian, peringatan dan pemulihan dari bencana.
- 4.1.8 Dalam bidang perubahan iklim, kerja ITU-R berfokus pada penggunaan TIK (teknologi dan perlengkapan radio dan telekomunikasi yang berbeda) untuk memantau cuaca dan perubahan iklim serta untuk prediksi, pendeteksian dan mitigasi dari topan, taifun, badai, gempa bumi, tsunami, bencana akibat perbuatan manusia, dsb.
- 4.1.9 Para pemangku kepentingan kami, seperti badan-badan pemerintah, operator-operator telekomunikasi publik dan privat, pabrik-pabrik, badan-badan ilmu pengetahuan atau industri, konsultan-konsultan, universitas-universitas, lembaga-lembaga teknis, dsb., melalui proses-proses yang terhubung dengan konferensi-konferensi komunikasi radio dan kelompok-kelompok studi, akan terus perlu untuk membuat keputusan-keputusan terhadap cara-cara yang paling menguntungkan dan efisien untuk mengeksploitasi sumber-sumber terbatas dari spektrum frekuensi radio dan

orbit-orbit satelit, yang akan menjadi kritis dan memiliki nilai ekonomi yang meningkat untuk perkembangan ekonomi global pada abad kedua puluh satu.

4.2 Visi

Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) akan tetap menjadi konvergensi yang unik dan universal serta pusat pengaturan untuk semua masalah komunikasi radio di seluruh dunia.

4.3 Misi

Misi Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R), antara lain, untuk memastikan penggunaan spektrum frekuensi yang rasional, seimbang, efisien dan ekonomis oleh semua layanan komunikasi radio, termasuk yang menggunakan orbit-orbit satelit, dan untuk menjalankan studi dan menerima Rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah-masalah komunikasi radio.

4.4 Sasaran strategis

Sasaran strategis Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) adalah tiga lipatan, dan mencakup:

- Untuk memastikan operasi-operasi dari sistem-sistem komunikasi radio yang bebas gangguan dengan menjalankan Regulasi-regulasi Radio dan persetujuan-persetujuan regional, sebagaimana juga memperbaharui instrumen-instrumen ini dengan cara yang efisien dan tepat waktu melalui proses-proses konferensi komunikasi radio dunia dan regional
- Untuk membuat Rekomendasi-rekomendasi yang dimaksudkan untuk memastikan kinerja dan kualitas yang diperlukan dalam mengoperasikan sistem-sistem komunikasi radio
- Untuk mencari jalan dan cara untuk memastikan penggunaan yang rasional, seimbang, efisien dan ekonomis dari spektrum frekuensi radio dan sumber-sumber orbit satelit serta untuk memajukan fleksibilitas untuk ekspansi dan perkembangan-perkembangan teknologi di masa depan.

4.5 Tujuan

Tujuan-tujuan Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) adalah:

4.5.1 Tujuan 1 – Mengoordinasi:

Untuk memajukan, mendorong dan memastikan kerja sama dan koordinasi antara semua Negara Anggota dalam pembuatan keputusan mengenai isu-isu komunikasi radio, dengan peran serta Anggota-anggota Sektor dan Asosiasi-asosiasi, yang sesuai.

4.5.2 Tujuan 2 – Memroses:

Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keanggotaan untuk spektrum, akses orbit dan operasi-

operasi dalam aplikasi Konstitusi, Konvensi dan Regulasi-regulasi Radio, mengingat, antara lain, konvergensi percepatan layanan-layanan komunikasi radio.

4.5.3 Tujuan 3 – Memproduksi:

Untuk menghasilkan Rekomendasi-rekomendasi mengenai layanan-layanan komunikasi radio demi mendapatkan konektivitas dan kemampuan saling beroperasi dalam menerapkan telekomunikasi/TIK modern, sebagaimana juga untuk memberikan penggunaan spektrum dan sumber-sumber orbit yang paling efisien.

4.5.4 Tujuan 4 – Memberitahu:

Untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan keanggotaan dengan menyebarkan informasi dan keterampilan mengenai isu-isu komunikasi radio, dengan mempublikasikan dan mendistribusikan bahan-bahan yang relevan (misal publikasi-publikasi, laporan-laporan dan buku-buku panduan mengenai layanan), dengan koordinasi dan kolaborasi, sebagaimana sesuai, dengan Biro-biro lain dan Sekretariat Jenderal.

4.5.5 Tujuan 5 – Membantu:

Untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada keanggotaan, terutama kepada negara-negara berkembang, dalam kaitan dengan permasalahan komunikasi radio, prasarana dan aplikasi-aplikasi jaringan informasi dan komunikasi, dan khususnya dengan memerhatikan a) menjembatani kesenjangan digital; b) memperoleh akses yang layak bagi spektrum frekuensi radio dan bagi orbit satelit; dan c) menyediakan pelatihan dan menghasilkan bahan pelatihan yang relevan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 4.1 – Keluaran dan Tujuan ITU-R

Keluaran	Tujuan 1	Tujuan 2	Tujuan 3	Tujuan 4	Tujuan 5
Konferensi Komunikasi Radio Dunia	X				
Konferensi-konferensi Komunikasi Radio Regional	X				
Sidang Komunikasi Radio	X				
Kelompok Penasehat Komunikasi Radio	X				
Badan Regulasi Radio	X				
Pemrosesan pemberitahuan angkasa dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait		X			
Pemrosesan pemberitahuan terestrial dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait		X			
Perbaikan (misal ramah-pengguna) perangkat lunak Biro Komunikasi Radio		X			
Kelompok studi, kelompok kerja, kelompok tugas dan gabungan			X		
Publikasi ITU-R				X	
Bantuan kepada para anggota, khususnya negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang					X
Penghubung/dukungan untuk kegiatan pengembangan					X
Seminar					X

Tabel 4.2 – Tujuan, keluaran, hasil yang diharapkan dan indikator kinerja penentu ITU-R

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 1 – Mengoordinasi Untuk memajukan, mendorong serta memastikan kerja sama dan koordinasi antar semua Negara Anggota dalam membuat keputusan mengenai isu-isu komunikasi radio, dengan keikutsertaan Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat, yang sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Radio Komunikasi Dunia • Konferensi Komunikasi radio regional • Dewan Regulasi Radio • Sidang Komunikasi Radio • Kelompok Penasihat Komunikasi Radio 	<p>1 Untuk menyiapkan, menyelenggarakan dan memberikan dukungan yang sesuai dan efisien kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konferensi-konferensi komunikasi radio dunia • Konferensi-konferensi komunikasi radio regional, bila ada • Badan Regulasi Radio • Sidang-sidang komunikasi radio • Kelompok Penasihat Komunikasi Radio 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan dan tindakan tepat waktu sebelum dan selama konferensi-konferensi dan pertemuan-pertemuan; kepuasan para delegasi • Persiapan dan tindakan tepat waktu selama dan sebelum Informasi serta pertemuan-pertemuan persiapan
		<p>2 Keikutsertaan dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi telekomunikasi regional untuk membantu dalam persiapan dan koordinasi yang rinci antar wilayah</p>	

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 2 – Memroses Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keanggotaan untuk spektrum, akses orbit dan operasi-operasi dalam aplikasi Konstitusi, Regulasi-Regulasi Konvensi dan Radio, mengingat, antara lain, percepatan konvergensi layanan-layanan komunikasi radio.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pemrosesan pemberitahuan-pemberitahuan ruang angkasa dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya• Pemrosesan pemberitahuan-pemberitahuan terrestrial (bumi) dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya• Perbaikan (misal ramah pengguna) dari perangkat lunak Biro Komunikasi Radio	<ul style="list-style-type: none">• Untuk memroses permintaan-permintaan publikasi awal, koordinasi dan notifikasi yang menyangkut layanan-layanan komunikasi radio angkasa dan terrestrial (bumi) sebagaimana juga semua permintaan terkait lainnya• Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemulihan biaya yang sesuai untuk pendaftaran-pendaftaran jaringan satelit	<ul style="list-style-type: none">• Waktu pemrosesan untuk setiap pengajuan di dalam batas waktu menurut ketentuan, sesuai dengan prosedur-prosedur yang dapat diterapkan dan/atau ketentuan-ketentuan yang terkait dari Regulasi-regulasi Radio• Aplikasi tepat waktu dari Keputusan Dewan 482• Jumlah pengunduhan dan penjualan Rekomendasi-rekomendasi ITU-R

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
Tujuan 3 – Memproduksi Untuk menghasilkan Rekomendasi mengenai layanan komunikasi radio untuk mencapai konektivitas dan kemampuan kemampuan saling beroperasi dalam menerapkan TIK modern, sebagaimana juga untuk memberikan penggunaan yang paling efisien dari sumber-sumber spektrum dan orbit.	<ul style="list-style-type: none">• Kelompok studi, kelompok kerja, kelompok tugas dan gabungan, pertemuan persiapan konferensi	<ol style="list-style-type: none">1 Untuk menjalankan program kerja untuk menanggapi:<ul style="list-style-type: none">• Resolusi-resolusi ITU-R• kerja yang ditugaskan oleh Pertemuan Persiapan Konferensi (CPM) dan persiapan naskah laporan CPM kepada Konferensi Komunikasi Radio Dunia• Resolusi-resolusi ITU-R yang membahas bidang studi yang spesifik2 Menyediakan dukungan teknis dan logistik yang sesuai untuk pertemuan-pertemuan	<ul style="list-style-type: none">• Bahan-bahan yang dapat disampaikan tersedia bagi keanggotaan dalam skala waktu yang diharapkan• Pertemuan-pertemuan yang memenuhi tujuan-tujuan di dalam tenggat waktu yang ditentukan

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 4 – Memberitahu Memenuhi kebutuhan keanggotaan dengan menyebarkan informasi dan pengetahuan mengenai isu-isu komunikasi radio, dengan menerbitkan dan menyebarkan bahan-bahan yang relevan (misal publikasi layanan, laporan dan buku pegangan), dengan berkoordinasi dan berkolaborasi sebagaimana sesuai, dengan Biro lain dan Sekretariat Jenderal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi ITU-R 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Untuk mempublikasikan secara tahunan: <ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah 100 Rekomendasi, laporan dan buku pegangan • 25 isu tahunan BR IFIC (layanan terestrial (bumi) dan angkasa) dan BR IFIC tahunan (layanan-layanan luar angkasa) dalam DVD • Edisi dua tahunan SRS dalam DVD-ROM • 11 isu jadwal HFBC • Publikasi layanan-layanan yang relevan, dalam bentuk dan dengan isi yang dijelaskan dalam Regulasi-regulasi Radio 2 Untuk memelihara dan/atau meningkatkan dimana mungkin kualitas publikasi dan menjamin atau meningkatkan sampai ke yang paling sesuai tingkat pemasukan penjualan publikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • persiapan yang tepat waktu dari masukan yang relevan, sesuai dengan persyaratan ketentuan dan jadwal yang disusun sebelumnya serta publikasi yang tepat waktu • Jumlah publikasi yang terjual serta tingkat pemasukan penjualan publikasi

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 5 – Membantu Untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada keanggotaan, khususnya kepada negara-negara berkembang, dalam kaitan dengan permasalahan komunikasi radio, prasarana dan aplikasi-aplikasi informasi dan komunikasi, dan khususnya dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjembatani kesenjangan digital • Mendapatkan akses yang seimbang kepada spektrum frekuensi radio dan orbit-orbit satelit <p>Memberikan pelatihan dan memproduksi bahan-bahan pelatihan terkait untuk pengembangan sumber daya manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan kepada anggota, khususnya kepada negara berkembang dan LDC • Penghubung/ pendukung kepada kegiatan perkembangan • Seminar-seminar 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk membantu negara-negara berkembang dan Biro Pengembangan Telekomunikasi mengenai aspek propagasi gelombang radio serta teknik-teknik dan sistem-sistem pengelolaan spektrum • Untuk menyelenggarakan seminar-seminar, lokakarya-lokakarya dan pertemuan-pertemuan informasi tingkat dunia dan regional yang berhubungan dengan isu-isu penyiapan konferensi komunikasi radio dunia dan regional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan dalam duplikasi; perbaikan produk-produk ITU-D (misal Sistem-sistem pengelolaan spektrum); kepuasan para pengguna • Persiapan yang tepat waktu (dokumentasi dan logistik) dan kepuasan para peserta

5 Sektor Standardisasi Telekomunikasi (ITU-T)

5.1 Analisa situasi

- 5.1.1 Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) beroperasi dalam lingkungan dan ekosistem yang kompetitif, kompleks dan berkembang cepat.
- 5.1.2 Ada kebutuhan untuk standar-standar internasional yang berkualitas tinggi dan didorong permintaan, yang seharusnya dikembangkan secara cepat sejalan dengan prinsip-prinsip konektivitas global, keterbukaan, keterjangkauan, keandalan, kemampuan saling beroperasi dan keamanan. Teknologi-teknologi penentu memungkinkan layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi yang baru serta memajukan pembangunan masyarakat informasi timbul dan seharusnya diperhatikan dalam kerja ITU-T.
- 5.1.3 Selagi mempertahankan anggota-anggota ITU-T masa kini, anggota-anggota baru dari industri dan akademisi perlu ditarik dan didorong, dan keikutsertaan negara-negara berkembang dalam proses standardisasi (“Menjembatani kesenjangan standardisasi”) perlu ditingkatkan.
- 5.1.4 Kerja sama dan kolaborasi dengan badan-badan standardisasi lain serta konsorsium dan fora yang relevan merupakan penentu untuk menghindari duplikasi kerja dan mencapai penggunaan sumber-sumber daya yang efisien, sebagaimana juga melibatkan keahlian dari luar ITU.
- 5.1.5 Peninjauan kembali Regulasi Telekomunikasi Internasional akan mendirikan kerangka kerja yang baru di seluruh dunia untuk kegiatan-kegiatan ITU.

5.2 Visi

Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) memberikan tempat di seluruh dunia yang khas bagi standardisasi telekomunikasi dan TIK.

5.3 Misi

Misi Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) adalah menyediakan tempat untuk seluruh dunia yang khas bagi industri dan pemerintah untuk bekerja bersama-sama untuk memelihara perkembangan dan penggunaan standar-standar internasional yang dapat saling beroperasi, tidak diskriminasi dan didorong permintaan yang dilandasi keterbukaan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para pengguna, untuk menciptakan suatu lingkungan dimana para pengguna dapat mengakses layanan-

layanan yang terjangkau di seluruh dunia tanpa menghiraukan teknologi yang mendasari, khususnya di negara-negara berkembang, sementara pada saat yang bersamaan membuat hubungan-hubungan antara kegiatan-kegiatan ITU-T dan keluaran-keluaran yang terkait dari Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi.

5.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) adalah tiga lipatan, dan mencakup:

- Untuk mengembangkan standar-standar internasional yang dapat saling beroperasi dan tanpa diskriminasi (Rekomendasi-rekomendasi ITU-T)
- Untuk membantu dalam menjembatani kesenjangan standardisasi antara negara-negara maju dan berkembang
- Untuk memperluas dan memfasilitasi kerja sama internasional antar badan standardisasi internasional dan regional.

5.5 Tujuan

Tujuan-tujuan dari Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) adalah:

5.5.1 Tujuan 1 – Mengoordinasi/Kerja sama internasional:

- Untuk memajukan dan memelihara kerja sama antar Negara-Anggota, Anggota Sektor dan Asosiat dalam pembuatan keputusan mengenai permasalahan standardisasi telekomunikasi/TIK
- Untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Sektor-Sektor ITU lain, badan-badan standardisasi dan entitas-entitas yang relevan (misal Kolaborasi Standar-standar Global, Kerja sama Standar-standar Dunia), untuk menghindari duplikasi dan inkonsistensi sampai sejauh mungkin, mengidentifikasi bidang-bidang yang relevan untuk proyek-proyek standardisasi di masa depan untuk diawali dalam ITU-T seraya tetap sadar akan kerja yang sedang berlangsung dalam badan-badan standar lain dan memastikan bahwa kerja ITU-T menciptakan nilai lebih dengan meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan kerja sama internasional dengan maksud untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan.

5.5.2 Tujuan 2 – Memproduksi standar global:

- Untuk mengembangkan secara efisien, efektif dan secara tepat waktu standar-standar telekomunikasi/TIK global yang disyaratkan

(Rekomendasi-rekomendasi ITU-T), konsisten dengan mandat ITU serta kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan keanggotaan, seperti mempersempit kesenjangan digital, memperbaiki kesehatan dan keamanan serta menjaga lingkungan, dan mengembangkan standar-standar untuk memfasilitasi akses untuk telekomunikasi/TIK bagi orang-orang penyandang disabilitas

- Untuk menstandarisasi layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengguna global yang bergantung tidak hanya pada teknologi-teknologi paling mutakhir tetapi juga pada teknologi-teknologi yang telah teruji
- Untuk mengidentifikasi arah dan upaya untuk mencapai kemampuan saling beroperasi layanan-layanan dan perlengkapan-perengkapan.

5.5.3 Tujuan 3 – Menjembatani kesenjangan standardisasi:

Untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam menjembatani kesenjangan standardisasi dalam hubungan dengan permasalahan standardisasi, prasarana dan aplikasi-aplikasi jaringan informasi dan komunikasi, serta bahan-bahan pelatihan yang relevan untuk pengembangan sumber daya manusia, dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik lingkungan telekomunikasi dari negara-negara berkembang.

5.5.4 Tujuan 4 – Memberitahu/Menyebarkan informasi:

Untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan keanggotaan dan yang lainnya dengan menyebarkan informasi dan keterampilan melalui publikasi dan penyebaran Rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan bahan-bahan yang relevan (misal buku-buku manual), dengan berkolaborasi dengan Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU dalam menjembatani kesenjangan standardisasi antara negara-negara berkembang dan maju, dan dengan memajukan nilai ITU-T dalam rangka untuk mendorong peningkatan keanggotaan.

Tabel 5.1 – keluaran dan tujuan ITU-T

Keluaran	Tujuan 1	Tujuan 2	Tujuan 3	Tujuan 4
Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia	X			
Sesi konsultasi regional Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia	X			
Kelompok Penasihat Standardisasi Telekomunikasi	X			
Bantuan umum dan kerja sama ITU-T	X			
Kelompok studi ITU-T		X		
Menjembatani kesenjangan standardisasi			X	
Kegiatan pelatihan, termasuk lokakarya dan seminar			X	
Publikasi ITU-T				X
Buletin Operasional ITU				X
Publikasi Basis data				X
Basis data TSB yang relevan				X
Peruntukan dan pengelolaan sumber daya penomoran, penamaan, pengalamatan dan identifikasi telekomunikasi internasional sesuai dengan Rekomendasi dan prosedur ITU-T				X
Promosi				X

Tabel 5.2 – Tujuan, keluaran, hasil yang diharapkan dan indikator kinerja penentu ITU-T

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 1 – Koordinasi/ Kerja sama internasional Untuk memajukan dan memelihara kerjasama antar semua Negara Anggota, Anggota Sektor dan Asosiat dalam pembuatan keputusan perihal standardisasi telekomunikasi/TIK. Untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Sektor ITU lainnya, badan-badan standardisasi dan entitas yang relevan (misal Kolaborasi Standar Global, Kerja sama Standar Dunia), untuk mengurangi duplikasi dan menghindari ketidak konsistenan-konsistenan, sampai sejauh mungkin, mengidentifikasi bidang-bidang relevan untuk proyek-proyek standardisasi di masa depan untuk diawali dari dalam ITU-T seraya tetap sadar akan kerja yang sedang berlangsung di badan-badan standar lain, dan memastikan bahwa kerja ITU-T menciptakan nilai tambah dengan memajukan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama internasional dengan pandangan untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA) • sesi konsultasi regional WTSA • Kelompok Penasihat Standardisasi Telekomunikasi (TSAG) • bantuan dan kerja sama umum ITU-T 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Untuk mempersiapkan, menyelenggarakan dan memberikan dukungan yang sesuai dan efisien kepada: <ul style="list-style-type: none"> • Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA) • sesi-sesi konsultasi regional WTSA • Kelompok Penasihat Standardisasi Telekomunikasi (TSAG) 2 Untuk berkoordinasi dengan organisasi pengembangan standar dan organisasi internasional dan regional lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan dan tindakan yang tepat waktu sebelum dan selama konferensi-konferensi dan pertemuan-pertemuan, kepuasan para delegasi • Kegiatan penghubung dengan organisasi-organisasi lain

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 2 – Memproduksi standar-standar global Untuk mengembangkan secara efisien, efektif dan secara tepat waktu standar-standar telekomunikasi/TIK global yang dibutuhkan (Rekomendasi-rekomendasi ITU-T), konsisten dengan mandat ITU serta kebutuhan dan kepentingan keanggotaan, seperti mempersempit kesenjangan digital, memperbaiki kesehatan dan keamanan serta menjaga lingkungan, dan mengembangkan standar untuk memfasilitasi akses untuk telekomunikasi/TIK bagi orang-orang penyandang disabilitas Untuk menstandarisasi layanan dan aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna global yang bergantung tidak hanya pada teknologi paling mutakhir tapi juga pada teknologi yang telah teruji Untuk mengidentifikasi arah dan upaya untuk mencapai kemampuan saling beroperasi layanan dan perlengkapan.</p>	<p>Kelompok-kelompok kerja ITU-T</p>	<ul style="list-style-type: none">• Untuk menjalankan program kerja dalam menanggapi resolusi-resolusi WTSA• Untuk memberikan dukungan teknis dan logistik yang sesuai untuk pertemuan-pertemuan	<ul style="list-style-type: none">• Bahan yang dapat disampaikan tersedia bagi keanggotaan dalam skala waktu yang diharapkan• Pertemuan memenuhi tujuan di dalam tenggat waktu yang ditentukan• Jumlah unduh dan penjualan Rekomendasi ITU-T

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 3 – Menjembatani kesenjangan standardisasi Untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada negara berkembang dalam menjembatani kesenjangan standardisasi dalam hubungan dengan hal standardisasi, prasarana dan aplikasi jaringan informasi dan komunikasi, serta bahan pelatihan yang relevan untuk pengembangan sumber daya manusia, dengan memperhatikan karakteristik lingkungan telekomunikasi dari negara berkembang.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Menjembatani kesenjangan standardisasi• Kegiatan pelatihan, termasuk lokakarya dan seminar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk memberikan dukungan teknis dan logistik yang sesuai untuk pertemuan dan lokakarya• Pelaksanaan resolusi WTSA yang sesuai• Penyebarluasan pengetahuan ahli mengenai teknologi paling mutakhir	<ul style="list-style-type: none">• Persiapan dan aksi tindakan yang tepat waktu, sebelum dan selama pertemuan dan lokakarya; tingkat kepuasan para delegasi• Tingkat pelaksanaan resolusi-resolusi WTSA yang relevan (Rencana Aksi WTSA)• Peningkatan keikutsertaan negara berkembang dalam kerja Sektor

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 4 – Memberitahu/Menyebarkan informasi Untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan keanggotaan dan yang lain nya dengan menyebarkan informasi dan pengetahuan melalui publikasi dan penyebaran Rekomendasi ITU-T dan bahan yang relevan (misal buku manual), dengan berkolaborasi dengan Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU dalam menjembatani kesenjangan standardisasi antara negara-negara berkembang dan maju, dan dengan memajukan nilai ITU-T untuk menarik peningkatan keanggotaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi ITU-T • Buletin Operasional ITU • Publikasi basis data • Basis data TSB yang relevan • Peruntukan dan pengelolaan sumber penomoran, penamaan, pengalamatan dan identifikasi dari telekomunikasi internasional sesuai dengan Rekomendasi dan prosedur ITU-T • Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memublikasikan setiap tahun Rekomendasi dan naskah ITU-T, yang relevan yang tepat waktu dan relevan menurut pasar • Penyebarluasan informasi operasional berharga melalui Buletin Operasional ITU • Promosi kesadaran terhadap kegiatan, metode kerja dan prioritas ITU-T 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan dan tindakan yang tepat waktu dalam proses publikasi • Peruntukan sumber daya yang tepat waktu • Peningkatan kesadaran terhadap kegiatan ITU-T

6 Sektor Pengembangan Telekomunikasi (ITU-D)

6.1 Analisa situasi

Telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran yang semakin penting dalam ekonomi dan masyarakat kita. Mereka telah terbukti menjadi pendorong inovasi, pertumbuhan dan produktivitas yang kuat secara global. Akses yang luas kepada telekomunikasi/TIK memberikan kesempatan-kesempatan signifikan untuk memperbaiki layanan-layanan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan publik dari pemerintah. Telekomunikasi/TIK juga membuka saluran-saluran baru untuk berbagi sumber-sumber pengetahuan global serta arus bebas ide-ide dan pendapat-pendapat. Bagaimanapun, untuk mengatur potensi telekomunikasi/TIK, para pemerintah dan para pemangku kepentingan harus memberikan lingkungan kebijakan yang memungkinkan serta prasarana-prasarana pendukung yang kokoh dan tanggap terhadap seperangkat tantangan dan kesempatan yang berubah. Selama periode ini, rencana strategis Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) yang berikut, tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan tersebut akan mencakup, antara lain:

6.1.1 Kesenjangan digital

Membangun kapasitas ekonomi dan masyarakat yang berkembang untuk mengambil sepenuhnya manfaat-manfaat telekomunikasi/TIK akan mendapat prioritas utama pada agenda kebijakan internasional. Memajukan lingkungan yang memungkinkan, pembangunan prasarana serta peluncuran aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan publik dan komersial yang memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan tantangan-tantangan maupun kesempatan-kesempatan penentu. Membangun kesadaran telekomunikasi/TIK dan keahlian-keahlian khusus yang memungkinkan orang untuk mengambil manfaat penuh dari kesempatan-kesempatan yang ditawarkan telekomunikasi/TIK juga tetap sebagai prioritas.

Selama lima tahun ini, tingkat akses kepada telekomunikasi/TIK telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Selular bergerak telah terbukti menjadi teknologi yang diterima paling cepat dalam sejarah, dan jumlah total langganan pita lebar telah bertumbuh lebih dari tiga lipatan. Namun, tetap ada kesenjangan pita lebar yang besar (lihat di bawah), di dalam maupun antar negara-negara.

Upaya-upaya khusus perlu dibuat untuk mendukung ketersediaan prasarana dan layanan-layanan di daerah-daerah kurang terlayani dan terpencil, khususnya di

negara-negara berkembang³, sebagaimana juga antar orang-orang dengan kebutuhan khusus (populasi terpinggirkan dan rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penduduk pribumi, orang-orang tua dan orang-orang penyandang disabilitas).

Di tahun 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menilai hasil-hasil dan pelaksanaan Sasaran Pengembangan Milenium maupun Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi dari Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS).

6.1.2 Akses untuk pita lebar

Prasarana-prasarana pita lebar nasional telah menjadi landasan ekonomi-ekonomi jaringan dan masyarakat-masyarakat informasi. Mengikuti kepemimpinan sebagian negara yang telah menjadikannya bagian dari kewajiban-kewajiban layanan universal, akses pita lebar akan semakin dianggap sebagai layanan dasar yang seharusnya dibuat tersedia secara universal kepada semua penduduk. Untuk mendukung hal ini, para pemerintah didorong untuk memajukan kebijakan-kebijakan bagian pemasokan maupun permintaan yang menciptakan insentif-insentif untuk tulang punggung pita lebar dan peluncuran jaringan akses. Struktur-struktur pasar yang memajukan pita lebar dan layanan-layanan terkait pada harga-harga kompetitif akan perlu didorong. Pemerintah-pemerintah juga didorong untuk memajukan kebijakan-kebijakan dari sisi permintaan yang memajukan konektivitas pita lebar pada sekolah-sekolah, perpustakaan-perpustakaan dan lembaga-lembaga publik lainnya.

Memajukan akses pita lebar akan perlu memperhatikan kondisi-kondisi permulaan khusus di negara-negara berkembang, apabila penembusan jaringan tetap secara historis adalah rendah dan penembusan jaringan bergerak tinggi. Akan ada kebutuhan berkesinambungan untuk memberikan bantuan dan membagikan praktek-praktek terbaik mengenai peluncuran teknologi-teknologi prasarana yang sesuai (misal jaringan generasi mendatang, baik jaringan kabel maupun nirkabel dan/atau berbasis bergerak) serta kebijakan-kebijakan yang memajukan investasi dalam prasarana dan persaingan berbasis layanan.

Peningkatan kepentingan sosial ekonomi dari akses pita lebar akan juga memberikan tantangan-tantangan peraturan baru, seperti memastikan akses universal

³ Ini termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi

dengan menyeimbangkan dan merasionalisasikan akses dan harga-harga di bidang-bidang laba dan nirlaba, menjalankan prasarana tulang punggung pita lebar, menetapkan model-model pengelolaan untuk prasarana pita lebar dengan maksud untuk menghindari upaya-upaya duplikasi dan penanaman modal, membentuk model-model harga baru dan metodologi-metodologi, memitigasi monopoli-monopoli wajar dan mendorong persaingan, serta menyeimbangkan penyebaran dan penerimaan teknologi-teknologi dan layanan-layanan baru di negara-negara maju maupun berkembang.

6.1.3 Pemusatan dan lingkungan yang memungkinkan

Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh adanya jaringan-jaringan telekomunikasi/TIK berkecepatan tinggi, konvergensi dan global serta akses langsung kepada pengetahuan sedang melakukan perubahan besar pada abad kedua puluh satu. Aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan baru akan menciptakan perilaku pelanggan yang baru, praktek-praktek bisnis dan harapan-harapan dari sisi semua pemangku kepentingan, apabila sesuai, menyerukan untuk adanya peraturan yang inovatif dan memiliki target dalam ekonomi digital untuk memelihara pertumbuhan di semua tingkat. Kemajuan teknologi dan transformasi pasar ini telah meningkatkan ketegangan pada kebijakan yang ada dan rezim peraturan. Dengan konvergensi, pembuat-pembuat kebijakan dan para regulator akan terus berurusan dengan kepentingan-kepentingan yang bersaing, memastikan bidang permainan yang seimbang, memajukan transparansi dan menciptakan lingkungan stabil yang memelihara inovasi teknologi dan layanan yang terletak pada jantung sektor telekomunikasi/TIK. Para regulator juga sedang menghadapi tugas menantang untuk memastikan akses telekomunikasi/TIK yang terjangkau, sementara pada saat yang sama menciptakan dan memelihara insentif-insentif penanaman modal untuk semua peserta pasar. Keberhasilan keseimbangan yang baik memerlukan para regulator untuk selalu mengetahui isu-isu biaya terkini, sebagaimana juga mekanisme-mekanisme keuangan dan membuat model ekonomi untuk dapat mengukur dampak dan implikasi untuk lingkungan persaingan nasional.

Memenuhi tantangan-tantangan ekonomi digital akan memerlukan pendekatan-pendekatan lintas-sektor kepada kebijakan dan peraturan telekomunikasi/TIK yang melebihi peraturan khusus sektor sekarang. Pendekatan yang lebih luas akan perlu diambil, mencakup aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan, konten elektronik serta hak-hak dan

tanggung jawab pelanggan. Karena isu-isu ini sifatnya adalah lintas sektor, secara jelas menentukan tanggung jawab badan-badan pemerintah yang relevan adalah faktor sukses yang menentukan. Keseimbangan yang hati-hati akan diperlukan antara pendekatan-pendekatan keterlibatan dan ketidakterlibatan yang berdasarkan peraturan mengenai penilaian dampak yang lebih luas pada masyarakat secara keseluruhan.

6.1.4 Indikator telekomunikasi/TIK dan indeks pengembangan TIK

Pengumpulan, ketentuan serta penyebaran indikator-indikator dan statistik-statistik berkualitas yang mengukur dan memberikan analisa komparatif dari penggunaan dan penerimaan telekomunikasi/TIK akan terus menjadi kebutuhan penentu untuk mendukung ekonomi-ekonomi berkembang. Indikator-indikator ini, sebagaimana juga indeks pengembangan TIK, memberikan kepada pemerintah, otoritas-otoritas regulasi dan para pemangku kepentingan, suatu mekanisme untuk memahami lebih baik pendorong-pendorong penentu terhadap penerimaan telekomunikasi/TIK dan membantu dalam perumusan kebijakan nasional yang sedang berjalan.

6.1.5 Transisi kepada penyiaran digital dan pengelolaan spektrum

Negara-negara akan terus menjalankan transisi dari penyiaran analog ke digital dengan skala-skala waktu yang berbeda sesuai dengan prioritas nasional mereka, sebagaimana juga, dimana dapat digunakan, tenggat-tenggat waktu yang ditentukan oleh Konferensi Komunikasi Radio Regional ITU (RRC-06) beserta Rencana dan Persetujuannya. Selama periode rencana strategis ini, akan ada kebutuhan berkesinambungan, sebagai prioritas utama, untuk membantu para administrator, regulator, penyiar dan para pemangku kepentingan lainnya di negara-negara berkembang dalam meriset dan membantu pengenalan siaran digital. Bantuan yang berkesinambungan untuk negara-negara berkembang pada pengelolaan spektrum akan juga menjadi kebutuhan.

6.1.6 Layanan dan aplikasi telekomunikasi/TIK untuk pengembangan ekonomi dan sosial, pengentasan kemiskinan dan penciptaan kekayaan

Telekomunikasi/TIK telah dikenal luas sebagai pendorong pengembangan ekonomi dan sosial, pengentasan kemiskinan dan penciptaan kekayaan. Telekomunikasi/TIK

memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memfasilitasi pengembangan perdagangan dan ekonomi secara umum, sebagaimana juga pengembangan bisnis dan penciptaan lapangan kerja, khususnya untuk populasi yang miskin dan terpinggirkan, termasuk perempuan, penduduk pribumi dan orang-orang penyandang disabilitas. Aplikasi-aplikasi TIK adalah juga pendorong sisi permintaan yang dapat mendorong penerimaan layanan-layanan pita lebar. Tantangan dan kesempatan yang berkesinambungan adalah untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk memfasilitasi akses kepada layanan-layanan pemerintah berbasis TIK, perbaikan kesehatan, akses kepada pendidikan berkualitas dan pengelolaan lingkungan (termasuk dampak-dampak perubahan iklim). Memberikan bantuan kepada peluncuran aplikasi-aplikasi TIK spesifik yang membantu dalam mengintegrasikan teknologi-teknologi baru ke dalam rantai nilai ekonomi dan sosial yang lebih luas, akan tetap sebagai prioritas penentu.

6.1.7 Inovasi bergerak

Di tahun-tahun mendatang diharapkan untuk melihat lebih banyak kemajuan-kemajuan cepat dalam penggunaan teknologi-teknologi bergerak sebagai landasan untuk inovasi dan layanan-layanan baru. Ini meliputi solusi-solusi kesehatan bergerak (misal *ultrasound* bergerak dan diagnosa jarak jauh); pembayaran-pembayaran bergerak termasuk transaksi-transaksi bank normal serta pembayaran manfaat-manfaat sosial dan pajak-pajak pemerintah; teknologi sensor lingkungan dan biomedik yang diintegrasikan ke dalam alat-alat; pembelajaran bergerak; kenyataan yang lebih baik dan layanan-layanan berbasis lokasi yang maju, penerjemahan otomatis, jaringan sosial bergerak; dan antarmuka-antarmuka baru.

6.1.8 Membangun kepercayaan dalam penggunaan telekomunikasi/TIK

Dengan meningkatnya volume perdagangan elektronik dan transaksi keuangan online, ketersediaan layanan-layanan pemerintah, kepopuleritasan jaringan-jaringan kolaboratif dan sosial serta timbulnya "*Internet of things*", membangun kepercayaan untuk memelihara kepercayaan dalam penggunaan telekomunikasi/TIK akan terus menjadi perhatian kebijakan yang besar dari para pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Sementara telekomunikasi/TIK terus diintegrasikan lebih lanjut ke dalam ekonomi dan masyarakat-masyarakat kita, ketersediaan yang berkesinambungan, dapat diandalkan dan keamanan

akan semakin vital kepada para pemerintah, bisnis dan individual. Memajukan keamanan dunia maya dan kerjasama internasional serta koordinasi dalam domain ini tetap menjadi prioritas penentu dalam periode mendatang.

6.1.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Para pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa kesenjangan digital yang tetap menjadi perhatian penentu dari negara-negara berkembang, juga tidak menjadi kesenjangan pengetahuan antara mereka yang memiliki akses terhadap informasi dan alat-alat belajar dari abad ke duapuluh satu dan mereka yang tidak. Membangun kesadaran telekomunikasi/TIK yang luas memungkinkan para penduduk untuk mengakses dan berkontribusi informasi, ide-ide dan pengetahuan untuk menciptakan masyarakat informasi yang menyeluruh. Memberikan bantuan dalam pembangunan kapasitas manusia dan institusional yang memperbaiki keahlian-keahlian telekomunikasi/TIK untuk membantu pembangunan dan penggunaan jaringan-jaringan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK akan terus menjadi prioritas.

6.1.10 Telekomunikasi darurat

Telekomunikasi darurat memainkan peran kritis dalam peringatan bencana maupun akibat langsungnya, dengan memastikan arus informasi yang tepat waktu yang diperlukan oleh badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi yang berorientasi kemanusiaan dan industri yang terlibat dalam operasi-operasi penyelamatan dan pemulihan serta memberikan bantuan medis kepada yang terluka. Akan ada kebutuhan berkesinambungan untuk mendukung negara-negara berkembang dengan sistem-sistem peringatan awak, komunikasi darurat dan bantuan dalam merekonstruksi prasarana yang hancur oleh bencana.

6.1.11 Krisis keuangan global

Sementara ada indikasi-indikasi bahwa kondisi-kondisi ekonomi akan membaik dengan dimulainya rencana strategis ini, sponsor-sponsor dan institusi-institusi internasional terkait bersatu dalam kesepakatan bahwa pemulihan mungkin lemah, lamban dan/atau tidak merata. Pasca gempa yang disaksikan dalam sektor telekomunikasi/TIK di negara-negara berkembang termasuk dampak-dampak pada pasar-pasar modal dan pengeluaran-pengeluaran modal, kurangnya daya beli konsumen, kekurangan likuiditas dalam sektor perbankan

dan penurunan dana sumbangan. Sebagai akibatnya, akan diperlukan cara-cara yang fleksibel dan inovatif untuk membiayai proyek-proyek pengembangan, termasuk kerja sama-kerja sama publik-swasta dan perbaikan mobilisasi dari sumber-sumber anggaran ekstra.

6.1.12 Perubahan iklim

Perubahan iklim menantang kemampuan kita untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dampak-dampak merugikan dari perubahan iklim kemungkinan akan jatuh secara tidak proporsional di negara-negara berkembang, mengingat sumber-sumber terbatas mereka. Telekomunikasi/TIK memberikan kontribusi berharga untuk memantau, memitigasi dan menyesuaikan terhadap perubahan iklim. Akan terus ada kebutuhan untuk membantu negara-negara, khususnya yang sedang berkembang, untuk menanggapi perubahan iklim.

6.2 Visi

Untuk menjadi organisasi terkemuka untuk memajukan ketersediaan dan aplikasi telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembangunan sosial ekonomi.

6.3 Misi

Misi Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) wajib untuk memelihara kerja sama dan solidaritas internasional dalam penyampaian bantuan teknis dan dalam penciptaan, pengembangan dan perbaikan perlengkapan serta jaringan-jaringan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di negara-negara berkembang. ITU-D diperlukan untuk menghentikan tanggung jawab ganda Perhimpunan sebagai badan spesialisasi dan badan pelaksana dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan proyek-proyek di bawah sistem pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pengaturan-pengaturan pendanaan lain, sebagaimana untuk memfasilitasi dan memperbaiki pengembangan telekomunikasi/TIK dengan menawarkan, menyelenggarakan dan mengoordinasi kerja sama teknis dan kegiatan-kegiatan bantuan.

6.4 Sasaran strategis

Sasaran strategis Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) adalah tiga lipatan, dan mencakup:

- Untuk memajukan ketersediaan prasarana dan memelihara lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan

prasarana telekomunikasi/TIK dan penggunaannya dengan cara yang aman dan terjamin

- Untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam menjembatani kesenjangan digital dengan mencapai perkembangan sosial ekonomi yang dimungkinkan oleh telekomunikasi/TIK yang lebih luas
- Untuk memperluas manfaat-manfaat masyarakat informasi kepada keanggotaan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan publik dan swasta, dan untuk memajukan integrasi penggunaan telekomunikasi/TIK ke dalam ekonomi dan masyarakat sebagai pendorong-pendorong pengembangan, inovasi, kesejahteraan, pertumbuhan dan produktivitas secara global.

6.5 Tujuan

Tujuan-tujuan Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) adalah:

6.5.1 Tujuan 1

Untuk mendorong kerja sama internasional, antar anggota ITU-D dan para pemangku kepentingan lain, pada isu-isu pengembangan telekomunikasi/TIK, dengan memberikan forum diskusi terkemuka, berbagi informasi dan membangun kesepakatan mengenai isu-isu teknis dan kebijakan telekomunikasi/TIK.

6.5.2 Tujuan 2

Untuk membantu keanggotaan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi-teknologi baru yang sesuai, termasuk pita lebar, untuk mengembangkan prasarana-prasarana dan layanan-layanan telekomunikasi/TIK, dan untuk merancang dan meluncurkan prasarana-prasarana telekomunikasi/TIK yang ulet.

6.5.3 Tujuan 3

Untuk mendorong pengembangan strategi-strategi dan meningkatkan peluncuran, dan penggunaan aplikasi-aplikasi TIK yang aman, terjamin dan terjangkau menuju pengarusutamaan telekomunikasi/TIK dalam ekonomi dan masyarakat lebih luas.

6.5.4 Tujuan 4

Untuk membantu keanggotaan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kebijakan dan regulasi yang

memungkinkan, termasuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, rencana-rencana nasional yang berkelanjutan melalui berbagi praktik-praktik terbaik serta mengumpulkan dan menyebarkan informasi statistik mengenai pengembangan telekomunikasi/TIK.

6.5.5 Tujuan 5

Untuk pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan lembaga untuk memperbaiki keahlian-keahlian dalam pengembangan dan penggunaan jaringan-jaringan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK, dan untuk mendorong penggunaan digital untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus, seperti orang-orang penyandang disabilitas, melalui peningkatan kesadaran, kegiatan-kegiatan pelatihan, berbagi informasi dan keterampilan serta produksi dan penyebaran publikasi-publikasi yang relevan.

6.5.6 Tujuan 6

Untuk memberikan bantuan terkonsentrasi dan khusus kepada negara-negara terbelakang (LDCs) dan negara-negara dengan kebutuhan khusus, dan untuk membantu Negara-negara Anggota ITU dalam menanggapi perubahan iklim dan mengintegrasikan telekomunikasi/TIK dalam pengelolaan bencana.

Tabel 6.1 – Keluaran dan tujuan ITU-D

Keluaran ITU-D	Tuj. 1	Tuj. 2	Tuj. 3	Tuj. 4	Tuj. 5	Tuj. 6
Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC-14)	X					
Pertemuan-pertemuan persiapan regional WTDC-14 di Asia-Pasifik, Afrika, Amerika, CIS, Eropa dan Negara-negara Arab	X					
Kelompok-kelompok studi pengembangan telekomunikasi	X					
Kelompok Penasehat Pengembangan Telekomunikasi	X					
Ketentuan keahlian teknis untuk membantu memaksimalkan penggunaan teknologi-teknologi baru yang sesuai		X				
Pengembangan dan pelaksanaan proyek untuk membantu memaksimalkan penggunaan teknologi-teknologi baru yang sesuai		X				
Mobilisasi sumber-sumber anggaran keuangan ekstra dan kemitraan-kemitraan untuk membantu memaksimalkan penggunaan teknologi-teknologi baru yang sesuai		X				
Rencana-rencana induk dan garis-garis panduan praktek terbaik		X				
Simposium dan seminar-seminar		X				
Pengaturan-oengaturan internasional dan regional melalui forum-forum global – termasuk forum-forum keamanan dunia maya regional, IMPACT, FIRST, pengamanan online anak (COP) dan keikutsertaan dalam Forum Pemerintahan Internet			X			
Mobilisasi sumber-sumber anggaran keuangan ekstra dan kemitraan-kemitraan untuk mendorong pengembangan strategi-strategi untuk meningkatkan peluncuran, keamanan dan keselamatan dan keterjangkauan dari penggunaan aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan TIK			X			
Panduan dan perangkat peralatan praktek terbaik			X			

Keluaran ITU-D	Tuj. 1	Tuj. 2	Tuj. 3	Tuj. 4	Tuj. 5	Tuj. 6
Pengaturan-pengaturan internasional dan regional melalui forum-forum global yang terkait dengan telekomunikasi/TIK untuk pengembangan ekonomi dan sosial			X			
Forum-forum global – termasuk Simposium Regulator Global (GSR), Forum Pemimpin Industri Global (GILF), Pertukaran Regulator Global G-REX) dan Pertemuan Indikator Telekomunikasi/TIK dunia (WTIM)				X		
Survei-survei, basis data-basis data (termasuk basis data WTI, portal online ICT Eye), publikasi-publikasi statistik dan analitik (termasuk laporan Mengukur Masyarakat Informasi (MIS), Laporan Pengembangan Telekomunikasi/TIK Dunia (WTDR) dan laporan Kecenderungan dalam Reformasi Telekomunikasi)				X		
Studi kasus, panduan dan perangkat peralatan – termasuk Perangkat Peralatan Regulasi TIK dan buku manual dan panduan statistik mengenai metodologi biaya, ekonomi, dan keuangan				X		
Sumber-sumber pelatihan, bahan-bahan dan kurikulum yang berkualitas tinggi dalam telekomunikasi/TIK					X	
Peningkatan portal Akademi ITU sebagai lembaga penerima (repositoris) untuk sumber-sumber dan bahan-bahan pelatihan telekomunikasi/TIK					X	
Akses terhadap keterlibatan pelatihan ITU, melalui Akademi ITU, pusat keunggulan dan pusat pelatihan Internet					X	
Mobilisasi sumber anggaran keuangan ekstra dan kemitraan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan kemampuan kelembagaan					X	

Keluaran ITU-D	Tuj. 1	Tuj. 2	Tuj. 3	Tuj. 4	Tuj. 5	Tuj. 6
Meningkatkan kesadaran antar pembuat keputusan pemerintah dan sektor swasta mengenai pentingnya keterlibatan digital untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus					X	
Studi kasus, panduan dan perangkat peralatan – termasuk Menghubungkan Sekolah, Menghubungkan perangkat bagi pembuat kebijakan dan praktik terbaik dan perangkat e-Aksesibilitas masyarakat pada para penyandang disabilitas – untuk memajukan keterlibatan digital orang-orang dengan kebutuhan khusus					X	
Berbagi bahanpelatihan, aplikasi dan perangkat peralatan lainnya mengenai penggunaan telekomunikasi/TIK bagi pembangunan sosial dan ekonomi					X	
Pengembangan dan pelaksanaan proyek untuk pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan lembaga					X	
Forum global						X
Ketentuan keahlian teknis untuk LDCs dan negara dengan kebutuhan khusus						X
Pengembangan dan pelaksanaan proyek untuk membantu LDCs dan negara dengan kebutuhan khusus						X
Mobilisasi sumber anggaran keuangan ekstra dan kemitraan untuk membantu Negara LDCs dan negara dengan kebutuhan khusus						X
Survei, pengumpulan informasi, laporan dan analisa pasar						X
Studi kasus, panduan praktik terbaik, buku manual dan perangkat						X
Lokakarya dan seminar						X
Bantuan dalam keadaan darurat						X
Pengembangan strategi tanggap darurat						X

Tabel 6.2 – Tujuan, keluaran, hasil yang diharapkan dan indikator kinerja penentu ITU-D

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 1 Untuk mendorong kerja sama internasional, antar anggota ITU-D dan para pemangku kepentingan lainnya, pada isu-isu pengembangan telekomunikasi/TIK, dengan memberikan forum diskusi terkemuka, berbagi informasi dan membangun konsensus mengenai isu-isu teknis dan kebijakan dari telekomunikasi/TIK.</p>	<p>Pertemuan status, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC-14) • Pertemuan-pertemuan persiapan regional WTDC-14 di Asia-Pasifik, Afrika, Amerika, CIS, Eropa dan Negara-negara Arab • Kelompok studi pengembangan telekomunikasi • Kelompok Penasehat Pengembangan Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerja sama, termasuk kemitraan baru, mengenai isu pengembangan telekomunikasi/TIK • Diskusi tingkat tinggi mengenai isu pengembangan telekomunikasi/TIK • Keputusan yang dibuat mengenai penciptaan, pengakhiran, rencana kerja dan tujuan para kelompok kerja serta rencana kerja BDT 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tepat waktu (sesuai dengan Konstitusi dan resolusi relevan) • Jumlah, keberagaman dan senioritas para peserta pada kegiatan • Tanggapan balik dari para peserta kegiatan • Jumlah kemitraan baru/MoU yang ditandatangani • Ketersediaan rencana kerja untuk kelompok studi dan BDT.

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
Tujuan 2 Untuk membantu keanggotaan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi baru yang sesuai, termasuk pita lebar, untuk mengembangkan prasarana dan layanan telekomunikasi/TIK, dan untuk merancang dan meluncurkan prasarana telekomunikasi/TIK yang ulet.	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan mengenai keahlian teknis• Pengembangan dan pelaksanaan proyek• Mobilisasi sumber anggaran keuangan ekstra, dan kemitraan• Rencana induk dan panduan praktik terbaik• Simposium dan seminar serta peningkatan kesadaran	<ul style="list-style-type: none">• Pengurangan jumlah komunitas, dan kelompok kurang beruntung, di negara berkembang tanpa akses pita lebar• Perjanjian yang ditandatangani para mitra untuk membantu dalam peluncuran prasarana• Peningkatan kepadatan rata-rata telepon dan kepadatan rata-rata pita lebar	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah komunitas, dan kelompok kurang beruntung, di negara berkembang yang diberikan akses pita lebar• Jumlah kemitraan /MoU baru peluncuran pita lebar yang ditandatangani• Tanggapan balik dari para anggota

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 3 Untuk mendorong pengembangan strategi dan meningkatkan peluncuran, dan penggunaan aplikasi TIK yang aman, terjamin dan terjangkau menuju pengarusutamaan telekomunikasi/TIK dalam ekonomi dan masyarakat lebih luas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan internasional dan regional melalui forum global – termasuk forum keamanan dunia maya, IMPACT, FIRST, perlindungan <i>online</i> anak (COP) dan keikutsertaan dalam Forum Pengaturan Internet • Mobilisasi sumber anggaran keuangan ekstra dan kemitraan • Panduan praktik terbaik dan perangkat • Pengaturan internasional dan regional melalui forum global – terkait dengan telekomunikasi/TIK untuk pengembangan ekonomi dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kepercayaan pada keamanan dunia maya • Perbaikan koordinasi usaha internasional untuk mengurangi ancaman dunia maya dan melindungi <i>online</i> anak • Peningkatan pengetahuan dan keahlian para regulator nasional yang terkait dengan ancaman dunia maya • Peningkatan kerja sama melalui kemitraan • Peningkatan pengetahuan dan keahlian badan-badan nasional untuk menggunakan telekomunikasi/TIK untuk pengembangan sosial dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kepercayaan pada keamanan dunia maya • Jumlah dan dampak (misal jumlah dan senioritas para peserta) forum, program-program pelatihan, lokakarya, seminar, perangkat dan panduan • Tanggapan balik dari para anggota • Jumlah MoU yang berlaku • Jumlah negara yang telah mengembangkan atau memperbaiki program yang terkait dengan penggunaan telekomunikasi/TIK untuk pengembangan sosial dan ekonomi

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 4 Untuk membantu keanggotaan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kebijakan dan regulasi yang memungkinkan, termasuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, rencana nasional yang berkelanjutan melalui berbagi praktik terbaik serta mengumpulkan dan menyebarkan informasi statistik mengenai pengembangan telekomunikasi/TIK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forum global, termasuk Simposium Global untuk Regulator (GSR), Forum Pemimpin Industry Global (GILF), Pertukaran Regulator Global (G-REX) dan Pertemuan Indikator Telekomunikasi/TIK Dunia (WTIM) • Survei, basis data (termasuk Basis data WTI, portal online ICT Eye), publikasi statistik dan analitik, termasuk laporan , Laporan Pengembangan Telekomunikasi/TIK Dunia (WTDR) dan laporan Kecenderungan dalam Reformasi Telekomunikasi Mengukur Masyarakat Informasi (MIS) • Studi kasus, panduan dan perangkat, termasuk Regulasi Perangkat TIK dan buku manual statistik serta panduan mengenai metodologi biaya, ekonomi dan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dialog antara regulator nasional, pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan telekomunikasi/TIK lainnya • Peningkatan pengetahuan dan keahlian para pembuat kebijakan dan para regulator telekomunikasi/TIK nasional • Analisa akurat dari pengembangan telekomunikasi/TIK yang tersedia • Pemutakhiran Basis data WTI • Peningkatan kesadaran dan kapasitas negara untuk menghasilkan statistik telekomunikasi/TIK • Informasi pengaturan dan keuangan yang akurat mengenai sektor telekomunikasi/TIK yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah (misal jumlah dan senioritas para peserta) dari program pelatihan, lokakarya, seminar yang diselenggarakan sebagaimana direncanakan • Jumlah (misal jumlah kunjungan, kutipan, pembelian atau pengunjung) dari/pada publikasi “informasi”, sumber <i>online</i> dan kegiatan • Tingkat tanggapan terhadap kuesioner tahunan

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 5 Untuk mengembangkan sumber daya manusia dan kemampuan lembaga untuk memperbaiki keahlian dalam pengembangan dan penggunaan jaringan dan aplikasi telekomunikasi/TIK, dan untuk mendorong keterbukaan digital untuk orang dengan kebutuhan khusus, seperti orang-penyandang disabilitas, melalui peningkatan kesadaran, kegiatan pelatihan, berbagi informasi dan keterampilan serta produksi dan penyebaran publikasi yang relevan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber, bahan dan kurikulum pelatihan telekomunikasi/TIK yang berkualitas tinggi • Perbaiki portal Akademi ITU sebagai lembaga penerima (repositoris) bagi sumber dan bahan pelatihan telekomunikasi/TIK, sebagaimana juga sebagai akses terhadap keterlibatan pelatihan ITU • Keterlibatan pelatihan tatap muka dan jarak jauh • Keterlibatan pelatihan melalui Akademi ITU, pusat keunggulan dan pusat pelatihan Internet • Meningkatkan kesadaran di antara para pembuat keputusan pemerintah dan sektor swasta mengenai pentingnya keterbukaan digital untuk orang- dengan kebutuhan khusus • Studi kasus, panduan dan perangkat, termasuk Menghubungkan Sekolah, Menghubungkan perangkat bagi pembuat kebijakan dan praktik terbaik dan perangkat e-Aksesibilitas masyarakat pada para penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah tenaga profesional telekomunikasi/TIK terlatih di negara berkembang • Jaringan kerja sama global lembaga pelatihan • Jaringan CoE diperkuat dan Akademi ITU didirikan • Peningkatan kesadaran untuk kebutuhan menghubungkan sekolah kepada layanan Internet pita lebar • Peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan lembaga pada telekomunikasi/TIK yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas • Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di antara para pemangku kepentingan telekomunikasi/TIK pada penggunaan telekomunikasi/TIK untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi perempuan dan anak perempuan, generasi muda dan anak-anak, penduduk asli dan penyandang disabilitas • Bantuan diberikan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keterlibatan pelatihan yang diberikan • Jumlah orang yang dilatih • Tanggapan balik dari para anggota dan kepuasan survei mengenai keterlibatan pelatihan • Jumlah sumber pelatihan setara dengan Akademi ITU • Jumlah simpul CoE yang didirikan • Jumlah pusat pelatihan internet yang didirikan • Jumlah para anggota yang menyadari pentingnya menghubungkan sekolah • Jumlah studi kasus, panduan dan perangkat yang tersedia untuk para anggota • Tanggapan balik dari para anggota • Jumlah proyek yang

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
	<ul style="list-style-type: none">• Berbagi bahan, aplikasi dan peralatan pelatihan lainnya untuk penggunaan telekomunikasi/TIK untuk pembangunan sosial dan ekonomi• Pengembangan dan pelaksanaan proyek• Mobilisasi sumber anggaran keuangan ekstra dan kemitraan	<p>para anggota ITU dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi mengenai penggunaan telekomunikasi/TIK untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi perempuan dan anak perempuan, generasi muda dan anak-anak, penduduk asli dan penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none">• Studi kasus, panduan dan perangkat disediakan untuk semua anggota• Pelaksanaan proyek	<p>dikembangkan dan dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perjanjian yang ditandatangani (misal MoU) dan jumlah kemitraan yang dibentuk

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 6 Untuk memberikan bantuan terpusat dan khusus kepada negara terbelakang (LDCs) dan negara dengan kebutuhan khusus, dan untuk membantu Negara Anggota ITU dalam menangani perubahan iklim dan memadukan telekomunikasi/TIK dalam pengelolaan bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forum global • Ketentuan keahlian teknis • Pengembangan dan pelaksanaan proyek • Mobilisasi sumber anggaran keuangan ekstra dan kemitraan • Survei, pengumpulan informasi, laporan dan analisa pasar • Studi kasus, panduan praktik terbaik, buku manual dan perangkat • Lokakarya dan seminar • Bantuan dalam keadaan darurat • Pengembangan strategi tanggap darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kepadatan rata-rata telepon dan pita lebar dalam LDCs dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil (SIDS) • Peningkatan kapasitas para regulator dalam LDCs dan SIDS pada telekomunikasi/TIK • Perbaiki ketersediaan informasi mengenai telekomunikasi/TIK di LDCs dan SIDS • Pemetaan wilayah yang rentan terhadap bencana alam • Sistem informasi berbasis komputer mencakup hasil survei, penaksiran dan observasi yang berkembang • Kebijakan dan tindakan untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim dan keragaman iklim yang berkembang • Negara mendapat informasi lebih baik mengenai tindakan untuk memitigasi dan mengadaptasi perubahan cuaca dengan menggunakan telekomunikasi/TIK • Bantuan diberikan dalam keadaan darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan rata-rata telepon dan pita lebar dalam LDCs dan SIDS • Jumlah dan dampak (misal jumlah dan senioritas para peserta) dari forum, program pelatihan, lokakarya, seminar, perangkat dan panduan • Tanggapan balik dari para anggota • Efektivitas dan waktu untuk menanggapi permintaan dalam keadaan darurat • Jumlah negara dengan strategi dan rencana untuk perubahan iklim dan pengelolaan bencana

7 Sekretariat Jenderal (GS)

7.1 Misi

Misi Sekretariat Jenderal ITU, sesuai dengan Pasal 11 Konstitusi ITU dan Pasal 5 Konvensi ITU, adalah untuk memberikan layanan-layanan yang akurat, tepat waktu dan efisien kepada keanggotaan Perhimpunan dan untuk melayani dan mengoordinasi kegiatan-kegiatan Sektor-sektor Perhimpunan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lintas sektoral, sebagaimana juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan Sektor-sektor.

7.2 Sasaran strategis

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal ITU (GS) adalah untuk mencapai keefektifan dan efisiensi dalam perencanaan, pengelolaan, koordinasi dan pemberian layanan-layanan untuk mendukung keanggotaan Perhimpunan⁴, memastikan pelaksanaan rencana-rencana finansial dan strategis Perhimpunan dan mengoordinasi kegiatan-kegiatan lintas sektoral sebagaimana diidentifikasi dalam naskah-naskah dasar ITU.

7.3 Tujuan

Tujuan-tujuan Sekretariat Jenderal adalah:

7.3.1 Tujuan 1:

Pengelolaan dan koordinasi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan Perhimpunan, memastikan bahwa sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan rencana strategis tercapai.

7.3.2 Tujuan 2:

Perencanaan, koordinasi dan eksekusi yang efisien dari korporasi, strategis, hubungan-hubungan eksternal, komunikasi dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral Perhimpunan.

7.3.3 Tujuan 3:

Memberikan dukungan kepada, dan menyampaikan, ke konferensi-konferensi, pertemuan-pertemuan, dokumentasi dan publikasi-publikasi yang efisien dan dapat diakses, termasuk yang multi bahasa.

7.3.4 Tujuan 4:

Penggunaan sumber-sumber daya manusia, keuangan dan modal yang efektif dan efisien dari Perhimpunan.

⁴ sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 Konstitusi ITU.

7.3.5 Tujuan 5:

Memberikan layanan-layanan TIK untuk mendukung misi dan kegiatan-kegiatan Perhimpunan.

7.3.6 Tujuan 6

Memberikan landasan dimana para pemangku kepentingan lintas industri dan para operator TIK dapat terhubung, berdebat, berbagi strategi-strategi, menggali teknologi-teknologi terbaru, melakukan bisnis dan pada akhirnya menangani tantangan-tantangan global.

Tabel 7.1 – keluaran dan tujuan GS

Keluaran	Tujuan 1	Tujuan 2	Tujuan 3	Tujuan 4	Tujuan 5	Tujuan 6
Pengelolaan, koordinasi dan perwakilan Perhimpunan	X					
Organisasi, penyediaan masukan, sekretariat, protokol dan layanan-layanan komunikasi untuk ITU TELECOM, PP, Dewan, WTPF dan WCIT		X				
Pengaturan korporasidan hubungan dengan Negara Anggota, Anggota Sektor, Asosiat dan entitas lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lain		X				
Permasalahan eksternal dan layanan komunikasi		X				
Kecenderungan yang timbul dan evolusi TIK		X				
Organisasi dan koordinasi keikutsertaan ITU dalam kegiatan WSIS		X				
Perencanaan strategis korporasi dan evaluasi		X				
Koordinasi kegiatan lintas sektoral		X				
Persyaratan layanan linguistik dan logistik untuk konferensi, pertemuan dan acara			X			
Layanan penerjemahan dan proses naskah untuk produksi dokumentasi dan bahan lain kedalam enam bahasa Perhimpunan			X			
Layanan komposisi, pengeditan, produksi, pencetakan, penerbitan serta penjualan dan			X			

Keluaran	Tujuan 1	Tujuan 2	Tujuan 3	Tujuan 4	Tujuan 5	Tujuan 6
pemasaran untuk publikasi kertas dan elektronik ke dalam enam bahasa Perhimpunan						
Penempatan panduan anggaran dan akuntansi				X		
Penempatan regulasi staf dan buku manual administratif SDM				X		
Rencana jangka panjang untuk pemeliharaan bangunan ITU yang didirikan				X		
Penempatan rencana keamanan				X		
Layanan informasi untuk PP, Dewan dan CWG, serta konferensi dan forum dunia (WCIT dan WTPF)					X	
Layanan informasi untuk pengaturan korporasi, strategi dan komunikasi Perhimpunan					X	
ITU TELECOM Dunia 2013						X
ITU TELECOM Dunia 2015						X
Kegiatan pengembangan masyarakat yang berlangsung di antara acara						X
Acara lain yang terkait sebagaimana diperlukan						X

Tabel 7.2 – Tujuan, keluaran, hasil yang diharapkan dan indikator kinerja penentu GS

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
Tujuan 1 Pengelolaan dan koordinasi keseluruhan dari kegiatan Perhimpunan, memastikan bahwa sasaran dan tujuan rencana strategis tercapai.	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan, koordinasi dan perwakilan dari Perhimpunan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan efektif keseluruhan dan koordinasi kegiatan lintas sektoral Perhimpunan• Membentuk dan melaksanakan rencana audit internal yang menyeluruh, sesuai dengan standar IIA⁵• Pembaharuan kerangka kerja legal yang sesuai yang ditempatkan untuk berjalannya dan pengelolaan Perhimpunan• Memperkuat dan memajukan kebijakan etika serta memastikannya dipahami dengan jelas dari keseluruhan ITU	<ul style="list-style-type: none">• Eksekusi rencana strategis, sesuai dengan anggaran yang disetujui• Rencana audit internal ditetapkan dan laporan audit terkait diterbitkan• Pengarsipan instrumen hukum, kontrak dan perjanjian lain dengan tepat waktu• Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, standar, prosedur dan praktik mengenai etika sebagaimana juga seperti penyuluhan, pelatihan dan pendidikan

⁵ IIA stands for "Institute of Internal Auditors"

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 2 Perencanaan, koordinasi dan eksekusi yang efisien dari korporasi, strategis, hubungan eksternal, komunikasi dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral Perhimpunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi; pemberian layanan masukan, sekretariat, protokol dan komunikasi untuk ITU telecom, PP, Dewan, WTPF dan WCIT • Pengaturan korporasi dan hubungan dengan Negara Anggota, Anggota Sektor, Asosiasi dan entitas lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lain • Permasalahan eksternal dan layanan komunikasi • Kecenderungan yang timbul dan evolusi TIK • Organisasi dan koordinasi keikutsertaan ITU dalam kegiatan WSIS • Perencanaan strategis korporasi dan evaluasi • Koordinasi kegiatan lintas sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran antar semua target peserta program, kegiatan dan isu ITU • Persiapan rencana strategis ITU dan pemantauan efektif terhadap kemajuan dalam pelaksanaannya • Koordinasi efektif dari kegiatan lintas sektoral • Pengelolaan efektif organisasi Dewan, pertemuan PP dan pelaksanaan keputusan • Pengakuan lebih baik terhadap peran kepemimpinan ITU dalam TIK • Saluran komunikasi efektif, termasuk metode yang ada dan baru untuk pengomunikasian Visi ITU • Kepuasan keanggotaan meningkat dari tahun ke tahun (berdasarkan: nilai 2011) • Kenaikan tahunan dari jumlah dan kualitas/dampak kegiatan lintas sektoral (berdasarkan: Kecenderungan dari tahun 2008 sampai dengan 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah permintaan untuk keikutsertaan/sudut pandang ITU dalam berbagai forum dan pertemuan internasional • Ketaatan pada batas waktu pelaksanaan tindakan Dewan dan PP • ITU diakui sebagai pemimpin dalam TIK • Kepuasan keanggotaan • Rasio laporan, resolusi-resolusi, dsb. Yang ditetapkan/dipaparkan untuk pengesahan • Tingkat kepuasan (survei) para delegasi dan peserta konferensi utama • Cakupan media untuk kegiatan ITU • Jumlah dan kualitas/dampak kegiatan lintas sektoral yang dijalankan oleh bagian keluaran (keamanan dunia maya, perubahan iklim, dll.) • Peningkatan jumlah total pembaca

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
Tujuan 3 Memberikan dukungan kepada, dan menyampaikan, ke konferensi, pertemuan, dokumentasi dan publikasi yang efisien dan dapat diakses, termasuk yang multi bahasa.	<ul style="list-style-type: none">• Persyaratan layanan linguistik dan logistik untuk konferensi, pertemuan dan acara• Layanan penerjemahan dan proses naskah untuk produksi dokumentasi dan bahan lain dalam enam bahasa Perhimpunan• Layanan komposisi, pengeditan, produksi, pencetakan, penerbitan serta penjualan dan pemasaran untuk publikasi kertas dan elektronik dalam enam bahasa Perhimpunan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan yang efisien dan hemat biaya untuk konferensi dan pertemuan• Penyediaan layanan penerjemahan dan penafsiran yang berkualitas dalam enam bahasa Perhimpunan• Pengiriman dokumentasi dan publikasi yang berkualitas tinggi yang tepat waktu dalam enam bahasa Perhimpunan• Perbaikan berkesinambungan dalam proses penjualan dan pemasaran, penyebarluasan publikasi ITU yang luas dan peningkatan pendapatan dari penjualan	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan mengenai anggaran dengan tanggapan balik peserta yang bersifat positif• Kepuasan klien terhadap kualitas layanan penerjemahan dan penafsiran• Dokumen dikirimkan dalam batas waktu yang ditetapkan/disepakati• Angka penjualan dan pendapatan penjualan yang berhubungan dengan target anggaran

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
Tujuan 4 Penggunaan sumber daya manusia, keuangan dan modal Perhimpunan yang efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan panduan anggaran dan akuntansi• Penyusunan peraturan staf dan buku manual administratif SDM• Rencana jangka panjang untuk pemeliharaan bangunan ITU yang didirikan• Penyusunan rencana keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan yang efisien terhadap sumber keuangan Perhimpunan• Penggunaan dan pengelolaan sumber daya manusia Perhimpunan yang efektif dan efisien• Pengelolaan yang tepat gedung dan perlengkapan ITU• Penyusunan protokol keamanan yang efektif	<ul style="list-style-type: none">• Audit tahunan dari rekening yang tidak memenuhi syarat• Anggaran tahunan tidak digunakan berlebihan• Survei tahunan dari anggota MCG memberi penilaian pada kinerja divisi SDM sebagai memuaskan atau lebih baik• Fasilitas ITU dalam perbaikan yang baik• Tidak ada insiden keamanan yang besar dalam setahun

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 5 Memberikan layanan TIK untuk mendukung misi dan kegiatan Perhimpunan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Layanan informasi untuk PP, Dewan dan CWGs, serta konferensi dan forum dunia (WCIT dan WTPF)• Layanan informasi untuk pengaturan korporasi, strategi dan kegiatan komunikasi Perhimpunan	<ul style="list-style-type: none">• Sistem dan jaringan komputer yang sangat handal, termasuk keandalan, cadangan data, pemulihan bencana dan pengarsipan• Dukungan TIK untuk konferensi dan pertemuan, termasuk akses cepat untuk dokumen dan dukungan terhadap “kantor tanpa kertas”• Petukaran informasi efektif untuk para peserta kelompok studi, konferensi serta fora kolaboratif dan konsultatif ITU lainnya• Dukungan efektif untuk sistem kantor ITU, termasuk pelatihan, meja bantu dan fungsi dukungan lain• Dukungan efektif untuk fungsi inti TIK ITU, termasuk basis data dan sistem Sektor, sebagaimana juga sistem fungsional SAP	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan jaringan dan data memenuhi atau melebihi standar industri• Dokumen untuk pertemuan tersedia 24/7 dalam moda tanpa kertas• Jumlah para pengguna, unduhan dan kunjungan situs meningkat• Pengurangan berkelanjutan dari total biaya kepemilikan (TCO) untuk sistem kantor ITU• Operasional sistem dengan standar yang ditetapkan dalam perjanjian setara dengan tingkat layanan ITU (SLAs)• Pengurangan, sebesar mungkin, surel sampah (spam), virus dan piranti penyusup (<i>botware</i>) dari sistem komputer ITU

Tujuan	Keluaran	Hasil yang diharapkan	Indikator kinerja penentu
<p>Tujuan 6 Memberikan suatu landasan dimana para pemangku kepentingan dari lintas industri dan operator TIK dapat terhubung, berdebat, berbagi strategi, menggali teknologi terbaru, melakukan usaha dan pada akhirnya menghadapi tantangan global.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITU TELECOM Dunia 2013 • ITU TELECOM Dunia 2015 • Membangun dan mengelola hubungan dengan komunitas TIK yang lebih luas untuk membangun relevansi dan momentum menuju acara ITU Telecom • Memanfaatkan aset ITU TELECOM untuk memperkuat acara ITU lainnya, apabila diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan merek ITU TELECOM yang • Produk baru dan posisinya untuk industri • Kemitraan strategis baru lintas industri TIK • Model usaha baru • Perbaikan keadaan keuangan • Perluasan portofolio pelanggan yang memperpanjang ke dalam sektor pasar yang berbeda (seperti kesehatan atau pendidikan secara elektronik) 	<ul style="list-style-type: none"> • Calon tempat • Kepuasan dan jumlah pelaku pameran yang dikategorikan dalam pengertian pendapatan tahunannya • Ukuran pameran • Pengunjung perdagangan • VIPs • Jumlah dan kepuasan peserta forum • Media yang terakreditasi • Keseluruhan peserta • Lalu lintas ke dan kegiatan pada situs ITU TELECOM • Hasil finansial

BAGIAN II – Menghubungkan tujuan sektoral dan GS dengan orientasi dan sasaran strategis Perhimpunan

Tabel 8.1 – Tujuan dan sasaran strategis Perhimpunan

	Sasaran ITU-R	Sasaran ITU-T	Sasaran ITU-D	Sasaran GS
ITU-R				
Tujuan 1	X			
Tujuan 2	X			
Tujuan 3	X			
Tujuan 4	X			
Tujuan 5	X			
ITU-T				
Tujuan 1		X		
Tujuan 2		X		
Tujuan 3		X		
Tujuan 4		X		
ITU-D				
Tujuan 1			X	
Tujuan 2			X	
Tujuan 3			X	
Tujuan 4			X	
Tujuan 5			X	
Tujuan 6			X	
GS				
Tujuan 1				X
Tujuan 2				X
Tujuan 3				X
Tujuan 4				X
Tujuan 5				X
Tujuan 6				X

BAGIAN III – Deskripsi umum istilah yang digunakan dalam Resolusi 71

Istilah	Deskripsi
Misi	Misi merujuk pada tugas utama/ fungsi penentu Sekretariat Jenderal ITU atau setiap Sektor ITU sebagaimana tercantum dalam Konstitusi dan Konvensi ITU.
Sasaran	Sasaran merujuk pada target Perhimpunan tingkat tinggi yang tujuan Sektor dan Sekretariat Jenderal ITU memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tujuan	Tujuan merujuk pada maksud dan tujuan tertentu dari Sektor individual dan Sekretariat Jenderal
Keluaran	Keluaran merujuk pada produk dan layanan akhir sebagaimana disampaikan oleh ITU (misal program yang dapat diselesaikan).
Hasil yang diharapkan	Hasil yang diharapkan seharusnya mencerminkan keluaran kegiatan yang diinginkan (keluaran, yang kadang disebut sebagai “hasil akhir”), seharusnya dikaitkan, apabila sesuai, yang mendasari tujuan rencana strategis.
Indikator kinerja penentu (KPIs)	KPIs merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur pencapaian keluaran (atau hasil akhir). Indikator tersebut dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Berkenaan dengan KPI, suatu contoh dari indikator “kualitatif” dapat menjadi suatu survei untuk kepuasan peserta berkenaan dengan penyelenggaraan WTDC, yang terkait dengan Tujuan 1 dan Keluaran/Hasil akhir 1 BDT.

RESOLUSI 72 (Rev. Guadalajara, 2010)
Menghubungkan perencanaan strategis, keuangan dan operasional
dalam ITU

Konferensi yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) penerimaan Rekomendasi 11 (Valletta, 1998) pada Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia, dengan menggarisbawahi kebutuhan untuk perencanaan finansial dan operasional akan dipertimbangkan untuk pelaksanaan untuk ITU berbasis luas pada Konferensi yang Berkuasa penuh ini;
- b) bahwa, dalam rencana strategis Perhimpunan 2004-2007, sebagai salah satu dari prioritas ITU, perencanaan operasional diperluas sampai pada ketiga Sektor dan Sekretariat Jenderal sebagai suatu mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan meningkatkan hubungan antara alat pengelola ini dan perencanaan strategis serta proses anggaran keuangan,

mengakui

- a) bahwa proses dimana kemajuannya dengan mencapai tujuan-tujuan ITU dapat diukur mungkin dapat ditingkatkan secara berarti melalui pertautan rencana-rencana strategis, finansial dan operasional yang menyusun kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama periode setiap empat-tahun;
- b) bahwa rencana-rencana operasional dan finansial ITU seharusnya menetapkan kegiatan-kegiatan Perhimpunan, tujuan-tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut dan sumber-sumber yang terkumpul, dan dapat dimanfaatkan secara efektif, antara lain:
 - untuk memantau kemajuan dalam pelaksanaan program-program Perhimpunan;
 - untuk meningkatkan kemampuan keanggotaan untuk mengevaluasi, dengan menggunakan indikator kinerja, kemajuan dalam pencapaian program kegiatan-kegiatan;
 - untuk meningkatkan efisiensi kegiatan-kegiatan ini;
 - untuk memastikan transparansi, terutama dalam penerapan pemulihan biaya;
 - untuk meningkatkan kelengkapan antara kegiatan-kegiatan ITU dan kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi telekomunikasi internasional dan regional lainnya.
- c) bahwa pengenalan perencanaan operasional dan hubungan yang efektif dalam perencanaan strategis dan finansial dapat membuat perubahan dalam Regulasi Keuangan yang diperlukan untuk menguraikan hubungan-hubungan antara dokumen-dokumen yang terkait dan untuk menyelaraskan keberadaan informasi yang terkandung didalamnya;

- d) bahwa suatu mekanisme pandangan menyeluruh yang efektif dan khusus diperlukan dalam rangka untuk memungkinkan Dewan secara memadai mengaudit kemajuan yang mengaitkan dengan fungsi-fungsi strategis, operasional dan finansial serta untuk menilai pelaksanaan rencana-rencana operasional,
- e) bahwa, agar dapat membantu Negara-negara Anggota dalam mengembangkan usulan-usulan untuk konferensi-konferensi, sekretariat seharusnya diundang untuk mempersiapkan panduan untuk mengidentifikasi kriteria yang akan diterapkan dalam menilai dampak-dampak finansial, dan untuk menyebarkan panduan dalam suatu bentuk surat-surat edaran Sekretaris Jenderal atau para Direktur Biro;
- f) bahwa Negara-negara Anggota, dalam mempertimbangkan panduan yang dipersiapkan oleh sekretariat, seharusnya, sepanjang dapat dipraktekkan, termasuk informasi relevan dalam suatu lampiran terhadap usulan-usulan mereka, agar dapat mengizinkan Sekretaris Jenderal/Para Direktur Biro untuk mengenali dampak-dampak keuangan yang mungkin ada dari usulan-usulan serupa,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-Direktur dari ketiga Biro

- 1 untuk mengidentifikasikan kebijakan-kebijakan dan elemen-elemen tertentu yang seharusnya dipertimbangkan untuk menunjukkan indikatif dan bukan eksklusif, yang akan diikutsertakan dalam rencana-rencana operasional, yang akan membantu Perhimpunan dalam melaksanakan rencana-rencana strategi dan finansial serta memungkinkan Dewan untuk meninjau pelaksanaannya;
- 2 untuk meninjau kembali Peraturan Finansial Perhimpunan, dengan memperhatikan pandangan Negara-negara Anggota dan saran dari kelompok-kelompok penasihat Sektor, serta membuat usulan-usulan yang sesuai dengan pertimbangan Dewan sejalan konsideran *mengakui c) dan d) di atas*;
- 3 untuk menyiapkan masing-masing rencana-rencana yang sudah dikonsolidasikan yang mencerminkan penghubungan antara rencana strategis, finansial dan operasional, untuk peninjauan kembali yang dilakukan oleh Dewan setiap tahunan;
- 4 untuk membantu Negara-negara Anggota dalam mempersiapkan estimasi-estimasi biaya dari usulan-usulannya untuk semua konferensi dan sidang Perhimpunan;
- 5 untuk menyediakan pada konferensi-konferensi dan sidang-sidang informasi yang diperlukan dari mekanisme finansial dan perencanaan yang baru secara menyeluruh yang disediakan dalam rangka penghitungan secara wajar finansial dari keputusan-keputusan yang akan dibuat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 Konvensi ITU,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk mengevaluasi kemajuan dengan menghubungkan fungsi-fungsi strategis, finansial dan operasional dan dengan melaksanakan perencanaan operasional, serta untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan dari resolusi-resolusi ini;
- 2 untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa rencana-rencana strategis, finansial dan operasional di masa depan akan dipersiapkan sejalan dengan resolusi ini;
- 3 untuk mempersiapkan suatu laporan, dengan rekomendasi-rekomendasi apapun yang sesuai, untuk dipertimbangkan oleh konferensi yang berkuasa penuh 2014,

mendesak Negara-negara Anggota

untuk berhubungan dengan sekretariat pada suatu tahapan awal dalam mengembangkan usulan-usulan beserta dampak-dampak finansialnya sehingga persyaratan-persyaratan rencana kerja dan sumber daya terkait dapat diidentifikasi, dan sebesar mungkin dapat dipraktikkan, termasuk dalam usulan-usulan tersebut.

**RESOLUSI 77 (Rev. Guadalajara, 2010)
Konferensi, sidang dan forum Perhimpunan
di masa datang (2011-2014)**

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengakui

- a) Resolusi 111 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) Resolusi 153 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini,

telah menimbang

- a) Dokumen PP-10/55 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal mengenai konferensi-konferensi dan sidang-sidang yang direncanakan;
- b) usulan-usulan yang disampaikan oleh beberapa Negara Anggota,

dengan mengingat

persiapan kerja yang diperlukan untuk dilaksanakan oleh Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor, Sekretariat Jenderal dan Sektor-sektor Perhimpunan sebelum setiap sesi dari suatu konferensi atau sidang,

memperhatikan

bahwa tanggal-tanggal untuk sidang Komunikasi Radio (RA) yang berikutnya telah ditentukan untuk tanggal 16-20 Januari 2012, dan untuk Konferensi Komunikasi Radio Dunia (WRC) yang berikutnya pada tanggal 23 Januari – 17 Februari 2012,

memutuskan

- 1 bahwa jadwal untuk konferensi, sidang dan forum masa datang untuk tahun 2011-2014 wajib sebagai berikut:
 - 1.1 Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA): November 2012
 - 1.2 Konferensi Dunia mengenai Telekomunikasi Internasional (WCIT): November 2012
 - 1.3 Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC): Maret-April 2014;
 - 1.4 Konferensi Yang Berkuasa Penuh (PP-14): akan diadakan di Korea (Republik);
- 2 bahwa agenda-agenda konferensi-konferensi dunia dan regional wajib ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ITU yang relevan dan agenda sidang-sidang wajib ditetapkan, apabila sesuai, dengan memperhatikan resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi dari konferensi-konferensi dan sidang-sidang yang relevan;

- 3 i) bahwa tanggal dan jangka waktu yang telah diberikan dalam *memperhatikan* di atas untuk WRC-12, untuk agenda telah ditentukan dan disetujui, tidak boleh diubah;
- ii) bahwa konferensi-konferensi dan sidang-sidang yang disebutkan dalam *memutuskan* 1 akan diadakan di dalam periode yang dinyatakan disitu, bahwa tanggal dan tempat yang tepat, bila belum ditentukan, akan ditentukan oleh Dewan setelah konsultasi Negara-negara Anggota, dengan membiarkan waktu yang cukup antara berbagai konferensi, dan bahwa jangka waktu yang tepat akan ditentukan oleh Dewan setelah agenda mereka telah disusun.

RESOLUSI 91 (Rev. Guadalajara, 2010)
Penggantian biaya untuk beberapa produk dan layanan ITU

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) bahwa pemeriksaan opsi-opsi untuk penguatan dasar finansial Perhimpunan telah disahkan berdasarkan konferensi-konferensi yang berkuasa penuh sebelumnya, termasuk mengurangi biaya-biaya, alokasi sumber-sumber yang lebih efektif, menggolongkan kegiatan sesuai dengan tujuan-tujuan rencana strategis, ikut serta yang lebih luas dari entitas-entitas selain daripada Negara-negara Anggota dan, apabila sesuai, membebankan biaya-biaya untuk layanan-layanan ITU, khususnya dimana layanan-layanan ini dicari pada basis kebebasan memilih atau lebih besar dari tingkat fasilitas-fasilitas yang umumnya disediakan;
- b) bahwa Resolusi Dewan 1210 memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menyusun suatu proses akuntansi-biaya yang menghasilkan biaya proyek dan kegiatan individual ITU dapat diidentifikasi dan diaudit, proses tersebut adalah sangat perlu untuk pengembangan anggaran keuangan berbasis kegiatan yang akurat dan untuk pelaksanaan penggantian biaya;
- c) bahwa solidaritas antar Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dalam berbagi secara pantas dalam pembayaran kewajiban finansial harus terus menjadi suatu prinsip penting untuk landasan finansial Perhimpunan;
- d) bahwa Perhimpunan telah mengembangkan suatu sistem kontribusi dimana beberapa Negara Anggota telah menanggung secara sukarela bagian besar dalam dukungan finansial untuk kegiatan inti Perhimpunan, dimana semua Negara Anggota mendapatkan manfaat, walaupun pentingnya kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur secara berbeda oleh Negara-negara Anggota yang berbeda.

memperhatikan

- a) konsep penganggaran berbasis hasil yang telah dikembangkan dan dilaksanakan sehubungan dengan anggaran 2006-2007 Perhimpunan, sejalan dengan Resolusi Dewan 1216;
- b) bahwa Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Minneapolis, 1998) memutuskan untuk melaksanakan perencanaan operasional dalam ketiga Sektor dan Sekretariat Jenderal, untuk menghubungkan perencanaan finansial dengan rencana strategis, dengan menerima Resolusi 72 (Minneapolis, 1998), yang diubah kemudian pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Marrakesh, 2002), pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006) dan pada konferensi ini;

- c) diterimanya, oleh Keputusan Dewan 535, suatu metodologi alokasi-biaya yang memberikan ketelitian dalam proses akuntansi-biaya dan dalam alokasi biaya-biaya pengeluaran, melalui rancangan dan pelaksanaan dari suatu sistem penjejak-an-waktu, dan memungkinkan identifikasi keseluruhan dari biaya-biaya kegiatan dan keluaran, termasuk, antara lain, biaya-biaya pengembangan dan biaya-biaya produksi, penjualan, pemasaran dan penyebaran;
- d) peran Dewan dalam menyusun penjagaan keamanan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran pada saat menerima anggaran keuangan dua tahunan dan pada saat meninjau kembali rencana-rencana operasional tahunan dan laporan-laporan kerja finansial,

mengakui

- a) bahwa penerapan mekanisme-mekanisme pemulihan biaya bersifat spesifik untuk proses-proses usaha yang relevan dari berbagai produk dan layanan yang merujuk pada pemulihan biaya;
- b) bahwa metodologi yang diterapkan untuk pelaksanaan pemulihan biaya untuk pendaftaran- pendaftaran jaringan satelit ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan 482 (dimodifikasi tahun 2008) (Dokumen C08/103);
- c) bahwa pembebanan penggantian biaya-biaya untuk produk-produk dan layanan-layanan dipisahkan ke produk atau layanan khusus, meliputi hanya biaya-biaya langsung dan tidak langsung dari penyediaan produk atau layanan dimana mereka terkait, dan seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai menghasilkan pendapatan dari para anggota;
- d) bahwa batas-batas alokasi-alokasi biaya tidak langsung seharusnya diterapkan sejak, walaupun upaya-upayan terbaik menentukan suatu metodologi alokasi biaya yang adil sebagaimana dirujuk pada *memperhatikan c)* di atas, tidak mungkin untuk menjamin bahwa metodologi tersebut akan selalu menghasilkan suatu tingkat alokasi yang wajar dari biaya-biaya tidak langsung untuk suatu produk atau layanan yang sudah ada;
- e) bahwa pemulihan biaya dapat berupa suatu cara untuk meningkatkan efisiensi dengan tidak menganjurkan penggunaan produk-produk atau layanan-layanan yang tidak perlu atau sia-sia;
- f) bahwa tidak dibayarnya tagihan-tagihan yang dikeluarkan untuk produk-produk dan layanan-layanan yang diperuntukan untuk pemulihan biaya memiliki dampak negatif terhadap keadaan finansial Perhimpunan,

memutuskan

- 1 untuk meneruskan untuk menyetujui penggunaan pemulihan biaya berbasis prabayar, hingga semaksimal mungkin, sebagai suatu cara untuk mendanai produk-produk dan layanan-layanan Perhimpunan dengan pendekatan pemulihan-biaya yang disepakati;

- 2 bahwa penerapan lebih lanjut dari pemulihan biaya seharusnya dipertimbangkan oleh Dewan, dan, apabila sesuai, dilaksanakan:
 - i) untuk produk-produk dan layanan-layanan baru ITU;
 - ii) untuk produk-produk dan layanan-layanan yang direkomendasi oleh suatu konferensi atau sidang Sektor;
 - iii) dalam hal-hal lain sebagaimana Dewan akan menganggap sesuai;
- 3 bahwa, apabila Dewan sedang membahas penerapan pemulihan biaya untuk suatu produk atau layanan tertentu, faktor-faktor berikut ini seharusnya terus diperhatikan:
 - i) apabila suatu produk atau layanan yang diberikan untuk kemanfaatan pada sejumlah Negara-negara Anggota atau Anggota-anggota Sektor secara terbatas;
 - ii) apabila suatu produk atau layanan mendapat permintaan dalam jumlah yang secara signifikan besarnya oleh sejumlah kecil pengguna;
 - iii) apabila produk atau layanan mendapat permintaan berdasarkan basis keleluasaan;
- 4 bahwa pemulihan biaya seharusnya dilaksanakan oleh Dewan dengan cara berikut:
 - i) memastikan bahwa biaya-biaya langsung dan tidak langsung untuk penyediaan produk-produk dan jasa-jasa dilunasi sebagaimana dirujuk pada *memperhatikan c)* di atas;
 - ii) mengizinkan penghitungan yang terbuka dan transparan untuk biaya-biaya dan tanda terima-tanda terimanya;
 - iii) menyediakan suatu cara untuk menyesuaikan pembebanan biaya terhadap produk dan layanan yang berbasis pada biaya-biaya langsung dan tidak langsung sesuai dengan yang disebut dalam *memperhatikan c)* di atas;
 - iv) menyediakan suatu metodologi yang mencantumkan seluruh biaya tidak langsung spesifik yang dapat memberikan kontribusi terhadap keseluruhan biaya produk atau layanan tersebut;
 - v) menyediakan suatu batas atas untuk tingkat biaya-biaya tidak langsung yang akan dialokasikan suatu produk atau layanan, dalam pengertian persentase maksimum yang ditetapkan secara global dari biaya-biaya tetap yang tidak akan melampaui ;
 - vi) memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, khususnya negara-negara terbelakang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dalam ekonomi transisi, untuk memastikan bahwa penggantian biaya bukan merupakan halangan untuk pengembangan layanan-layanan dan jaringan-jaringan telekomunikasi di negara-negara tersebut;
 - vii) mengizinkan seluruh Negara Anggota suatu tingkat produk atau layanan bebas biaya, apabila sesuai;
 - viii) memastikan bahwa pungutan tidak dikenakan pada produk atau layanan yang diminta sebelum tanggal keputusan oleh Dewan atau

Konferensi Yang Berkuasa Penuh untuk menerapkan pemulihan biaya;

- ix) mengizinkan produk-produk dan layanan-layanan yang relevan untuk diselesaikan dengan cara yang paling efisien dan hemat-biaya, dengan memperhatikan praktik-praktik terbaik dari organisasi-organisasi internasional lainnya, apabila sesuai,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

berkonsultasi dengan para Direktur Biro, Negara Anggota dan Anggota Sektor,

- 1 untuk terus mempertimbangkan dan merekomendasikan serangkaian kriteria untuk penerapan pemulihan biaya, konsisten dengan, tetapi tidak terbatas pada, *memutuskan* 1, 2, 3 dan 4 di atas;
- 2 untuk menentukan produk-produk dan layanan-layanan pemulihan biaya dan mengusulkan produk-produk dan layanan-layanan tambahan dengan pendekatan pemulihan biaya dapat diterapkan,
- 3 menetapkan struktur biaya dari setiap produk dan layanan untuk pemulihan biaya;
- 4 untuk menyusun prosedur-prosedur dan mekanisme- mekanisme untuk melaksanakan prabayar untuk produk-produk dan layanan-layanan yang terkena pemulihan biaya, termasuk penagihan , untuk dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan;
- 5 untuk menyiapkan suatu laporan untuk mendapatkan pertimbangan pada setiap sesi tahunan Dewan, termasuk tindakan-tindakan lebih lanjut yang mungkin dipersyaratkan untuk pelaksanaan pemulihan biaya, agar memungkinkan peningkatan pendapatan sejalan dengan Resolusi 158 (Antalya, 2006) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh;

memerintahkan Dewan

- 1 untuk terus menimbang laporan dan usulan-usulan Sekretaris Jenderal dan menerima kriteria atau modifikasi- modifikasi baru terhadap kriteria sebelumnya untuk penerapan biaya pemulihan secara konsisten dengan *memutuskan* 1, 2, 3 dan 4 di atas;
- 2 untuk terus menimbang, berdasarkan kasus demi kasus, produk-produk dan layanan-layanan yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas, dan menentukan produk-produk dan layanan-layanan mana yang dikenakan pemulihan biaya;
- 3 untuk terus mengembangkan pembebanan biaya yang sesuai berdasarkan pengenaan sepenuhnya biaya-biaya untuk menyediakan layanan;
- 4 untuk terus melaksanakan pengaturan-pengaturan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dalam ekonomi transisi;

- 5 untuk terus meningkatkan efisiensi pengiriman dari dan pembayaran untuk produk-produk dan layanan- layanan yang dikenakan pembebanan pemulihan biaya;
- 6 untuk memastikan bahwa setiap kekurangan dalam pendapatan diatur secara benar, dengan meninjau kembali secara tahunan kinerja yang sebenarnya dari kegiatan-kegiatan yang dikenakan pemulihan biaya, sehingga tindakan-tindakan pembedulan yang sesuai dengan tepat waktu dapat dilakukan;
- 7 untuk memperbaiki perkiraan pendapatan pemulihan biaya dengan menggunakan kerangka kerja penganggaran yang berdasarkan hasil, sistem penjejakan waktu dan metodologi alokasi biaya;
- 8 untuk terus mengubah Peraturan Finansial sebagaimana diperlukan dalam rangka memungkinkan pelaksanaan pemulihan biaya dan memastikan akuntabilitas dan keakuratan;
- 9 untuk melaporkan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai tindakan yang diambil untuk melaksanakan resolusi ini.

RESOLUSI 94 (Rev. Guadalajara, 2010)
Mengaudit rekening Perhimpunan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) bahwa Auditor Eksternal, anggota Panel Auditor-Auditor Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ditunjuk oleh Pemerintah Konfederasi Swiss mengaudit rekening-rekening Perhimpunan untuk tahun 2006-2009 dengan sangat hati-hati, kompeten dan akurat;
- b) bahwa Panel Auditor-Auditor Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung praktik terbaik dimana auditor eksternal dari organisasi internasional harus ditunjuk dengan cara yang terbuka, adil dan transparan;
- c) bahwa Dewan ITU, pada sesinya tahun 2008 dan berdasarkan pada suatu surat dari Kantor Audit Federal Swiss, menanyakan kepada sekretariat untuk mempertimbangkan rotasi auditor eksternal sebelum konferensi yang berkuasa penuh 2010,

mengakui

bahwa hanya Konferensi Yang Berkuasa Penuh dapat membuat keputusan mengenai penunjukan auditor eksternal,

memutuskan untuk menyatakan

rasa terima kasihnya yang paling hangat dan syukur yang paling dalam kepada Pemerintah Konfederasi Swiss dan harapannya bahwa pengaturan-pengaturan yang telah ada untuk mengaudit rekening-rekening Perhimpunan dapat diperbaharui dalam jangka waktu singkat,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk membawa resolusi ini kepada perhatian Pemerintah Konfederasi Swiss;
- 2 untuk menginisiasi, bilamana dirasa perlu oleh Dewan, mengadakan tender pengaturan-pengaturan untuk seleksi auditor eksternal konsisten dengan praktik terbaik yang dijelaskan dalam *mempertimbangkan b)* di atas, dan untuk melapor kembali kepada Dewan dalam prosesnya.

**RESOLUSI 99 (Rev. Guadalajara, 2010)
Status Palestina dalam ITU**

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia;
- b) Resolusi 52/250 sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keikutsertaan Palestina dalam kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c) Resolusi-resolusi 32 (Kyoto, 1994) dan 125 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- d) Resolusi 18 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia;
- e) bahwa Nomor 6 dan 7 Pasal 1 Konstitusi ITU menyatakan “Untuk meningkatkan perluasan kemanfaatan teknologi telekomunikasi baru kepada seluruh penduduk dunia” dan “untuk meningkatkan penggunaan layanan-layanan telekomunikasi dengan tujuan untuk memfasilitasi hubungan perdamaian”,

menimbang

- a) bahwa instrumen-instrumen dasar Perhimpunan bermaksud untuk memperkuat perdamaian dan keamanan dunia dengan cara-cara kerja sama internasional dan pemahaman yang lebih baik antar manusia;
- b) bahwa, untuk mencapai maksud di atas, ITU perlu bersifat universal,

menimbang lebih lanjut

- a) hasil-hasil fase Jenewa (2003) maupun Tunis (2005) dari Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi;
- b) keikutsertaan Palestina dalam Konferensi Komunikasi Radio Regional (Jenewa, 2006), dan penerimaan persyaratan-persyaratan Palestina dalam Rencana penyiaran digital, berdasarkan pada pemberitahuannya kepada Sekretaris Jenderal ITU bahwa Palestina menerima hak-hak tersebut dan berkomitmen untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang timbul daripadanya;
- c) perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan terus menerus di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pertanggungjawaban Otoritas Palestina, menuju pada restrukturisasi dan liberalisasi sektor dan persaingan;
- d) bahwa Palestina adalah anggota dari Liga Negara-negara Arab, Organisasi Konferensi Islam, Gerakan Non-Blok dan Kemitraan Euro-Mediterrania;

- e) bahwa banyak, tapi tidak semua, Negara-negara Anggota ITU yang mengakui Palestina sebagai Negara,

dengan mengingat

prinsip-prinsip dasar dalam pembukaan Konstitusi,

memutuskan

bahwa, penundaan setiap perubahan lebih lanjut status Palestina dalam ITU, wajib berlaku sebagai berikut :

- 1 ketentuan-ketentuan Regulasi Administratif, dan resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi terkait, wajib diberlakukan pada Otoritas Palestina dengan cara yang sama sebagaimana telah diterapkan pada lembaga-lembaga administrasi sebagaimana ditentukan dalam Nomor 1002 Konstitusi, dan Sekretariat Jenderal serta ketiga Biro wajib bertindak sesuai dengannya, terutama berkaitan dengan kode akses internasional, tanda-tanda panggilan dan pengolahan pemberitahuan penetapan frekuensi;
- 2 Palestina wajib berpartisipasi dalam semua konferensi, sidang dan pertemuan ITU serta dalam konferensi-konferensi pembuatan perjanjian dengan hak-hak tambahan sebagai berikut:
 - hak untuk menyampaikan butir-butir ketertiban;
 - hak untuk ikut mensponsori naskah usulan-usulan;
 - hak untuk berpartisipasi dalam debat-debat;
 - Palestina wajib memiliki hak untuk dimasukkan dalam daftar pembicara di bawah pokok agenda selain dari permasalahan Palestina dan Timur Tengah pada pertemuan paripurna atau pertemuan komite manapun dari konferensi-konferensi, sidang-sidang dan pertemuan-pertemuan tersebut diatas;
 - hak untuk menjawab;
 - Palestina wajib memiliki hak untuk menghadiri pertemuan-pertemuan kepala-kepala delegasi;
 - Palestina wajib memiliki hak untuk meminta penyisipan verbatim dari pernyataan manapun yang dibuat selama perdebatan;
- 3 Delegasi Palestina wajib ditempatkan segera setelah Negara-negara Anggota;
- 4 Badan-badan operasi Palestina, organisasi-organisasi ilmu pengetahuan atau industrial serta lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan dari Palestina yang berhubungan dengan bidang-bidang telekomunikasi dapat mengajukan secara langsung kepada Sekretaris Jenderal untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Perhimpunan sebagai Anggota-anggota Sektor atau Asosiat-asosiat, dan permohonan dimaksud akan ditindaklanjuti sepatutnya; meskipun telah diatur diatas, ketentuan-ketentuan Nomor 28B dan 28C Konstitusi (sepanjang bahwa ketentuan terakhir menyinggung terhadap diterimanya pertanyaan dan rekomendasi yang mensyaratkan dampak-dampak kebijakan atau

peraturan, serta keputusan-keputusan yang berhubungan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur kerja dari Sektor yang berkepentingan) tidak wajib diberlakukan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk memastikan pelaksanaan resolusi ini dan semua resolusi lain yang diterapkan oleh konferensi yang berkuasa penuh terhadap Palestina, khususnya keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kode akses internasional dan pemberitahuan penetapan frekuensi, serta untuk melapor secara berkala kepada Dewan mengenai kemajuan dalam hal ini;
- 2 untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ketiga Sektor Perhimpunan sesuai dengan *memutuskan* di atas dalam rangka untuk memastikan efektifitas yang maksimal dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Perhimpunan yang mendukung Otoritas Palestina serta untuk melaporkan kemajuan hal ini pada sidang Dewan dan pada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya.

**RESOLUSI 101 (Rev. Guadalajara, 2010)
Jaringan Internet berbasis Protokol**

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat kembali

- a) Resolusi 101 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) hasil-hasil fase Jenewa (2003) dan Tunis (2005) dari Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS), khususnya butir-butir 27 c) dan 50 d) Agenda Tunis untuk masyarakat Informasi, yang terkait dengan konektivitas Internet internasional;
- c) Nomor 196 Konvensi ITU, yang mengatur kelompok-kelompok studi standardisasi telekomunikasi wajib memberi perhatian yang sepantasnya pada kajian pertanyaan-pertanyaan dan terhadap rumusan rekomendasi-rekomendasi yang secara langsung terkait dengan pendirian, pengembangan dan perbaikan telekomunikasi di negara-negara berkembang baik ditingkat regional maupun internasional;
- d) Resolusi 23 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai akses dan ketersediaan Internet untuk negara-negara berkembang serta prinsip-prinsip penguasaan tarif koneksi Internet internasional;
- e) Resolusi 69 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA), mengenai akses dan penggunaan sumber-sumber daya Internet non diskriminasi;
- f) Rekomendasi ITU-T D.50, mengenai prinsip-prinsip tarif umum yang dapat diterapkan untuk koneksi Internet internasional;
- g) Resolusi 64 (Johannesburg 2008) WTSA, mengenai alokasi alamat IP dan mendorong peluncuran IPv6,

menyadari

- a) bahwa salah satu dari maksud Perhimpunan adalah untuk meningkatkan perluasan teknologi-teknologi telekomunikasi baru untuk seluruh penduduk dunia;
- b) bahwa, dalam rangka memenuhi maksud-maksudnya, Perhimpunan seharusnya, di antara hal lainnya, memfasilitasi standardisasi telekomunikasi seluruh dunia, dengan suatu kualitas layanan yang memuaskan,

menimbang

- a) bahwa kemajuan-kemajuan dalam infrastruktur informasi, termasuk pengembangan jaringan Internet berbasis Protokol (IP) dan khususnya Internet, serta pengembangan-pengembangan IP di masa depan, terus menjadi suatu isu yang sangat penting, sebagai mesin penggerak yang

penting untuk pertumbuhan bagi ekonomi dunia di abad kedupuluh satu;

- b) bahwa peningkatan penggunaan Internet memperkenalkan aplikasi-aplikasi tambahan baru dalam layanan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdasarkan pada teknologi mutakhirnya, misal penggunaan surat elektronik dan pesan teks, *voice over IP*, video, dan siaran langsung TV (IPTV) melalui Internet, dimana telah menjadi hal yang umum, walaupun ada tantangan-tantangan mengenai kualitas layanan, ketidakpastian sumber, dan tingginya biaya konektivitas internasional;
- c) bahwa jaringan-jaringan berbasis IP di masa sekarang dan masa depan akan terus memperkenalkan perubahan-perubahan dramatis dalam cara kita mendapatkan, membuat, mengedarkan dan menggunakan informasi;

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa Sektor Pengembangan Telekomunikasi (ITU-D) telah membuat kemajuan signifikan dan menjalankan beberapa kajian mengenai peningkatan prasarana dan penggunaan Internet di negara-negara berkembang, dalam Rencana Aksi Istanbul 2002 nya, melalui upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia seperti prakarsa Pusat Pelatihan Internet; dan hasil-hasil dari Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia (WTDC-06), yang mengesahkan lanjutan kajian-kajian tersebut, dan menyerukan pada ITU-D untuk memberi bantuan kepada negara-negara berkembang, termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara berkembang daratan, untuk menyusun jaringan tulang-punggung berkecepatan tinggi untuk Internet, sebagaimana juga titik-titik akses nasional, subregional dan regional untuk Internet;
- b) bahwa kajian-kajian sedang berlangsung dalam Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) mengenai isu-isu jaringan yang berbasis IP, termasuk kemampuan saling beroperasi layanan dengan jaringan-jaringan telekomunikasi lainnya, penomoran, persyaratan sinyal dan aspek-aspek protokol, biaya-biaya komponen keamanan dan prasarana, isu-isu yang berhubungan dengan perubahan pada jaringan generasi mendatang (NGN), termasuk migrasi dari jaringan yang ada pada NGN dan pelaksanaan persyaratan-persyaratan Rekomendasi ITU-T D.50;
- c) bahwa ada perjanjian kerja sama umum antara ITU-T dan Masyarakat Internet (ISOC)/ Satuan Tugas Teknik Internet (IETF), sebagaimana dirujuk dalam Tambahan 3 dari rekomendasi-rekomendasi Seri A ITU-T, tetap ada,

mengakui

- a) bahwa jaringan-jaringan berbasis IP telah berkembang menjadi media yang dapat diakses secara luas yang digunakan untuk perniagaan dan komunikasi global, dan oleh karenanya ada kebutuhan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan global yang terkait dengan jaringan-jaringan berbasis IP berkenaan, misalnya:
 - i) prasarana, kemampuan saling beroperasi dan standardisasi;
 - ii) penamaan dan pengalamatan Internet;
 - iii) penyebarluasan informasi mengenai jaringan-jaringan berbasis IP dan dampaknya terhadap perkembangannya untuk Negara-negara Anggota ITU, khususnya negara-negara berkembang;
- b) bahwa kegiatan signifikan mengenai isu-isu yang terkait dengan IP dan internet di masa depan¹ yang sedang dilakukan dalam ITU dan banyak badan internasional lainnya;
- c) bahwa kualitas layanan jaringan-jaringan berbasis IP seharusnya konsisten dengan rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan standar-standar internasional lain yang diakui;
- d) bahwa itu merupakan kepentingan publik bahwa jaringan-jaringan berbasis IP dan jaringan-jaringan telekomunikasi lainnya seharusnya dapat saling beroperasi dan menyediakan, minimal, dengan tingkat kualitas layanan sebagaimana disediakan oleh jaringan-jaringan tradisional, yang konsisten dengan rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan standar-standar internasional lainnya yang diakui,

memohon kepada Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU

untuk meneruskan kegiatan-kegiatan kolaboratif nya terhadap jaringan berbasis IP dengan ISOC/IETF dan organisasi relevan lain yang diakui, dengan memperhatikan interkoneksi dengan jaringan-jaringan telekomunikasi yang ada serta migrasi kepada NGN dan jaringan-jaringan masa depan,

memohon kepada tiga Sektor

untuk terus mempertimbangkan masa depan program kerja mereka mengenai jaringan berbasis IP serta mengenai migrasi kepada NGN dan jaringan-jaringan masa depan,

memutuskan

- 1 untuk menjelajahi cara-cara dan sarana-sarana untuk kolaborasi dan koordinasi yang lebih besar antara ITU dan organisasi-organisasi²

¹ misal acara ITU-T Kaleidoscope tentang *Beyond the Internet? – Innovations for future networks and services*, diadakan di Pune, India pada Desember 2010

² termasuk, namun tidak terbatas, pada *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, *regional Internet registries (RIRs)*, *Internet Engineering Task Force (IETF)*, *Internet Society (ISOC)* dan *World Wide Web Consortium (W3C)*, atas dasar timbal-balik.

- relevan yang terlibat dalam pengembangan jaringan-jaringan berbasis IP dan internet masa depan, melalui persetujuan-persetujuan kerjasama, sebagaimana sesuai, untuk meningkatkan peran ITU dalam pengaturan Internet sehingga memastikan manfaat-manfaat maksimal untuk komunitas global;
- 2 bahwa ITU wajib memanfaatkan sepenuhnya kesempatan-kesempatan untuk pengembangan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang timbul dari pertumbuhan layanan-layanan berbasis IP, sejalan dengan tujuan-tujuan ITU serta hasil-hasil fase WSIS Jenewa (2003) dan Tunis (2005), dengan memperhatikan kualitas dan keamanan layanan-layanan;
 - 3 bahwa ITU wajib secara jelas mengidentifikasi, untuk Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor serta untuk masyarakat umum, jajaran isu-isu yang terkait dengan internet yang berada di bawah pertanggungjawaban pemangku jabatan Perhimpunan di bawah naskah-naskah dan kegiatan-kegiatan dasar dalam dokumen-dokumen hasil WSIS dimana ITU berperan;
 - 4 bahwa ITU akan berkolaborasi dengan organisasi relevan lainnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan dalam jaringan berbasis IP, sejalan dengan dan dengan memperhatikan jaringan tradisional, menyampaikan manfaat maksimal kepada masyarakat global, dan akan terus berpartisipasi, sebagaimana sesuai, dalam setiap inisiatif internasional yang berhubungan langsung, khususnya pada inisiatif terbaru dalam kerjasama dengan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perhimpunan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengenai Komisi Pita Lebar Perhimpunan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk tujuan ini;
 - 5 untuk melanjutkan studi konektivitas Internet internasional sebagai suatu permasalahan mendesak, sebagaimana diserukan dalam butir 50 d) Agenda Tunis, dan untuk menyerukan terhadap ITU-T, khususnya Kelompok Studi 3 yang memiliki tanggung jawab untuk Rekomendasi ITU-T D.50 untuk secepat mungkin melengkapi studinya yang telah berlangsung sejak WTS-2000,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk menyiapkan laporan tahunan kepada Dewan dengan masukan yang sesuai dari Negara-Negara Anggota, Anggota-Anggota Sektor, tiga Sektor dan Sekretariat Jenderal, yang menyediakan suatu ringkasan lengkap mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan ITU dengan memperhatikan jaringan-jaringan berbasis IP dan perubahan-perubahan apapun padanya, termasuk pengembangan NGN dan jaringan-jaringan masa depan, dan mengenai peran-peran serta kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi internasional lain yang relevan, menjelaskan keterlibatan mereka dalam permasalahan jaringan berbasis IP; laporan tersebut akan menunjukkan tingkat kerjasama antara ITU dan organisasi-organisasi ini, menarik informasi yang dibutuhkan bilamana mungkin dari sumber-sumber yang ada, dan memuat usulan-usulan

kongkrit mengenai memperbaiki kegiatan ITU dan kerjasama serupa, dan akan disebarkan secara luas di antara Negara-Negara Anggota dan Anggota-Anggota Sektor, kelompok penasihat dari tiga Sektor dan kelompok-kelompok lain yang terlibat, satu bulan sebelum sesi Dewan;

- 2 berdasarkan laporan ini, untuk meneruskan kegiatan-kegiatan kolaboratif yang berhubungan dengan jaringan berbasis IP, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil-hasil dari dua fase WSIS yang relevan;
- 3 untuk mengajukan pada sesi Dewan 2011 bahwa forum khusus di dalam Resolusi 2 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi atau pelatihan kerja ini diselenggarakan dalam kuartal pertama tahun 2013 untuk membahas semua permasalahan yang diangkat dalam resolusi ini dan juga dalam Resolusi-resolusi 102 dan 133 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, sebaiknya dialokasikan bersama dengan kegiatan-kegiatan ITU besar lain yang relevan,

mengundang Dewan

untuk mempertimbangkan laporan yang telah disebut di atas dan memperhatikan komentar-komentar, bila ada, yang dibuat oleh kelompok penasihat dari tiga Sektor melalui Direktur Biro masing-masing dan, bilamana sesuai, menjalankan langkah-langkah lebih lanjut, dan untuk mempelajari usulan Sekretaris Jendral yang memanggil forum dalam Resolusi 2 (Rev. Guadalajara, 2010) atau pelatihan kerja untuk membahas semua permasalahan yang terkait dengan resolusi ini dan dengan Resolusi-resolusi 102 dan 133 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini,

mengundang Negara-Negara Anggota dan Anggota-Anggota Sektor

- 1 untuk berpartisipasi dalam, dan mengikuti kemajuan dari, kerja terkini Sektor-Sektor Perhimpunan;
- 2 untuk meningkatkan kesadaran pada tingkat nasional di antara semua kelompok non-pemerintah yang berminat dan untuk mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan ITU yang relevan, dan dalam kegiatan yang relevan lainnya yang berasal dari fase-fase WSIS Jenewa (2003) dan Tunis (2005).

RESOLUSI 102 (Rev. Guadalajara, 2010)
Peran ITU dengan memperhatikan permasalahan kebijakan publik internasional mengenai Internet dan pengelolaan sumber Internet, termasuk nama dan alamat domain

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengakui

- a) semua resolusi relevan dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) semua hasil relevan dari Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS),

menimbang

- a) bahwa tujuan-tujuan Perhimpunan adalah, antara lain, untuk memajukan, pada tingkat internasional, penerimaan pendekatan luas terhadap permasalahan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam ekonomi dan masyarakat informasi global, untuk memajukan perluasan manfaat teknologi telekomunikasi baru kepada semua penghuni dunia dan untuk menyelaraskan upaya-upaya Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dalam pencapaian hasil akhir tersebut;
- b) bahwa kemajuan-kemajuan dalam prasarana informasi global, termasuk pengembangan jaringan Internet berbasis Protokol (IP) dan Internet, dengan memperhatikan persyaratan, fitur dan kemampuan saling beroperasi dari jaringan-jaringan generasi mendatang (NGN) dan jaringan-jaringan masa depan, adalah sangat penting sebagai suatu mesin penggerak penting untuk pertumbuhan dalam ekonomi dunia di abad kedua puluh satu;
- c) bahwa pengembangan Internet pada dasarnya ditentukan oleh pasar dan digerakkan oleh inisiatif-inisiatif swasta dan pemerintah;
- d) bahwa sektor swasta terus memainkan peran sangat penting dalam memperluas dan mengembangkan Internet, misalnya melalui investasi-investasi dalam prasarana-prasarana dan layanan-layanan;
- e) bahwa pengelolaan registrasi dan alokasi nama-nama dan alamat-alamat domain Internet harus sepenuhnya menggambarkan sifat geografis Internet, dengan memperhatikan keseimbangan yang pantas dari kepentingan semua pemangku kepentingan;
- f) peran yang dimainkan oleh ITU dalam penyelenggaraan yang sukses dari dua fase Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS), dan bahwa Deklarasi Prinsip Jenewa dan Rencana Aksi Jenewa, diterima pada 2003, dan Komitmen Tunis serta Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi, diterima pada 2005, telah disahkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa;

- g) bahwa pengelolaan Internet adalah suatu persoalan kepentingan internasional yang sah dan harus mengalir dari kerjasama internasional dan berbagai pemegang saham sepenuhnya berdasarkan hasil-hasil dua fase WSIS;
- h) bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam hasil-hasil WSIS, semua pemerintah harus memiliki peran dan tanggung jawab yang setara untuk pengaturan Internet internasional dan untuk memastikan stabilitas, keamanan dan kesinambungan Internet serta pengembangan masa depan dan internet di masa depan, dan bahwa kebutuhan untuk pengembangan kebijakan publik oleh para pemerintah dalam konsultasi dengan semua pemangku kepentingan juga diakui,

mengakui lebih lanjut

- a) bahwa ITU sedang menangani permasalahan teknis dan kebijakan yang berhubungan dengan jaringan berbasis IP termasuk Internet dan perubahan kepada NGN sebagaimana juga studi-studi menuju internet di masa depan;
- b) bahwa ITU menjalankan koordinasi seluruh dunia dari sejumlah sistem alokasi sumber-sumber yang berhubungan dengan komunikasi radio dan telekomunikasi dan bertindak sebagai forum untuk diskusi kebijakan dalam bidang ini;
- c) bahwa upaya signifikan telah dilakukan oleh ITU mengenai permasalahan ENUM, “.int”, nama domain yang diinternasionalkan (IDN), dan domain tingkat teratas kode negara (ccTLD) melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan standardisasi;
- d) bahwa ITU telah menerbitkan Buku Pegangan mengenai Jaringan Internet Berbasis Protokol (IP) dan topik serta isu terkait yang lengkap dan berguna;
- e) butir-butir 71 dan 78a) Agenda Tunis dengan memperhatikan pembangunan kerjasama yang ditingkatkan terhadap pengaturan Internet dan pendirian Forum Pengaturan Internet (IGF), sebagai dua proses yang berbeda;
- f) hasil-hasil WSIS yang relevan dalam butir-butir 29 sampai 82 dari Agenda Tunis mengenai pengaturan Internet;
- g) bahwa ITU harus didorong untuk memfasilitasi kerjasama dengan semua pemangku kepentingan sebagaimana dirujuk dalam butir 35 Agenda Tunis;
- h) bahwa Negara-negara Anggota mewakili kepentingan populasi negara atau wilayah dimana suatu ccTLD telah didelegasikan;
- i) bahwa negara-negara harus tidak terlibat dalam keputusan-keputusan mengenai ccTLD negara lain,

menekankan

- a) bahwa pengelolaan Internet mencakup permasalahan kebijakan teknis maupun publik dan harus melibatkan semua pemangku kepentingan serta organisasi-organisasi antarpemerintah dan internasional terkait sesuai dengan butir-butir 35 a) sampai e) Agenda Tunis;
- b) bahwa peran pemerintah-pemerintah termasuk menyediakan suatu kerangka kerja hukum yang jelas, konsisten dan dapat diperkirakan, untuk memajukan lingkungan yang diinginkan dimana jaringan TIK global dapat saling beroperasi dan dapat diakses secara luas oleh semua penduduk dan untuk memastikan perlindungan yang pantas dari kepentingan publik dalam pengelolaan sumber-sumber daya Internet, termasuk nama dan alamat domain;
- c) bahwa WSIS mengakui kebutuhan untuk mendorong kerja sama di masa akan datang, untuk memungkinkan para pemerintah, berdasarkan kesetaraan, untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya, dalam isu-isu kebijakan publik mengenai Internet, tetapi tidak merupakan permasalahan teknis dan operasional sehari-hari, yang tidak berdampak isu-isu kebijakan publik internasional;
- d) bahwa ITU, pada bagiannya, telah memulai proses menuju peningkatan kerja sama sebagai satu dari organisasi-organisasi relevan yang dirujuk dalam butir 71 Agenda Tunis, dan bahwa Kelompok yang Berdedikasi terhadap isu-isu kebijakan umum yang terkait dengan Internet internasional seharusnya melanjutkan kerjanya terhadap isu-isu kebijakan umum yang terkait dengan Internet;
- e) bahwa ITU dapat memainkan peran positif dengan menawarkan pada semua pihak yang berkepentingan suatu landasan untuk mendorong diskusi-diskusi dan untuk penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan nama-nama dan alamat-alamat domain Internet serta sumber-sumber daya Internet lainnya dalam mandat ITU,

memperhatikan

- a) keputusan untuk mengadakan rapat Forum Kebijakan Telekomunikasi Dunia ke empat dan hasil-hasil forum ini, khususnya Opini 1 dengan memperhatikan isu-isu kebijakan umum yang berkaitan dengan Internet, dan dengan mempertimbangkan Resolusi 47, 48, 49, 50 dan 52 (Rev. Johannesburg, 2008) dan 64, 69 dan 75 (Rev. Johannesburg, 2008) dari Sidang Umum Standardisasi Telekomunikasi Dunia(WTSA);
- b) bahwa Kelompok yang Berdedikasi, sebagai bagian integral dari Kelompok Kerja Dewan mengenai WSIS (Resolusi 75 (Johannesburg, 2008)), telah melanjutkan tujuan-tujuan resolusi tersebut mengenai isu-isu kebijakan umum yang berkaitan dengan Internet;
- c) yang memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menyebarluaskan, sebagaimana sesuai, laporan-laporan Kelompok yang Berdedikasi kepada semua organisasi internasional dan pemangku kepentingan yang relevan yang secara aktif terlibat dalam permasalahan-permasalahan tersebut untuk menjadi pertimbangan mereka dalam proses-proses pembuatan kebijakan mereka;

- d) bahwa Kelompok yang Berdedikasi akan menjadi lebih efisien dalam perannya bila menjadi otonom dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan;
- e) bahwa Kelompok yang Berdedikasi akan memasukkan dalam kerjanya semua keputusan yang relevan dari konferensi ini dan semua resolusi lain yang relevan dari kerja kelompok seperti disebutkan dalam Resolusi Dewan 1305 dan lampiran daripadanya,

memutuskan

untuk menjelajahi cara-cara dan sarana-sarana untuk kolaborasi dan koordinasi yang lebih besar antara ITU dan organisasi-organisasi relevan¹ yang terlibat dalam pengembangan jaringan-jaringan berbasis IP dan internet di masa depan, melalui perjanjian-perjanjian kerja sama, sebagaimana sesuai, untuk meningkatkan peran ITU dalam pengaturan Internet sehingga dapat memastikan manfaat-manfaat yang maksimal untuk masyarakat global.

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk melanjutkan mengambil peran signifikan dalam diskusi-diskusi internasional dan inisiatif-inisiatif mengenai pengelolaan nama-nama dan alamat-alamat domain Internet serta sumber-sumber daya Internet lainnya dalam mandat ITU, dengan memperhatikan pengembangan Internet di masa depan, tujuan-tujuan Perhimpunan dan kepentingan-kepentingan para anggotanya sebagaimana dinyatakan dalam instrumen-instrumen, resolusi-resolusi dan keputusan-keputusannya;
- 2 untuk mengambil langkah-langkah yang perlu bagi ITU untuk terus memainkan peran memfasilitasi dalam koordinasi permasalahan kebijakan publik internasional yang terkait dengan Internet, sebagaimana dinyatakan dalam butir 35 d) Agenda Tunis, berinteraksi sebagaimana perlu dengan organisasi-organisasi antarpemerintah lainnya dalam domain-domain ini;
- 3 sejalan dengan butir 78 a) Agenda Tunis, untuk melanjutkan memberi kontribusi sebagaimana sesuai dengan kerja IGF, apabila mandat IGF diperpanjang oleh sesi 2010 dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- 4 untuk terus mengambil langkah-langkah yang perlu bagi ITU untuk memainkan peran aktif dan konstruktif dalam proses menuju peningkatan kerja sama sebagaimana dinyatakan dalam butir 71 Agenda Tunis;
- 5 untuk terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam proses internal ITU sendiri untuk meningkatkan kerja sama pada permasalahan kebijakan publik internasional yang terkait dengan

¹ termasuk, namun tidak terbatas, pada *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, *regional Internet registries (RIRs)*, *Internet Engineering Task Force (IETF)*, *Internet Society (ISOC)* dan *World Wide Web Consortium (W3C)*, atas dasar timbal-balik.

Internet sebagaimana dinyatakan dalam butir 71 Agenda Tunis, melibatkan semua pemangku kepentingan, dalam peran dan tanggung jawab masing-masing;

- 6 untuk melapor setiap tahun kepada Dewan mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan pada subyek-subyek ini dan untuk mengajukan usulan-usulan sebagaimana sesuai;
- 7 untuk terus menyebarluaskan, sebagaimana sesuai, laporan-laporan Kelompok yang Berdedikasi kepada semua organisasi internasional dan pemangku kepentingan yang relevan yang terlibat dalam permasalahan tersebut untuk pertimbangan mereka dalam proses-proses pembuatan kebijakan mereka,

memerintahkan Direktur-direktur Biro

- 1 untuk memberi kontribusi kepada Kelompok yang Berdedikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Biro-biro mereka yang relevan terhadap kerja kelompok tersebut;
- 2 untuk menyediakan bantuan, sesuai dengan keahlian yang dimiliki Perhimpunan, sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber daya yang ada, sebagaimana sesuai, dengan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang relevan, untuk Negara-negara Anggota, apabila diminta demikian, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan dengan memperhatikan pengelolaan nama-nama dan alamat-alamat domain Internet serta sumber-sumber Internet lainnya, dan dengan memperhatikan isu-isu kebijakan umum yang berhubungan dengan Internet, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Resolusi Dewan 1305, yang mengidentifikasi peran Kelompok yang Berdedikasi, sesuai dengan mandatnya;
- 3 untuk berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi telekomunikasi regional mengikuti resolusi ini,

memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

- 1 untuk memastikan bahwa Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) menjalankan perannya dalam isu-isu teknis, dan untuk terus memberi kontribusi keahlian ITU-T dan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan entitas-entitas yang sesuai mengenai isu-isu yang terkait dengan pengelolaan nama-nama dan alamat-alamat domain Internet serta sumber-sumber daya Internet lainnya dalam mandat ITU, seperti IP versi 6 (IPv6), ENUM dan IDNs, sebagaimana juga pengembangan-pengembangan dan isu-isu teknologi terkait lainnya, termasuk memfasilitasi studi-studi yang sesuai mengenai isu-isu ini oleh kelompok-kelompok kajian-kajian ITU-T dan kelompok-kelompok lainnya;
- 2 sesuai dengan peraturan dan prosedur ITU, serta mengingat kontribusi-kontribusi keanggotaan ITU, untuk terus memainkan peran memfasilitasi dengan koordinasi dan bantuan dalam pengembangan isu-isu kebijakan umum yang terkait dengan nama-nama dan alamat-

alamat domain Internet serta sumber-sumber Internet lainnya sesuai mandat ITU dan perubahannya yang memungkinkan;

- 3 untuk bekerja dengan Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, mengakui kegiatan entitas-entitas lain yang sesuai, pada isu-isu mengenai ccTLD Negara-negara Anggota dan pengalaman-pengalaman terkait;
- 4 untuk melapor setiap tahun kepada Dewan, dan juga kepada WTSA, mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan pencapaian-pencapaian terhadap subyek-subyek ini, termasuk usulan-usulan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut apabila sesuai,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk menyelenggarakan forum-forum internasional dan regional serta menjalankan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, bersama dengan entitas-entitas yang sesuai, untuk periode 2010-2014, untuk membahas isu-isu kebijakan, operasional dan teknis mengenai Internet secara umum, dan mengenai pengelolaan nama-nama dan alamat-alamat domain Internet serta sumber-sumber daya internet lainnya dalam mandat ITU secara khusus, termasuk yang berhubungan dengan multibahasa, untuk memberi manfaat bagi Negara-negara Anggota, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk negara-negara terbelakang (LDCs) dan negara-negara berkembang kepulauan kecil (SIDS) dan negara-negara berkembang daratan (LLDCs), negara-negara dengan ekonomi dalam transisi, dengan mempertimbangkan isi resolusi-resolusi relevan konferensi ini, termasuk resolusi ini, sebagai tambahan isi resolusi-resolusi yang relevan dari Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia 2010 (WTDC);
- 2 untuk terus memajukan, melalui program-program dan kelompok-kelompok studi Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU, pertukaran informasi, mendorong debat dan pengembangan dari praktik-praktikterbaik mengenai isu-isu Internet, dan untuk terus memainkan peran penentu dalam pencapaian dengan memberi kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia, dengan menyediakan bantuan teknis dan meningkatkan keterlibatan negara-negara berkembang, termasuk LDCs, SIDS, LLDCs dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi, dalam forum-forum dan isu-isu Internet internasional;
- 3 untuk terus melapor setiap tahun kepada Dewan dan Kelompok Penasihat Pengembangan Telekomunikasi, dan juga kepada WTDC, mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan pencapaian-pencapaian pada subyek-subyek ini, termasuk usulan-usulan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut apabila sesuai,

mengundang Kelompok yang Berdedikasi mengenai isu-isu kebijakan umum yang berhubungan dengan Internet, sebagai bagian integral dari Kelompok Kerja Dewan pada Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi,

- 1 untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan kegiatan-kegiatan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro sehubungan dengan pelaksanaan resolusi ini;
- 2 untuk mempersiapkan masukan-masukan ITU untuk kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas apabila sesuai,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk merevisi resolusi-resolusinya yang sesuai untuk membuat Kelompok yang Berdedikasi menjadi kelompok kerja Dewan (CWG), terbatas pada Negara-negara Anggota, dengan konsultasi terbuka kepada semua pemangku kepentingan;
- 2 memperhatikan laporan-laporan tahunan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk memberi kontribusi secara aktif pada diskusi-diskusi internasional dan inisiatif –inisiatif yang berhubungan dengan isu-isu pengelolaan internasional dari nama-nama dan alamat-alamat domain Internet serta sumber-sumber Internet lainnya sesuai mandat ITU;
- 3 untuk memperhatikan laporan-laporan Kelompok yang Berdedikasi dan mengambil tindakan-tindakan apabila sesuai;
- 4 untuk melapor kepada konferensi yang berkuasa penuh 2014 mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan pencapaian-pencapaian mengenai tujuan-tujuan resolusi ini, termasuk usulan-usulan untuk pertimbangan lebih lanjut apabila sesuai,

mengundang Negara-negara Anggota

- 1 untuk berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mengenai pengelolaan internasional sumber-sumber Internet, termasuk nama-nama dan alamat-alamat domain, dan dalam proses untuk meningkatkan kerja sama mengenai pengaturan Internet dan permasalahan kebijakan publik internasional menyangkut Internet, sehingga keterwakilan seluruh dunia dalam perdebatan dapat dipastikan;
- 2 untuk melanjutkan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi-diskusi dan pengembangan isu-isu kebijakan umum yang berhubungan dengan sumber-sumber daya Internet, termasuk nama-nama dan alamat-alamat domain, perubahannya yang memungkinkan dampak penggunaan dan aplikasi baru, bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang relevan, dan untuk memberi kontribusi kepada Kelompok yang Berdedikasi dan kelompok-kelompok studi ITU mengenai permasalahan terkait,

mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

untuk mengupayakan cara-cara yang sesuai untuk berkontribusi untuk peningkatan kerja sama mengenai isu-isu kebijakan publik internasional yang terkait dengan Internet, dalam peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

RESOLUSI 122 (Rev. Guadalajara, 2010)
Peran pengembangan Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) Pasal 13 Konvensi ITU, yang menentukan peran dan tanggung jawab Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA), sebagaimana juga Pasal 14 dan 14A, berkenaan kelompok studi standardisasi telekomunikasi dan Kelompok Penasihat Standardisasi Telekomunikasi (TSAG);
- b) keputusan-keputusan dari konferensi yang berkuasa penuh sebelumnya berkenaan dengan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan standardisasi ITU;
- c) Resolusi-resolusi 1, 7, 22, 33 dan 45 (Rev. Johannesburg, 2008) WTSA, dimana menurut:
 - keanggotaan dapat merevisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dan menyusun pertanyaan-pertanyaan baru antara WTSA's;
 - keanggotaan terus berkolaborasi dengan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan Komisi Teknik Elektro Internasional (IEC);
 - keanggotaan, bekerja melalui TSAG, dapat merestrukturisasi dan membentuk kelompok studi antara WTSA's;
 - keanggotaan, bekerja melalui TSAG, dapat mengenali teknologi yang baru dan bertemu serta kebutuhan untuk mengembangkan standar-standar yang sesuai, secara cepat dan dapat diandalkan;
 - keanggotaan, bekerja melalui TSAG, dapat membentuk, mengakhiri atau mempertahankan kelompok-kelompok lain antara WTSA's, dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki efektifitas kerja ITU-T, untuk maksud-maksud termasuk koordinasi kerja ITU-Ts dan tanggapan yang fleksibel terhadap isu-isu prioritas tinggi yang terdapat pada beberapa kelompok studi;
 - TSAG diperintahkan untuk mengambil peran aktif dalam memastikan koordinasi antara kelompok-kelompok studi, apabila sesuai, mengenai isu-isu standardisasi prioritas tinggi yang sedang dikaji oleh lebih dari satu kelompok studi, dan dengan memperhatikan, dan melaksanakan sebagaimana diperlukan, nasihat yang diberikan kepadanya oleh kelompok-kelompok lain mengenai koordinasi efektif terhadap topik-topik standardisasi prioritas tinggi;
- d) kerja Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dalam kelompok-kelompok studi Sektor dan TSAG dalam melaksanakan keputusan-keputusan ini dan dalam menerima prosedur-prosedur kerja yang telah memperbaiki ketepatan waktu dan efisiensi dari kegiatan-kegiatan standar seraya mempertahankan kualitas mereka,

- e) Resolusi 123 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, mengenai penjembitanan kesenjangan pengembangan standardisasi antara negara-negara-negara maju dan berkembang;
- f) butir 64 Deklarasi Prinsip Jenewa dari Konferensi Tingkat Tinggi Sedunia mengenai Masyarakat Informasi, yang mengakui bahwa kompetensi utama dalam bidang-bidang teknologi informasi dan komunikasi – bantuan dalam menjembatani kesenjangan digital, kerja sama internasional dan regional, pengelolaan spektrum radio, pengembangan standar-standar dan penyebaran informasi – merupakan kepentingan yang sangat penting untuk membangun masyarakat informasi,

menimbang lebih lanjut

analisa kegiatan-kegiatan standardisasi ITU oleh Kelompok Kerja mengenai Reformasi ITU (WGR) dan penekanan yang ditempatkan oleh WGR mengenai kebutuhan untuk peningkatan yang berkelanjutan dalam efektifitas proses standardisasi dan kebutuhan untuk mencapai suatu kemitraan efektif antara Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor,

mengakui

- a) hasil-hasil positif dari proses penyetujuan alternatif dalam metode-metode kerja ITU-Ts, khususnya pengurangan waktu yang diperlukan untuk penyetujuan pertanyaan-pertanyaan dan rekomendasi-rekomendasi yang relevan, sesuai dengan prosedur-prosedur yang diterima oleh Sektor;
- b) kedudukan WTSA sebagai forum yang luas dan inklusif dimana Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor ITU-T dapat mendiskusikan masa depan ITU-T, meninjau kembali kemajuan program kerja standardisasi ITU-T, mempertimbangkan struktur dan fungsi keseluruhan Sektor serta menetapkan sasaran-sasaran untuk ITU-T;
- c) bahwa WTSA melayani semua Negara Anggota dan Anggota Sektor ITU-T, sebagai suatu forum pengambilan keputusan untuk memutuskan isu-isu dalam batas kemampuannya yang mungkin dibawa kepadanya,
- d) bahwa Simposium Standar-Standar Global (GSS) diselenggarakan sehari sebelum WTSA-08,

menyadari

- a) tantangan terus-menerus yang dihadapi keanggotaan oleh keadaan finansial terkini Perhimpunan, jumlah pertemuan-pertemuan ITU-T dan acara-acara yang berhubungan serta peran penting WTSA sebagai badan pemantauan untuk ITU-T;
- b) kebutuhan bagi Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor ITU-T untuk bekerja secara dekat dalam ITU-T, dengan cara yang proaktif, kooperatif dan berpandangan ke depan, dengan

memperhatikan tanggung jawab dan tujuan masing-masing, untuk memajukan perubahan berkesinambungan ITU-T;

- c) bahwa ITU-T bertujuan untuk terus menyediakan tempat yang unik, meliputi dunia luas untuk pemerintah dan industri untuk bekerjasama untuk memelihara perkembangan dan penggunaan standar-standar yang dapat saling beroperasi dan non-diskriminasi berdasarkan keterbukaan, dan yang didorong oleh permintaan maupun sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan para pengguna;
- d) bahwa langkah cepat dari perubahan dalam lingkungan telekomunikasi menuntut bahwa, untuk mempertahankan perannya, ITU-T harus memiliki fleksibilitas untuk membuat keputusan yang tepat waktu antar sesama WTSA mengenai permasalahan seperti prioritas-prioritas kerja, struktur kelompok kerja dan jadwal-jadwal pertemuan,

memutuskan

- 1 untuk mendorong WTSA untuk mengembangkan lebih lanjut metode-metode dan prosedur-prosedur kerjanya untuk tujuan memperbaiki pengelolaan kegiatan-kegiatan standardisasi ITU-T;
- 2 bahwa WTSA akan terus, sesuai dengan tanggung jawabnya, dan mengacu pada sumber-sumber finansial yang ada, untuk memajukan perubahan berkesinambungan sektor standardisasi dengan cara-cara seperti, tetapi tidak terbatas pada, penguatan TSAG;
- 3 bahwa WTSA akan membahas dengan secukupnya isu-isu strategis dalam standardisasi dan, melalui Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi, memberikan usulan-usulan dan komentar-komentarnya kepada Dewan ITU;
- 4 bahwa WTSA, dalam rangkumannya, harus memperhatikan rencana strategis Perhimpunan dan, konsisten dengan No. 188 Konvensi ITU, memberi pertimbangan terhadap status finansial Sektor,
- 5 bahwa WTSA mendorong kerjasama dan koordinasi erat yang berkesinambungan dengan organisasi-organisasi internasional, regional dan nasional yang merumuskan standar-standar yang relevan dengan kerja ITU-T,

memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

- 1 dalam menyiapkan laporan Direktur kepada WTSA, untuk memasukkan laporan mengenai status finansial Sektor untuk membantu WTSA dalam fungsi-fungsinya;
- 2 untuk terus, berkonsultasi dengan badan-badan yang relevan, dan keanggotaan ITU, dan berkolaborasi dengan Sektor Komunikasi Radio ITU dan Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU, apabila sesuai, untuk menyelenggarakan GSS;

mengundang Sidang Standardisasi Telekomunikasi Sedunia
untuk terus memperhatikan kesimpulan-kesimpulan GSS,

mendorong

- 1 Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor ITU-T untuk mendukung peran berkembang WTSA;
- 2 Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor ITU-T dan ketua serta wakil ketua TSAG dan kelompok-kelompok studi untuk memusatkan, antara lain, pada identifikasi dan analisa isu-isu strategis dalam standardisasi dalam persiapan mereka untuk WTSA sehingga dapat memfasilitasi kerja sidang.

RESOLUSI 123 (Rev. Guadalajara, 2010)
Menjembatani kesenjangan standardisasi antara negara maju dan berkembang

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

Resolusi 123 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

menimbang

- a) bahwa "Perhimpunan akan secara khusus memfasilitasi standardisasi telekomunikasi seluruh dunia, dengan kualitas layanan yang memuaskan" (No. 13 dalam Pasal 1 Konstitusi ITU);
- b) bahwa, dalam hubungan dengan fungsi-fungsi dan struktur Sektor Standardisasi Telekomunikasi (ITU-T), dalam Pasal 17, Konstitusi menyatakan bahwa fungsi-fungsi tersebut adalah "..., dengan mengingat perhatian khusus negara-negara berkembang, untuk memenuhi maksud-maksud tertentu Perhimpunan...",
- c) bahwa, berdasarkan rencana strategis untuk Perhimpunan 2012-2015, ITU-T bekerja untuk "menyediakan dukungan dan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam menjembatani kesenjangan standardisasi dalam hubungan dengan permasalahan standardisasi, prasarana dan aplikasi-aplikasi jaringan informasi dan komunikasi, dan bahan-bahan pelatihan yang relevan untuk pengembangan sumber daya manusia, dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik lingkungan telekomunikasi dari negara-negara berkembang",

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa Sidang Standardisasi Telekomunikasi Sedunia menerima Resolusi 17, 44, 53 dan 54 untuk membantu dalam menjembatani kesenjangan standardisasi antara negara-negara berkembang dan maju;
- b) bahwa Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia menerima Resolusi 47 (Rev. Hyderabad, 2010), yang menghendaki kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan efektif dari rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan Sektor Komunikasi Radio (ITU-R) di negara-negara berkembang, serta Resolusi 37 (Rev. Hyderabad, 2010) yang mengakui kebutuhan untuk menciptakan kesempatan digital di negara-negara berkembang,

mengingat kembali

bahwa Rencana Aksi Jenewa dan Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi dari Konferensi Tingkat Tinggi Sedunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) menekankan pada upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan digital dan kesenjangan pembangunan,

memperhatikan

sasaran-sasaran berikut dalam Rencana Strategis Perhimpunan untuk 2012-2015, yang diterima dalam Resolusi 71 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini:

- untuk mengembangkan standar-standar internasional yang dapat saling beroperasi, non diskriminasi (rekomendasi-rekomendasi ITU-T)
- untuk membantu dalam menjembatani kesenjangan standardisasi antara negara-negara maju dan berkembang;
- untuk memperluas dan memfasilitasi kerjasama internasional antara badan-badan standardisasi internasional dan regional dan sasaran strategis berikutnya dari Sektor Pengembangan Telekomunikasi (ITU-D) dalam rencana strategis untuk Perhimpunan 2012-2015, sebagaimana diterima dalam Resolusi 71 (Rev. Guadalajara, 2010):
- untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam menjembatani kesenjangan digital dengan mencapai telekomunikasi/TIK yang memungkinkan pengembangan sosial-ekonomi yang lebih luas,

mengakui

- a) kelanjutan kekurangan sumber-sumber daya manusia dalam bidang standardisasi di negara-negara berkembang, mengakibatkan pada rendahnya tingkat partisipasi negara-negara berkembang dalam pertemuan-pertemuan ITU-T serta ITU-R, kendati dengan perbaikan yang telah diawasi belakangan ini, dan, karenanya, dalam proses pembuatan standar-standar, mengarah pada kesulitan ketika mengartikan rekomendasi-rekomendasi ITU-T dan ITU-R;
- b) tantangan terus-menerus yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk negara-negara berkembang, dengan mengingat inovasi teknologi yang cepat dan pemusatan layanan-layanan yang meningkat;
- c) tingkat partisipasi yang moderat oleh perwakilan-perwakilan negara-negara berkembang dalam kegiatan-kegiatan standardisasi ITU, walaupun melalui kurangnya kesadaran akan kegiatan-kegiatan, kesulitan dalam mengakses informasi, kekurangan pelatihan untuk bakat manusia dalam permasalahan yang berhubungan dengan standardisasi, atau kekurangan sumber-sumber keuangan untuk bepergian ke tempat-tempat pertemuan, adalah faktor-faktor yang berdampak memperlebar kesenjangan pengetahuan yang telah ada;
- d) bahwa kebutuhan-kebutuhan dan realita-realita teknologi dari satu negara ke negara lain serta satu wilayah ke wilayah lain, dan dalam

banyak hal, negara-negara berkembang tidak memiliki kesempatan-kesempatan atau mekanisme-mekanisme untuk membuatnya dikenal;

- e) bahwa dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Pasal Resolusi 44 (Rev. Johannesburg, 2008) dan Resolusi 17, 53 dan 54 (Rev. Johannesburg, 2008), aksi-aksi ITU telah dijalankan melalui ITU-T untuk membantu dalam mengurangi kesenjangan standardisasi antara negara-negara berkembang dan maju,

memperhatikan

- a) bahwa negara-negara berkembang dapat mengambil manfaat dari perbaikan kemampuan dalam penerapan dan pengembangan standar-standar;
- b) bahwa kegiatan-kegiatan ITU-T dan ITU-R serta pasar telekomunikasi/TIK juga dapat mengambil manfaat dari keterlibatan yang lebih baik dari negara-negara berkembang dalam pembuatan standar dan penerapan standar;
- c) bahwa inisiatif-inisiatif untuk membantu dalam menjembatani kesenjangan standardisasi adalah hakiki pada, dan adalah tugas dengan prioritas tinggi, Perhimpunan,
- d) bahwa walaupun ITU sedang melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan standardisasi, perbedaan besar dalam pengetahuan dan pengelolaan standar-standar tetap ada antara negara-negara berkembang dan maju,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur dari ketiga Biro

- 1 untuk bekerja secara dekat satu sama lain dalam penindaklanjutan dan pelaksanaan resolusi ini, sebagaimana juga dengan Resolusi ITU-R 7 (Jenewa, 2007) Sidang Komunikasi Radio, Resolusi 17, 44 dan 54 (Rev. Johannesburg, 2008) dan 47 (Rev. Hyderabad, 2010) dan untuk meningkatkan aksi-aksi yang dimaksudkan dan untuk mengurangi kesenjangan standardisasi antara negara-negara berkembang dan maju;
- 2 untuk mempertahankan suatu mekanisme koordinasi yang erat diantara ketiga Sektor ditingkat regional untuk menjembatani kesenjangan digital, melalui kegiatan-kegiatan kantor-kantor regional ITU untuk tujuan tersebut;
- 3 untuk mengidentifikasi cara-cara dan sarana-sarana untuk mendukung partisipasi perwakilan-perwakilan dari negara-negara berkembang dalam pertemuan-pertemuan ketiga Sektor ITU dan penyebaran informasi mengenai standardisasi;
- 4 untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan organisasi-organisasi regional yang relevan dan mendukung kerjanya dibidang ini,
- 5 untuk memperkuat mekanisme-mekanisme pelaporan mengenai pelaksanaan rencana aksi yang tergabung dalam Resolusi 44 (Rev.

Johannesburg, 2008) melalui, misalnya, rencana-rencana operasional tahunan,

mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

untuk membuat kontribusi sukarela (finansial dan sejenisnya) terhadap dana untuk menjembatani kesenjangan standardisasi, sebagaimana juga untuk menjalankan aksi-aksi kongkrit dalam mendukung aksi-aksi dan inisiatif-inisiatif ITU dari ketiga Sektor dan kantor-kantor regionalnya dalam permasalahan ini.

RESOLUSI 125 (Rev. Guadalajara, 2010)
Bantuan dan dukungan kepada Palestina untuk membangun kembali jaringan telekomunikasinya

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 125 (Marrakesh, 2002), 99 (Rev. Guadalajara, 2010) dan 32 (Kyoto, 1994) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) Resolusi 18 (Rev. Hyderabad, 2010), 18 (Rev. Istanbul, 2002) dan 18 (Valetta, 1998) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia;
- c) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia;
- d) No 6 dan 7 Konstitusi ITU yang menyebutkan di antara maksud-maksud Perhimpunan "*untuk meningkatkan perluasan manfaat-manfaat dari teknologi-teknologi telekomunikasi baru kepada semua penduduk dunia*" dan "*untuk meningkatkan penggunaan layanan-layanan telekomunikasi dengan tujuan untuk memfasilitasi hubungan-hubungan damai*";
- e) istilah-istilah Resolusi 43/177 (1988) Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana telah ditetapkan untuk menggunakan sebutan "Palestina" dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa,

menimbang

- a) bahwa Konstitusi dan Konvensi ITU dirancang untuk memperkuat perdamaian dan keamanan dunia untuk pengembangan kerjasama internasional dan pemahaman lebih baik di antara bangsa-bangsa yang terkait;
- b) bahwa kebijakan ITU mengenai bantuan untuk Palestina untuk pengembangan sektor telekomunikasinya sudah efisien tetapi belum memenuhi sasaran-sasarannya, karena situasi yang berlaku;
- c) bahwa, agar Palestina mengambil bagian efektif dalam masyarakat informasi baru, harus membangun masyarakat informasinya,

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa pendirian jaringan telekomunikasi yang dapat diandalkan dan modern adalah bagian yang sangat penting dari pengembangan ekonomi dan sosial dan adalah yang paling penting untuk masa depan bangsa Palestina;
- b) bahwa masyarakat internasional memiliki peran penting dalam membantu Palestina untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi yang dapat diandalkan dan modern;
- c) bahwa Palestina saat ini tidak memiliki jaringan-jaringan telekomunikasi yang disebabkan oleh kesulitan-kesulitan dalam pembangunannya,

menyadari

prinsip-prinsip fundamental sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Konstitusi,

memperhatikan

bantuan teknis jangka panjang Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT) kepada Palestina untuk pengembangan telekomunikasinya dalam pelaksanaan Resolusi 32 (Kyoto, 1994) Konferensi Yang Berkuasa Penuh dan kebutuhan mendesak bagi bantuan untuk diberikan dalam berbagai bidang komunikasi dan informasi,

memutuskan

bahwa rencana aksi yang dimulai setelah Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Kyoto, 1994) di dalam kerangka kerja kegiatan-kegiatan Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU, dengan bantuan spesialisasi dari Sektor Komunikasi Radio ITU dan Sektor Standardisasi ITU, wajib dilanjutkan dan ditingkatkan dalam rangka memberikan bantuan dan dukungan kepada Palestina untuk membangun kembali dan mengembangkan prasarana telekomunikasinya, mendirikan kembali lembaga-lembaga disektor ini, mengembangkan perundang-undangan telekomunikasi dan suatu kerangka kerja pengaturan telekomunikasi termasuk rencana penomoran, pengelolaan spektrum frekuensi radio, tarif dan pengembangan sumber daya manusia serta semua bentuk bantuan lain,

menyerukan kepada Negara-negara Anggota

untuk melakukan setiap upaya dengan maksud untuk:

- i) melestarikan prasarana telekomunikasi Palestina;
- ii) memfasilitasi pendirian jaringan-jaringan gerbang internasional milik Palestina, termasuk stasiun-stasiun satelit bumi, kabel-kabel dasar laut, serat-serat optik dan sistem-sistem gelombang mikro;
- iii) memberikan semua bentuk bantuan dan dukungan kepada Palestina, secara bilateral atau melalui kebijakan-kebijakan eksekutif yang diambil oleh ITU, dalam membangun kembali, memulihkan dan mengembangkan jaringan telekomunikasi Palestina;
- iv) membantu Palestina dalam memulihkan hak-hak yang diperoleh dari lalu lintas internasional yang masuk dan keluar;
- v) memberikan bantuan kepada Palestina dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek BDT, termasuk pengembangan sumber daya manusia sumber-sumber daya manusia,

mengundang Dewan

untuk mengalokasikan dana yang diperlukan sesuai dengan sumber-sumber yang tersedia untuk pelaksanaan resolusi ini,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk melanjutkan dan meningkatkan bantuan teknis yang diberikan kepada Palestina bagi pengembangan telekomunikasinya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengatasi bertambahnya dan meningkatnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penyediaan bantuan selama siklus sebelumnya sejak tahun 2002;
- 2 untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai mandat BDT yang ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan jaringan-jaringan akses internasional, termasuk stasiun-stasiun terestrial (bumi) dan satelit, kabel-kabel bawah laut, serat optik dan sistem-sistem gelombang mikro;
- 3 untuk memberikan laporan secara berkala mengenai berbagai pengalaman dalam liberalisasi dan privatisasi telekomunikasi dan untuk menilai dampaknya terhadap pengembangan sektor dalam wilayah Jalur Gaza dan Tepi Sungai Barat;
- 4 untuk melaksanakan e-kesehatan, e-pendidikan, e-pemerintah, perencanaan dan manajemen spektrum sesuai dengan persetujuan-persetujuan yang lalu dalam ITU, dan proyek-proyek pengembangan sumber-sumber daya manusia serta semua bentuk bantuan lainnya;
- 5 untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan ITU mengenai kemajuan yang dibuat dalam melaksanakan resolusi ini dan resolusi-resolusi yang serupa serta mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk mengatasi bertambahnya kesulitan-kesulitan yang timbul,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk memastikan bahwa resolusi ini dan semua resolusi lain yang diterima oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai Palestina, terutama yang berhubungan dengan kode akses internasional dan pemrosesan pemberitahuan-pemberitahuan penetapan frekuensi, dilaksanakan, dan untuk menyampaikan laporan-laporan berkala kepada Dewan mengenai kemajuan-kemajuan pada pertanyaan-pertanyaan ini;
- 2 untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh ketiga Sektor ITU sesuai dengan *memutuskan* di atas, untuk memastikan bahwa tindakan Perhimpunan dalam mendukung Palestina adalah seefektif mungkin, dan untuk memberikan laporan mengenai permasalahan ini kepada Dewan serta kepada konferensi yang berkuasa penuh berikut mengenai kemajuan yang dicapai mengenai isu-isu ini.

RESOLUSI 126 (Rev. Guadalajara, 2010)
Bantuan dan dukungan kepada Republik Serbia untuk membangun kembali sistem penyiaran publiknya yang hancur

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) prinsip-prinsip, maksud dan tujuan-tujuan mulia yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia;
- b) maksud-maksud Perhimpunan sebagaimana diabadikan dalam Pasal 1 Konstitusi ITU,

memperhatikan

- a) Resolusi 126 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) Resolusi 33 (Rev. Doha, 2006) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia;
- c) bahwa peran penentu yang dimainkan oleh ITU dalam membangun kembali sektor telekomunikasi negara telah diakui secara luas;

memperhatikan dengan penghargaan

upaya-upaya yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi untuk pelaksanaan resolusi-resolusi sebagaimana tersebut di atas,

mengakui

- a) bahwa penyiaran publik dan sistem telekomunikasi yang dapat diandalkan sangat diperlukan untuk memajukan pengembangan sosial-ekonomi negara-negara, khususnya mereka yang menderita karena bencana-bencana alam, konflik-konflik domestik atau perang;
- b) bahwa fasilitas penyiaran publik yang baru didirikan di Republik Serbia, entitas publik “Siaran Multipleks dan Operator Jaringan” (ETV), yang sebelumnya merupakan bagian dari Radio Televisi Serbia, telah rusak parah;
- c) bahwa kerusakan pada penyiaran publik (ETV) di Serbia seharusnya memperhatikan masyarakat internasional secara keseluruhan, khususnya ITU;
- d) bahwa, sebagai penyiar publik, ETV merupakan entitas publik, yang seharusnya mulai menyiarkan program-program televisi digital pada tanggal 4 April 2012;

- e) bahwa, berdasarkan kondisi terkini dan di masa depan yang dapat diketahui, Serbia tidak akan dapat membawa sistem penyiaran publiknya kepada tingkat yang dapat diterima tanpa bantuan dari masyarakat internasional, diberikan secara bilateral atau melalui organisasi-organisasi internasional;

memutuskan

- 1 untuk melanjutkan tindakan khusus, dalam kerangka kerja dan sumber-sumber anggaran keuangan yang tersedia dari Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU, dengan bantuan ahli dari Sektor Komunikasi Radio dan Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU;
- 2 untuk memberikan bantuan yang sesuai;
- 3 untuk mendukung Serbia dalam membangun kembali sistem penyiaran publiknya;

menyerukan kepada Negara-negara Anggota

- 1 untuk menawarkan semua bantuan yang memungkinkan;
- 2 untuk mendukung Pemerintah Serbia, secara bilateral maupun melalui, atau, dalam perkara apapun, dalam koordinasi dengan, tindakan khusus Perhimpunan yang dirujuk di atas,

memerintahkan Dewan

untuk mengalokasikan dana yang diperlukan, dalam sumber-sumber yang tersedia, untuk melanjutkan tindakan ini,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

untuk menggunakan dana yang diperlukan, dari sumber-sumber yang tersedia, untuk melanjutkan tindakan yang tepat,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Sektor-sektor ITU sesuai dengan di atas;
- 2 untuk memastikan bahwa tindakan ITU untuk kepentingan Serbia adalah seefektif mungkin;
- 3 untuk melapor mengenai permasalahan ini kepada Dewan ITU.

RESOLUSI 130 (Rev. Guadalajara, 2010)
Memperkuat peran ITU dalam membangun kepercayaan dan keamanan
dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 130 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) Resolusi 69 (Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi dunia (WTDC), mengenai pembentukan tim respon insiden komputer nasional (CIRTs), khususnya untuk negara-negara berkembang, dan kerjasama di antara mereka;
- c) bahwa Resolusi 1305 Dewan ITU, diterima pada sesinya tahun 2009, mengidentifikasi keamanan, keselamatan, kesinambungan, keberlanjutan dan ketahanan Internet sebagai isu-isu kebijakan umum yang berada di dalam lingkup ITU,

menimbang

- a) pentingnya infrastruktur informasi dan komunikasi serta penerapannya terhadap semua bentuk kegiatan sosial dan ekonomi;
- b) bahwa, dengan penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ancaman-ancaman baru dari berbagai sumber telah muncul dapat mensyaratkan dampak pada kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK pada semua Negara Anggota, Anggota Sektor dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk semua pengguna TIK, dan mengenai pemeliharaan keamanan terhadap pengembangan ekonomi dan sosial semua Negara Anggota, dan bahwa ancaman-ancaman kepada dan kerentanan jaringan-jaringan terus meningkatkan tantangan keamanan yang selalu tumbuh melampaui batas nasional untuk semua negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara kepulauan kecil sedang berkembang, negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi, memperhatikan konteks ini penguatan peran ITU dalam membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK serta kebutuhan untuk meningkatkan lebih lanjut kerjasama internasional serta mengembangkan mekanisme nasional, regional dan internasional yang ada dengan sesuai (misalnya persetujuan, praktek-praktek terbaik, memorandum saling pengertian, dll);
- c) bahwa Sekretaris Jenderal ITU telah diundang untuk mendukung Kemitraan Multilateral Internasional Melawan Ancaman Dunia Maya (IMPACT), Forum untuk Tim Tanggap Kejadian dan Keamanan (FIRST) dan proyek-proyek keamanan dunia maya global atau regional lainnya, sebagaimana sesuai, dan semua negara, khususnya negara-negara berkembang, telah diundang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan mereka;

- d) Agenda Keamanan Dunia Maya Global ITU (GCA);
- e) bahwa, untuk melindungi prasarana-prasarana ini dan membahas tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman ini, tindakan nasional, regional dan internasional yang dikoordinasi diperlukan untuk mencegah, menyiapkan, menanggapi dan memulihkan dari suatu insiden keamanan komputer, pada bagian otoritas pemerintah, pada tingkat nasional (termasuk pembentukan CIRTs nasional), dan sub-nasional, sektor swasta dan penduduk serta para pengguna, sebagai tambahan pada kerjasama dan koordinasi internasional dan regional, dan bahwa ITU memiliki peran pemimpin untuk dijalankan dalam mandat dan kompetensinya dalam bidang ini;
- f) kebutuhan untuk perubahan yang berkelanjutan dalam teknologi-teknologi baru untuk mendukung deteksi awal dari, dan tanggapan yang terkoordinasi dan tepat waktu untuk, kegiatan-kegiatan atau insiden-insiden yang mengorbankan ketersediaan, integritas dan kerahasiaan dari prasarana-prasarana yang sangat penting dalam Negara-negara Anggota ITU, dan untuk strategi-strategi yang akan meminimalkan dampak insiden-insiden serupa serta mengurangi resiko-resiko dan ancaman-ancaman yang tumbuh dimana landasan-landasan serupa terkena,

mengakui

- a) bahwa pengembangan TIK telah dan terus menjadi perangkat untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi global, didukung oleh keamanan dan kepercayaan;
- b) bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) mengakui kebutuhan untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK serta sangat pentingnya pelaksanaan multi pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan Garis Aksi C5 (Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK), dengan ITU diidentifikasi dalam Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi sebagai moderator/fasilitator untuk garis aksi, dan bahwa tugas ini telah dijalankan oleh Perhimpunan dalam tahun-tahun belakangan ini, misalnya di bawah GCA;
- c) bahwa WTDC-10 telah menerima Rencana Aksi Hyderabad dan Program 2 nya, mengenai keamanan dunia maya dan aplikasi-aplikasi TIK serta isu-isu yang berhubungan dengan jaringan berbasis IP, yang mengidentifikasi keamanan dunia maya sebagai kegiatan prioritas dari Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT) dan menjabarkan kegiatan-kegiatan untuk dijalankan oleh BDT; serta telah juga menerima Resolusi 45 (Hyderabad, 2010), mengenai mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan kerjasama pada keamanan dunia maya, termasuk menghadapi dan memerangi spam, menyerukan kepada Sekretaris Jenderal untuk membawa resolusi ini kepada perhatian konferensi yang berkuasa penuh berikut untuk pertimbangan dan tindakan yang diperlukan, sebagaimana sesuai; serta Resolusi 69 (Hyderabad, 2010), mengenai pembentukan CIRTs nasional, khususnya untuk negara-

- negara berkembang, dan kerjasama di antara mereka; serta lebih dari itu, suatu pusat keamanan jaringan publik nasional yang berbasis IP untuk negara-negara berkembang sedang dipelajari oleh Kelompok Studi 17 Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T);
- d) bahwa, untuk mendukung pembentukan CIRTs nasional dalam Negara-negara Anggota dimana mereka diperlukan dan saat ini tidak ada, Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA) menerima Resolusi 58 (Johannesburg, 2008), mengenai mendorong pembentukan CIRTs nasional, khususnya untuk negara-negara berkembang; dan WTDC-10 menerima Resolusi 69 (Hyderabad, 2010), mengenai pembentukan CIRTs nasional, khususnya untuk negara-negara berkembang, dan kerja sama di antara mereka;
- e) butir 15 Komitmen Tunis, yang menyatakan bahwa: “Mengakui prinsip-prinsip universal dan akses non-diskriminasi terhadap semua negara, kebutuhan untuk memperhatikan tingkat pengembangan sosial dan ekonomi setiap negara, dan menghormati aspek-aspek yang berorientasi pengembangan masyarakat informasi, kami menggarisbawahi bahwa TIK adalah alat efektif untuk memajukan perdamaian, keamanan dan stabilitas, untuk meningkatkan demokrasi, keterpaduan sosial, pemerintahan yang baik dan aturan hukum, ditingkat nasional, regional dan internasional. TIK dapat digunakan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan mengusahakan perkembangan. Pengembangan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, keamanan informasi dan keamanan jaringan adalah mutlak untuk mencapai sasaran-sasaran ini. Kami lebih lanjut mengakui kebutuhan untuk secara efektif menghadapi tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman yang diakibatkan dari penggunaan TIK untuk tujuan-tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan untuk pemeliharaan stabilitas dan keamanan internasional dan berakibat mengurangi integritas prasarana dalam Negara-negara, dan memperlemah keamanan mereka. Adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber-sumber dan teknologi informasi untuk tujuan-tujuan kejahatan dan teroris, sambil menghormati hak-hak asasi manusia”, dan bahwa tantangan-tantangan yang disebabkan oleh penyalahgunaan sumber-sumber TIK hanya terus meningkat sejak WSIS;
- f) bahwa Negara-negara Anggota, khususnya negara-negara berkembang, dalam penjabaran langkah-langkah hukum yang sesuai dan dapat dijalankan yang terkait dengan perlindungan terhadap ancaman-ancaman dunia maya pada tingkat nasional, regional dan internasional, mungkin memerlukan bantuan dari ITU dalam membuat langkah-langkah teknis dan prosedural, ditujukan untuk mengamankan prasarana-prasarana TIK nasional, berdasarkan permintaan dari Negara-negara Anggota, seraya mencatat bahwa ada sejumlah inisiatif regional dan internasional yang dapat mendukung negara-negara ini dalam menjabarkan langkah-langkah hukum serupa;
- g) Opini 4 (Lisbon, 2009) Forum Kebijakan Telekomunikasi Dunia, mengenai strategi-strategi kolaboratif untuk membentuk kepercayaan diri dan keamanan pada penggunaan TIK;

- h) hasil-hasil relevan dari WTSA-08, khususnya:
- i) Resolusi 50 (Rev. Johannesburg, 2008), mengenai keamanan dunia maya;
 - ii) Resolusi 52 (Rev. Johannesburg, 2008), dalam menghadapi dan memerangi spam;
- i) bahwa Resolusi 69 (Hyderabad, 2010) menetapkan pembentukan CIRTs,
- menyadari*
- a) bahwa ITU dan organisasi-organisasi internasional lain, melalui berbagai kegiatan, menguji permasalahan yang berhubungan dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK termasuk stabilitas dan langkah-langkah untuk memerangi surel sampah (*spam*), *malware*, peralihan konten yang tidak diinginkan dll., dan untuk melindungi data pribadi dan privasi;
 - b) bahwa Kelompok Studi 17, Kelompok Studi 1 dan 2 ITU dari Sektor Pengembangan Telekomunikasi (ITU-D) dan kelompok-kelompok studi ITU lain yang relevan terus mengerjakan cara-cara teknis untuk keamanan jaringan-jaringan informasi dan komunikasi, sesuai dengan Resolusi 50 dan 52 (Rev. Johannesburg, 2008) dan Resolusi 45 (Rev. Hyderabad, 2010) dan 69 (Hyderabad, 2010);
 - c) bahwa ITU memiliki peran fundamental untuk dijalankan untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK;
 - d) bahwa Opini 4 (Lisbon, 2009), mengenai strategi-strategi kolaboratif untuk membentuk kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK, mengundang ITU untuk meneruskan, secara prinsip pada landasan kontribusi dan petunjuk keanggotaan, inisiatif-inisiatif serta kegiatan-kegiatan lebih lanjut, dalam kemitraan yang erat dengan entitas-entitas dan organisasi-organisasi nasional, regional dan internasional yang terkait, konsisten dengan Resolusi 71 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, mengenai rencana strategis untuk Perhimpunan 2012-2015, dan semua resolusi ITU lain yang relevan;
 - e) bahwa Kelompok Studi 1 ITU-D terus menjalankan studi-studi yang diserukan dalam Pertanyaan 22-1/1 ITU-D (Mengamankan jaringan-jaringan informasi dan komunikasi: praktik-praktik terbaik untuk mengembangkan kebudayaan keamanan dunia maya), yang telah dicerminkan dalam Resolusi 64/211 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,

memperhatikan

- a) bahwa, sebagai organisasi antar pemerintahan dengan ikut serta sektor swasta, ITU ditempatkan secara baik untuk memainkan peran penting, bersama dengan badan dan organisasi internasional lain, dalam mengatasi ancaman dan kerentanan, yang mempengaruhi upaya-upaya untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK;

- b) butir 35 and butir 36 Deklarasi Prinsip Jenewa dan paragraf butir 39 Agenda Tunis, mengenai membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK;
- c) bahwa, meskipun tidak ada definisi terhadap surel sampah (*spam*) yang disetujui secara universal dan istilah-istilah dalam bidang ini, surel sampah (*spam*) dikarakterisasi oleh Kelompok Studi 2 ITU-T pada sesinya Juni 2006, sebagai suatu istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan komunikasi borongan elektronik yang tidak diinginkan melalui surat elektronik atau pengiriman pesan bergerak (SMS, MMS), biasanya dengan tujuan memasarkan barang-barang atau layanan-layanan komersial,
- d) inisiatif Perhimpunan yang menyangkut IMPACT dan FIRST;
- e) bahwa Program 2 BDT dalam Rencana Aksi Hyderabad diterima dengan pengertian dari delegasi-delegasi WTDC-10 bahwa BDT tidak merumuskan hukum,

dengan mengingat

kerja ITU yang dibentuk oleh Resolusi 50 dan 52 (Rev. Johannesburg, 2008) dan 58 (Johannesburg, 2008); Resolusi 45 (Rev. Hyderabad, 2010) dan 69 (Hyderabad, 2010); Program 2 BDT dalam Rencana Aksi Hyderabad; Pertanyaan-pertanyaan ITU-T yang relevan mengenai aspek-aspek teknis tentang keamanan jaringan-jaringan informasi dan komunikasi; dan Pertanyaan 22-1/1 ITU-D,

memutuskan

- 1 untuk terus memberi pekerjaan ini suatu prioritas tinggi dalam ITU, sesuai dengan kompetensi dan keahliannya,
- 2 untuk memberi prioritas tinggi kepada kerja dalam ITU yang dijelaskan di bawah *dengan mengingat* di atas, sesuai dengan kompetensi-kompetensi dan bidang-bidang keahlian, seraya mengingat kebutuhan untuk menghindari penduplikasian kerja antar Biro atau Sekretariat Jenderal atau kerja yang letaknya lebih sesuai di dalam mandat-mandat dari badan-badan internasional antar pemerintah dan relevan yang lain;
- 3 bahwa ITU wajib memfokuskan sumber-sumber dan program-program pada bidang-bidang keamanan dunia maya di dalam mandat dan keahlian intinya, khususnya lingkup teknik dan pengembangan, dan tidak termasuk bidang-bidang yang berhubungan dengan aplikasi prinsip-prinsip hukum atau kebijakan Negara-negara Anggota yang terkait dengan pertahanan nasional, keamanan, isi dan kejahatan dunia maya nasional, yang ada di dalam hak kedaulatannya, walaupun ini tidak mengecualikan ITU bagaimanapun dari menjalankan mandatnya untuk mengembangkan rekomendasi-rekomendasi teknis yang dirancang untuk mengurangi kerentanan-kerentanan dalam prasarana TIK, maupun dalam memberikan semua bantuan yang telah disetujui pada WTDC-10, termasuk kegiatan-kegiatan Program 2 seperti

“membantu Negara-negara Anggota, khususnya negara-negara berkembang, dalam perluasan langkah-langkah hukum yang sesuai dan dapat dijalankan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kejahatan-kejahatan dunia maya” dan dalam kegiatan-kegiatan di bawah Pertanyaan 22-1/1,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro

- 1 untuk terus meninjau:
 - i) kerja yang sudah dilakukan sejauh ini dalam ketiga Sektor, di bawah inisiatif Agenda Keamanan Dunia Maya global ITU dan dalam organisasi-organisasi relevan lainnya, serta inisiatif-inisiatif untuk membahas ancaman-ancaman yang ada dan di masa depan untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK, seperti permasalahan untuk melawan spam, yang tumbuh dan meningkat;
 - ii) kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan resolusi ini dan dalam peranan ITU sebagai moderator/fasilitator untuk Garis Aksi C5 dengan bantuan kelompok-kelompok penasihat, sejalan dengan Konstitusi dan Konvensi ITU;
- 2 konsisten dengan Resolusi 45 (Rev. Hyderabad, 2010) untuk bekerja menuju persiapan dokumen yang terkait kepada memorandum pengertian (MoU), termasuk analisis hukum MoU dan lingkup aplikasinya, di antara Negara-negara Anggota yang berkepentingan, untuk memperkuat keamanan dunia maya dan melawan ancaman-ancaman dunia maya, untuk melindungi negara-negara berkembang dan negara mana pun yang berkepentingan dalam mengaksesi MoU yang memungkinkan ini, dengan hasil pertemuan untuk diserahkan kepada sesi Dewan di tahun 2011 untuk pertimbangan dan tindakan apapun, sebagaimana sesuai;
- 3 untuk memfasilitasi akses terhadap peralatan dan sumber-sumber, dalam anggaran yang tersedia, yang diperlukan untuk memajukan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK untuk semua Negara Anggota, konsisten dengan ketentuan-ketentuan WSIS mengenai akses universal dan non-diskriminasi terhadap TIK untuk semua negara;
- 4 untuk terus memelihara gerbang keamanan dunia maya sebagai cara untuk membagi informasi mengenai inisiatif-inisiatif nasional, regional dan internasional yang berhubungan dengan keamanan dunia maya di seluruh dunia;
- 5 untuk melapor secara tahunan kepada Dewan mengenai kegiatan-kegiatan ini dan untuk membuat usulan-usulan sebagaimana sesuai;
- 6 untuk lebih lanjut meningkatkan koordinasi antara kelompok-kelompok studi dan program-program yang berhubungan,

memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

- 1 untuk mengintensifkan kerja dalam kelompok studi ITU-T yang ada untuk:
 - i) menangani ancaman-ancaman yang ada dan kerentanan di masa depan yang mempengaruhi upaya-upaya untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK, dengan mengembangkan laporan-laporan atau rekomendasi-rekomendasi, sebagaimana sesuai, dengan sasaran untuk melaksanakan resolusi-resolusi WTSA-08, khususnya Resolusi 50 dan 52 (Rev. Johannesburg, 2008), membolehkan kerja untuk dimulai sebelum Pertanyaan disetujui;
 - ii) mencari cara-cara untuk meningkatkan pertukaran informasi teknis dalam bidang-bidang ini, meningkatkan pelaksanaan tata cara dan standar yang ada lebih lanjut meningkatkan keamanan, dan memajukan kerja sama internasional antara entitas-entitas yang sesuai;
 - iii) memfasilitasi proyek-proyek yang berasal dari hasil-hasil WTSA-08, khususnya:
 - a) Resolusi 50 (Rev. Johannesburg, 2008) mengenai keamanan dunia maya;
 - b) Resolusi 52 (Rev. Johanneburg, 2008), mengenai menghadapi dan melawan surel sampah (*spam*);
- 2 untuk melanjutkan kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang relevan dengan maksud untuk bertukar praktik-praktik terbaik dan menyebarkan informasi melalui, misalnya, lokakarya-lokakarya dan sesi-sesi pelatihan gabungan serta kelompok-kelompok kegiatan koordinasi gabungan, dan, dengan undangan, melalui kontribusi-kontribusi tertulis dari organisasi-organisasi yang relevan,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk mengembangkan, konsisten dengan hasil-hasil WTDC-10 dan sesuai dengan Resolusi 45 (Rev. Hyderabad, 2010), Resolusi 69 (Hyderabad, 2010) dan Program 2 dalam Rencana Aksi Hyderabad, proyek untuk meningkatkan kerja sama terhadap keamanan dunia maya dan memerangi surel sampah (*spam*) menanggapi kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang, dalam kolaborasi dekat dengan mitra-mitra yang relevan;
- 2 berdasarkan permohonan, untuk mendukung Negara-negara Anggota ITU dalam upaya-upaya mereka untuk membangun sumber daya manusia, dengan memfasilitasi akses Negara-negara Anggota kepada sumber-sumber yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional relevan lainnya yang sedang mengerjakan legislasi nasional untuk memerangi kejahatan dunia maya; mendukung upaya-upaya nasional dan regional Negara-negara Anggota ITU untuk membangun sumber daya untuk melindungi terhadap ancaman dunia maya/kejahatan dunia maya, dengan kolaborasi satu sama yang lain, konsisten dengan legislasi nasional Negara-negara Anggota yang

disebutkan di atas, membantu Negara-negara Anggota, khususnya negara-negara berkembang, dalam memperluas langkah-langkah legal yang sesuai dan dapat dijalankan yang terkait dengan perlindungan terhadap ancaman-ancaman dunia maya pada tingkat nasional, regional dan internasional; menetapkan langkah-langkah teknis dan prosedural, ditujukan pada mengamankan prasarana-prasarana TIK nasional, dengan mempertimbangkan kerja dari kelompok-kelompok studi ITU-T dan, sebagaimana sesuai, organisasi-organisasi relevan lainnya; mendirikan struktur-struktur organisasi, seperti CIRT, untuk mengenali, **memanage** dan menanggapi ancaman-ancaman dunia maya, dan mekanisme-mekanisme kerjasama pada tingkat regional dan internasional;

- 3 untuk memberikan dukungan finansial dan administratif yang diperlukan untuk proyek-proyek ini dalam sumber-sumber yang ada, dan untuk mencari sumber-sumber tambahan (dalam bentuk tunai dan yang serupa) untuk pelaksanaan proyek-proyek ini melalui persetujuan kemitraan;
- 4 untuk memastikan koordinasi proyek-proyek ini dalam konteks kegiatan keseluruhan ITU dalam perannya sebagai moderator/fasilitator untuk Garis Aksi WSIS C5, dan untuk menghilangkan duplikasi apapun mengenai hal penting ini dengan Sekretariat Jenderal dan ITU-T;
- 5 untuk mengkoordinasikan proyek-proyek ini dengan kegiatan dan program kelompok-kelompok studi ITU-D terhadap topik ini, dan dengan kegiatan-kegiatan program relevan dan Sekretariat Jenderal;
- 6 untuk melanjutkan kerja sama dengan organisasi-organisasi yang terkait dalam rangka untuk bertukar praktik-praktik terbaik dan menyebarkan informasi melalui, misalnya, pelatihan-pelatihan kerja dan sesi-sesi pelatihan gabungan;
- 7 untuk melapor secara tahunan kepada Dewan mengenai kegiatan-kegiatan ini dan membuat usulan-usulan sebagaimana sesuai,

lebih lanjut memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

masing-masing di dalam lingkup tanggung jawabnya:

- 1 untuk menjalankan resolusi-resolusi relevan dari kedua WTSA-08 dan WTDC-10, termasuk Program 2 mengenai pemberian dukungan dan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK;
- 2 untuk mengenali dan memajukan ketersediaan informasi mengenai pembangunan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK, khususnya berhubungan dengan prasarana TIK, untuk Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan organisasi-organisasi relevan;
- 3 tanpa menduplikasikan kerja di bawa Pertanyaan 22-1/1 ITU-D, untuk mengenali praktik-praktik terbaik dalam membentuk CIRTs, untuk

- mempersiapkan panduan referensi untuk Negara-negara Anggota dan, dimana sesuai, untuk memberi kontribusi pada Pertanyaan 22-1/1;
- 4 untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi relevan dan ahli-ahli internasional dan nasional relevan lainnya, sebagaimana sesuai, untuk mengenali praktik-praktik terbaik dalam membentuk CIRTs;
 - 5 untuk melakukan tindakan dengan maksud kepada Pertanyaan baru yang sedang diuji oleh kelompok-kelompok studi di dalam Sektor-sektor mengenai pembentukan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK;
 - 6 untuk mendukung strategi, organisasi, peningkatan kesadaran, kerja sama, evaluasi dan pengembangan keahlian-keahlian;
 - 7 untuk memberikan dukungan teknis dan finansial yang diperlukan, di dalam kendala-kendala sumber-sumber anggaran yang ada, sesuai dengan Resolusi 58 (Johannesburg, 2008);
 - 8 untuk menggerakkan sumber-sumber anggaran ekstra yang sesuai, di luar anggaran biasa Perhimpunan, untuk pelaksanaan resolusi ini, untuk membantu negara-negara berkembang,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

mengikuti inisiatifnya terhadap permasalahan ini:

- 1 untuk mengajukan kepada Dewan, dengan memperhitungkan kegiatan-kegiatan dari ketiga Sektor dalam masalah ini, suatu rencana aksi untuk memperkuat peran ITU dalam membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK;
- 2 untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan, termasuk melalui penerimaan MoUs, bergantung pada persetujuan Dewan dalam masalah ini, sesuai dengan Resolusi 100 (Minneapolis, 1998) Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

memohon kepada Dewan

untuk memasukkan laporan Sekretaris Jenderal dalam dokumen yang dikirim kepada Negara-negara Anggota sesuai dengan Nomor 81 Konvensi;

mengundang Negara-negara Anggota

untuk mempertimbangkan penggabungan inisiatif-inisiatif internasional dan regional kompeten yang sesuai untuk meningkatkan kerangka-kerangka kerja legislatif nasional yang relevan kepada keamanan jaringan informasi dan komunikasi,

mengundang Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Para Asosiat

- 1 untuk memberi kontribusi pada subyek ini kepada kelompok-kelompok studi ITU yang relevan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi tanggung jawab Perhimpunan ;
- 2 untuk berkontribusi membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK pada tingkat nasional, regional dan internasional, dengan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagaimana digarisbawahi dalam butir 12 Rencana Aksi Jenewa, dan berkontribusi untuk penyiapan studi-studi dalam bidang-bidang tersebut;
- 3 untuk memajukan pengembangan program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap resiko-resiko dalam dunia maya.

RESOLUSI 131 (Rev. Guadalajara, 2010)
Indeks¹ teknologi informasi dan komunikasi serta indikator²
konektivitas masyarakat

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menyadari

- a) bahwa inovasi teknologi, digitisasi dan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang secara signifikan dan telah terus memodifikasi cara-cara dimana orang mengakses pengetahuan dan berkomunikasi dengan satu sama lain;
- b) bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan dalam semua populasi untuk mencapai pengembangan ekonomi, sosial dan budaya yang lebih baik dan untuk mengangkat standar kehidupan penduduk dunia;
- c) bahwa setiap Negara Anggota mencoba untuk membuat kebijakan dan regulasi sendiri untuk mempersempit kesenjangan digital se-efektif mungkin antara mereka yang memiliki akses pada komunikasi dan informasi dan mereka yang tidak memiliki akses,

mengakui

- a) bahwa hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi Sedunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) mewakili suatu kesempatan untuk mengenali strategi global untuk mempersempit kesenjangan digital dari sudut pengembangan;
- b) bahwa hasil dari Kemitraan Global untuk Pengukuran TIK untuk Pengembangan telah menghasilkan sesuai kesepakatan mengenai identifikasi seperangkat indikator-indikator dasar untuk mengukur TIK untuk pengembangan, sebagaimana diserukan sesuai dengan butir 115 Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi,

menimbang

- a) bahwa Rencana Aksi Jenewa yang diterima oleh WSIS mencantumkan bahwa: “Dalam kerja sama dengan setiap negara yang terlibat, mengembangkan dan meluncurkan suatu komposit Indeks Pengembangan (Kesempatan Digital) TIK. Hal ini dapat diterbitkan secara tahunan, atau bahkan setiap dua tahun, dalam suatu Laporan Pengembangan TIK. Indeksnya dapat memperlihatkan statistik sementara laporan nya dapat menyampaikan kerja analitik mengenai

¹ Indeks TIK tunggal harus dikembangkan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan keanggotaan.

² Konektivitas masyarakat diartikan di sini merujuk pada kemungkinan pada akses terhadap layanan-layanan telekomunikasi dari suatu fasilitas terminal yang diserahkan pada masyarakat, untuk memfasilitasi penggunaan yang mudah.

- kebijakan dan pelaksanaannya, bergantung pada keadaan nasional, termasuk analisa gender”,
- b) bahwa para pemangku kepentingan penentu, dimana di antaranya ITU (diwakili oleh Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D)), terlibat dalam pengukuran statistik Masyarakat Informasi, menggabungkan kekuatan untuk menciptakan suatu “Kemitraan Global untuk Mengukur TIK untuk Pengembangan”,
- c) konten Resolusi 8 (Rev. Hyderabad, 2010) dari Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia (WTDC), sebagaimana juga Program 3 dari Rencana Aksi Hyderabad, mengenai pengumpulan dan penyebaran informasi dan statistik telekomunikasi/TIK, dengan penekanan khusus pada penggabungan data informasi dan statistik mengenai situs Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT), untuk menghindari penggandaan dalam bidang ini;
- d) bahwa, melalui Program 3 Rencana Aksi Hyderabad, WTDC menyerukan ITU-D untuk:
- mengumpulkan dan menyebarluaskan dengan tepat waktu, data dan statistik-statistik, termasuk data pemisahan jenis kelamin dimana berlaku;
 - menganalisa kecenderungan-kecenderungan telekomunikasi/TIK dan menghasilkan laporan-laporan riset regional dan global;
 - mematok perkembangan-perkembangan TIK dan memperjelas besarnya kesenjangan digital (menggunakan peralatan seperti Indeks Perkembangan TIK dan Seperangkat Harga TIK);
 - mengembangkan standar-standar dan metodologi-metodologi internasional mengenai statistik-statistik TIK;
 - memberikan kontribusi terhadap pemantauan sasaran-sasaran dan target-target yang disetujui secara internasional (seperti target-target dan Sasaran-Sasaran Pengembangan Milenium (MDG) dan WSIS);
 - mempertahankan peran terdepan dalam Kemitraan Global untuk Mengukur TIK untuk Pengembangan;
 - memberikan bantuan pengembangan sumber daya manusia dan teknis kepada Negara-negara Anggota dalam bidang pengukuran TIK;
- e) hasil-hasil WSIS dalam hubungan terhadap indikator-indikator ini, khususnya paragraf-paragraf berikut dalam Agenda Tunis:
- butir 113 yang menyerukan untuk merumuskan indikator-indikator yang sesuai dan melakukan standar pengukuran termasuk indikator konektivitas masyarakat, untuk menjelaskan besarnya kesenjangan digital, dalam dimensi domestik maupun internasional, dan menjaganya di bawah taksiran regular, dan menjajaki kemajuan global dalam penggunaan TIK untuk mencapai sasaran dan objektif pengembangan yang disetujui internasional, termasuk Sasaran-Sasaran Pengembangan Millenium;
 - butir 114 yang mengakui pentingnya pengembangan indikator-indikator TIK untuk mengukur kesenjangan digital dan mencatat peluncuran Kemitraan untuk Mengukur TIK bagi Perkembangan;

- butir 115 yang mencatat peluncuran Indeks Kesempatan TIK dan Indeks Kesempatan Digital;
- butir 116 yang menekankan kebutuhan untuk memperhatikan tingkat-tingkat pengembangan yang berbeda dan keadaan-keadaan nasional;
- butir 117 yang menyerukan untuk berkolaborasi, keefektifan biaya dan non-duplikasi dalam bidang ini;
- butir 118 yang mengundang masyarakat internasional untuk memperkuat kapasitas statistik dari negara-negara berkembang dengan memberikan dukungan yang sesuai pada tingkat nasional dan regional,

mengakui lebih lanjut

- a) bahwa, dengan pandangan untuk menyediakan akses lebih cepat untuk layanan telekomunikasi/TIK bagi populasi mereka, banyak negara telah melaksanakan kebijakan konektivitas masyarakat publik dalam komunitas-komunitas tersebut yang kurang terlayani oleh fasilitas telekomunikasi;
- b) bahwa pendekatan untuk mencapai layanan universal melalui konektivitas masyarakat dan akses pita lebar dari pada mencari dalam jangka pendek untuk memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki sambungan telepon menjadi salah satu dari sasaran-sasaran utama ITU,

mengingat

- a) bahwa, untuk menjaga agar setiap pembuat kebijakan publik negara berpengetahuan layak, ITU-D mengumpulkan dan secara periodik menerbitkan berbagai macam statistik yang menyediakan beberapa indikasi dari tingkat kemajuan dalam dan penetrasi terhadap layanan telekomunikasi/TIK dalam wilayah-wilayah dunia yang berbeda;
- b) bahwa, sesuai dengan garis pedoman Konferensi Berkuasa Penuh, adalah perlu untuk memastikan sejauh mungkin bahwa kebijakan dan strategi Perhimpunan sangat selaras dengan lingkungan telekomunikasi yang terus berubah;

memperhatikan

- a) bahwa Rencana Aksi Jenewa yang diterima oleh WSIS mengenali indikator dan pokok referensi yang sesuai, termasuk indikator-indikator konektivitas masyarakat, sebagai elemen untuk tindak lanjut dan evaluasinya;
- b) bahwa Indeks Pengembangan TIK tunggal (IDI) dikembangkan oleh ITU-D dan telah dipublikasikan setiap tahun sejak 2009;
- c) bahwa Resolusi 8 (Rev. Hyderabad, 2010) memerintahkan Direktur BDT untuk membuat dan mengumpulkan indikator-indikator konektivitas masyarakat dan untuk berpartisipasi dalam pembuatan indikator-

indikator inti untuk mengukur upaya-upaya untuk membangun masyarakat informasi dan, dengan melakukan hal tersebut, menggambarkan skala kesenjangan digital,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

untuk melanjutkan, apabila dibenarkan, untuk memajukan penerimaan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa indikator-indikator konektivitas masyarakat diperhatikan dalam pertemuan-pertemuan regional dan dunia yang bersidang untuk tujuan mengevaluasi dan menindak lanjuti Rencana Aksi Jenewa serta Agenda Tunis,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk terus meningkatkan penerimaan statistik-statistik ITU, dan untuk mempublikasikannya secara berkala.
- 2 untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mendefinisikan dan menerima indikator-indikator baru untuk tujuan mengukur dampak nyata TIK terhadap pengembangan negara-negara;
- 3 untuk dalam rangka memberlakukan sepenuhnya Resolusi 8 (Rev. Hyderabad, 2010), untuk terus mengadakan seminar untuk Negara-negara Anggota dan pada ahli untuk mengembangkan indikator-indikator yang ada serta meninjau metodologi-metodologi mereka secara sistematis, memulai peninjauan ini sesuai dengan Resolusi 8 (Rev. Hyderabad, 2010), dan sebagaimana sesuai, untuk merumuskan indikator-indikator lain manapun yang mungkin diperlukan;
- 4 untuk menyelenggarakan suatu konferensi mengenai indikator-indikator TIK setidaknya setiap dua tahun sekali;
- 5 untuk memberi dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan Resolusi 8 (Rev. Hyderabad, 2010), dan untuk menekankan pentingnya melaksanakan hasil-hasil WSIS dalam hubungan terhadap indikator-indikator yang telah disebutkan, dan untuk menghindari duplikasi dalam kerja statistik di bidang ini;
- 6 untuk terus bekerja untuk memajukan indeks TIK tunggal sebagai cara dimana ITU menanggapi terhadap *menimbang a)* di atas;
- 7 untuk bekerja sama dengan badan-badan internasional yang relevan, khususnya dengan yang terlibat dalam Kemitraan untuk Mengukur TIK bagi Perkembangan, untuk pelaksanaan resolusi ini;
- 8 untuk mengerjakan pengembangan indikator-indikator konektivitas masyarakat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara tahunan,
- 9 untuk menyesuaikan pengumpulan data dan indeks TIK tunggal untuk mencerminkan akses yang berubah pada dan penggunaan TIK, dan untuk mengundang Negara-negara Anggota untuk ikut serta dalam proses-proses serupa,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk menyampaikan suatu laporan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai kemajuan pelaksanaan resolusi ini,

mengundang Negara-negara Anggota

- 1 untuk berpartisipasi dengan menyampaikan statistik-statistik konektivitas masyarakat nasional mereka kepada ITU-D;
- 2 untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha ini, dengan menyediakan informasi yang diminta untuk menghasilkan standar ukuran telekomunikasi/TIK, dengan pandangan untuk mengembangkan suatu indeks tunggal.

RESOLUSI 133 (Rev. Guadalajara, 2010)
Peran administrasi Negara Anggota dalam pengelolaan nama domain internasional (multi bahasa)

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

Resolusi 133 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai subyek ini,

menimbang

Ketentuan-ketentuan Resolusi 101 dan 102 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini mengenai peran ITU dengan memperhatikan permasalahan kebijakan publik internasional yang berhubungan dengan Internet dan manajemen sumber-sumber Internet, termasuk nama-nama dan alamat-alamat domain,

mengingat kembali

- a) peran Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) sebagaimana didefinisikan dalam resolusi-resolusi yang diterima pada Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (Johannesburg, 2008) termasuk, antara lain, Resolusi 47 (Rev. Johannesburg, 2008), mengenai kode negara nama-nama domain tingkat teratas, Resolusi 48 (Rev. Johannesburg, 2008) mengenai nama-nama domain yang diinternasionalkan, dan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dalam Kelompok Studi 16 ITU-T mengenai hal ini;
- b) komitmen Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi yang diterima oleh Konferensi Tingkat Tinggi Sedunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) untuk memajukan proses untuk pengenalan multibahasa dalam beberapa bidang termasuk nama-nama domain, surat elektronik, alamat-alamat internet dan pencarian kata kunci;
- c) kebutuhan untuk memajukan *root server* regional dan penggunaan nama-nama domain internasional untuk mengatasi rintangan-rintangan bahasa terhadap akses Internet;
- d) kegiatan-kegiatan standardisasi terdahulu yang sukses yang dijalankan oleh ITU-T dengan memperhatikan penerimaan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan susunan huruf non-Latin untuk teleks (kode lima huruf) dan transfer data (kode tujuh huruf), yang mengizinkan penggunaan serangkaian huruf non-Latin untuk teleks nasional dan regional serta transfer data pada tingkat global, regional dan internasional,

menyadari

- a) kesinambungan kemajuan menuju integrasi telekomunikasi dan Internet;
- b) bahwa pengguna-pengguna Internet pada umumnya lebih nyaman membaca atau menjelajah melalui kalimat-kalimat dalam bahasa mereka sendiri dan bahwa, untuk Internet menjadi lebih tersedia secara luas kepada sejumlah besar pengguna, adalah perlu untuk membuat Internet tersedia dalam bahasa program (*scripts*) yang berdasarkan non-Latin; dengan memperhitungkan kemajuan yang akhir-akhir ini dibuat dalam hal ini;
- c) bahwa, mengingat hasil-hasil WSIS dan resolusi-resolusi Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), harus ada suatu komitmen untuk bekerja sungguh-sungguh untuk multibahasa Internet, sebagai bagian dari proses multilateral, transparan dan demokratis, melibatkan para pemerintah dan semua pemangku kepentingan, dalam peran masing-masing dalam melaksanakan resolusi ini,

menekankan

- a) bahwa sistem nama domain yang sekarang tidak mencerminkan secara penuh keragaman dan pertumbuhan kebutuhan bahasa semua pengguna;
- b) bahwa nama domain yang diinternasionalkan, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih umum serta Internet, harus dapat diakses secara luas oleh semua penduduk tanpa memperhatikan gender, ras, agama, negara tempat tinggal atau bahasa;
- c) bahwa nama domain Internet harus tidak memberi hak istimewa kepada negara atau wilayah manapun di dunia kepada kerugian yang lain, dan harus memperhatikan keragaman bahasa global;
- d) peran ITU untuk membantu keanggotaannya dalam memajukan penggunaan bahasa program (*scripts*) mereka untuk nama-nama domain, sebagaimana telah dilakukan dahulu dalam hubungan dengan teleks dan transfer data;
- e) bahwa, mengingat kembali hasil-hasil WSIS dan kebutuhan kelompok-kelompok bahasa, ada kebutuhan mendesak untuk:
 - memajukan proses pengenalan multibahasa dalam sejumlah bidang, termasuk nama-nama domain, alamat-alamat surat elektronik dan pencarian kata kunci;
 - melaksanakan program-program yang memperbolehkan keberadaan nama-nama domain dan isi multibahasa pada Internet dan penggunaan berbagai model piranti lunak untuk melawan kesenjangan digital bahasa dan untuk memastikan bahwa semua dapat berpartisipasi dalam masyarakat yang baru timbul;
 - memperkuat kerjasama antar badan-badan yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut standar-standar teknis dan untuk memelihara peluncuran globalnya;

mengakui

- a) peran dan kedaulatan yang ada dari Negara-negara Anggota ITU dengan memperhatikan alokasi dan pengelolaan sumber-sumber penomoran kode negara mereka sebagaimana diabadikan dalam Rekomendasi ITU-T E. 164;
- b) bahwa ada sejumlah tantangan dengan memperhatikan properti intelektual dan peluncuran nama-nama domain internasional, dan solusi yang layak harus dijelajahi;
- c) peran yang dimainkan oleh Organisasi Properti Intelektual Sedunia (WIPO) dengan perhatian untuk memperdebatkan resolusi untuk nama-nama domain;
- d) peran yang dimainkan oleh Organisasi Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dengan memperhatikan untuk memajukan keragaman dan identitas budaya, keragaman bahasa dan muatan lokal;
- e) bahwa ITU menikmati kerja sama erat dengan WIPO maupun UNESCO;
- f) bahwa adalah terpenting untuk memelihara kemampuan saling beroperasi global seraya nama-nama domain meluas untuk memasukkan serangkaian huruf non-Latin,

memutuskan

untuk menjelajahi cara-cara dan sarana-sarana untuk kolaborasi dan koordinasi yang lebih besar antara ITU dan organisasi-organisasi relevan¹ lainnya dalam pengembangan jaringan-jaringan berbasis IP dan masa depan internet, melalui persetujuan-persetujuan kerja sama, sebagaimana sesuai, dalam rangka meningkatkan peran ITU dalam pengaturan Internet untuk memastikan manfaat-manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat global,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro

- 1 untuk mengambil bagian aktif dalam semua diskusi, inisiatif dan kegiatan internasional mengenai peluncuran dan pengelolaan nama-nama domain Internet internasional, bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang relevan, termasuk WIPO dan UNESCO;
- 2 untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan kedaulatan Negara-negara Anggota ITU dengan memperhatikan rencana penomoran Rekomendasi ITU-T E. 164 dalam penerapan apapun yang menggunakannya ;
- 3 untuk memajukan secara efektif peran keanggotaan ITU dalam internasionalisasi nama-nama domain dalam bahasa program (*scripts*)

¹ termasuk, tapi tidak terbatas pada Korporasi Internet untuk Nama dan Nomer yang Ditentukan (ICANN), pendaftaran Internet regional (RIR), kelompok Tugas Teknik Internet (IETF), Masyarakat Internet (ISOC) dan Konsorsium World Wide Web (W3C), pada landasan timbal balik.

masing-masing dengan menggunakan susunan karakter spesifik mereka;

- 4 untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam menemui komitmen-komitmen Rencana Aksi Jenewa dan Agenda Tunis dengan memperhatikan nama-nama domain internasional;
- 5 untuk membuat usulan-usulan, dimana sesuai, untuk mencapai tujuan-tujuan resolusi ini secepat mungkin;
- 6 untuk memberikan prioritas kepada studi-studi yang dijalankan oleh ITU-T sebagaimana diperhatikan berbeda dengan bahasa program (*scripts*) non-Latin;
- 7 untuk membawa resolusi ini kepada perhatian WIPO dan UNESCO, yang merupakan fasilitator untuk pelaksanaan Garis Aksi WSIS C8, menekankan perhatian dan permintaan untuk bantuan dari Negara-negara Anggota, khususnya negara-negara berkembang, dengan memperhatikan nama-nama domain yang diinternasionalkan (multibahasa), dan desakan mereka mengenai bantuan dari Perhimpunan dalam bidang ini, untuk memastikan penggunaan Internet dan kemajuan melewati rintangan-rintangan bahasa, sehingga meningkatkan penggunaan Internet secara internasional
- 8 untuk melapor secara tahunan kepada Dewan mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan prestasi-prestasi yang dicapai dalam subyek ini;

memerintahkan Dewan

untuk mempertimbangkan kegiatan-kegiatan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro dengan memperhatikan pelaksanaan resolusi ini dan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sebagaimana sesuai,

mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

- 1 untuk mengambil peran aktif dalam semua diskusi dan inisiatif internasional mengenai pengembangan dan peluncuran nama-nama domain Internet internasional, termasuk inisiatif-inisiatif serupa dari kelompok-kelompok bahasa yang relevan, dan untuk mengajukan kontribusi secara tertulis kepada ITU-T untuk membantu menjalankan resolusi ini;
- 2 untuk meningkatkan kesadaran pada tingkat nasional dan regional di antara semua kelompok yang berkepentingan dan untuk mendorong partisipasi mereka dalam kerja ITU, dan dari ITU-T khususnya, dan untuk mengundang entitas-entitas yang terlibat dalam pengembangan dan peluncuran nama-nama domain yang diinternasionalkan untuk bekerja sama dengan Perhimpunan dan ITU-T untuk menolong melaksanakan resolusi ini;

- 3 untuk mendesak semua entitas yang relevan yang bekerja untuk mengembangkan dan melaksanakan nama-nama domain yang diinternasionalkan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan mereka dalam domain ini.

RESOLUSI 135 (Rev. Guadalajara, 2010)
Peran ITU dalam pengembangan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi, dalam memberikan bantuan dan nasihat teknis kepada negara berkembang¹, dan dalam melaksanakan proyek nasional, regional dan antarregional yang relevan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh dari Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 135 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) Resolusi 34 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, mengenai bantuan dan dukungan kepada negara-negara dengan kebutuhan khusus untuk membangun sektor telekomunikasi mereka;
- c) resolusi-resolusi yang relevan dari Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (Hyderabad, 2010) – khususnya Resolusi 17 (Rev. Hyderabad, 2010) dan lampiran-lampirannya, mengenai pelaksanaan inisiatif-inisiatif pada tingkat nasional, regional, inter regional dan global yang disetujui oleh enam² wilayah; Resolusi 32 (Rev. Hyderabad, 2010), mengenai kerjasama internasional dan regional pada inisiatif-inisiatif regional; dan Resolusi 34 (Rev. Hyderabad, 2010), mengenai peran telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi dalam persiapan bencana, peringatan awal, penyelamatan, mitigasi, pemulihan dan tanggapan – serta ketetapan lima program yang diterima oleh konferensi dan tautannya dengan resolusi-resolusi tersebut,

menimbang

- a) perkembangan sasaran-sasaran yang mengharuskan bahwa telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat diakses oleh umat manusia sebagai keseluruhan, khususnya orang-orang di negara-negara berkembang;
- b) pengalaman yang terhimpun dan maju dari ITU dalam melaksanakan resolusi-resolusi sebagaimana tersebut di atas;
- c) tugas-tugas yang diberikan kepada ITU dengan memperhatikan Garis-garis Aksi C2, C5 dan C6 dalam Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi, dan keikutsertaan yang dibutuhkan oleh ITU dalam melaksanakan garis-garis aksi lainnya yang bergantung kepada ketersediaan telekomunikasi/TIK, berdasarkan kesepakatan dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkolaborasi dalam melaksanakan garis-garis aksi ini;
- d) sukses berkesinambungan yang dicapai oleh Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU dalam kemitraannya untuk melaksanakan banyak

¹ Termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara terkurung daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi.

² Afrika, Amerika, Negara-negara Arab, Asia-Pasifik, Negara-negara Persemakmuran Independen, Eropa.

program pengembangan, termasuk mengembangkan jaringan-jaringan telekomunikasi/TIK di beberapa negara berkembang;

- e) Rencana Aksi Hyderabad dan optimalisasi yang diperlukan dari sumber-sumber untuk mencapai sasaran-sasaran yang diusulkan;
- f) tindakan-tindakan yang dijalankan untuk melaksanakan Resolusi 157 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, dalam memperkuat fungsi pelaksanaan proyek dalam ITU,

memutuskan

1 bahwa ITU seharusnya:

- i) terus mengoordinasikan usaha-usaha untuk harmonisasi, pengembangan dan peningkatan telekomunikasi/TIK di seluruh dunia untuk membangun masyarakat informasi, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan dirinya dengan kecenderungan-kecenderungan dalam lingkungan pengembangan prasarana telekomunikasi/TIK;
- ii) memperbaharui kontak-kontak dengan Organisasi Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) untuk merevisi Program Internasional untuk Pengembangan Komunikasi (IPDC), dengan maksud untuk melaksanakan Garis Aksi C7 dalam Agenda Tunis yang berkaitan dengan pendidikan dan kerjasama dengan Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP);

2 bahwa Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT) wajib:

- i) terus menyediakan ahli-ahli teknis yang berkualifikasi tinggi untuk menawarkan saran yang menjadi subyek-subyek penting bagi negara-negara berkembang, baik secara individu maupun bersama-sama, dan untuk memastikan keahlian yang memadai melalui perekrutan atau kontrak-kontrak jangka pendek, sebagaimana sesuai;
- ii) terus bekerja sama sesuai sumber-sumber keuangan, baik di bawah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP maupun pengaturan-pengaturan keuangan lainnya, dan memperbanyak kemitraan dengan Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor, lembaga-lembaga keuangan dan organisasi-organisasi internasional dan regional, untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan resolusi ini;
- iii) melanjutkan Program Sukarela Khusus untuk Kerja sama Teknisnya, berdasarkan pada kontribusi-kontribusi keuangan, layanan-layanan ahli atau bentuk bantuan lain apapun, untuk membantu dengan lebih baik memenuhi permintaan-permintaan dari negara-negara berkembang dibidang telekomunikasi/TIK sejauh mungkin;
- iv) memperhatikan, apabila menentukan tindakan-tindakan yang disebutkan di atas, rencana-rencana konektivitas nasional atau regional sebelumnya, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan

tersebut berdampak pada aspek-aspek prioritas dari rencana-rencana ini dan dampak tindakan tersebut dilakukan sesuai aspek-aspek utama membantu pencapaian dari sasaran-sasaran nasional, regional dan ITU; apabila para administrasi tidak memiliki rencana-rencana ini, proyek-proyek tersebut dapat juga mempertimbangkan untuk mengembangkannya,

mengundang organisasi-organisasi dan badan-badan keuangan regional dan internasional, penyedia perlengkapan, para operator, dan semua mitra yang potensial

untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk memastikan pembiayaan penuh atau sebagian untuk melaksanakan program-program kerja sama untuk mengembangkan telekomunikasi/TIK, termasuk inisiatif-inisiatif yang telah disetujui secara regional di bawah Resolusi 17 (Rev. Hyderabad, 2010)

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk menyampaikan suatu laporan terperinci tahunan kepada Dewan ITU mengenai hasil-hasil pelaksanaan resolusi ini, termasuk rekomendasi-rekomendasi apapun yang dianggap perlu oleh Sekretaris Jenderal, berdasarkan kesepakatan dengan Direktur BDT, untuk meningkatkan dampak resolusi ini,

mengundang Dewan

untuk meninjau kembali hasil-hasil yang dicapai dan untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk mempercepat pelaksanaan resolusi ini sebaik mungkin.

RESOLUSI 136 (Rev. Guadalajara, 2010)
Penggunaan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitor dan pengelolaan dalam keadaan darurat dan keadaan bencana untuk peringatan dini, pencegahan, mitigasi dan pemulihan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 36 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, mengenai telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan bantuan kemanusiaan;
- b) Resolusi 182 (Guadalajara, 2010) konferensi ini, mengenai peran telekomunikasi/TIK dengan memperhatikan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan;
- c) Resolusi 34 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai peran telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi dalam kesiapan bencana, peringatan dini, mitigasi, pemulihan dan penanggulangan;
- d) Resolusi 48 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC, mengenai penguatan kerjasama di antara para regulator telekomunikasi;
- e) Resolusi 644 (Rev. WRC-07) Konferensi Komunikasi Radio Dunia (WRC), mengenai sumber-sumber telekomunikasi untuk mitigasi bencana dan operasi-operasi pemulihan;
- f) Resolusi 646 (WRC-03) WRC, mengenai perlindungan dan pemulihan bencana;
- g) Resolusi 673 (WRC-07) WRC, mengenai penggunaan komunikasi radio untuk aplikasi-aplikasi observasi Bumi;
- h) mekanisme-mekanisme telekomunikasi/TIK dalam keadaan darurat yang didirikan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan,

memperhatikan

Resolusi 60/125, mengenai kerja sama internasional pada bantuan kemanusiaan dalam bidang bencana-bencana alam, mulai dari pemulihan hingga pengembangan, yang diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Maret 2006,

memperhatikan

- a) butir 51 Deklarasi Prinsip Jenewa yang diterima oleh Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS), mengenai penggunaan aplikasi-aplikasi TIK untuk pencegahan bencana;
- b) butir 20 Rencana Aksi Jenewa yang diterima oleh WSIS, mengenai e-lingkungan, yang menyerukan untuk pembentukan sistem-sistem

monitor, menggunakan TIK, untuk memperkirakan dan memonitor dampak bencana-bencana alam dan buatan manusia, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara terbelakang dan ekonomi-ekonomi kecil;

- c) butir 30 Komitmen Tunis yang diterima oleh WSIS, mengenai mitigasi bencana;
- d) butir 91 Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi yang diterima oleh WSIS, mengenai pengurangan bencana;
- e) kerja koordinasi efektif dari Panel Koordinasi Kemitraan untuk Telekomunikasi bagi Pemulihan dan Mitigasi Bencana, yang dipimpin oleh Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU

menimbang

- a) kehancuran yang diderita dari bencana-bencana di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang yang mungkin menderita secara tidak seimbang dikarenakan kekurangan prasarana dan, oleh karena itu, mendapatkan manfaat yang paling banyak dari informasi mengenai subyek pencegahan bencana, mitigasi dan usaha-usaha pemulihan,
- b) potensi telekomunikasi/TIK modern untuk memfasilitasi pencegahan bencana, mitigasi dan usaha-usaha pemulihan;
- c) kerja sama yang berkesinambungan antara kelompok-kelompok studi ITU dan organisasi-organisasi pengembangan standar lainnya yang berurusan dengan telekomunikasi dalam keadaan darurat, sistem-sistem waspada dan peringatan,

mengakui

- a) kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan pada tingkat-tingkat internasional dan regional di ITU dan organisasi-organisasi relevan lainnya untuk menetapkan cara-cara yang disetujui secara internasional untuk pengoperasian sistem-sistem bagi perlindungan publik dan pemulihan bencana yang berbasis harmonisasi dan terkoordinasi;
- b) pengembangan yang sedang berjalan oleh ITU, dalam koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai panduan untuk menerapkan standar muatan internasional bagiseluruh media peringatan publik di semua situasi bencana dan darurat;
- c) kontribusi sektor swasta, dalam pencegahan, mitigasi dan pemulihan situasi-situasi darurat dan bencana, yang terbukti efektif;
- d) kebutuhan untuk suatu pemahaman bersama dari komponen-komponen prasana jaringan yang diperlukan untuk memberikan kemampuan-kemampuan telekomunikasi yang tahan yang dapat dipasang dengan cepat, dapat saling beroperasi, untuk bantuan kemanusiaan dan operasi-operasi pemulihan bencana;

- e) pentingnya bekerja menuju pembentukan monitor berbasis standar dan sistem-sistem peringatan dini seluruh dunia, berbasis pada telekomunikasi/TIK, yang terhubung pada jaringan-jaringan nasional dan regional dan yang memfasilitasi tanggap bencana darurat di seluruh dunia, khususnya di wilayah-wilayah beresiko tinggi;
- f) peran yang dapat dimainkan oleh Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU, melalui sarana-sarana serupa seperti pada Simposium Global untuk Regulator, dalam mengumpulkan dan menyebarkan seperangkat praktik-praktik terbaik regulasi nasional bagi fasilitas-fasilitas telekomunikasi/TIK untuk pencegahan bencana, mitigasi dan pemulihan,

meyakini

bahwa suatu standar internasional untuk komunikasi informasi peringatan waspada dan peringatan dapat membantu dalam penyediaan bantuan kemanusiaan yang efektif dan sesuai serta dalam memitigasi konsekuensi-konsekuensi bencana, khususnya di negara-negara berkembang,

memutuskan untuk memerintahkan Para Direktur Biro

- 1 untuk melanjutkan studi-studi teknis mereka dan untuk mengembangkan rekomendasi-rekomendasi, melalui kelompok-kelompok studi ITU, mengenai pelaksanaan-pelaksanaan teknis dan operasional, sebagaimana perlu, dari solusi-solusi yang maju untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perlindungan publik dan telekomunikasi/TIK pemulihan bencana, dengan memperhitungkan kemampuan, perubahan dan persyaratan-persyaratan transisi apapun yang dihasilkan dari sistem-sistem yang ada, khususnya yang ada di banyak negara berkembang, untuk operasi-operasi nasional dan internasional;
- 2 untuk mendukung pengembangan peringatan dini darurat dan bencana yang berbahaya, menyeluruh dan untuk semua bahaya, sistem-sistem mitigasi dan pemulihan, pada tingkat-tingkat nasional, regional dan internasional, termasuk sistem-sistem monitor dan pengelolaan yang melibatkan penggunaan telekomunikasi/TIK (misal penginderaan jarak jauh), berkolaborasi dengan badan-badan internasional lainnya, dalam rangka mendukung koordinasi pada tingkat global dan regional;
- 3 untuk memajukan pelaksanaan oleh otoritas-otoritas pemberi peringatan yang sesuai berdasarkan standar muatan internasional untuk semua seluruh media peringatan publik, sejalan dengan pedoman-pedoman pembangunan-pembangunan yang sedang berjalan oleh semua Sektor ITU untuk aplikasi untuk semua situasi bencana dan keadaan darurat;
- 4 untuk terus berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang bekerja di bidang standar-standar untuk telekomunikasi/TIK dalam keadaan darurat dan mengkomunikasikan informasi kewaspadaan dan

peringatan, dalam rangka mempelajari penyertaan yang sesuai dari standar-standar serupa dalam kerja ITU dan penyebarluasannya, terutama di negara-negara berkembang,

mendorong Negara-negara Anggota

- 1 dalam situasi-situasi pemulihan darurat dan bencana, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sementara untuk spektrum sebagai tambahan dari yang normalnya disediakan dalam perjanjian-perjanjian dengan administrasi-administrasi yang bersangkutan, seraya mencari bantuan internasional untuk koordinasi dan pengelolaan spektrum, sesuai dengan kerangka kerja hukum yang berlaku di setiap negara;
- 2 untuk bekerja dengan kolaborasi erat dengan Sekretaris Jenderal, Para Direktur Biro, serta juga mekanisme-mekanisme koordinasi telekomunikasi/TIK dalam keadaan darurat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam pengembangan dan penyebarluasan peralatan, prosedur-prosedur dan praktik-praktik terbaik untuk koordinasi dan operasional telekomunikasi/TIK yang efektif dalam situasi-situasi bencana;
- 3 untuk memfasilitasi penggunaan oleh organisasi-organisasi darurat baik dari teknologi-teknologi dan solusi-solusi (satelit dan terestrial (bumi)) yang telah ada dan yang baru, sebesar mungkin yang mungkin dipraktikkan, dalam rangka untuk memenuhi persyaratan-persyaratan kemampuan saling beroperasi dan untuk memajukan sasaran-sasaran terhadap perlindungan publik dan pemulihan bencana;
- 4 untuk mengembangkan dan mendukung pusat-pusat keunggulan nasional dan regional untuk riset, pra-perencanaan, pra-posisi perlengkapan dan peluncuran sumber-sumber telekomunikasi/TIK untuk bantuan kemanusiaan dan koordinasi pemulihan bencana,

mengundang Sekretaris Jenderal

untuk menginformasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, mengenai resolusi ini.

RESOLUSI 137 (Rev. Guadalajara, 2010)
Peluncuran jaringan generasi masa depan di negara berkembang¹

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

Resolusi 137 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

menimbang

- a) bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam butir 22 Deklarasi Prinsip Jenewa yang diterima oleh Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS), prasarana dan aplikasi-aplikasi jaringan informasi dan komunikasi yang dikembangkan dengan baik, yang diadaptasi kepada kondisi-kondisi regional, nasional dan lokal, mudah diakses dan terjangkau, serta membuat penggunaan yang lebih besar dari pita lebar dan teknologi-teknologi inovatif lain, bilamana mungkin, dapat mengakselerasi kemajuan sosial dan ekonomi negara-negara, dan kesejahteraan semua individu, masyarakat dan rakyat, dan ini semua tercakup dalam Garis Aksi C2, diperluas untuk mencakup Garis Aksi C6;
- b) bahwa keberadaan, pada tingkat nasional, regional, antar regional dan global, dari jaringan dan layanan telekomunikasi yang saling terkait untuk pengembangan ekonomi-ekonomi nasional, regional dan internasional adalah elemen yang sangat penting dalam perbaikan situasi sosial, ekonomi dan finansial Negara-negara Anggota,

menyambut

upaya-upaya yang dibuat oleh ITU dalam memberikan perhatian kepada kepentingan negara-negara berkembang (cf. Resolusi 17 (Rev. Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Sedunia (WTSA), dan lampiran-lampiran untuk Resolusi 17 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia (WTDC)),

memperhatikan

- a) bahwa negara-negara berkembang sedang ditantang oleh perubahan cepat dari trend teknologi dan pemusatan;
- b) sedang berlangsungnya kekurangan sumber-sumber, pengalaman dan pembangunan kemampuan di negara-negara berkembang dalam merencanakan dan meluncurkan jaringan-jaringan, khususnya jaringan generasi masa depan (NGN), dan penundaan dalam melaksanakan dan menerima NGN di negara-negara berkembang;

¹ Termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi.

mengingat

- a) upaya-upaya dan kolaborasi tiga Biro untuk melanjutkan meningkatkan kerja yang ditujukan bagi penyediaan informasi dan nasihat mengenai subyek yang penting bagi negara-negara berkembang untuk perencanaan, organisasi pengembangan dan operasi sistem-sistem telekomunikasi mereka;
- b) bahwa, pengetahuan teknis dan pengalaman dari nilai besar pada negara-negara berkembang juga dapat diperoleh dari atau melalui Sektor-Sektor Komunikasi Radio (ITU-R), Standardisasi Telekomunikasi (ITU-T) dan Pengembangan Telekomunikasi (ITU-D) ITU;
- c) bahwa, sesuai dengan Resolusi COM5/1 (Antalya, 2006) ketentuan-ketentuan dalam semua dokumen ITU yang berhubungan dengan negara-negara berkembang wajib diperluas untuk diterapkan secara layak kepada negara-negara dengan ekonomi dalam transisi,

mengakui

- a) bahwa negara-negara berkembang memiliki sumber-sumber daya manusia dan finansial yang terbatas untuk mengatasi kesenjangan teknologi yang terus meningkat;
- b) bahwa kesenjangan digital yang ada menyebabkan diperparahnya lebih lanjut dengan timbulnya teknologi-teknologi baru, termasuk pasca NGNs, apabila negara-negara berkembang tidak mampu mengenalkan NGNs sepenuhnya dan secara tepat waktu,

memperhatikan

- a) bahwa, untuk negara-negara, khususnya negara-negara berkembang dan banyak negara maju, yang telah membuat investasi besar dalam jaringan telepon beralih umum yang tradisional (PSTN), adalah suatu tugas yang menekan bagi mereka untuk melakukan suatu migrasi mulus dari jaringan-jaringan yang ada kepada NGNs;
- b) bahwa NGNs dianggap sebagai suatu alat yang potensial untuk menemui tantangan-tantangan baru dalam menghadapi industri telekomunikasi, dan kegiatan-kegiatan pengembangan penyebaran dan standar-standar NGN adalah sangat penting untuk negara-negara berkembang, khususnya untuk daerah-daerah pedesaan mereka dimana mayoritas populasi tinggal;
- c) bahwa negara-negara dapat mengambil manfaat dari NGN, yang dapat memudahkan penyampaian layanan berbasis TIK yang maju yang banyak macam nya untuk membangun masyarakat informasi, memutuskan permasalahan-permasalahan sulit seperti pengembangan dan pelaksanaan sistem-sistem untuk perlindungan publik dan pemulihan bencana, khususnya telekomunikasi untuk peringatan awal dan penyebaran informasi darurat;

- d) bahwa tantangan, sebagaimana dipahami oleh WSIS, adalah untuk mengendalikan potensi teknologi informasi dan komunikasi untuk memajukan sasaran-sasaran pengembangan dari Deklarasi Millenium, seperti pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang luar biasa, mencapai pendidikan dasar universal, memajukan kesetaraan gender dan pendayagunaan perempuan, mengurangi kematian anak-anak, memperbaiki kesehatan ibu-ibu dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lain,

memutuskan untuk memerintahkan Direktur dari tiga Biro

- 1 untuk melanjutkan dan mengonsolidasikan upaya-upayanya pada NGN dan studi-studi peluncuran jaringan-jaringan² masa depan serta kegiatan-kegiatan pengembangan standar-standar, terutama yang dirancang untuk daerah-daerah pedesaan serta untuk menjembatani kesenjangan digital dan kesenjangan pembangunan;
- 2 untuk mengoordinasikan studi-studi dan program-program berdasarkan Inisiatif Standar Global Jaringan Generasi Masa Depan (NGN-GSI) ITU-T dan dari Inisiatif Perencanaan Jaringan Global (GNPI) ITU-D; mengkoordinasikan kerja yang sedang berjalan yang sedang dilakukan oleh kelompok-kelompok studi dan program-program sebagaimana ditetapkan oleh Rencana Aksi Hyderabad dari WTDC-10, untuk membantu keanggotaan dalam menyebarkan NGN secara efektif, khususnya Pertanyaan 26 Kelompok Studi 2 ITU-D dan kegiatan-kegiatan Program 1 BDT, khususnya dalam melakukan suatu migrasi yang mulus dari prasarana-prasarana telekomunikasi yang telah ada ke NGNs; dan mencari solusi-solusi yang sesuai untuk mempercepat penyebaran NGN yang terjangkau di daerah-daerah pedesaan, dengan mempertimbangkan kesuksesan beberapa negara berkembang dalam memindahkan jaringan-jaringan tersebut, dan mengambil manfaat dari pengalaman negara-negara tersebut,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencari dukungan dan ketentuan finansial yang layak untuk pelaksanaan resolusi ini, dalam sumber-sumber finansial yang ada, termasuk dukungan finansial melalui persetujuan kemitraan;
- 2 untuk menggarisbawahi kepentingan dan manfaat pengembangan dan peluncuran NGN terhadap agensi-agensi khusus dan instansi-instansi finansial Perserikatan Bangsa-Bangsa,

² Lihat hasil kerja Kelompok Fokus dari Kelompok Studi 13 ITU-T mengenai jaringan-jaringan masa depan.

memerintahkan Dewan

untuk mempertimbangkan laporan-laporan dan proposal-proposal yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal dan tiga Biro yang berhubungan dengan pelaksanaan resolusi ini, membuat hubungan yang sesuai dengan paragraf-paragraf operatif Resolusi 44 (Johannesburg, 2006) WTSA, dan untuk mengambil tindakan yang sesuai sehingga Perhimpunan tersebut memberikan perhatian untuk pembahasan kebutuhan negara-negara berkembang,

mengundang semua Negara Anggota dan Anggota Sektor

- 1 untuk menjalankan aksi-aksi kongkrit, untuk mendukung aksi-aksi ITU dan untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif mereka sendiri untuk melaksanakan resolusi ini;
- 2 untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara maju dan berkembang, dan diantara negara-negara berkembang sendiri, dalam meningkatkan kemampuan nasional, regional dan internasional dalam pelaksanaan NGNs, khususnya berkenaan dengan perencanaan, peluncuran, operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan penerapan yang berbasis NGN, khususnya untuk daerah-daerah pedesaan, dengan mempertimbangkan juga pembangunan dalam waktu dekat, dalam rangka dapat menangani jaringan-jaringan masa depan.

RESOLUSI 139 (Rev. Guadalajara, 2010)
Telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi untuk
menjembatani kesenjangan digital dan membangun masyarakat
informasi yang terbuka

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010)

mengingat

Resolusi 139 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

mengakui

- a) bahwa keterbelakangan sosial dan ekonomi dari sebagian besar dunia adalah salah satu masalah paling serius yang mempengaruhi tidak hanya negara-negara yang terlibat tetapi juga masyarakat internasional sebagai keseluruhan;
- b) bahwa ada kebutuhan untuk menciptakan kesempatan untuk layanan digital di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara terkurung daratan dan kepulauan kecil sedang berkembang, serta negara-negara dengan ekonomi dalam transisi, dengan mengambil keuntungan revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- c) bahwa jaringan arsitektur telekomunikasi yang baru menunjukkan suatu potensi untuk menawarkan layanan telekomunikasi dan TIK yang lebih efisien dan ekonomis, khususnya untuk daerah-daerah pedalaman dan terpencil;
- d) bahwa Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) menggarisbawahi bahwa infrastruktur TIK adalah suatu landasan sangat penting untuk suatu masyarakat informasi yang inklusif, dan menyatakan komitmennya untuk menempatkan TIK pada layanan pengembangan;
- e) bahwa deklarasi-deklarasi dari konferensi-konferensi pengembangan telekomunikasi dunia sebelumnya (WTDC) (Istanbul 2002, Doha 2006 and Hyderabad 2010) telah terus menegaskan bahwa TIK dan penerapan TIK adalah merupakan hal penting untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahwa mereka memainkan suatu peran penting dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, perlindungan lingkungan hidup serta pencegahan dan mitigasi bencana-bencana alam dan bencana-bencana lainnya (sebagai tambahan bagi pentingnya prakiraan bencana), dan bahwa mereka harus ditempatkan pada layanan pembangunan pada sektor-sektor lainnya; dan untuk itu, oleh karenanya, kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh TIK yang baru harus digali sepenuhnya dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- f) bahwa Sasaran 2 dalam rencana strategis Perhimpunan untuk 2008-2011 dan juga sasaran mendasar dari rencana strategis untuk Perhimpunan untuk tahun 2012-2015 menyatakan bahwa tujuan untuk

ITU adalah untuk membantu dalam menjembatani kesenjangan digital ditingkat nasional, regional dan internasional dalam TIK dan penerapan TIK dengan memfasilitasi antar-operabilitas, antarkoneksi dan konektivitas global jaringan-jaringan dan layanan-layanan telekomunikasi, dan dengan memainkan suatu peran utama, sesuai mandatnya, dalam proses keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan untuk tindak lanjut dan pelaksanaan sasaran-sasaran dan tujuan WSIS yang relevan;

- g) bahwa, bahkan sebelum WSIS, sebagai tambahan kepada kegiatan-kegiatan ITU, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh banyak organisasi dan entitas untuk menjembatani kesenjangan digital;
- h) bahwa kegiatan serupa telah ditingkatkan sejak kesimpulan WSIS dan diterimanya Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi, khususnya dalam hubungan dengan pelaksanaan dan tindak lanjut, sesuai dengan rencana strategis untuk Perhimpunan tahun 2008-2011 dan resolusi-resolusi dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006),

mengingat

- a) Resolusi 24 (Kyoto, 1994) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai peran ITU dalam pengembangan telekomunikasi dunia, Resolusi 31 (Rev. Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai prasarana telekomunikasi dan TIK untuk pembangunan sosial ekonomi dan budaya, dan Resolusi 129 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai menjembatani kesenjangan digital;
- b) bahwa Laporan Perkembangan Telekomunikasi Dunia Perhimpunan telah menggarisbawahi ketidakseimbangan yang tidak dapat diterima dalam pendistribusian telekomunikasi dan kebutuhan memaksa dan mendesak untuk memulihkan ketidakseimbangan tersebut;
- c) bahwa, dalam konteks ini, WTDC pertama (Buenos Aires, 1994), antara lain, menyerukan kepada para pemerintah, agensi-agensi internasional dan semua kelompok lain yang terlibat untuk menyesuaikan, khususnya di negara-negara berkembang, suatu prioritas lebih tinggi yang sesuai untuk investasi dan tindakan terkait lainnya untuk pengembangan telekomunikasi;
- d) bahwa, sejak saat itu, WTDC telah mendirikan kelompok-kelompok studi, mengembangkan program-program kerja dan menyetujui resolusi-resolusi untuk memajukan kesempatan, menggarisbawahi peran TIK dalam sejumlah bidang;
- e) bahwa Resolusi-resolusi 30 dan 143 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini menggarisbawahi bahwa apa yang diperlukan negara-negara, sebagaimana dicerminkan dalam kedua resolusi ini, adalah untuk kesenjangan digital ini akan dijembatani, sebagai suatu sasaran fundamental
- f) Resolusi 143 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini,

mengesahkan

Resolusi 37 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC mengenai permasalahan ini,

menimbang

- a) bahwa, meskipun dengan semua perkembangan yang diuraikan di atas dan peningkatan yang dicapai dalam beberapa sisi, sejumlah negara berkembang TIK dan penerapan TIK masih belum terjangkau bagi mayoritas orang, terutama yang tinggal di daerah-daerah pedesaan;
- b) bahwa setiap wilayah, negara dan daerah harus menangani permasalahan spesifik mereka sendiri mengenai kesenjangan digital, dengan menekankan pada kerjasama dengan yang lain nya untuk mendapatkan manfaat dari pengalaman yang diperoleh;
- c) bahwa banyak negara tidak memiliki prasarana dasar yang diperlukan, rencana jangka panjang, hukum, peraturan dan hal-hal serupa ditempatkan untuk pengembangan TIK;
- d) bahwa negara-negara kepulauan kecil sedang berkembang dan masyarakat menghadapi masalah-masalah khusus dalam menjembatani kesenjangan digital,

lebih lanjut menimbang

- a) bahwa fasilitas-fasilitas, layanan-layanan dan penerapan telekomunikasi/TIK bukan merupakan hanya konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, tapi sebagai suatu prasyarat untuk keseluruhan perkembangan, termasuk pertumbuhan ekonomi;
- b) bahwa telekomunikasi/TIK dan penerapan-penerapan TIK, merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan nasional, regional dan internasional;
- c) bahwa kemajuan terkini, dan terutama pemusatan telekomunikasi, informasi, penyiaran serta teknologi-teknologi dan layanan-layanan komputer, merupakanduta-duta perubahan untuk zaman informasi;
- d) bahwa ada kesinambungan kebutuhan di kebanyakan negara berkembang untuk investasi dalam berbagai sektor pengembangan, seraya memberikan prioritas untuk investasi di sektor telekomunikasi/TIK, dengan memperhatikan kebutuhan mendesak bagi telekomunikasi/TIK untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan di sektor-sektor lainnya;
- e) bahwa, dalam situasi ini, e-strategi nasional harus dihubungkan ke keseluruhan sasaran pengembangan dan memandu keputusan-keputusan nasional;
- f) bahwa hal ini terus diperlukan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pembuat-pembuat keputusan mengenai peran dan kontribusi umum TIK pada rencana pengembangan keseluruhan;

- g) bahwa studi-studi yang dahulu dijalankan dengan inisiatif Perhimpunan untuk menghitung manfaat-manfaat telekomunikasi/TIK dan penerapan-penerapan TIK dalam sektor telah memiliki dampak yang bermanfaat dalam sektor-sektor lain dan adalah suatu kondisi yang dibutuhkan untuk pengembangannya,

menekankan

- a) peran penting yang dimainkan oleh telekomunikasi/TIK dan aplikasi-aplikasi TIK dalam pengembangan e-pemerintah, tenaga kerja, pertanian, kesehatan, pendidikan, transpor, industri, hak-hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, pertukaran dan perpindahan informasi untuk kesejahteraan sosial, dan dalam kemajuan ekonomi dan sosial umum dari negara-negara berkembang;
- b) bahwa prasarana dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK adalah pusat untuk mencapai sasaran inklusi digital, memungkinkan akses terhadap informasi yang universal, dapat disokong, ada dimana-mana dan terjangkau,

menyadari

- a) bahwa Deklarasi Hyderabad menekankan pentingnya peran yang dimainkan para pemerintah, para pembuat kebijakan dan para regulator yang seharusnya dimainkan untuk memajukan akses terjangkau yang luas terhadap telekomunikasi/TIK melalui lingkungan-lingkungan yang adil, transparan, stabil, dapat diperkirakan, non diskriminasi, memungkinkan hukum dan regulasi yang memajukan persaingan, memelihara inovasi teknologi dan layanan yang berkesinambungan serta mendorong insentif-insentif investasi;
- b) bahwa sasaran-sasaran dalam rencana strategis untuk Perhimpunan tahun 2012-2015 ditujukan pada memungkinkan dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan jaringan-jaringan dan layanan-layanan telekomunikasi yang didukung, dalam memfasilitasi akses universal sehingga orang-orang dimanapun dapat ikut serta dalam, dan mendapatkan manfaat dari, masyarakat informasi yang muncul, dan dalam memberikan bantuan untuk negara-negara berkembang untuk menjembatani kesenjangan digital dengan mencapai perkembangan sosial ekonomi yang dimungkinkan oleh telekomunikasi/TIK yang lebih luas;
- c) bahwa Deklarasi Prinsip Jenewa yang diterima oleh WSIS mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang menciptakan suhu yang diinginkan untuk stabilitas, prediktabilitas dan persaingan yang adil pada semua tingkat harus dikembangkan dan dilaksanakan dalam cara yang menarik lebih banyak investasi swasta dalam telekomunikasi dan infrastruktur TIK;
- d) bahwa, di banyak Negara Anggota ITU, badan-badan peraturan independen telah didirikan untuk menghadapi isu-isu peraturan seperti interkoneksi, penentuan tarif, perizinan dan persaingan, dirancang

untuk memajukan kesempatan-kesempatan digital pada tingkat nasional,

menghargai

berbagai studi yang telah dijalankan sebagai bagian dari program kegiatan-kegiatan kerja sama dan bantuan teknis Perhimpunan,

memutuskan

- 1 bahwa pelaksanaan Resolusi 37 (Rev. Hyderabad, 2010) seharusnya dilaksanakan tanpa penundaan;
- 2 bahwa Perhimpunan seharusnya terus menyelenggarakan, menyponsori dan menjalankan studi-studi yang diperlukan untuk menggarisbawahi, dalam suatu konteks yang berbeda dan berubah, kontribusi TIK kepada perkembangan keseluruhan;
- 3 bahwa Perhimpunan seharusnya terus berlaku sebagai mekanisme badan pemeriksa untuk pertukaran informasi dan keahlian dalam hal ini, dalam pelaksanaan Rencana Aksi Hyderabad dan dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi lain yang sesuai, dan melaksanakan inisiatif-inisiatif, program-program dan proyek-proyek yang ditujukan untuk memajukan akses terhadap telekomunikasi/TIK dan penerapan-penerapan TIK,

terus mengundang

para administrasi dan pemerintah Negara-negara Anggota, badan-badan dan organisasi-organisasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi-organisasi antar pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan para penyelenggara perlengkapan dan layanan telekomunikasi serta TIK untuk memperluas dukungan mereka untuk pelaksanaan yang memuaskan dari resolusi ini,

terus mendorong

semua badan yang bertanggung jawab untuk pengembangan pertolongan dan bantuan, termasuk Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan (IBRD), Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), serta dana-dana pengembangan regional dan nasional, sebagaimana juga donor dan penerima Negara-negara Anggota Perhimpunan, untuk terus melampirkan pentingnya TIK dalam proses perkembangan dan untuk menyesuaikan suatu prioritas tinggi untuk pengalokasian sumber terhadap sektor ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk membawa resolusi ini kepada perhatian semua kelompok yang berkepentingan termasuk, khususnya UNDP, IBRD, bank-bank pengembangan regional dan dana-dana pengembangan nasional untuk kerja sama;
- 2 untuk melapor secara tahunan kepada Dewan ITU mengenai kemajuan yang dibuat dalam pelaksanaan resolusi ini;
- 3 untuk mengatur bagi penyebaran luas dari penemuan-penemuan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan sesuai dengan resolusi ini,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi, dengan koordinasi dengan Direktur Biro-Biro lain, sebagaimana sesuai

- 1 untuk terus membantu Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dalam mengembangkan kebijakan yang prokompetisi dan kerangka kerja pengaturan untuk TIK dan penerapan-penerapan TIK;
- 2 untuk terus membantu Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor dengan strategi-strategi yang memperluas akses kepada prasarana telekomunikasi, khususnya untuk daerah-daerah pedesaan;
- 3 untuk mengevaluasi model-model untuk sistem-sistem yang dapat dijangkau dan berkelanjutan untuk akses pedesaan ke informasi, komunikasi dan penerapan-penerapan TIK pada jaringan global, berdasarkan studi-studi pada model-model ini;
- 4 untuk terus menjalankan, dengan sumber-sumber yang tersedia, studi-studi kasus yang menyangkut telekomunikasi/TIK di daerah-daerah pedesaan dan, apabila sesuai, untuk menyebarkan suatu model percontohan yang menggunakan teknologi berbasis IP, atau setara dengannya di masa depan, untuk memperluas akses pedesaan,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk mengalokasikan cukup dana, dalam sumber-sumber anggaran keuangan yang disetujui, untuk pelaksanaan resolusi ini;
- 2 untuk meninjau laporan Sekretaris Jenderal dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan pelaksanaan resolusi ini;
- 3 untuk melapor mengenai hal ini kepada konferensi yang berkuasa penuh berikut,

mengundang Negara-negara Anggota

untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan Resolusi 37 (Rev. Hyderabad, 2010), yang merupakan kasus untuk Resolusi 37 (Rev. Doha, 2006), dengan mendukung resolusi ini sebagaimana telah direvisi pada konferensi ini.

RESOLUSI 140 (Rev. Guadalajara, 2010)
Peran ITU dalam melaksanakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi Dunia
mengenai Masyarakat Informasi

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 73 (Minneapolis, 1998) Konferensi Berkuasa Penuh, yang mencapai tujuannya dengan memperhatikan sokongan kedua fase Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS);
- b) Resolusi 113 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai WSIS;
- c) Keputusan 8 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai masukan ITU terhadap Deklarasi Prinsip WSIS dan Rencana Aksi serta dokumen informasi mengenai kegiatan-kegiatan ITU yang terkait kepada Konferensi Tingkat Tinggi,

mengingat lebih lanjut

Deklarasi Prinsip Jenewa dan Rencana Aksi Jenewa, diterima pada 2003, dan Komitmen Tunis serta Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi, diterima pada 2005, dimana semua disahkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,

menimbang

- a) peran yang dimainkan ITU dalam penyelenggaraan dua fase WSIS yang berhasil;
- b) bahwa kompetensi-kompetensi inti ITU dalam bidang-bidang teknologi-teknologi informasi dan komunikasi (TIK) – bantuan dalam menjembatani kesenjangan digital, kerjasama internasional dan regional, pengelolaan spektrum radio, pengembangan standar dan penyebarluasan informasi – adalah sangat penting untuk membangun masyarakat informasi, sebagaimana dinyatakan dalam butir 64 Deklarasi Prinsip-prinsip Jenewa;
- c) bahwa Agenda Tunis menyatakan bahwa “setiap badan PBB seharusnya bertindak sesuai dengan mandat dan kompetensinya, dan mengikuti keputusan-keputusan dari badan-badan pemerintah masing-masing, dan di dalam sumber-sumber yang diakui yang ada” (butir 102 (b));
- d) bahwa pembentukan Kelompok Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Masyarakat Informasi (UNGIS) oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas permintaan Konferensi Tingkat Tinggi, dengan tujuan utama mengkoordinasikan isu-isu substantif dan kebijakan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam ‘pelaksanaan hasil-hasil

WSIS, dan bahwa ITU adalah anggota tetap dari UNGIS, dan berbagi keketuaan secara bergilir;

- e) bahwa ITU, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dan Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memainkan peran utama yang memfasilitasi dalam pelaksanaan berbagai pemangku kepentingan dari Rencana Aksi Jenewa dan Agenda Tunis, sebagaimana diserukan oleh WSIS;
- f) bahwa ITU merupakan moderator/fasilitator untuk Garis-garis Aksi C2 (Prasarana informasi dan komunikasi) dan C5 (Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK) Agenda Tunis, dan sebagai mitra potensial untuk sejumlah garis-garis aksi lain, sebagaimana dikenali oleh WSIS;
- g) bahwa para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hasil-hasil Sidang yang disetujui, pada tahun 2008, untuk menunjuk ITU sebagai moderator/fasilitator untuk Garis Aksi C6 (Lingkungan yang memungkinkan), dimana sebelumnya mereka sebelumnya hanya bertindak sebagai co-fasilitator;
- h) bahwa ITU telah diberikan tanggung jawab khusus untuk memelihara basis data inventarisasi WSIS (butir 120 Agenda Tunis);
- i) bahwa ITU mampu menyediakan keahlian yang relevan dengan Forum Pengaturan Internet sebagaimana ditunjukkan selama proses WSIS (butir 78 Agenda Tunis);
- j) bahwa ITU memiliki, antara lain, tanggung jawab khusus untuk mempelajari dan melaporkan mengenai konektivitas Internet internasional (butir-butir 27 dan 50 Agenda Tunis);
- k) bahwa ITU memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan penggunaan rasional, efisien dan ekonomis dari, dan akses layak terhadap, spektrum frekuensi-radio oleh semua negara, berdasarkan persetujuan internasional yang relevan (butir 96 Agenda Tunis);
- l) bahwa Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 60/252 nya, memutuskan untuk menjalankan suatu tinjauan keseluruhan pelaksanaan hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi pada tahun 2015,
- m) bahwa “membangun masyarakat informasi berorientasi pengembangan yang terbuka akan membutuhkan usaha dari pemangku kepentingan yang tak henti-hentinya.. Dengan memperhatikan sifat pembangunan Masyarakat Informasi yang banyak seginya, kerja sama efektif antara para pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi-organisasi internasional lainnya, sesuai dengan peran-peran dan tanggungjawab-tanggungjawab mereka serta memanfaatkan keahlian mereka, adalah yang utama” (butir 83 Agenda Tunis),

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa ITU memainkan peran fundamental dalam menyediakan sudut pandang global mengenai perkembangan masyarakat informasi;
- b) kebutuhan bagi ITU untuk terus menerus berkembang sebagai tanggapan bagi perubahan dalam lingkungan telekomunikasi/TIK dan, khususnya, dengan memperhatikan teknologi-teknologi yang berkembang dan tantangan-tantangan peraturan baru;
- c) kebutuhan-kebutuhan bagi negara-negara berkembang, termasuk dalam bidang-bidang pembangunan prasarana telekomunikasi/TIK, memperkuat kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan telekomunikasi/TIK dan pelaksanaan sasaran-sasaran WSIS lainnya;
- d) keinginan untuk menggunakan sumber-sumber dan keahlian ITU dengan cara yang memperhatikan perubahan-perubahan cepat dalam lingkungan telekomunikasi dan hasil-hasil WSIS;
- e) kebutuhan untuk secara berhati-hati meluncurkan sumber-sumber daya manusia dan finansial Perhimpunan dengan cara yang konsisten dengan prioritas keanggotaan dan sadar akan batasan-batasan anggaran, dan kebutuhan untuk menghindari penggandaan antara Biro-Biro dan Sekretariat Umum;
- f) bahwa keterlibatan penuh keanggotaan, termasuk Anggota-anggota Sektor, sebagaimana juga pemangku-pemangku kepentingan lain, adalah kritis untuk kesuksesan pelaksanaan hasil-hasil WSIS yang relevan oleh ITU;
- g) bahwa rencana strategis bagi Perhimpunan untuk tahun 2012-2015 sebagaimana tercantum dalam Resolusi 71 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini memuat suatu komitmen untuk pelaksanaan hasil-hasil WSIS yang relevan, sebagai tanggapan terhadap lingkungan telekomunikasi/TIK yang berubah dan dampak-dampaknya terhadap Perhimpunan,
- h) bahwa Kelompok Kerja Dewan mengenai WSIS (WG-WSIS) telah membuktikan menjadi suatu mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi masukan-masukan Negara Anggota mengenai peran ITU dalam melaksanakan hasil-hasil WSIS, sebagaimana tergambar pada Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006);
- i) bahwa Dewan ITU telah membuktikan peta-peta jalan untuk Garis-garis Aksi C2, C5 dan C6;
- j) bahwa masyarakat internasional diundang untuk memberikan kontribusi sukarela bagi dana perwalian khusus sebagaimana ditetapkan oleh ITU untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan hasil-hasil WSIS;
- k) bahwa ITU mampu menyediakan keahlian dalam bidang kerja statistik dengan mengembangkan indikator-indikator TIK, menggunakan indikator-indikator yang sesuai dan percontohan perbandingan untuk menjejaki kemajuan global, dan mengukur kesenjangan digital (butir-butir 113-118 Agenda Tunis),

dengan memperhatikan

- a) bahwa WSIS mengakui bahwa partisipasi multi pemangku kepentingan adalah sangat penting bagi kesuksesan pembangunan masyarakat informasi yang berpusat pada rakyat, inklusif dan berorientasi pada pengembangan;
- b) hubungan antara pisu-isu pengembangan telekomunikasi dengan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana juga dampaknya terhadap struktur-struktur sosial dan ekonomi dalam semua Negara Anggota;
- c) butir 98 Agenda Tunis, yang mendorong penguatan dan kesinambungan kerjasama di antara dan antar pemangku-pemangku kepentingan dan menyambut, dalam hal ini, Inisiatif Menyambungkan Dunia yang dipimpin oleh ITU;
- d) bahwa, dalam dekade-dekade terakhir, kemajuan pada ilmu pengetahuan alam, matematika, keahlian teknik dan teknologi telah membentuk basis untuk penemuan-penemuan dan pemusatan TIK yang membawa manfaat-manfaat masyarakat Informasi kepada peningkatan sejumlah orang di seluruh dunia,
- e) bahwa Sekretaris Jenderal ITU membentuk Gugus Tugas WSIS ITU, yang diketuai oleh Wakil Sekretaris Jenderal, dalam rangka, untuk memenuhi, antara lain, perintah-perintah yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal dalam Resolusi 140 (Antalya, 2006) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- f) hasil-hasil dari kedua forum WSIS yang diselenggarakan oleh ITU pada bulan Mei 2009 dan Mei 2010;
- g) laporan “WSIS+5” ITU mengenai kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan tindak lanjut WSIS ITU untuk lima tahun 2005-2010,

memperhatikan

bahwa saat ini tidak terdapat definisi untuk istilah “teknologi informasi dan komunikasi (TIK)”, yang secara luas digunakan dalam dokumen-dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, ITU dan organisasi-organisasi lainnya, termasuk hasil-hasil WSIS,

mengesahkan

- a) Resolusi 30 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC);
- b) Resolusi 139 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini;
- c) hasil-hasil relevan sesi 2010 dari Dewan ITU, termasuk Resolusi 1282 (Rev. 2008);

- d) program-program, kegiatan-kegiatan dan kegiatan-kegiatan regional yang disusun oleh WTDC-10 dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan digital;
- e) kerja relevan yang telah dilakukan dan/atau akan dilakukan oleh ITU dalam melaksanakan hasil-hasil WSIS, berdasarkan perlindungan WG-WSIS;
- f) Resolusi 75 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA), mengenai kontribusi ITU dalam melaksanakan hasil-hasil WSIS, dan membentuk suatu Kelompok Berdedikasi pada isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan Internet internasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari WG-WSIS,

mengingat

kerja relevan telah dilakukan dan/atau untuk dijalankan oleh ITU dalam melaksanakan hasil-hasil WSIS, di bawah lindungan WG-WSIS dan Gugus Tugas WSIS,

mengakui

- a) pentingnya peran dan keikutsertaan ITU dalam UNGIS, sebagai anggota tetap, dan berbagi suatu keketuaan secara bergilir;
- b) komitmen ITU terhadap pelaksanaan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan WSIS, sebagai satu dari sasaran paling penting Perhimpunan,
- c) bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Resolusi 60/252nya, memutuskan untuk melakukan peninjauan kembali secara keseluruhan terhadap pelaksanaan hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi dalam tahun 2015,

memutuskan

- 1 bahwa ITU seharusnya memainkan suatu peran memfasilitasi terdepan dalam proses pelaksanaan, sejalan dengan UNESCO dan UNDP, sebagaimana dinyatakan dalam butir 109 Agenda Tunis;
- 2 bahwa ITU seharusnya memainkan suatu peran memfasilitasi terdepan dalam proses pelaksanaan WSIS, sebagai moderator/ fasilitator untuk melaksanakan Garis-garis Aksi C2 , C5 dan C6;
- 3 bahwa ITU harus terus menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut yang datang dalam mandat nya, dan berpartisipasi dengan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana sesuai, dalam pelaksanaan garis-garis aksi C1, C3, C4, C6, C7, C11 dan semua garis aksi yang relevan lain nya serta hasil-hasil WSIS lain, dalam batas-batas finansial yang ditentukan oleh Konferensi Berkuasa Penuh;
- 4 bahwa ITU seharusnya terus menyesuaikan diri, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan teknologi dan potensinya untuk

- memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan suatu masyarakat informasi yang terbuka;
- 5 untuk menyatakan kepuasannya dengan keberhasilan hasil-hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi, dimana keahlian dan kompetensi inti ITU dicatat beberapa kali;
 - 6 untuk menyatakan rasa terima kasihnya kepada staf Perhimpunan, negara-negara tuan rumah dan WG-WSIS atas upaya-upayanya dalam penyiapan kedua fase WSIS, serta seluruh anggota ITU yang terlibat secara aktif dalam melaksanakan hasil-hasil WSIS;
 - 7 bahwa terdapat suatu kebutuhan untuk menyatukan pelaksanaan Rencana Aksi Hyderabad, dan terutama Resolusi 30 (Rev. Hyderabad, 2010), serta resolusi-resolusi yang relevan dari konferensi yang berkuasa penuh, terhadap pelaksanaan berbagai pemangku kepentingan atas hasil-hasil WSIS;
 - 8 bahwa ITU wajib, dalam sumber-sumber yang tersedia, memelihara basis data inventarisasi WSIS umum terkini, sebagai satu dari peralatan berharga untuk membantu dalam tindak lanjut WSIS, sebagaimana diperintahkan dalam butir 109 Agenda Tunis,
 - 9 bahwa Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) wajib memberikan prioritas tinggi untuk membangun prasarana informasi dan komunikasi (Garis Aksi WSIS C2), hal ini menjadi tulang punggung untuk semua e-aplikasi, menyerukan juga kepada Program 1 dan kelompok-kelompok studi ITU-D untuk melakukan hal yang sama;
 - 10 bahwa ITU harus melengkapi laporan mengenai pelaksanaan hasil-hasil WSIS yang berkenaan dengan ITU pada tahun 2014,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Para Direktur Biro

- 1 untuk mengambil semua langkah yang diperlukan bagi ITU untuk memenuhi perannya, sebagaimana digariskan dalam *memutuskan* 1,2 dan 3 di atas, berdasarkan peta-peta jalan yang sesuai;
- 2 untuk terus berkoordinasi, dengan Komite Koordinasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan WSIS untuk melaksanakan *memutuskan* 1, 2, 3 dan 4 di atas, dengan tujuan untuk menghindari penggandaan kerja di antara Biro-Biro dan Sekretariat Jenderal;
- 3 untuk terus mengangkat kesadaran publik mengenai mandat, peran dan kegiatan Perhimpunan serta menyediakan akses yang lebih luas bagi sumber-sumber Perhimpunan untuk publik umum dan pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam masyarakat informasi yang timbul;
- 4 untuk merumuskan tugas-tugas dan tenggat-tenggat waktu yang spesifik untuk melaksanakan garis-garis aksi sebagaimana dirujuk di atas, dan memasukkannya dalam rencana-rencana operasional dari Sekretariat Jenderal dan Sektor-Sektor;

- 5 untuk melapor secara tahunan kepada Dewan mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan terhadap subyek-subyek ini, termasuk implikasi-implikasi finansial mereka,
- 6 untuk menyiapkan dan menyerahkan suatu laporan akhir dan menyeluruh mengenai kegiatan-kegiatan ITU untuk pelaksanaan WSIS pada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya pada tahun 2014,

memerintahkan Direktur-Direktur Biro

untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan tenggat-tenggat waktu kongkrit untuk kegiatan-kegiatan WSIS adalah dikembangkan dan dicerminkan dalam rencana operasional setiap Sektor,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

untuk mengikuti, sesegera mungkin dan sesuai dengan Resolusi 30 (Rev. Hyderabad, 2010) suatu pendekatan kemitraan dalam kegiatan-kegiatan ITU-D yang terkait dengan peran-perannya dalam pelaksanaan dan tindak lanjut hasil-hasil WSIS, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi ITU dan Konvensi ITU, dan untuk melapor secara tahunan, sebagaimana sesuai, kepada Dewan,

meminta Dewan

- 1 untuk mengawasi pelaksanaan ITU terhadap hasil-hasil WSIS, dan, dalam batas-batas finansial yang ditentukan oleh Konferensi Berkuasa Penuh, untuk membuat sumber-sumber tersedia sebagaimana sesuai;
- 2 untuk mengawasi adaptasi ITU terhadap masyarakat informasi, sejalan dengan *memutuskan* 4 di atas;
- 3 untuk memelihara WG-WSIS, untuk memudahkan masukan dan panduan keanggotaan mengenai pelaksanaan hasil-hasil WSIS yang relevan oleh ITU dan untuk menguraikan usulan-usulan kepada Dewan yang mungkin diperlukan untuk mengadaptasi ITU kepada peran nya dalam membangun masyarakat informasi, dengan bantuan Kelompok Tugas WSIS, usulan-usulan ini mungkin termasuk perubahan-perubahan pada Konstitusi dan Konvensi
- 4 untuk menjabarkan melalui kelompok-kelompok studi Sektor dan menyampaikan suatu definisi kerja mengenai istilah “TIK” bagi Dewan dan kelompok-kelompok kerja Dewan, untuk kemungkinan pengalihan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya;
- 5 memperhatikan keputusan-keputusan yang relevan dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berkenaan dengan penilaian jangka menengah mengenai pelaksanaan hasil-hasil WSIS;
- 6 untuk memodifikasi Resolusi 1282 sebagaimana telah diterima oleh Dewan pada sesi 2008 untuk membentuk suatu kelompok kerja Dewan bagi Kelompok Berdedikasi mengenai isu-isu kebijakan publik yang

terkait dengan Internet internasional, terbuka hanya untuk Negara-negara Anggota dengan berkonsultasi terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan;

- 7 untuk memasukkan laporan Sekretaris Jenderal dalam dokumen yang dikirim kepada Negara-negara Anggota sesuai dengan No. 81 Konvensi,

mengundang Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat

- 1 untuk berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan hasil-hasil WSIS, memberikan kontribusi untuk basis data inventaris WSIS yang dipelihara oleh ITU, dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan WG-WSIS dan dalam penerapan lebih lanjut ITU bagi masyarakat informasi;
- 2 untuk membuat kontribusi-kontribusi sukarela kepada dana perwalian khusus sebagaimana ditetapkan oleh ITU untuk mendukung kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pelaksanaan hasil-hasil WSIS,

memutuskan untuk menyatakan

rasa terima kasih yang paling hangat dan rasa syukur yang paling dalam kepada Pemerintah Swiss dan Tunisia yang telah menyelenggarakan dua fase Konferensi Tingkat Tinggi yang berkolaborasi erat dengan ITU, UNESCO, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya yang relevan.

RESOLUSI 143 (Rev. Guadalajara, 2010)
Memperluas ketentuan dalam dokumen ITU yang terkait dengan negara berkembang¹ untuk memberlakukan pada negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

Resolusi 143 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

dengan memperhatikan

- a) Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 47/187 pada 22 Desember 1992, 48/181 pada 21 Desember 1993, 49/106 pada 19 Desember 1994, 51/175 pada 6 Desember 1996, 53/179 pada 15 Desember 1998, 55/191 pada 20 Desember 2000, 57/247 pada 20 Desember 2002 dan 59/243 pada 22 Desember 2004, mengenai integrasi ekonomi dalam transisi kepada ekonomi dunia;
- b) dokumen-dokumen yang diterima dalam dua fase Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi;

mengakui

bahwa resolusi-resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah disebut di atas:

- menekankan pentingnya kelanjutan bantuan internasional kepada negara-negara dengan ekonomi dalam transisi untuk memastikan bahwa mereka diintegrasikan sepenuhnya kepada ekonomi dunia;
- mengakui, khususnya, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara tersebut untuk menggunakan secara efektif manfaat-manfaat globalisasi, termasuk yang di dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan untuk memberi tanggapan lebih layak terhadap tantangan-tantangannya.
- menekankan kebutuhan untuk memfokuskan bantuan internasional kepada negara-negara dengan ekonomi dalam transisi terhadap yang menghadapi kesulitan tertentu dalam pengembangan sosial-ekonomi dan menemui sasaran-sasaran pengembangan yang disetujui internasional, termasuk yang dimuat dalam Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa,

mengingat

bahwa, pada Sidang Standardisasi Telekomunikasi Sedunia (Johannesburg, 2008) dan Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Sedunia (Hyderabad,

¹ Termasuk negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi.

2010), persetujuan dicapai pada ketentuan-ketentuan dokumen Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU yang berhubungan dengan negara-negara berkembang akan oleh karenanya diperluas untuk diterapkan juga pada negara-negara dengan ekonomi dalam transisi,

memutuskan

bahwa ketentuan-ketentuan dalam semua dokumen ITU yang berhubungan dengan negara-negara berkembang akan diperluas untuk diterapkan secara layak kepada negara-negara dengan ekonomi dalam transisi.

RESOLUSI 150 (Rev. Guadalajara, 2010)
Penyetujuan rekening Perhimpunan untuk tahun 2006 – 2009

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) Nomor 53 dari Konstitusi ITU;
- b) laporan dari Dewan kepada Konferensi Yang Berkuasa Penuh dalam Dokumen PP-10/44 terkait pada pengelolaan keuangan Perhimpunan selama tahun 2006-2009, dan laporan dari Komite Administrasi dan Pengelolaan dari konferensi ini (Dokumen PP-10/177 (Rev. 2)),

memutuskan

untuk memberi penyetujuan akhirnya atas rekening-rekening Perhimpunan untuk tahun 2006-2009.

RESOLUSI 151 (Rev. Guadalajara, 2010)
Pelaksanaan pengelolaan berdasarkan hasil dalam ITU

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) Resolusi 72 (Rev. Guadalajara, 2010) dari konferensi ini, yang mencatat bahwa proses kemajuan dalam pencapaian tujuan-tujuan ITU dapat dipertimbangkan, ditingkatkan secara banyak melalui pertautan rencana-rencana strategis, finansial dan operasional yang menentukan kegiatan-kegiatan sebagaimana direncanakan akan dilakukan kapanpun selama periode empat tahun;
- b) Resolusi 107 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, tujuan-tujuan yang digabungkan dalam resolusi ini, yang memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk mengidentifikasi mekanisme-mekanisme yang terkait dengan penganggaran berbasis hasil (RBB), dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi Unit Inspeksi Bersama (JIU), pandangan-pandangan Negara-negara Anggota, saran kelompok-kelompok penasehat Sektor, dan pengalaman dari organisasi-organisasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c) Resolusi 151 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, yang lebih lanjut memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk terus melengkapi tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan penuh RBB, termasuk penyajian anggaran dua tahunan tahun 2008-2009, sebagai pendahulu dari pengembangan suatu kerangka kerja untuk pengenalan pengelolaan berbasis hasil (RBM) dalam Perhimpunan,

mengakui

- a) bahwa mengakui pelaksanaan RBB dan RBM ke tingkat berikut pada ITU akan memberikan tantangan-tantangan dan langkah-langkah, termasuk kebutuhan untuk suatu perubahan budaya yang signifikan dan untuk staf pada semua tingkat menjadi terbiasa dengan konsep-konsep dan syarat-syarat RBB;
- b) bahwa suatu strategi komprehensif yang ditujukan pada perubahan cara badan-badan beroperasi, dengan meningkatkan kinerja (mencapai hasil) sebagai orientasi pusat, telah diidentifikasi oleh JIU sebagai langkah esensial menuju RBM dalam suatu laporan yang diterbitkan tahun 2004 berjudul *Pelaksanaan Pengelolaan Berbasis-Hasil dalam Organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa*;
- c) bahwa JIU telah mengidentifikasikan proses dari perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi; pendelegasian kewenangan dan akuntabilitas, dan kinerja staf dan pengelolaan kontrak sebagai pilar-pilar utama bagi pengembangan dari sistem RBM yang kokoh,

menekankan

bahwa maksud dari RBB dan RBM adalah untuk menjamin bahwa kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi disediakan sumber daya yang memadai dalam rangka mencapai hasil-hasil yang direncanakan,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk terus memperbaiki metodologi-metodologi yang terkait dengan pelaksanaan penuh RBB dan RBM, termasuk pelaksanaan penyajian yang telah direvisi atas anggaran dua tahunan sebagaimana direferensikan dalam lampiran di dalam resolusi ini www.itu.int/plenipotentiary/2010/pd/RBB.docx;
- 2 untuk terus mengembangkan dan memperbaiki penggunaan indikator-indikator kinerja penentu sebagaimana dipersyaratkan dalam Resolusi 1243 Dewan ITU;
- 3 untuk mengembangkan suatu kerangka kerja resiko, dalam konteks RBM, untuk memastikan bahwa kontribusi-kontribusi dari Negara-negara Anggota digunakan untuk keuntungan terbaik,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk terus meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang diusulkan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin pelaksanaan penuh dari RBB dan RBM pada ITU;
- 2 untuk memantau pelaksanaan resolusi ini di setiap sesi lanjutan Dewan dan untuk melaporkan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya.

RESOLUSI 152 (Rev. Guadalajara, 2010)
Perbaikan pengelolaan dan tindak lanjut penggantian pengeluaran ITU
oleh Anggota Sektor dan Asosiat

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) Resolusi 110 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai peninjauan kembali kontribusi Anggota-anggota Sektor menuju penggantian pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan;
- b) Resolusi 1208 dari Dewan ITU yang menentukan syarat-syarat referensi kelompok kerja yang terbuka bagi semua Negara Anggota dan semua Anggota Sektor untuk mempelajari sistem di mana Anggota-anggota Sektor dan Asosiat –asosiat memberikan kontribusi menuju pembiayaan pengeluaran Perhimpunan, dan memerintahkan kelompok kerja membuat suatu laporan akhir selambat-lambatnya pada Sidang Dewan tahun 2005;

menimbang lebih lanjut

laporan sesuai yang dipaparkan oleh kelompok kerja kepada Dewan pada sesinya tahun 2005 dalam Dokumen C05/40, dan lebih spesifik Bagian 5 serta rekomendasi-rekomendasi R7 dan R8;

memperhatikan

ketentuan Pasal 33 Konvensi ITU mengenai kewajiban-kewajiban Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan entitas-entitas lain yang berhubungan dengan pembiayaan pengeluaran Perhimpunan dan konsekuensi-konsekuensi finansial terhadap penolakan;

memperhatikan lebih lanjut

perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap nomor 240 Konvensi oleh konferensi ini dalam rangka penolakan tersebut wajib memberlakukan pada akhir enam bulan sejak tanggal pemberitahuan resmi diterima oleh Sekretaris Jenderal;

mengakui

- a) gerak cepat dari pasar dan kenyataan finansial yang dihadapi oleh entitas-entitas sektor swasta;
- b) bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan menarik lebih banyak Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat, mengingat kontribusi mereka yang tak ternilai bagi pekerjaan Perhimpunan;

- c) bahwa terdapat suatu kebutuhan untuk memastikan tindak-lanjut yang lebih baik dan pengawasan hal-hal finansial yang terkait dengan Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat, menjadi bagian dari ITU maupun Negara-negara Anggota, dalam rangka memastikan peningkatan stabilitas keuangan Perhimpunan;
- d) bahwa aturan-aturan dan prosedur-prosedur berkenaan dengan hal-hal finansial mengenai Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat seharusnya diubah sehingga fleksibel dan efektif, dan selanjutnya dapat dilaksanakan sepenuhnya;

mengakui lebih lanjut,

- a) bahwa relevansi dan keefektifan dari denda-denda yang dapat digunakan dalam hal hutang-hutang dapat dipertanyakan, karena hutang-hutang Anggota-anggota Sektor meningkat lebih cepat daripada Negara-negara Anggota;
- b) bahwa, dalam kerangka kerja saat ini, suatu Anggota Sektor atau suatu Asosiat yang berhutang dapat ikut serta di ITU sedikitnya untuk tiga tahun sebelum dikenakan suatu sanksi, dan karena itu mungkin mempunyai insentif untuk menyerahkan jadwal pembayaran kembali;
- c) bahwa kerangka-waktu yang berlaku untuk pemberlakuan penangguhan dan pencabutan harus dipercepat;

memutuskan

- 1 bahwa perubahan-perubahan sederhana mengenai nama dan alamat dari Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat wajib ditangani secara administratif, tanpa dikenakan biaya;
- 2 bahwa, dalam hal penggabungan antar Anggota-anggota Sektor atau Asosiat-asosiat dari Sektor yang sama, telah diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal, Nomor 240 dari Konvensi wajib tidak diberlakukan dan wajib tidak mempunyai dampak pada persyaratan Anggota Sektor atau Asosiat sebagai hasil dari penggabungan untuk membayar lebih dari satu kontribusi untuk keikutsertaannya dalam pekerjaan Sektor terkait;
- 3 bahwa setiap Anggota Sektor atau Asosiat yang baru wajib, berkenaan dengan tahun aksesori atau pendaftaran, membayar di muka suatu kontribusi yang dihitung sejak hari pertama pada bulan aksesori atau pendaftaran, sebagaimana hal tersebut dimungkinkan;
- 4 bahwa kontribusi-kontribusi tahunan bagi Anggota-anggota Sektor atau Asosiat-asosiat yang ada akan ditagihkan di muka atau tidak lebih dari tanggal 15 September setiap tahun;
- 5 bahwa kontribusi-kontribusi tahunan untuk Anggota-anggota Sektor yang ada atau Asosiat-asosiat yang ada pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret setiap tahun;

- 6 bahwa, dalam hal pembayaran terlambat, penangguhan keikutsertaan dalam ITU wajib, dalam hal suatu Anggota sektor atau Asosiat, dilakukan enam bulan (180 hari) setelah tanggal saat pembayaran kontribusi tahunan jatuh tempo, dan dalam hal ketiadaan suatu jadwal pembayaran kembali yang dirundingkan dan disepakati, pengeluaran dari suatu Anggota Sektor atau suatu Asosiat karena tidak-membayar wajib dilakukan tiga bulan (90 hari) setelah tanggal penerimaan pemberitahuan penghentian dimaksud.
- 7 bahwa Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat dapat daftarkan kembali pada Perhimpunan berdasarkan ketentuan-ketentuan biasa dan sejak pembayaran kontribusi-kontribusi keanggotaan;
- 8 bahwa setiap kesulitan (misal tidak ada pembayaran, berita dikembalikan karena kurang informasi mengenai alamat baru) wajib diberitahukan segera kepada Negara Anggota yang menyetujui Anggota Sektor dan Asosiat,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

dengan berkonsultasi dengan Direktur-direktur Biro, untuk melaporkan kepada Dewan mengenai pelaksanaan resolusi ini, menyoroti garis besar dari kesulitan apapun yang mungkin dijumpai dan mengusulkan perbaikan lebih lanjut, yang sesuai,

memerintahkan Dewan

untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memfasilitasi pelaksanaan resolusi ini,

mengundang Negara-negara Anggota

apabila sesuai, untuk ikut serta secara aktif dalam tindak-lanjut dan pengawasan masalah-masalah finansial terkait dengan Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat.

RESOLUSI 153 (Rev. Guadalajara, 2010)
Penjadwalan sidang Dewan dan konferensi yang berkuasa penuh

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) Keputusan 7 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan yang memerintahkan Dewan, antara lain, untuk membentuk kelompok ahli-ahli untuk melaporkan mengenai "efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dari manajemen dan administrasi Perhimpunan secara menyeluruh";
- b) pemaparan pada sesi Dewan tahun 2003 oleh Kelompok Spesialis (GoS), memuat suatu rangkaian rekomendasi yang mengidentifikasi sejumlah perbaikan-perbaikan yang dapat dibuat terhadap pengelolaan Perhimpunan, dan yang menghasilkan penerimaan Resolusi Dewan 1216 yang menggariskan pelaksanaan berbagai strategi;
- c) bahwa GoS, dalam Rekomendasi 2 nya terkait pada proses untuk persiapan dan pengamatan kembali anggaran, merekomendasikan bahwa waktu persiapan anggaran seharusnya diperpanjang dalam rangka memungkinkan proses ini dilakukan, dan bahwa pertimbangan seharusnya diberikan untuk menyelenggarakan sesi dewan tidak lebih dari bulan September setiap tahun, sehingga anggaran dapat siap dan laporan-laporan audit dari tahun sebelumnya akan tersedia untuk pengamatan kembali,
- d) bahwa rekomendasi 2 dari Kelompok Spesialis (GoS) telah dilaksanakan, sejauh dapat dilaksanakan,

mengakui

- a) bahwa konferensi yang berkuasa penuh biasanya diselenggarakan pada kuartal terakhir dari tahun kalender dan bahwa jadwal ini berdampak pada tanggal-tanggal sesi Dewan;
- b) bahwa konferensi pengembangan telekomunikasi dunia (WTDC) biasanya diselenggarakan pada kuartal pertama atau kedua dari tahun yang sama dengan konferensi yang berkuasa penuh;
- c) bahwa, lebih baik terdapat tenggang waktu lima sampai enam bulan antara konferensi yang berkuasa penuh dan WTDC;
- d) bahwa penjadwalan Sesi Dewan lebih awal dalam tahun kalender saat konferensi yang berkuasa penuh diselenggarakan akan memperbaiki pertautan antar rencana-rencana strategis, finansial dan operasional, dan anggaran serta kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilakukan oleh Dewan,

mengakui lebih lanjut

- a) bahwa tanggal sesi biasa Dewan tidak ditetapkan dalam rangkaian konferensi yang berkuasa penuh;
- b) bahwa Dewan cenderung bersidang dalam, atau mendekati, kuartal kedua dari tahun kalender;
- c) bahwa laporan-laporan auditor luar mengenai keuangan Perhimpunan seharusnya tersedia untuk Dewan pada waktunya sebelum sesi-sesinya;
- d) bahwa penjadwalan sesi biasa Dewan selama kuartal terakhir tahun kalender akan melakukan peninjauan kembali keuangan menjadi lebih efektif,
- e) kebutuhan untuk mempertimbangkan periode-periode keagamaan besar sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi 111 (Rev. Antalya, 2006) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

memutuskan

- 1 bahwa konferensi yang berkuasa penuh wajib, pada prinsipnya, diselenggarakan pada kuartal terakhir dari tahun tersebut;
- 2 bahwa Dewan wajib, pada prinsipnya, menyelenggarakan sesi biasanya dalam kuartal terakhir dari tiap tahun, kecuali pada tahun dimana konferensi yang berkuasa penuh diselenggarakan, selamasesi akhir Dewan akandiselenggarakan lima sampai enam bulan sebelum dimulainya konferensi yang berkuasa penuh, tunduk dengan mempertimbangkan waktu WTDC pada tahun tersebut, kecuali diputuskan lain oleh Dewan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

melaporkan kepada Dewan mengenai pelaksanaan resolusi ini, mengusulkan perbaikan lebih lanjut, yang sesuai,

memerintahkan Dewan

mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memfasilitasi pelaksanaan resolusi dan melaporkan kepada konferensi-konferensi yang berkuasa penuh yang akan datang mengenai perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan resolusi ini.

RESOLUSI 154 (Rev. Guadalajara, 2010)
Penggunaan enam bahasa resmi Perhimpunan berdasarkan kesetaraan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 154 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) Resolusi 115 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- c) Resolusi 104 (Minneapolis, 1998) Konferensi Yang Berkuasa Penuh,
- d) Resolusi 66 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini,

menegaskan kembali

prinsip dasar mengenai perlakuan sama terhadap keenam bahasa-bahasa resmi, sebagaimana diabadikan dalam Resolusi 115 (Marrakesh, 2002) dan 154 (Antalya, 2006) mengenai penggunaan keenam bahasa atas dasar kesetaraan,

memperhatikan dengan kepuasan dan penghargaan

- a) langkah-langkah yang diambil sedemikian jauh untuk melaksanakan Resolusi 115 (Marrakesh, 2002) sejak 1 Januari 2005 dan Resolusi 154 (Antalya, 2006);
- b) kemajuan yang dilakukan dalam keberhasilan pelaksanaan Resolusi 104 (Minneapolis, 1998) dan menghasilkan efisiensi dan ekonomi,

mengakui

- a) pentingnya mempertahankan dan memperbaiki muatan multi-bahasa yang dipersyaratkan pada sifat universal dari organisasi-organisasi sistem Perserikatan Bangsa-bangsa, yang dinyatakan dalam laporan Unit Pengawasan Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai “Kejamakan Bahasa dalam Sistem Perserikatan Bangsa-bangsa” (Dokumen JIU/REP/2002/11);
- b) bahwa, meskipun telah ada keberhasilan pelaksanaan Resolusi 115 (Marrakesh, 2002), untuk berbagai alasan pengalihan dari keenam bahasa tidak dapat dicapai dalam semalam, dan suatu “masa transisi” ke pelaksanaan penuh tak terelakkan;
- c) bahwa, dalam rangka mencapai pelaksanaan sepenuhnya tersebut, perlu juga menyesuaikan metode-metode kerja dan mengoptimalkan tingkat-tingkat staf dalam keenam bahasa,
- d) bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan dalam Kelompok Kerja Dewan mengenai Bahasa-bahasa, mulai dilakukan oleh sekretariat untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi kelompok-kelompok kerja

sebagaimana disepakati pada sesinya tahun 2006 Dewan, khususnya berkenaan dengan penyatuan basis-basis data bahasa untuk definisi-definisi dan istilah-istilah serta sentralisasi fungsi-fungsi pengeditan,

mengakui lebih lanjut

pengetatan anggaran Perhimpunan,

memutuskan

untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan penafsiran dan penerjemahan dari dokumentasi ITU dalam keenam bahasa berdasarkan kesetaraan, meskipun beberapa pekerjaan di ITU (misalnya kelompok-kelompok kerja, kelompok-kelompok studi, konferensi regional) mungkin tidak memerlukan penggunaan seluruh keenam bahasa dimaksud,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan internal dan prinsip-prinsip untuk penafsiran dan penerjemahan yang diusulkan oleh ketiga Sektor dan Sekretariat Jenderal, dalam rangka pengetatan finansial, dan memperhatikan maksud dari pelaksanaan penuh dari perlakuan berdasarkan kesetaraan;
- 2 untuk meneruskan dan memantau kebijakan-kebijakan struktural yang sesuai, seperti:
 - peninjauan kembali yang mendasar atas layanan-layanan pendokumentasian dan publikasi ITU dengan maksud untuk menghilangkan setiap duplikasi dan menciptakan sinergi-sinergi;
 - cara-cara dan langkah-langkah yang sesuai untuk mempercepat penyampaian tepat waktu atas dokumentasi dan publikasi-publikasi ITU dalam keenam bahasa;
 - tingkat-tingkat optimal staf, termasuk staf inti, bantuan sementara dan tenaga kerja kontrak;
 - penggunaan yang bijaksana terhadap teknologi-teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan-kegiatan bahasa dan publikasi, dengan menimbang pengalaman yang digali oleh organisasi-organisasi internasional lainnya, tercatat melalui Pertemuan Tahunan Internasional mengenai pengaturan-pengaturan, Dokumentasi dan Publikasi-publikasi Bahasa (IAMLADP);
 - kebijakan-kebijakan untuk mengurangi ukuran dan volume dari dokumen-dokumen (batasan halaman, ringkasan eksekutif, bahan dalam lampiran-lampiran atau banyak jaringan), apabila dibenarkan, tanpa mempengaruhi kualitas dan muatan dokumen-dokumen yang diterjemahkan atau dipublikasikan, dan memperhatikan dengan jelas kebutuhan untuk memenuhi tujuan musti bahasa sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa;

- 3 untuk memantau pekerjaan yang dilakukan oleh sekretariat ITU mengenai:
 - memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian integrasi basis data terminologi untuk bahasa Arab, bahasa China, dan bahasa Rusia serta memberikan prioritas untuk penerjemahan istilah-istilah dan definisi-definisi ke dalam bahasa Arab, bahasa China dan bahasa Rusia;
 - menggabungkan semua basis-basis data yang telah ada untuk definisi-definisi dan peristilahan ke dalam suatu sistem terpusat, dengan langkah-langkah sesuai untuk pemeliharaan, perluasan dan pembaharuan;
 - menciptakan fungsi-fungsi pengeditan terpusat yang diperlukan untuk setiap bahasa, berdasarkan kesetaraan antara bahasa-bahasa;
 - penyesuaian dan penyatuan prosedur-prosedur kerja dalam keenam layanan-layanan bahasa, dan menyediakan staf yang memenuhi syarat serta alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka;
 - meningkatkan pandangan terhadap ITU dan efektifitas dari pekerjaan informasi publik, memanfaatkan ke-enam bahasa Perhimpunan, dalam, antara lain, publikasi ITU News, membuat situs web ITU, mengorganisasikan penyiaran Internet dan penyimpanan rekaman-rekaman, dan mengeluarkan dokumen-dokumen bersifat informasi publik, termasuk pengumuman-pengumuman dari pameran-pameran dan forum-forum ITU TELECOM Dunia dan regional; *e-flash* dan yang serupa;
- 4 untuk melanjutkan pekerjaan Kelompok Kerja Dewan mengenai Bahasa-bahasa, dalam rangka memantau kemajuan dan melaporkan kepada Dewan mengenai pelaksanaan dari resolusi ini;
- 5 melaporkan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai pelaksanaan dari resolusi ini.

RESOLUSI 157 (Rev. Guadalajara, 2010)
Menguatkan fungsi pelaksanaan proyek dalam ITU

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) Nomor 118 Konstitusi ITU yang menggariskan tanggung jawab rangkap Perhimpunan sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa dan badan pelaksana untuk pelaksanaan proyek-proyek di bawah sistem pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau pengadaan pendanaan lain sedemikian untuk memfasilitasi dan meningkatkan pengembangan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan menawarkan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kerja sama teknik dan kegiatan-kegiatan bantuan;
- b) Resolusi 135 (Rev. Guadalajara, 2010) dari konferensi ini, mengenai keikutsertaan Perhimpunan dalam Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), dalam program-program lain dari sistem Perserikatan Bangsa-bangsa dan pengaturan-pengaturan pendanaan lain, yang memerintahkan Dewan ITU untuk melakukan semua kebijakan yang diperlukan untuk memastikan efisiensi maksimum atas keikutsertaan Perhimpunan dalam UNDP dan pengaturan-pengaturan pendanaan lain.
- c) Resolusi 52 (Doha, 2006) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai penguatan peran badan pelaksana Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D), yang menekankan pentingnya pembentukan kemitraan-kemitraan antara sektor-sektor publik dan swasta sebagai alat yang efisien untuk melaksanakan proyek-proyek ITU yang berkesinambungan, dan untuk menggunakan keahlian lokal yang ada dalam melaksanakan proyek-proyek ITU berbasis regional atau negara seluasnya.
- d) Resolusi 13 (Rev. Doha, 2006) WTDC mengenai mobilisasi sumber-sumber daya dan kemitraan untuk mempercepat pengembangan telekomunikasi/TIK, yang menyoroti kebutuhan solusi praktis untuk memobilisasi dana-dana, khususnya dalam mendukung proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan di negara-negara berkembang,

mengakui

Resolusi 17 (Rev. Doha, 2006) WTDC mengenai pelaksanaan inisiatif-inisiatif pada tingkat-tingkat nasional, regional, antar-regional dan global yang telah disepakat oleh keenam wilayah ITU-D, yang telah mempertimbangkan kekurangan dana dari UNDP dan institusi-institusi finansial internasional lain, mendesak Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT) untuk menggali berbagai kemungkinan pendanaan, termasuk kemungkinan kemitraan-kemitraan dengan Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor ITU-D, lembaga-lembaga keuangan dan organisasi-organisasi internasional agar

mensponsori pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari inisiatif yang diterima oleh WTDC-06,

memperhatikan

- a) bahwa peran ITU-D yang berkelanjutan dalam pelaksanaan proyek-proyek kerja sama teknik dengan negara-negara berkembang dan pembangunan pertalian-pertalian bisnis/klien tergantung pada penciptaan dan pemeliharaan tingkat keahlian dalam sekretariat untuk memungkinkan BDT mengelola proyek-proyek secara efektif dan dengan cara yang tepat waktu dan efisien, untuk ini, peningkatan kemampuan-kemampuan pelatihan dalam Perhimpunan, sebagaimana diperkirakan dalam Resolusi 48 (Rev. Antalya, 2006) dari konferensi ini, akan berkontribusi pada kelangsungan keahlian yang dipersyaratkan untuk meningkatkan fungsi pelaksanaan proyek,
- b) bahwa memperkuat pelaksanaan proyek dan pengelolaan keahlian di BDT juga membutuhkan perbaikan keterampilan-keterampilan dalam bidang mobilisasi sumber daya dan keuangan,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal, dengan bekerjasama erat dengan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi dan Kepala-kepala Kantor-kantor Regional

- 1 untuk meninjau kembali pengalaman ITU-D dalam menunaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan proyek-proyek di bawah sistem pengembangan Perserikatan Bangsa-bangsa atau pengadaan pendanaan lain dengan mengidentifikasi pelajaran-pelajaran yang dipelajari dan dengan mengembangkan strategi untuk memperkuat fungsi ini di masa depan;
- 2 untuk melakukan suatu peninjauan kembali praktik-praktik terbaik dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa dan dalam organisasi-organisasi eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang kerja sama teknik, dengan maksud untuk menyesuaikan praktik-praktik tersebut sesuai dengan kekhususan-kekhususan yang berlaku dalam ITU;
- 3 untuk memastikan bahwa keahlian yang dipersyaratkan dalam bidang-bidang pengelolaan dan pelaksanaan proyek serta mobilisasi sumber daya dan pembiayaan diidentifikasi;
- 4 untuk mendorong proyek-proyek dari semua sumber, termasuk sektor swasta;
- 5 untuk memfokuskan pada pelaksanaan proyek-proyek berskala lebih besar, sementara secara hati-hati mempertimbangkan penyelesaian proyek-proyek skala lebih kecil.
- 6 untuk memastikan bahwa suatu biaya pendukung minimum sebesar 7 persen, terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek di bawah UNDP atau pengaturan-pengaturan pendanaan lain, diatur sebagai target untuk

penggantian, seraya mengizinkan suatu tingkat fleksibilitas untuk perundingan selama diskusi pendanaan;

- 7 untuk terus memeriksa persentasi sumber-sumber biaya pendukung berkenaan dengan proyek-proyek tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkannya dalam rangka untuk digunakan dalam memperbaiki fungsi pelaksanaan;
- 8 untuk merekrut staf intern dan/atau ekstern yang mampu, apabila diperlukan, sesuai dengan keterbatasan keuangan yang diatur oleh konferensi-konferensi yang berkuasa penuh, atau sesuai dengan sumber-sumber biaya pendukung berkenaan dengan proyek-proyek tersebut, dalam rangka memperkuat, dan memastikan kelangsungan maupun berkelanjutan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan kerja sama teknik dan kegiatan-kegiatan bantuan;
- 9 menyiapkan laporan-laporan tahunan kepada Dewan mengenai kemajuan yangtelah dicapai dalam memenuhi fungsi-fungsi yang ditentukan dalam Nomor 118 Konstitusi.

**RESOLUSI 158 (Rev. Guadalajara, 2010)
Isu keuangan untuk pertimbangan Dewan**

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) Pasal 28 Konstitusi ITU dan Pasal 133 Konvensi ITU yang menyangkut keuangan Perhimpunan;
- b) perlunya menjamin bahwa, dalam setiap anggaran dua tahunan, pemasukan dan pengeluaran harus seimbang;
- c) aturan-aturan, prosedur-prosedur dan pengaturan-pengaturan finansial untuk kontribusi-kontribusi sukarela dan penyertaan modal perwalian sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 2 dari Peraturan Keuangan;

memperhatikan

- a) hasil-hasil Kelompok Kerja Dewan untuk penjabaran rancangan rencana strategis dan rancangan rencana keuangan untuk tahun 2012-2015;
- b) dampak-dampak biaya untuk ITU sebagai hasil dari peran yang diperolehnya dalam menindaklanjuti dan melaksanakan hasil-hasil yang relevan dari kedua fase Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi;
- c) bahwa ada kebutuhan untuk menstabilkan elemen-elemen dari rencana finansial selama konferensi yang berkuasa penuh;
- d) bahwa dalam delapan tahun terakhir pemasukan finansial Perhimpunan, berdasar pada kontribusi Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, terus menurun;
- e) perlunya meningkatkan pemasukan Perhimpunan, kemungkinan melalui peningkatan sumber-sumber pemasukan atau pengembangan mekanisme finansial tambahan baru,

memperhatikan lebih lanjut

penerimaan dari Resolusi 151 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai pengelolaan berbasis hasil dan Resolusi 155 (Antalya, 2006) dari Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai suatu pembentukan kelompok pengelolaan dan anggaran Dewan ITU,

memutuskan untuk memerintahkan Dewan

- 1 untuk mengkaji masalah-masalah sebagai berikut:
 - i) kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi ITU, termasuk, apabila perlu, merekomendasikan modifikasi-modifikasi untuk pasal-pasal yang relevan dari Konstitusi dan Konvensi dan dengan melalui identifikasi sumber-sumber keuangan baru yang tidak terkait dengan unit-unit kontribusi,
 - ii) kemungkinan untuk menyusun mekanisme-mekanisme untuk memberikan kestabilan keuangan yang lebih baik untuk Perhimpunan, dan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi terkait dengan hal tersebut.;
 - iii) metodologi-metodologi saat ini untuk keikutsertaan Anggota-anggota sektor dan Asosiasi-asosiasi, termasuk, antara lain, revisi struktur biaya, kemungkinan menggabungkan keikutsertaan Sektor, dan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan manfaat-manfaat dari “pengalaman” keikutsertaan Anggota-anggota Sektor dan Asosiasi-asosiasi;
- 2 untuk melaporkan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai hasil-hasil dari kajian ini.

RESOLUSI 159 (Rev. Guadalajara, 2010)
Bantuan dan dukungan bagi Libanon untuk pembangunan kembali jaringan telekomunikasi (tetap dan bergerak)

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) prinsip-prinsip luhur, tujuan-tujuan dan objektif-objektif yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan di dalam Deklarasi Hak-hak Manusia;
- b) upaya-upaya Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memajukan pembangunan yang berkelanjutan dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang relevan berkenaan dengan situasi tersebut;
- c) tujuan-tujuan Perhimpunan sebagaimana diabadikan dalam Pasal 1 Konstitusi ITU;
- d) butir 16 dari Prinsip-prinsip Deklarasi Jenewa sebagaimana telah diterima Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi,

mengakui,

- a) bahwa suatu jaringan telekomunikasi yang andal sangat diperlukan untuk memajukan pengembangan sosial-ekonomi negara-negara, khususnya yang mengalami penderitaan karena bencana-bencana alam, konflik domestik atau perang;
- b) bahwa fasilitas-fasilitas telekomunikasi Libanon telah sangat rusak oleh peperangan-peperangan dalam negeri tersebut;
- c) bahwa kerusakan terhadap telekomunikasi Libanon seharusnya menjadi hal mengkhawatirkan bagi seluruh komunitas internasional, khususnya ITU, sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa untuk telekomunikasi;
- d) Resolusi 159 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, yang memutuskan bahwa tindakan seharusnya dimulai untuk memberikan dan mendukung Libanon dalam membangun kembali jaringan telekomunikasinya;
- e) bahwa Resolusi 159 (Antalya, 2006) belum dilaksanakan ke dalam tindakan, terkecuali untuk misi penyelidikan oleh ahli ITU dalam tahun 2007 yang diakhiri dengan suatu laporan penilaian yang mengevaluasi kerusakan-kerusakan dan hilangnya pendapatan sejumlah USD 547.3 juta;
- f) bahwa, berdasarkan kondisi-kondisi saat ini dan di masa mendatang, Libanon tidak akan mampu membangun jaringan telekomunikasi dan prasarananya sampai tingkat kinerja dan ketahanan yang diperlukan

tanpa bantuan dari masyarakat internasional, sebagaimana diberikan secara bilateral atau melalui organisasi-organisasi internasional,

menimbang

- a) bahwa upaya-upaya akan membantu membangun kembali dan meningkatkan prasarana jaringan telekomunikasinya;
- b) bahwa upaya-upaya juga akan meningkatkan ketahanan sistem-sistem pengelolaan dan keamanannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hal layanan-layanan ekonomi dan telekomunikasi dan keamanan,

memutuskan

- 1 bahwa tindakan-tindakan khusus seharusnya diinisiasikan dalam kerangka kegiatan-kegiatan Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU, dengan bantuan khusus dari kedua Sektor lainnya, dalam rangka implementasi resolusi ini dan agar dapat menyediakan bantuan dan dukungan yang sesuai untuk mendukung Libanon dalam membangun kembali jaringan-jaringan telekomunikasinya (tetap dan bergerak);
- 2 bahwa dana-dana yang diperlukan seharusnya dialokasikan sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber daya Perhimpunan untuk pelaksanaan resolusi ini,

menyerukan kepada Negara-negara Anggota

untuk menawarkan segala bantuan dan dukungan yang memungkinkan kepada Pemerintah Libanon, baik secara bilateral atau melalui, dan, dalam hal apapun, dalam koordinasi dengan, aksi khusus Perhimpunan yang disebut di atas,

memerintahkan Dewan

untuk mengalokasikan, dalam sumber-sumber yang tersedia, dana-dana yang perlu untuk, dan menginisiasikan, aksi tersebut,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ketiga Sektor-sektor ITU sesuai dengan *memutuskan* di atas, dan menjamin bahwa aksi Perhimpunan demi kebaikan Libanon adalah seefektif mungkin, dan melaporkan mengenai hal tersebut secara periodik kepada Dewan.

RESOLUSI 162 (Guadalajara, 2010)
Komite penasihat pengelolaan independen

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

rekomendasi Perwakilan-perwakilan Layanan Audit Internal dari organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga keuangan multilateral mengenai pembentukan komite-komite audit yang efektif dan independen,

mengingat

laporan dari unit Inspeksi Bersama yang berjudul *Kekosongan Pengawasan dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (JIU/REP/2006/2)* dan khususnya rekomendasi 1 daripadanya mengenai pembentukan suatu dewan pengawasan eksternal independen,

menegaskan kembali

komitmennya untuk pengelolaan Perhimpunan yang efisien, akuntabel dan transparan,

mengakui

- a) bahwa pembentukan komite penasihat pengelolaan independen memberikan kontribusi terhadap pengawasan dan pengaturan yang efektif dari suatu organisasi;
- b) bahwa suatu komite penasihat pengelolaan independen merupakan suatu alat pengaturan dan tidak menduplikasi fungsi-fungsi audit keuangan baik auditor internal maupun eksternal;
- c) bahwa praktik yang telah ditetapkan di antara lembaga-lembaga internasional merupakan bahwa suatu komite penasihat pengelolaan independen yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai penasihat ahli dan membantu badan pemerintah serta kepala badan dalam memenuhi tanggungjawab-tanggungjawab pengaturan dan pengawasannya;

memperhatikan

laporan-laporan oleh Ketua Kelompok Dewan mengenai Peraturan-peraturan Keuangan dan isu-isu pengelolaan keuangan terkait lainnya (Kelompok FINREGS) (Dokumen C10/28 dan WG-RG-18/2),

memperhatikan lebih lanjut

Lampiran D pada laporan oleh Ketua Komite Tetap mengenai administrasi dan pengelolaan Dewan (Dokumen C10/75), yang memuat kerangka acuan untuk pembentukan suatu komite penasihat pengelolaan independen yang berjudul "Komite penasihat audit independen dari para ahli (IAACE)",

memutuskan

untuk menyetujui kerangka acuan untuk Komite Penasihat Pengelolaan Independen ITU (IMAC) yang tercantum dalam lampiran resolusi ini,

memerintahkan Dewan

untuk membentuk IMAC berdasarkan percobaan untuk empat tahun, dan melaporkan kepada konferensi yang berkuasa penuh tahun 2014.

LAMPIRAN RESOLUSI 162 (Guadalajara, 2010)
Kerangka acuan untuk
Komite Penasihat Pengelolaan Independen ITU

Maksud

- 1 Komite Penasihat Pengelolaan Independen (IMAC), sebagai suatu badan pembantu pada Dewan ITU, bertindak dalam kapasitasnya sebagai penasihat ahli serta membantu Dewan dan Sekretaris Jenderal dalam memenuhi tanggungjawab pemerintahannya , termasuk memastikan keefektifan sistem-sistem pengawasan internal, pengelolaan resiko dan proses-proses pemerintahan ITU. IMAC harus memberikan nilai dan harus membantu dalam menguatkan akuntabilitas serta fungsi-fungsi pemerintahan Dewan dan Sekretaris Jenderal.
- 2 IMAC akan memberikan nasihat kepada Dewan dan pengelolaan ITU, mengenai:
 - a) kualitas dan tingkat pelaporan keuangan, pemerintahan, pengelolaan resiko, pemantauan dan pengawasan internal dalam ITU;
 - b) tindakan-tindakan yang diambil oleh pengelolaan ITU mengenai rekomendasi-rekomendasi audit;
 - c) independensi, efektifitas, dan obyektifitas fungsi-fungsi audit internal dan eksternal; serta
 - d) bagaimana untuk menguatkan komunikasi diantara para pemangku kepentingan, auditor-auditor eksternal dan internal serta pengelolaan ITU.

Tanggung jawab

- 3 Tanggung jawab IMAC adalah:
 - a) fungsi audit internal: untuk memberikan nasihat kepada Dewan mengenai kepegawaian, sumber-sumber daya dan kinerja fungsi audit internal serta kelayakan independensi dari fungsi audit internal.
 - b) Pengelolaan resiko dan pengawasan internal: untuk memberikan nasihat kepada Dewan mengenai efektifitas sistem-sistem pengawasan internal ITU, termasuk pengelolaan resiko dan praktik-praktik pengaturan ITU.
 - c) Laporan-laporan keuangan: untuk memberikan nasihat kepada Dewan mengenai isu-isu yang timbul dari laporan-laporan keuangan ITU yang di audit, dan surat-surat untuk pengelolaan serta laporan-laporan lain yang dibuat oleh auditor eksternal.
 - d) Akuntansi: untuk memberikan nasihat kepada Dewan mengenai kelayakan kebijakan-kebijakan akuntansi dan praktik-praktik

pengungkapan serta menilai perubahan-perubahan serta resiko-resiko dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

- e) Audit eksternal: untuk memberikan nasihat kepada Dewan mengenai cakupan dan pendekatan kerja auditor eksternal. IMAC dapat memberikan nasehat mengenai penunjukan auditor eksternal, termasuk biaya-biaya dan cakupan layanan-layanan yang akan disediakan.
- f) Evaluasi: untuk meninjau kembali dan memberikan nasehat kepada Dewan mengenai kepegawaian, sumber-sumber daya dan kinerja fungsi evaluasi ITU.

Kewenangan

- 4 IMAC wajib memberikan semua kewenangan yang diperlukan untuk memenuhi tanggungjawabnya, termasuk akses yang bebas dan tidak terbatas terhadap semua informasi, rekaman atau staf (termasuk fungsi audit internal) dan auditor eksternal, atau setiap usaha yang dikontrakkan oleh ITU.
- 5 Kepala fungsi audit internal ITU dan auditor eksternal akan memiliki akses tidak terbatas dan rahasia terhadap IMAC, dan sebaliknya.
- 6 Kerangka acuan (ToR) tersebut akan ditinjau secara berkala, apabila sesuai, oleh IMAC, dan setiap perubahan yang diusulkan disampaikan kepada Dewan untuk mendapatkan persetujuan.
- 7 IMAC, sebagai badan penasihat, tidak mempunyai kewenangan pengelolaan, kewenangan eksekutif atau tanggung jawab operasional.

Susunan

- 8 IMAC wajib terdiri dari lima anggota ahli independen yang bertindak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
- 9 Kompetensi dan integritas profesional wajib merupakan pertimbangan terpenting dalam penyeleksian para anggota.
- 10 Tidak boleh lebih dari satu anggota IMAC yang merupakan warga negara dari Negara Anggota ITU yang sama.
- 11 Sejauh mungkin:
 - a) tidak lebih dari satu anggota IMAC yang berasal dari wilayah geografis yang sama; dan
 - b) keanggotaan IMAC wajib seimbang, dengan individu-individu dari negara-negara maju dan berkembang, sesuai dengan pengalaman sektor publik dan swasta, dan sesuai gender.
- 12 Setidak-tidaknya satu anggota wajib dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalamannya sebagai seorang profesional pengawas senior atau manajer keuangan senior, lebih disukai sejauh mungkin dalam sistem

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam organisasi internasional lainnya,.

- 13 Untuk melakukan perannya secara efektif, para anggota IMAC seharusnya secara bersama-sama memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman tingkat senior dalam bidang-bidang berikut ini:
 - a) keuangan dan audit;
 - b) pengaturan organisasi dan struktur akuntabilitas, termasuk pengelolaan resiko;
 - c) hukum;
 - d) pengelolaan tingkat senior;
 - e) pengaturan, struktur dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau organisasi-organisasi antar pemerintah lainnya; dan
 - f) suatu pemahaman umum mengenai industri telekomunikasi/TIK.
- 14 Para anggota seharusnya secara ideal memiliki atau mendapatkan secara cepat suatu pemahaman yang baik mengenai tujuan-tujuan, struktur pengaturan, peraturan-peraturan dan aturan-aturan yang relevan dari ITU, serta budaya organisasi dan lingkungan pengawasannya.

Independensi

- 15 Mengingat peran IMAC adalah untuk memberikan nasihat yang obyektif, para anggotawajib tetap bersifat independen dari sekretariat ITU, Dewan dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh, serta bebas dari setiap konflik kepentingan yang nyata atau yang diduga.
- 16 Para anggota IMAC wajib:
 - a) tidak memegang suatu posisi atau terlibat dalam setiap kegiatan yang dapat merusak independensi mereka dari ITU atau dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan usaha dengan ITU;
 - b) tidak sedang, atau telah dalam waktu tiga tahun sebelum penunjukannya di IMAC, dipekerjakan atau terlibat dalam setiap kapasitas ITU, Anggota Sektor, Asosiat atau delegasi Negara Anggota, atau memiliki hubungan keluarga langsung (sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Staf dan Aturan Staf ITU) bekerja untuk atau memiliki hubungan kontrak dengan ITU, Anggota Sektor, Asosiat atau delegasi Negara Anggota;
 - c) bersifat independen dari Majelis Auditor-auditor Eksternal Perserikatan Bangsa-bangsa dan Satuan Inspeksi Gabungan; dan
 - d) tidak memenuhi syarat untuk kepegawaian dengan ITU setidaknya tiga tahun segera setelah hari terakhir masa jabatannya pada IMAC.
- 17 Para anggota IMAC akan bertindak dalam kapasitas pribadi mereka dan wajib tidak mencari atau menerima perintah-perintah dalam hal kinerjanya pada IMAC dari setiap pemerintah atau otoritas internal atau eksternal lain pada ITU.

18 Para anggota IMAC wajib menandatangani suatu deklarasi tahunan dan pernyataan pribadi, keuangan dan kepentingan-kepentingan lainnya (Apendiks A pada ToR ini). Ketua IMAC wajib memberikan deklarasi dan pernyataan yang lengkap dan ditandatangani kepada Ketua Dewan segera setelah seorang anggota memulai periodenya pada IMAC, dan sesudahnya setiap tahun.

Penyeleksian, penunjukan dan masa jabatan

19 Proses penyeleksian anggota-anggota IMAC diatur dalam Apendiks B pada ToR ini. Proses tersebut wajib melibatkan suatu majelis penyeleksian yang terdiri dari wakil-wakil Dewan berdasarkan penyebaran geografis yang adil.

20 Majelis penyeleksian wajib menyampaikan rekomendasi-rekomendasinya kepada Dewan. Para anggota IMAC wajib ditunjuk oleh Dewan.

21 Para anggota IMAC ditunjuk untuk bertugas selama masa jabatan empat tahun, dapat diperbaharui untuk masa jabatan kedua dan sekaligus terakhir selama empat tahun, yang tidak harus berturut-turut. Untuk memastikan kelanjutan keanggotaan, penunjukan awal dari dua dari kelima anggotanya wajib hanya untuk satu masa jabatan selama empat tahun, diputuskan oleh penarikan undian pada pertemuan pertama IMAC. Ketua wajib diseleksi oleh para anggota IMAC dari diantara para anggotanya dan wajib bertindak sesuai kapasitasnya selama masa jabatan dua tahun.

22 Seorang anggota IMAC dapat mengundurkan diri dari keanggotaannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Dewan. Penunjukan khusus untuk sisa masa jabatan anggota tersebut wajib dilakukan oleh Ketua Dewan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Apendiks B dari ToR ini untuk mengisi kekosongan tersebut.

23 Penunjukan untuk IMAC dapat dibatalkan oleh Dewan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan

Pertemuan

24 IMAC wajib bertemu setidaknya dua kali dalam satu tahun keuangan ITU. Jumlah pasti dari pertemuan setiaptahun tergantung pada beban kerja yang telah disepakati untuk IMAC dan waktu yang paling sesuai untuk mempertimbangkan hal-hal yang spesifik.

25 Tunduk pada ToR ini, IMAC akan menetapkan tata caranya sendiri untuk membantu para anggotanya dalam menjalankan tanggungjawabnya. tata cara IMAC wajib dikomunikasikan kepada Dewan sebagai informasi.

26 Kuorum untuk komite adalah tiga anggota. Selama para anggota bertindak dalam kapasitasnya masing-masing, pengantiannya tidak diijinkan.

- 27 Sekretaris Jenderal, Auditor Eksternal, Kepala Administrasi dan Departemen Keuangan, Kepala fungsi audit internal dan Penjabat Etika, atau wakil-wakilnya, wajib menghadiri pertemuan-pertemuan apabila diundang oleh IMAC. Para pejabat ITU lainnya beserta fungsi-fungsinya yang relevan dengan butir-butir agenda dapat juga diundang.
- 28 Apabila perlu, IMAC mempunyai kemampuan untuk memperoleh konsultasi independen atau meminta para ahli luar lainnya dalam rangka memberikan nasihat pada komite.
- 29 Semua dokumen dan informasi rahasia yang disampaikan atau diperoleh IMAC tetap bersifat rahasia.

Pelaporan

- 30 Ketua IMAC akan menyampaikan temuan-temuannya kepada Ketua Dewan dan Sekretaris Jenderal setelah setiap pertemuan, dan akan memaparkan laporan tahunan, baik secara tertulis maupun hadir sendiri, untuk mendapatkan pertimbangan Dewan pada sesi tahunannya.
- 31 Ketua IMAC dapat memberitahukan kepada Ketua Dewan, antara sesi-sesi Dewan, mengenai suatu isu pengaturan yang serius.

Pengaturan Administratif

- 32 Para anggota IMAC akan memberikan layanan-layanan secara cuma-cuma. Sesuai dengan prosedur-prosedur yang diterapkan untuk menunjuk staf ITU yang ditunjuk, para anggota IMAC:
 - a) wajib menerima tunjangan nafkah harian; dan
 - b) yang bukan penduduk di kanton Jenewa atau dengan Perancis yang berdekatan wajib berhak untuk mendapatkan pengembalian biaya-biaya perjalanan, untuk menghadiri sesi-sesi IMAC,
- 33 Sekretariat ITU akan menyediakan dukungan sekretariat untuk IMAC.

APENDIKS A

**Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) Komite Penasihat
Pengelolaan Independen (IMAC)
Formulir Deklarasi & Pernyataan Pribadi, Keuangan dan kepentingan
Lainnya**

1. Uraian		
_____ Nama		
2. Pribadi, keuangan atau Kepentingan lainnya (beri centang pada kotak yang sesuai)		
<input type="checkbox"/> Saya tidak memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, keuangan atau kepentingan lainnya yang dapat atau dapat diduga mempengaruhi keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang sedang saya kerjakan atau nasihat yang saya berikan berkenaan masa tugas saya sebagai anggota IMAC.		
<input type="checkbox"/> Saya memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, keuangan atau kepentingan lainnya yang dapat atau dapat diduga mempengaruhi keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang sedang saya kerjakan atau nasihat yang saya berikan berkenaan masa tugas saya sebagai anggota IMAC.		
<input type="checkbox"/> Saya tidak memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, keuangan atau kepentingan lainnya yang dapat atau dapat diduga mempengaruhi keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang sedang saya ambil atau nasihat yang saya berikan berkenaan masa tugas saya sebagai anggota IMAC. Namun demikian, saya telah memutuskan untuk memberikan kepentingan-kepentingan pribadi, keuangan atau kepentingan saya lainnya yang terkini.		
3. Pribadi, keuangan atau kepentingan lainnya dari anggota keluarga * (beri centang pada kotak yang sesuai)		
<input type="checkbox"/> Menurut pengetahuan saya, tidak ada anggota keluarga langsung saya yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, keuangan atau kepentingan lainnya yang dapat atau dapat diduga mempengaruhi keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang sedang saya kerjakan atau nasihat yang saya berikan berkenaan masa tugas saya sebagai anggota IMAC.		
<input type="checkbox"/> Seorang anggota dari keluarga langsung saya memiliki kepentingan-kepentingan pribadi, keuangan atau lainnya yang dapat atau dapat diduga mempengaruhi keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang sedang saya kerjakan atau nasihat yang saya berikan berkenaan masa tugas saya sebagai anggota IMAC.		
<input type="checkbox"/> Menurut pengetahuan saya, tidak ada anggota keluarga langsung saya yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi, keuangan atau lainnya yang dapat atau dapat diduga mempengaruhi keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang sedang saya kerjakan atau nasihat yang saya berikan berkenaan masa tugas saya sebagai anggota IMAC. Namun demikian, saya telah memutuskan untuk memberikan kepentingan-kepentingan pribadi, keuangan atau kepentingan saya lainnya yang terkini.		
(*CATATAN: UNTUK MAKSUD-MAKSUD DEKLARASI INI, 'ANGGOTA KELUARGA' MEMPUNYAI PENGERTIAN YANG SAMA SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM PERATURAN STAF DAN ATURAN STAF ITU).		
_____ Tandatangan	_____ Nama	_____ Tanggal

**Formulir Deklarasi & Pernyataan
Pribadi, Keuangan dan Kepentingan Lainnya
(Apendiks A, halaman 3/4)**

5. Deklarasi

Saya menyatakan bahwa:

- Sebagai anggota dari Komite Penasihat Pengelolaan Independen (IMAC), saya sadar akan tanggung jawab saya sesuai Kerangka Acuannya:
 - untuk mengungkapkan, dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari, setiap konflik kepentingan (nyata atau nampak) dalam hubungan dengan keanggotaan IMAC saya; dan
 - tidak menyalahgunakan (a) informasi dalam atau (b) tugas-tugas saya, kedudukan, kewenangan atau otoritas, untuk memperoleh, atau berusaha memperoleh, suatu manfaat atau keuntungan untuk diri saya atau orang lain.

Saya menyatakan bahwa:

- Saya telah membaca Kerangka Acuan IMAC dan mengerti persyaratan bagi saya untuk mengungkapkan setiap kepentingan pribadi, finansial atau lainnya yang dapat atau dapat dianggap mempengaruhi keputusan-keputusan yang saya ambil atau nasehat yang saya berikan dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai anggota IMAC.
- Saya akan segera memberitahukan Ketua IMAC (yang wajib memberitahukan kepada Ketua Dewan) dari setiap perubahan dari keadaan pribadi saya atau tanggung jawab-tanggung jawab kerja saya yang dapat memengaruhi isi-isi dari pengungkapan ini dan memberikan suatu pengungkapan-(pengungkapan) yang diperbaiki dengan menggunakan *pro forma* ini.
- Saya akan mengungkapkan segera setiap kepentingan pribadi, finansial atau lainnya dari keluarga terdekat yang saya ketahui , apabila timbul keadaan-keadaan dimana saya perkirakan bahwa hal tersebut dapat atau dianggap dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang saya ambil atau nasihat yang saya berikan dalam melaksanakan tugas-tugas resmi saya.
- Saya mengerti bahwa hal ini dapat memerlukan izin anggota keluarga bagi pengumpulan oleh ITU mengenai informasi pribadi dan suatu deklarasi bahwa ia mengetahui maksud untuk mana informasi pribadi ini dikumpulkan, persyaratan-persyaratan menurut ketentuan hukum yang memberi kuasa pengumpulan tersebut dan pihak-pihak ketiga kepada mana informasi pribadinya dapat diungkapkan, dan disetujui.

Tandatangan

Nama

Tanggal

**Formulir Deklarasi & Pernyataan
Pribadi, Keuangan dan Kepentingan Lainnya
(Apendiks A, halaman 4/4)**

6. Deklarasi persetujuan oleh anggota keluarga langsung untuk pengungkapan data pribadi, keuangan dan kepentingan lainnya.

Apabila anda mencentang kotak pertama pada Item 3, lewati tahap ini dan langsung ke 7.

Deklarasi ini akan dilengkapi oleh anggota keluarga langsung dari anggota IMAC apabila anggota IMAC menimbang bahwa data pribadi, keuangan dan kepentingan lainnya dapat atau dapat diduga mempengaruhi keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang mereka ambil atau nasehat-nasehat yang akan mereka berikan dalam melaksanakan keanggotaan IMACnya.

Nama anggota keluarga _____

Hubungan dengan anggota IMAC _____

Nama anggota IMAC _____

Tandatangan	Nama anggota keluarga langsung	Tanggal
-------------	--------------------------------	---------

7. Menyampaikan formulir

Begitu dilengkapi dan ditandatangani, formulir ini seharusnya dikirim kepada Ketua Dewan ITU.

APENDIKS B
Proses yang diajukan untuk penyeleksian anggota Komite Penasehat
Manajemen Independen (IMAC)

Lowongan pada IMAC (termasuk bagi keanggotaan awalnya) akan dipenuhi sesuai dengan proses yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Sekretaris Jenderal wajib:
 - i) mengundang Negara-negara Anggota ITU untuk mencalonkan individu-individu yang dianggap memiliki kualifikasi dan pengalaman yang istimewa;
 - ii) menempatkan dalam majalah-majalah dan/atau koran-koran internasional dan terkemuka, serta pada internet, ajakan bagi pernyataan-pernyataan minat dari individu-individu yang memenuhi syarat dan mempunyai pengalaman yang sesuai,

untuk mengabdikan pada IMAC.

Negara Anggota yang mencalonkan seorang individu berdasarkan subparagraf a)i) wajib memberikan informasi sama yang diminta oleh Sekretaris Jenderal dari para pemohon yang menanggapi pernyataan minat di bawah subparagraf a)ii), dan berdasarkan kerangka waktu yang sama.

- b) Suatu majelis penyeleksian wajib dibentuk yang terdiri dari enam anggota Dewan yang mewakili Amerika, Eropa, CIS, Afrika, Asia dan Australasia serta Negara-negara Arab.
- c) Majelis penyeleksian wajib, dengan memperhatikan kerangka acuan (ToR) IMAC dan sifat kerahasiaan dari proses seleksi, peninjauan kembali dan mempertimbangkan permohonan-permohonan yang diterima serta membuat daftar singkat dari calon-calon yang hendak diwawancarai. Majelis penyeleksian akan dibantu, sebagaimana diperlukan, oleh sekretariat ITU.
- d) Majelis penyeleksian nantinya wajib mengajukan kepada Dewan suatu daftar bagi para calon yang paling memenuhi syarat, sama dengan jumlah lowongan pada IMAC. Dalam keadaan pengambilan suara oleh majelis penyeleksian untuk menentukan apakah calon(-calon) wajib dimasukkan dalam daftar para calon yang diusulkan kepada Dewan dan berakhir dalam jumlah suara yang sama, Ketua Dewan wajib memberikan suara penentuan.

Informasi yang akan diberikan oleh majelis penyeleksian kepada Dewan wajib terdiri dari nama, jenis kelamin, kebangsaan, kualifikasi-kualifikasi dan pengalaman profesional dari setiap calon. Majelis penyeleksian wajib memberikan laporan kepada Dewan mengenai para calon yang direkomendasikan bagi penunjukan untuk IMAC.

- e) Dewan wajib mempertimbangkan rekomendasi untuk menunjuk para individu kepada IMAC.

- f) Majelis penyeleksian juga akan membuat dan menyimpan kumpulan para calon sesuai yang memenuhi syarat untuk pertimbangan oleh Dewan apabila diperlukan dalam rangka memenuhi lowongan yang muncul untuk alasan apapun (misal pengunduran diri, ketidakmampuan) selama suatu periode IMAC.
- g) Dalam rangka mematuhi prinsip rotasi, dan menjelang penghabisan periode percobaan, posisi-posisi harus diiklankan ulang setiap empat tahun, bila dirasa sesuai oleh Dewan, dengan menggunakan proses seleksi yang diatur oleh apendiks ini. Kumpulan para calon sesuai yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam subparagraf f) juga akan diperbaharui dengan menggunakan proses seleksi yang sama.

RESOLUSI 163 (Guadalajara, 2010)
Pendirian kelompok kerja Dewan pada Konstitusi ITU yang tetap

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) bahwa instrumen-instrumen Perhimpunan disebutkan dalam Pasal 4 Konstitusi ITU;
- b) bahwa Pasal 52 Konstitusi menyaratkan bahwa Konstitusi dan Konvensi ITU diratifikasi secara bersamaan oleh setiap Negara Anggota penandatanganan sesuai dengan aturan-aturan konstitusionalnya;
- c) bahwa, sesuai dengan Nomor 224 Konstitusi dan Nomor 519 Konvensi, setiap Negara Anggota dapat mengajukan perubahan-perubahan masing-masing pada Konstitusi dan Konvensi;
- d) bahwa Nomor 231 Konstitusi dan Nomor 527 Konvensi menetapkan bahwa, setelah berlakunya setiap instrumen perubahan, ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesinya apapun yang diubah sesuai dengan Pasal 52 dan 53 Konstitusi wajib diberlakukan pada Konstitusi dan Konvensi sebagaimana telah diubah,

mengingat

- a) bahwa sejumlah perubahan dibuat terhadap Konstitusi dan Konvensi pada setiap konferensi yang berkuasa penuh di masa lalu;
- b) bahwa perubahan-perubahan yang disebutkan dalam *mengingat a)* di atas memerlukan ratifikasi, penerimaan, penyetujuan dari atau aksesinya baik pada Konstitusi maupun Konvensi sebagaimana telah diubah,

mengakui

- a) bahwa Konstitusi, yang ketentuan-ketentuannya dilengkapi oleh Konvensi tersebut, adalah instrumen dasar Perhimpunan (mengacu pada No. 30 Konstitusi);
- b) bahwa ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesinya pada perubahan Konstitusi dan Konvensi adalah proses yang kompleks dan panjang bagi Negara-negara Anggota ITU, khususnya bagi Negara-negara Anggota yang bahasa nasionalnya bukan merupakan salah satu dari enam bahasa resmi ITU;
- c) bahwa perubahan yang banyak dan kebutuhan untuk melalui suatu proses ratifikasi yang berat telah menghasilkan, dari sudut pandang hukum, suatu **perusakan** dari salah satu prinsip **kardinal**/fundamental hukum dari organisasi-organisasi internasional, yaitu integritas dan **homegenitas** dari instrumen normatif tertinggi yang berlaku pada semua Negara Anggota dari suatu organisasi antar pemerintah seperti ITU,

mengakui lebih lanjut

- a) bahwa diskusi-diskusi pada sesi-sesi Dewan ITU tahun 2009 dan 2010 mengungkapkan bahwa ada kebutuhan untuk memiliki Konstitusi yang tetap dalam rangka menyelesaikan kesulitan-kesulitan ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi saat ini yang disebutkan dalam *mengakui b) dan c) di atas*;
- b) bahwa konsensus telah muncul di antara Negara-negara Anggota ITU untuk mempersiapkan rancangan Konstitusi tetap dimaksud untuk diserahkan kepada konferensi yang berkuasa penuh untuk pertimbangan dan tindakan-tindakan yang diperlukannya, sebagaimana sesuai;
- c) bahwa konsensus juga telah muncul antar Negara-negara Anggota ITU, terpisah dari Konstitusi tetap, ketentuan-ketentuan yang tersisa dapat dipindahkan kepada “dokumen/konvensi”¹ lain yang tidak akan tergantung dari ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi, dengan memperhatikan kesulitan-kesulitan yang disebutkan dalam *mengakui b) dan c) di atas*,

memutuskan

- 1 bahwa kelompok kerja Dewan mengenai Konstitusi tetap, terbuka untuk semua Negara Anggota Perhimpunan, didirikan, dengan persyaratan-persyaratan referensi sebagaimana dimuat dalam lampiran resolusi ini;
- 2 bahwa laporan-laporan tahunan dari kelompok kerja Dewan yang disebut di atas harus diserahkan kepada pertemuan-pertemuan Dewan dalam tahun 2011 (termasuk program kerja) dan tahun 2012, serta laporan akhir harus diserahkan kepada sesi Dewan pada tahun 2013,

memerintahkan sesi istimewa Dewan dalam tahun 2010

- 1 untuk mendirikan Kelompok Kerja Dewan pada Konstitusi tetap (CWG-STB-CS), terbuka kepada semua Negara Anggota Perhimpunan, dengan persyaratankerangka acuan sebagaimana tercantum dalam *memutuskan 1 di atas*;
- 2 untuk menentukan ketua dan wakil ketua CWG-STB-CS,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk mengalokasikan dana-dana yang diperlukan dalam sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka melaksanakan resolusi ini;
- 2 untuk memeriksa dan mengambil tindakan yang sesuai dalam laporan-laporan tahunan CWG-STB-CS yang diserahkan pada sesi-sesi Dewan

¹ Kelompok Kerja Council (CWG-STB-CS) perlu memeriksa ketentuan-ketentuan ini dan untuk mengusulkan pilihan-pilihan dalam laporannya kepada Council sebagai pertimbangan bagi konferensi yang berkuasa penuh 2014 untuk ditindak lanjuti, sebagaimana sesuai.

tahun 2011 dan 2012, sebagaimana disebutkan dalam *memutuskan* 2 di atas;

- 3 untuk memastikan bahwa semua Negara Anggota dan Anggota Sektor Perhimpunan diberi informasi secara teratur dengan cara yang komprehensif melalui laporan-laporan tahunan, sehingga Negara-negara Anggota dapat menyerahkan tanggapan-tanggapan dan/atau kontribusi-kontribusi mereka, serta Anggota-anggota Sektor dapat menyerahkan tanggapan-tanggapan mereka, sebagaimana sesuai, sesuai dengan butir 6 dari lampiran resolusi ini;
- 4 untuk mempertimbangkan laporan akhir yang dipersiapkan oleh kelompok yang disebutkan di atas dan menyerahkan kepada sesi Dewan pada tahun 2013, dan membuat setiap tanggapan yang dianggap sesuai sebelum disiarkan kepada Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan konferensi yang berkuasa penuh 2014;
- 5 untuk memastikan bahwa laporan akhir diedarkan kepada Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor setidaknya 12 bulan sebelum konferensi yang berkuasa penuh tahun 2014,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk mendukung kegiatan-kegiatan CWG-STB-CS, termasuk persiapan laporan-laporan tahunan dan akhir, dengan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan dan bantuan yang dibutuhkan untuk keberhasilan penyelesaian tugas-tugasnya, yang wajib dijalankan dalam enam bahasa resmi ITU;
- 2 untuk mengirimkan surat undangan, termasuk agenda dari pertemuan-pertemuan kelompok ini setidaknya empat bulan sebelumnya sehingga membolehkan Negara-negara Anggota untuk mempersiapkan kontribusi-kontribusinya;
- 3 untuk menyerahkan laporan-laporan tahunan dan akhir dari CWG-STB-CS kepada sesi-sesi Dewan pada tahun 2011, 2012 dan 2013;
- 4 untuk menyebarluaskan laporan-laporan tahunan dan akhir dari CWG-STB-CS kepada semua Negara Anggota dan Anggota Sektor, sebagaimana disebutkan dalam *memerintahkan Dewan* 3 dan 5 di atas;
- 5 untuk melakukan studi mengenai mekanisme-mekanisme yang ada di dalam organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa yang lain dengan memperhatikan masa mulai berlaku dari perubahan-perubahan terhadap “instrumen-instrumen dasar” mereka dan melaporkan kepada sesi-sesi Dewan pada tahun 2011 atau 2012, dan untuk mengedarkan hasil-hasil studinya kepada semua Negara Anggota agar mereka mempersiapkan kontribusi-kontribusi mereka, sebagaimana sesuai, dalam konferensi yang berkuasa penuh tahun 2014;
- 6 untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dibiayai dan anggaran biasa Perhimpunan, di bawah pengawasan Dewan,

memerintahkan Direktur-direktur dari ketiga Biro

untuk ikut serta dalam dan mendukung kegiatan-kegiatan CWG-STB-CS,

mengundang Negara-negara Anggota

- 1 untuk mencalonkan wakil-(wakil) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas terhadap subyek tersebut dan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan menghadiri pertemuan-pertemuan CWG-STB-CS;
- 2 untuk mempertimbangkan, dimana sesuai, setiap tanggapan-tanggapan apapun dari Anggota-anggota Sektor masing-masing mengenai kerja kelompoknya, dengan maksud untuk mempertimbangkannya, sebagaimana sesuai, apabila menyerahkan kontribusi-kontribusi mereka pada kerja kelompok.

LAMPIRAN RESOLUSI 163 (Guadalajara, 2010)
Kerangka acuan Kelompok Kerja Dewan (CWG-STB-CS)

Kerangka acuan Kelompok Kerja Dewan pada Konstitusi tetap (CWG-STB-CS), sebagaimana disebutkan dalam *memutuskan* 1 resolusi ini, adalah:

- 1 Untuk memeriksa ketentuan-ketentuan Konstitusi ITU yang terkini dan Konvensi ITU yang terkini, tanpa mengusulkan modifikasi pada naskah mereka, dan menjalankan studi-studi dari ketentuan-ketentuan ini dalam rangka menyiapkan rancangan Konstitusi tetap dan rancangan “dokumen/konvensi” lainnya; yang terakhir tidak bergantung kepada ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi yang ditetapkan dalam Pasal 52 dan 53 dari Konstitusi.
- 2 Dalam hal ini, CWG-STB-CS, tanpa mengusulkan modifikasi-modifikasi pada naskah Konstitusi dan Konvensi, wajib:
 - 2.1 Memeriksa ketentuan-ketentuan dari Konstitusi dan Konvensi, termasuk perubahan-perubahan yang disetujui oleh konferensi yang berkuasa penuh tahun 2010, dalam rangka mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang bersifat tetap dan fundamental dan harus terus menjadi bersifat tetap dan fundamental di masa mendatang.
 - 2.2 Mengonsolidasikan dan memasukkan semua ketentuan yang dikenali di bawah butir 2.1 di atas, tanpa mengusulkan modifikasi terhadap naskahnya, dalam suatu dokumen yang berlabel “Rancangan Konstitusi tetap”, yang akan tunduk pada ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 52 dan 53 Konstitusi.
 - 2.3 Mengonsolidasikan dan memasukkan semua ketentuan yang tersisa dalam Konstitusi yang terkini dan Konvensi yang terkini, termasuk perubahan-perubahan yang disetujui oleh konferensi yang berkuasa penuh tahun 2010, tidak diidentifikasi sebagai bersifat tetap dan fundamental, ataupun diketahui sebagai bersifat tetap dan fundamental yang berkelanjutan/ tetap sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan di bawah butir 2.1 di atas dalam “dokumen/konvensi” lain. “Dokumen/konvensi” lain, tidak akan tunduk pada ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 52 dan 53 Konstitusi.
- 3 Untuk mengusulkan perubahan-perubahan **turutan** pada rancangan Konstitusi tetap dan rancangan “dokumentasi/konvensi” sebagai hasil dari tindakan-tindakan yang diambil ketika menjalankan tugas-tugas yang dimuat dalam butir-butir 2.2 dan 2.3 di atas, bersamaan dengan referensi silang yang berhubungan, dalam suatu bagian terpisah dari laporan, untuk pertimbangan dan tindakan yang diperlukan oleh konferensi yang berkuasa penuh tahun 2014, sebagaimana sesuai.
- 4 Untuk mencari kontribusi-kontribusi dan tanggapan-tanggapan dari Negara-negara Anggota.

- 5 Untuk menyiapkan, mengacu kepada memutuskan 2 resolusi ini, laporan-laporan tahunan dan akhir untuk diserahkan kepada sesi-sesi Dewan ITU tahun 2011, 2012 dan 2013.
- 6 Untuk menempatkan pada situs kelompok tanggapan-tanggapan dari Anggota-anggota Sektor mengenai laporan-laporan tahunan yang dipersiapkan oleh kelompok pada tahun 2011 dan 2012.
- 7 CWG-STB-CS wajib menyelenggarakan dua pertemuan dalam tahun 2011, masing-masing untuk periode maksimal lima hari. Jumlah pertemuan dalam tahun 2012 dan 2013 tidak boleh lebih dari 2 kali setahun, masing-masing untuk periode maksimal lima hari. Namun, keputusan akhir mengenai jumlah dan lamanya pertemuan-pertemuan pada tahun 2012 dan 2013 akan diputuskan oleh Dewan. Pertemuan-pertemuan ini sebaiknya diadakan bersama dengan acara-acara/pertemuan-pertemuan besar ITU yang relevan.

RESOLUSI 164 (Guadalajara, 2010)
Pengalokasian kursi dari Negara Anggota Dewan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) bahwa Dewan terdiri dari Negara-negara Anggota yang dipilih oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- b) bahwa jumlah Negara Anggota Dewan wajib ditentukan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh,

memperhatikan

bahwa, sesuai dengan No. 50A Konvensi ITU, jumlah Negara Anggota Dewan tidak boleh melebihi 25 persen jumlah total Negara-negara Anggota Perhimpunan,

mengakui

kebutuhan untuk mengklarifikasikan cara dimana penyebaran seimbang dari Negara Anggota Dewan diterapkan mengacu pada Nomor 61 Konstitusi ITU,

mengakui lebih lanjut

pertimbangan-pertimbangan Dewan mengacu pada Resolusi 134 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai jumlah Negara-negara Anggota Dewan,

memutuskan

- 1 bahwa, untuk setiap wilayah administrasi Dewan, persentasi dari 25 persen wajib diterapkan pada jumlah Negara-negara Anggota dalam wilayah itu untuk menentukan jumlah kursi yang akan dialokasikan pada wilayah;
- 2 bahwa angka yang didapat setelah perhitungan ini wajib dibulatkan ke bilangan bulat yang terdekat;
- 3 bahwa bilangan bulat yang dibulatkan ini wajib menjadi jumlah kursi yang dialokasikan pada wilayah,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk memberitahukan Negara-negara Anggota mengenai perubahan-perubahan dalam jumlah Negara Anggota Perhimpunan dan dampak mereka terhadap penyebaran kursi-kursi Negara Anggota Perhimpunan.

RESOLUSI 165 (Guadalajara, 2010)
Tenggat waktu untuk penyerahan usulan dan prosedur pendaftaran
peserta untuk konferensi dan sidang Perhimpunan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengakui

- a) No. 224 Konstitusi ITU, yang menyebutkan bahwa Negara Anggota manapun boleh mengajukan setiap perubahan pada Konstitusi, asalkan usulan dimaksud sampai kepada Sekretaris Jenderal paling lambat dari delapan bulan sebelum hari pembukaan yang ditetapkan untuk konferensi yang berkuasa penuh;
- b) Nomor 519 Konvensi ITU, yang menentukan persyaratan untuk penyerahan perubahan-perubahan kepada Dewan paling lambat delapan bulan sebelum hari pembukaan konferensi yang berkuasa penuh
- c) Resolusi 114 (Marrakesh, 2002) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai interpretasi No. 224 Konstitusi dan No. 519 Konvensi ini,

mengakui juga

- a) Bab 8 Aturan-aturan Umum konferensi-konferensi, sidang-sidang dan pertemuan-pertemuan Perhimpunan, mengenai batas-batas waktu dan kondisi-kondisi untuk penyerahan usulan-usulan dan laporan-laporan ke konferensi-konferensi;
- b) Bab 17 Aturan-aturan Umum, mengenai usulan-usulan atau perubahan-perubahan yang disajikan selama konferensi,

menimbang

Keputusan 556 yang diterima oleh sesi Dewan ITU pada tahun 2010, mengenai penyerahan dokumentasi ke sesi-sesi Dewan, yang menentukan bahwa semua kontribusi seharusnya diserahkan paling lambat 21 hari kalender sebelum pembukaan sesi Dewan dalam rangka memastikan terjemahan yang tepat waktu dan pertimbangan yang seksama selama sesi-sesi Dewan,

memperhatikan

- a) bahwa penyerahan-penyserahan yang terlambat tidak hanya membebani sekretariat ITU dalam memproses kontribusi-kontribusi dimaksud, tetapi juga merugikan para delegasi, khususnya para delegasi kecil, dalam membaca dan mempersiapkan posisi-posisi mereka secara tepat waktu dan berguna;
- b) bahwa kontribusi-kontribusi terlambat juga mengganggu fungsi efisien dari konferensi-konferensi, sidang-sidang dan pertemuan-pertemuan ITU sebagaimana juga komite-komite dan kelompok-kelompok kerjanya;

- c) bahwa ada kebutuhan untuk menentukan tenggat waktu yang pantas untuk penyerahan-penyerahan dokumentasi kepada pertemuan-pertemuan Perhimpunan yang telah disebutkan di atas di masa mendatang,

memperhatikan

suatu usulan yang disampaikan kepada konferens yang berkuasa penuh tahun 2010, yang meminta Dewan, dengan konsultasi dengan Sekretariat Jenderal dan Direktur-direktur dari tiga Biro, menjelajahi, bersama dengan kelompok-kelompok penasihat kelompok, isu mengenai penyelarasan tenggat-tenggat waktu untuk penyerahan dokumen-dokumen dan prosedur-prosedur yang mengatur registrasi untuk pertemuan-pertemuan Perhimpunan,

memutuskan

untuk menentukan tenggat waktu penyerahan yang tegas untuk semua kontribusi, dengan pengecualian tenggat-tenggat waktu yang digariskan dalam *mengakui a)* dan *b)* di atas, paling lambat empatbelas hari kalender sebelum pembukaan konferensi-konferensi dan sidang-sidang Perhimpunan, termasuk konferensi-konferensi berkuasa penuh, untuk menjamin penerjemahan yang tepat waktu dan pertimbangan yang mendalam oleh para delegasi,

memerintahkan Sekretaris Jenderal berkonsultasi dengan Direktur-direktur dari tiga Biro

- 1 untuk menyiapkan laporan pada Dewan secara berkelanjutan mengenai permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas, termasuk pelaksanaan keuangan yang relevan;
- 2 untuk menjelajahi, bersama dengan kelompok-kelompok penasihat Sektor, sebagaimana sesuai, isu penyelarasan tenggat-tenggat waktu untuk penyerahan pengajuan-pengajuan sebagaimana juga prosedur-prosedur yang mengatur registrasi untuk pertemuan-pertemuan Perhimpunan.

RESOLUSI 166 (Guadalajara, 2010)
**Jumlah wakil ketua dari kelompok penasihat Sektor, kelompok kerja
dan kelompok lainnya**

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010)

menimbang

- a) bahwa Pasal 20 Konvensi ITU yang berhubungan dengan menjalankan bisnis kelompok-kelompok studi menetapkan:

242 1 Sidang komunikasi radio, sidang standardisasi
PP-98 telekomunikasi dunia dan konferensi pengembangan telekomunikasi dunia wajib menunjuk ketua dan satu atau lebih wakil ketua untuk setiap kelompok studi. Dalam menunjuk para ketua dan para wakil ketua, pertimbangan khusus wajib diberikan pada persyaratan-persyaratan kemampuan dan penyebaran geografis seimbang, dan pada kebutuhan untuk memajukan keikutsertaan yang lebih efisien dari negara-negara berkembang;

243 2 apabila beban kerja dari kelompok studi manapun
PP-98 membutuhkan, majelis atau konferensi wajib menunjuk wakil-wakil ketua tambahan sebagaimana dibutuhkan;

- b) bahwa Sidang Komunikasi Radio (RA), Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA) dan Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC) telah menerima resolusi-resolusi yang berhubungan dengan penunjukan dan masa jabatan maksimal untuk ketua dan wakil ketua dari kelompok-kelompok penasihat dan kelompok-kelompok studi masing-masing,

mengakui

bahwa saat ini tidak ada kriteria yang telah ditentukan dalam tiga Sektor ITU manapun dengan memperhatikan jumlah wakil ketua kelompok-kelompok penasihat Sektor, kelompok-kelompok studi dan kelompok-kelompok lainnya¹ (termasuk Pertemuan Persiapan Konferensi (CPM) dan Komite Khusus untuk Permasalahan Regulasi dan Prosedural (SC-RPM) dalam Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R)),

mengakui lebih lanjut

- a) bahwa kelompok-kelompok penasihat Sektor, kelompok-kelompok studi dan kelompok-kelompok lainnya harus menunjuk hanya jumlah wakil ketua yang dirasa perlu untuk pengelolaan serta fungsi yang efisien dan efektif dari kelompok yang dipertanyakan;

¹ Kriteria yang dimuat dalam resolusi ini tidak berlaku terhadap penunjukan ketua atau wakil-ketua kelompok-kelompok fokus.

- b) bahwa langkah-langkah seharusnya diambil untuk memberikan suatu kelangsungan antara ketua dan wakil ketua,

dengan memperhatikan

- a) diskusi yang diselenggarakan pada pertemuan pleno terakhir dari WTDC-10 dengan memperhatikan keperluan untuk mengundang Konferensi Yang Berkuasa Penuh untuk memberikan pedoman mengenai kriteria penyelarasan yang diperlukan untuk ditetapkan dengan memperhatikan jumlah wakil ketua dari kelompok-kelompok penasihat Sektor, kelompok-kelompok studi dan kelompok-kelompok lainnya;
- b) bahwa, saat ini, seorang individu dari satu Negara Anggota dapat memegang lebih dari satu posisi dalam suatu Sektor atau dalam tiga Sektor, yang dapat menjadi tidak konsisten dengan prinsip distribusi geografis yang setara, dan dengan kebutuhan untuk memajukan keikutsertaan yang lebih efisien dari negara-negara berkembang,

memutuskan untuk mengundang Sidang Komunikasi Radio, Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia dan Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia, dengan konsultasi Direktur-direktur dari tiga Biro

untuk meninjau situasi terkini dengan tujuan untuk menetapkan kriteria yang diperlukan untuk penunjukan jumlah-jumlah optimal dari wakil ketua untuk kelompok-kelompok penasihat Sektor, kelompok-kelompok studi dan kelompok-kelompok lainnya (termasuk, sejauh yang dapat dilaksanakan, CPM dan SC-RPM dalam ITU-R), sebagaimana hal tersebut dapat terjadi, dengan memperhatikan pedoman berikut:

- 1) Jumlah wakil ketua seharusnya dibatasi pada jumlah minimum dari profesional-profesional berpengalaman yang diperlukan, sesuai resolusi-resolusi Sektor masing-masing yang berhubungan dengan penunjukan wakil ketua kelompok-kelompok penasihat Sektor, kelompok-kelompok studi dan kelompok-kelompok lainnya
- 2) Penyebaran geografis yang seimbang di antara wilayah-wilayah ITU dan kebutuhan-kebutuhan untuk memajukan keikutsertaan yang lebih efektif dari negara-negara berkembang seharusnya diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap wilayah diwakili oleh setidaknya satu atau dua orang yang kompeten dan berpengalaman dalam kelompok-kelompok penasihat Sektor, kelompok-kelompok studi dan kelompok-kelompok lainnya
- 3) Jumlah total dari ketua dan wakil ketua yang diajukan oleh administrasi manapun seharusnya cukup beralasan, sehingga mematuhi prinsip penyebaran pos-pos yang seimbang di antara Negara-negara Anggota yang berkepentingan
- 4) Perwakilan regional dalam kelompok-kelompok penasihat, kelompok-kelompok studi dan kelompok-kelompok lainnya dari seluruh tiga Sektor seharusnya dipertimbangkan, sehingga tidak ada seorangpun yang

dapat memegang lebih dari satu posisi wakil ketua dalam kelompok-kelompok ini di satu Sektor manapun, dan hanya dalam kasus-kasus khusus dapat memegang posisi serupa di lebih dari satu Sektor²

- 5) Setiap wilayah ITU yang menghadiri RA, WTSA dan WTDC didorong, bila menugaskan posisi-posisi kepada profesional-profesional yang berpengalaman, untuk mematuhi sepenuhnya prinsip penyebaran geografis yang seimbang di antara wilayah-wilayah ITU, dan kebutuhan untuk memajukan keikutsertaan yang lebih efisien dari negara-negara berkembang
- 6) Pedoman yang disebutkan di atas dapat, sejauh dapat dilaksanakan, diterapkan pada CPM dan SC-RPM di ITU-R,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur dari tiga Biro

untuk membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk pelaksanaan yang layak dari resolusi ini,

memerintahkan Direktur-direktur dari tiga Biro

- 1 untuk memasukkan hal yang menjadi subyek tersebut dalam agenda pertemuan berikut dari kelompok penasihat masing-masing, dengan tujuan untuk menetapkan dengan layak kriteria penyelarasan yang diperlukan untuk seleksi/penunjukan posisi-posisi yang disebutkan di atas;
 - 2 untuk membuat pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk RA, WTSA dan WTDC untuk meninjau kembali kriteria yang dirujuk di atas dalam resolusi-resolusi masing-masing dan/atau rekomendasi-rekomendasi, termasuk dengan menyiapkan dan memberikan informasi yang diperlukan mengenai posisi(-posisi) yang telah dipegang oleh individu perorangan dari setiap negara dalam ketiga Sektor ITU di bawah
- memerintahkan Direktur-direktur dari tiga Biro 1*

² Kriteria yang disebutkan dalam paragraf ini seharusnya tidak boleh mencegah seorang wakil ketua dari suatu kelompok penasihat atau seorang wakil ketua dari suatu kelompok studi untuk menjabat posisi-posisi ketua atau wakil ketua dari suatu kelompok kerja atau sebagai pelapor atau pelapor asosiat untuk kelompok manapun di bawah mandat kelompok Sektor.

RESOLUSI 167 (Guadalajara, 2010)
Memperkuat kemampuan ITU untuk pertemuan elektronik dan cara
untuk memajukan kerja Perhimpunan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) perubahan teknologi yang cepat di bidang telekomunikasi dan penyesuaian kebijakan, regulasi dan prasarana terkait yang diperlukan pada tingkat-tingkat nasional, regional dan global;
- b) konsekuensi kebutuhan untuk keterlibatan seluas mungkin keanggotaan ITU dari seluruh dunia dalam menyelesaikan hal-hal ini dalam kerja Perhimpunan;
- c) bahwa pengembangan-pengembangan dalam teknologi-teknologi dan fasilitas-fasilitas untuk mengadakan pertemuan-pertemuan secara elektronik dan pengembangan lebih lanjut dari metode-metode kerja secara elektronik (EWM) akan memungkinkan kolaborasi yang lebih terbuka, cepat dan mudah antara para peserta dalam kegiatan-kegiatan ITU, yang mungkin tanpa kertas,

mengingat

- a) Resolusi 66 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai dokumen-dokumen dan publikasi-publikasi Perhimpunan, mengenai ketersediaan dokumen-dokumen secara elektronik;
- b) Resolusi 32 (Rev. Johanensburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA), mengenai penguatan metode-metode kerja secara elektronik dalam kerja Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) dan pelaksanaan kemampuan-kemampuan EWM serta pengaturan-pengaturan yang terkait dalam kerja ITU-T;
- c) Resolusi 73 (Johannesburg, 2008) WTSA, mengenai teknologi-teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perubahan iklim serta, khususnya, *mengakui g)* daripadanya mengenai metode-metode kerja yang efisien energi;

mengakui

- a) kesulitan-kesulitan anggaran yang dimiliki delegasi-delegasi dari banyak negara dan, khususnya negara-negara berkembang, dalam perjalanan untuk ikut serta dalam pertemuan tatap muka ITU;
- b) keikutsertaan secara elektronik akan memberikan manfaat-manfaat yang signifikan untuk keanggotaan Perhimpunan, dengan mengurangi biaya-biaya perjalanan, dan akan memfasilitasi keikutsertaan yang lebih luas baik dalam kerja Perhimpunan maupun dalam pertemuan-pertemuan yang memerlukan kehadiran;

- c) bahwa sejumlah pertemuan ITU telah tersedia sebagai *webcast audio* dan *video* serta bahwa penggunaan konferensi video, panggilan konferensi audio, tayangan langsung dan perangkat kolaborasi berbasis situs untuk keikutsertaan secara elektronik dalam jenis-jenis pertemuan tertentu telah dimajukan dalam pertemuan-pertemuan Sektor-sektor dan Sekretariat Jenderal.

mengakui lebih lanjut

kontribusi yang penting dari penggunaan TIK dan mengurangi perjalanan untuk menciptakan netralitas,

menyadari

bahwa sebagian kegiatan dan prosedur yang dikaitkan dengan pertemuan-pertemuan ITU tertentu masih memerlukan keikutsertaan tatap muka langsung oleh keanggotaan Perhimpunan,

memperhatikan

- a) bahwa, sebagai alternatif terhadap pertemuan-pertemuan tatap muka, ada manfaat-manfaat dalam menggunakan pertemuan-pertemuan secara elektronik untuk memajukan diskusi-diskusi;
- b) bahwa keberadaan pertemuan-pertemuan secara elektronik, dengan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang didokumentasikan dengan baik, akan membantu ITU dalam memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan yang potensial, baik para tenaga ahli yang merupakan anggota maupun tidak, khususnya dari negara-negara berkembang, yang tidak dapat turut serta dalam pertemuan-pertemuan tatap muka;
- c) bahwa pertemuan-pertemuan secara elektronik dapat menyebabkan peningkatan efisiensi kegiatan-kegiatan ITU dan pengurangan biaya-biaya untuk semua pihak, sebagai contoh dengan mengurangi keperluan perjalanan dan mengurangi kebutuhan keperluan untuk salinan cetak dokumen-dokumen;
- d) bahwa terdapat kebutuhan atas suatu pendekatan yang terkoordinasi dan selaras terhadap teknologi yang dipergunakan,

memperhatikan lebih lanjut

- a) bahwa metode-metode kerja secara elektronik telah membuat kontribusi-kontribusi penting bagi kerja kelompok-kelompok Sektor, seperti kelompok-kelompok pelapor, dan kepada kelompok-kelompok kerja Dewan, dan kerja tersebut, seperti pengembangan naskah-naskah, telah dikembangkan dalam berbagai bagian dari Perhimpunan melalui komunikasi-komunikasi secara elektronik;

- b) bahwa cara-cara keikutsertaan yang berbeda-beda sesuai untuk jenis-jenis pertemuan yang berbeda-beda;
- c) kebutuhan untuk menetapkan peran tautan canggih (*hyperlink*), khususnya dokumen-dokumen yang diserahkan kepada badan-badan eksekutif atau deliberatif untuk persetujuan, dan keputusan yang terkait dari sesi Dewan tahun 2009¹;
- d) pentingnya menyediakan naskah-naskah lengkap pada saat penyetujuan,

menekankan

- a) bahwa ada kebutuhan untuk prosedur-prosedur untuk memastikan keikutsertaan yang adil dan seimbang dari semua;
- b) bahwa pertemuan-pertemuan secara elektronik dapat memberikan kontribusi untuk menjembatani kesenjangan digital;
- c) bahwa pelaksanaan pertemuan-pertemuan secara elektronik bermanfaat bagi peran ITU dalam memimpin koordinasi TIK-TIK dan perubahan iklim, serta aksesibilitas,

memutuskan

- a) bahwa ITU harus mengembangkan lebih lanjut fasilitas-fasilitas dan kemampuan-kemampuannya untuk keikutsertaan jarak jauh dengan cara-cara elektronik dalam pertemuan-pertemuan yang sesuai dari Perhimpunan, termasuk kelompok-kelompok kerja yang dibentuk oleh Dewan;
- b) bahwa dokumen-dokumen akhir yang diserahkan untuk persetujuan tidak boleh memuat tautan canggih (*hyperlink*) selain dari, dimana sesuai, tautan canggih (*hyperlink*) internal untuk dokumen atau bagian dari dokumen tetap dan telah disetujui oleh badan kompeten Perhimpunan, dan bahwa pencantuman suatu tautan canggih (*hyperlink*) internal dalam suatu dokumen yang diserahkan untuk persetujuan tidak boleh menghasilkan persetujuan implisit dari konten target tautan canggih (*hyperlink*), sebaliknya, persetujuan apapun harus eksplisit (prosedur ini tidak dapat diterapkan kepada kelompok-kelompok studi);
- c) bahwa ITU seharusnya terus mengembangkan metode-metode kerja secara elektronik mengenai pengembangan, penyebaran dan persetujuan dokumen-dokumen, serta peningkatan pertemuan-pertemuan tanpa kertas,

¹ Dokumen C09/90, butir 12.

memerintahkan Sekretaris Jenderal, dalam konsultasi dan kolaborasi dengan Direktur-direktur Biro

- 1 untuk mengembangkan rencana aksi, untuk dipertimbangkan oleh Dewan pada sesinya tahun 2011 untuk keikutsertaan elektronik dalam kelompok-kelompok kerjanya dan pertemuan-pertemuan yang terkait yang melaporkan kepada Dewan, termasuk penggunaan peralatan seperti konferensi video;
- 2 untuk membangun terhadap percobaan-percobaan untuk pertemuan-pertemuan elektronik, dalam kolaborasi dengan Direktur-direktur Biro, sehingga pelaksanaan berikutnya adalah netral secara teknologi, sampai sejauh mungkin, dan efektif biaya, dalam rangka memperbolehkan keikutsertaan luas untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keamanan yang diperlukan;
- 3 untuk melibatkan kelompok-kelompok penasehat dalam evaluasi penggunaan pertemuan-pertemuan secara elektronik dan mengembangkan lebih lanjut prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang terkait dengan pertemuan-pertemuan secara elektronik, termasuk aspek-aspek hukum;
- 4 untuk melaporkan kepada Dewan mengenai pengembangan-pengembangan yang sedang berjalan yang dilaksanakan dengan memperhatikan pertemuan-pertemuan secara elektronik, dalam rangka menilai kemajuan dalam penggunaannya di dalam ITU;
- 5 untuk melapor kepada Dewan mengenai kemungkinan memperluas penggunaan bahasa-bahasa dalam pertemuan-pertemuan secara elektronik,

memerintahkan Direktur-direktur Biro

untuk bertindak, berkonsultasi dengan kelompok-kelompok penasihat Sektor, dalam rangka menyediakan fasilitas-fasilitas keikutsertaan atau pengamatan secara elektronik yang sesuai dalam pertemuan-pertemuan Sektor untuk para delegasi yang tidak dapat menghadiri pertemuan-pertemuan tatap muka.

RESOLUSI 168 (Guadalajara, 2010)
Penerjemahan rekomendasi ITU

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) maksud-maksud Perhimpunan sebagaimana diabadikan dalam Pasal 1 Konstitusi ITU,
- b) kebutuhan untuk memperluas akses nasional terhadap rekomendasi-rekomendasi ITU yang ditawarkan gratis secara online kepada publik umum;
- c) kebutuhan untuk mempermudah akses terhadap rekomendasi-rekomendasi ITU dalam bahasa-bahasa nasional lain selain dari bahasa-bahasa resmi ITU;
- d) resolusi 20 (Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai akses non-diskriminasi terhadap fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern, yang mencatat bahwa:
 - fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan telekomunikasi/TIK yang modern dibentuk, terutama, pada landasan rekomendasi-rekomendasi Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) dan Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T);
 - rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan ITU-T adalah hasil dari usaha-usaha bersama semua yang mengambil bagian dalam proses standardisasi di dalam ITU, dan diterima berdasarkan kesepakatan dari anggota-anggota Perhimpunan;
 - bahwa pembatasan-pembatasan terhadap akses untuk fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan telekomunikasi/TIK pada pengembangan telekomunikasi/TIK nasional tergantung dan dibentuk berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan ITU-T menciptakan suatu hambatan terhadap pengembangan yang selaras dan kesesuaian telekomunikasi/TIK di seluruh dunia;
- e) Resolusi 47 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC, mengenai peningkatan pengetahuan dan penerapan yang efektif dari rekomendasi-rekomendasi ITU di negara-negara berkembang, yang memutuskan untuk mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan efektif dari rekomendasi-rekomendasi ITU-R dan ITU-T di negara-negara berkembang,

memperhatikan

- a) ketentuan-ketentuan No. 495 Konevensi ITU, yang menyatakan bahwa setiap dokumentasi manapun sebagaimana dirujuk dalam ketentuan-ketentuan Pasal 29 Konsitusi yang relevan dapat dipublikasikan dalam bahasa-bahasa selain dari yang disebutkan di dalamnya, dengan syarat Negara-negara Anggota yang meminta publikasi tersebut wajib membayar keseluruhan biaya penerjemahan dan publikasi yang dikeluarkan;
- b) bahwa versi-versi bahasa resmi dari dokumen-dokumen dan naskah-naskah Perhimpunan wajib dipersiapkan oleh ITU sesuai dengan Pasal 29 Konstitusi,

mengakui

- a) bahwa terdapat kecenderungan umum terhadap akses online bebas terhadap dokumen-dokumen dan publikasi-publikasi yang terkait dengan TIK dalam bahasa-bahasa resmi;
- b) kebutuhan strategis untuk meningkatkan visibilitas dan ketersediaan hasil-hasil ITU,

memutuskan

- 1 bahwa suatu administrasi dapat menerjemahkan rekomendasi-rekomendasi ke dalam bahasa-bahasa, selain daripada keenam bahasa resmi ITU, untuk penggunaan resmi administrasi;
- 2 bahwa naskah dari rekomendasi dalam bahasa resmi ITU manapun akan berlaku bila terjadi ketidaksesuaian antara versi yang diterjemahkan dan versi resmi;
- 3 bahwa setiap pengeluaran untuk penerjemahan dan publikasi rekomendasi-rekomendasi wajib tidak dibebankan pada ITU;
- 4 bahwa logo ITU wajib tidak ditampilkan pada halaman-halaman yang diterjemahkan;
- 5 bahwa setiap publikasi wajib memuat, pada tempat yang layak, pernyataan dalam lampiran dari resolusi ini, judul dan rangkuman rekomendasi tersebut dan suatu tautan dimana naskah resmi rekomendasi dapat diunduh dari situs ITU, dalam bahasa nasional, sebagai tambahan, publikasi tersebut wajib memuat halaman depan dari naskah resmi rekomendasi ITU;
- 6 bahwa ITU wajib menerima dua salinan secara gratis dari setiap publikasi serupa, sesegera mungkin setelah publikasi, untuk keperluan arsip;
- 7 bahwa penerjemahan untuk penggunaan resmi administrasi tidak akan dikenakan biaya oleh ITU;
- 8 bahwa penerjemahan yang dimaksudkan untuk dijual – baik berdasarkan penggantian biaya atau untuk mendapatkan keuntungan –

wajib memerlukan kesepakatan sebelumnya dari ITU, dan publikasi-publikasi yang diterjemahkan yang dijual untuk mendapatkan keuntungan wajib dikenakan pembayaran royalti kepada ITU;

- 9 bahwa, dalam hal sebagaimana dirujuk dalam *memutuskan* 8 di atas, penerbit yang bersangkutan wajib mengirimkan kepada ITU suatu pernyataan mengenai jumlah salinan yang terjual,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk melapor kepada Dewan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan resolusi ini,

mengundang Dewan

untuk menimbang laporan dari Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan resolusi ini.

LAMPIRAN

Rekomendasi ini telah direproduksi dengan seizin Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU). Tanggung jawab sendiri untuk penerjemahan naskah ini ke dalam {*} ditanggung oleh {**}.

Rekomendasi ini, dipublikasikan oleh ITU dalam versi -versi resminya (Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Spanyol, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia) dapat diperoleh di:

Perhimpunan Telekomunikasi Internasional
Sekretariat Jenderal – Layanan Penjualan dan Pemasaran
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Swiss
Telepon: +41 22 730 6141
e-mail: sales@itu.int

* Menyatakan bahasa nasional yang terkait.

** Menyatakan nama penerbit.

RESOLUSI 169 (Guadalajara, 2010)
Penerimaan akademisi, universitas dan lembaga penelitiannya yang terkait untuk ikut serta dalam pekerjaan ketiga Sektor Perhimpunan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

Resolusi 71 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia,

menimbang

- a) bahwa keikutsertaan akademisi, universitas-universitas dan lembaga-lembaga penelitiannya dalam pekerjaan ketiga Sektor Perhimpunan akan menguntungkan kerja Sektor-sektor, terutama sebagaimana badan-badan tersebut menyelesaikan pembangunan-pembangunan mengenai teknologi modern dalam bidang-bidang kompetensi ITU, seraya memiliki suatu pandangan masa depan yang mengizinkan teknologi-teknologi aplikasi-aplikasi modern untuk dibahas pada waktunya;
- b) bahwa kontribusi ilmiah dari badan-badan tersebut akan jauh melebihi tingkat kontribusi finansial yang diusulkan untuk mendorong keikutsertaannya,

memutuskan

- 1 untuk menerima akademisi, universitas-universitas dan lembaga-lembaga penelitian terkait yang menyangkut pengembangan telekomunikasi/teknologi informasi dan teknologi (TIK) untuk ikut serta dalam kerja ketiga Sektor, sesuai ketentuan-ketentuan resolusi ini, tanpa kebutuhan untuk perubahan apapun terhadap pasal 2 dan 3 Konstitusi ITU, untuk periode percobaan hingga konferensi yang berkuasa penuh berikutnya;
- 2 untuk menetapkan tingkat kontribusi finansial bagi keikutsertaan serupa pada seperenambelas dari nilai unit kontribusi untuk Anggota-anggota Sektor dalam hal penyelenggaraan-penyelenggaraan dari negara-negara berkembang, dan sepertigapuluh dua dari nilai unit kontribusi untuk Anggota-anggota Sektor dalam hal organisasi-organisasi dari negara-negara berkembang¹ untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan;
- 3 bahwa penerimaan aplikasi-aplikasi untuk keikutsertaan wajib dengan syarat memperoleh dukungan Negara-negara Anggota Perhimpunan dimana badan-badan tersebut berasal, dengan ketentuan bahwa hal ini wajib tidak dimaksudkan untuk mengganti badan-badan tersebut yang

¹ Hal ini termasuk Negara terbelakang, Negara berkembang kepulauan kecil, negara berkembang daratan dan negara dengan ekonomi dalam masa transisi

sekarang terdaftar dalam Perhimpunan sebagai Anggota-anggota Sektor atau Asosiat-asosiat,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk menambah kondisi tambahan apapun atau prosedur-prosedur rinci pada resolusi ini, apabila dianggap sesuai;
- 2 untuk menyampaikan laporan mengenai keikutsertaan ini kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya, berdasarkan evaluasi daripadanya oleh kelompok-kelompok penasihat dari ketiga Sektor, untuk suatu keputusan akhir yang akan dilakukan mengenai keikutsertaan tersebut;
- 3 bahwa akademisi tersebut seharusnya tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan, termasuk penerimaan resolusi-resolusi atau rekomendasi-rekomendasi, terlepas dari prosedur penyetujuannya;
- 4 bahwa permohonan dan proses penyetujuan untuk akademisi, selain dari yang disebutkan dalam *memutuskan* 1, 2 dan 3 di atas, seharusnya berlaku sama untuk Asosiat-asosiat;
- 5 untuk melaksanakan resolusi ini dan menetapkan biaya tahunan berdasarkan jumlah seperenambelas yang di usulkan dari nilai unit kontribusi untuk Negara-negara Anggota dalam hal organisasi-organisasi dari negara-negara berkembang, dan sepertigapuluh dua dari nilai unit kontribusi untuk Anggota-anggota Sektor dalam hal organisasi-organisasi dari negara-negara berkembang;
- 6 untuk memperhitungkan kontribusi-kontribusi keuangan dan ketentuan-ketentuan untuk penerimaan-penerimaan yang sedang berjalan, dan melaporkan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya,

lebih lanjut memerintahkan Sidang Komunikasi Radio, Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia dan Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia

untuk memberikan mandat kepada masing-masing kelompok penasihat Sektornya untuk mempelajari, bilamana terdapat suatu kebutuhan untuk langkah-langkah tambahan apapun dan/atau pengaturan-pengaturan untuk memfasilitasi keikutsertaan serupa yang tidak tercakup oleh Resolusi 1 atau rekomendasi-rekomendasi yang relevan dengan sidang-sidang dan konferensi-konferensi yang disebutkan di atas, dan menerima modalitas-modalitas tersebut apabila dianggap perlu atau dipersyaratkan, dan melaporkan hasil-hasilnya melalui Direktur-direktur kepada Dewan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur ketiga Biro

untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan sesuai dalam rangka melaksanakan resolusi ini.

RESOLUSI 170 (Guadalajara, 2010)
Penerimaan Anggota Sektor dari negara berkembang¹ untuk ikut serta
dalam pekerjaan Sektor Komunikasi Radio ITU dan Sektor
Standardisasi Telekomunikasi ITU

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

Resolusi 74 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi dunia,

menimbang

- a) bahwa peran serta dalam kerja Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) dan Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) dari Anggota-anggota Sektor dari kategori negara-negara berkembang dengan suatu pendapatan per kapita tahunan kurang dari USD 2000 menurut klasifikasi Program Pembangunan Perhimpunan Bangsa-bangsa akan memberikan manfaat bagi kedua Sektor serta negara-negara yang diwakilinya, dengan membantu untuk menutup kesenjangan standardisasi yang masih ada antara negara-negara maju dan berkembang di dalam kedua Sektor, khususnya yang berhubungan dengan kategori ini dari negara-negara berkembang;
- b) bahwa mengizinkan mereka untuk ikut serta dalam kerja salah satu dari kedua Sektor mengenai syarat-syarat keuangan yang menguntungkan berkenaan dengan masing-masing Sektor akan mendorong mereka untuk bergabung dalam kedua Sektor ini, sesuai dengan kebutuhan mereka;
- c) bahwa keikutsertaan ini tidak mensyaratkan perubahan apapun pada Pasal 2 dan 3 Konstitusi ITU untuk masa percobaan hingga akhir tahun 2014, pada saat konferensi yang berkuasa penuh berikutnya akan diselenggarakan,

memutuskan

- 1 untuk mengizinkan Negara-negara Sektor dari kategori negara-negara berkembang sebagaimana disebut di atas untuk ikut serta dalam pekerjaan ITU-R dan ITU-T sesuai dengan ketentuan-ketentuan resolusi ini;
- 2 untuk menetapkan tingkat kontribusi keuangan untuk keikutsertaan tersebut sebesar seperenambelas dari nilai unit kontribusi bagi Anggota-

¹ Anggota-anggota Sektor demikian wajib tidak menjadi anak perusahaan dari korporasi multinasional dimana kantor-kantor pusat eksekutifnya berkedudukan di negara maju, dan wajib dibatasi pada Anggota-anggota Sektor ydari negara-negara berkembang yang diklasifikasi oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai negara-negara berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita tidak melebihi USD 2 000 dan yang belum bergabung salah satu atau kedua Sektor.

anggota Sektor untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan;

- 3 bahwa penerimaan permohonan-permohonan keikutsertaan wajib dengan syarat mendapatkan dukungan dari Negara Anggota dimana anggota Sektor berasal, pada pemenuhan kriteria pada catatan kaki resolusi ini oleh masing-masing pemohon keanggotaan, dan juga untuk pemohon yang saat ini tidak tercantum pada Perhimpunan sebagai Anggota Sektor yang memberikan kontribusi minimum setengah dari nilai unit kontribusi untuk Anggota-anggota Sektor atau sebagai Asosiat dalam Sektor tersebut,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk memberi kondisi-kondisi tambahan atau prosedur-prosedur rinci apapun yang mungkin diminta;
- 2 untuk menyampaikan laporan mengenai keikutsertaan ini pada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya berdasarkan suatu evaluasi daripadanya oleh masing-masing kelompok penasihat Sektor, sehingga memungkinkan Konferensi Yang Berkuasa Penuh untuk membuat keputusan akhir mengenai keikutsertaan tersebut sejalan dengan laporan dan usulan-usulan di dalamnya.

RESOLUSI 171 (Guadalajara, 2010)
Persiapan untuk konferensi dunia mengenai telekomunikasi internasional tahun 2012

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 146 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai peninjauan kembali Regulasi-regulasi Telekomunikasi Internasional (ITRs);
- b) Keputusan 9 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai Forum Kebijakan Telekomunikasi Dunia keempat (WTPF-09);
- c) laporan akhir dari Kelompok Ahli untuk meninjau kembali ITRs, yang telah dipaparkan kepada Dewan ITU pada sesinya tahun 2009,

menimbang

- a) bahwa Pasal 25 Konstitusi Itu menyatakan, antara lain, bahwa konferensi dunia mengenai telekomunikasi internasional (WCIT) dapat secara sebagian, atau dalam keadaan khusus, secara lengkap merevisi ITRs, dan dapat menangani setiap permasalahan tentang ciri sedunia sesuai kompetensinya dan terkait dengan agendanya;
- b) bahwa cakupan ITRs ditetapkan dalam Pasal 1 daripadanya: “Maksud dan cakupan peraturan-peraturan”;
- c) bahwa Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006) mendesak ketiga Sektor, setelah WTPF, masing-masing sesuai dengan bidang kompetensinya, untuk melakukan kajian-kajian yang lebih jauh diperlukan yang ditujukan pada menyiapkan WCIT, dan untuk ikut serta dalam serangkaian pertemuan regional, dalam rangka mengidentifikasi topik-topik yang akan dibahas dalam WCIT, sesuai dengan sumber-sumber anggaran yang ada;
- d) bahwa, setelah tanggal saat versi ITRs yang ada disetujui, konferensi-konferensi yang berkuasa penuh, sidang-sidang standardisasi telekomunikasi dunia dan kelompok-kelompok studi dari Sektor Standardisasi Telekomunikasi (ITU-T) telah menyetujui serangkaian resolusi yang ketentuan-ketentuannya telah membantu ITRs untuk tetap berlaku dan seharusnya diperhatikan dalam proses peninjauan kembalinya;
- e) bahwa Konsensus Lisabon yang dicapai pada WTPF-09, khususnya dalam Opini 6nya (Lisabon, 2009) mengenai ITRs, yang mengidentifikasi beberapa isu bahwa keanggotaan diharapkan dapat dipertimbangkan, antara lain, dalam konteks persiapan-persiapan apapun untuk WCIT-12;
- f) bahwa, sesuai dengan Resolusi 1312, sesi Dewan tahun 2009 membentuk suatu Kelompok Kerja Dewan untuk menyiapkan konferensi

dunia mengenai telekomunikasi internasional tahun 2012 (CWG-WCIT-12), dengan kerangka acuan yang disediakan untuk pembahasan baik naskah ITRs yang ada dan pengenalan ketentuan-ketentuan baru yang dimungkinkan;

- g)* bahwa, mengikuti Resolusi 146 (Antalya, 2006), sesi Dewan tahun 2010 telah menerima Resolusi 1317 yang menetapkan tanggal-tanggal dan agenda untuk konferensi dunia mengenai telekomunikasi-telekomunikasi internasional tahun 2012 (WCIT-12);
- h)* laporan untuk konferensi ini oleh CWG-WCIT-12, yang menyatakan kepedulian terhadap Negara-negara Anggota ITU mengenai situasi dengan memperhatikan peraturan dari telekomunikasi internasional di sejumlah wilayah;
- i)* bahwa lingkungan teknologi telekomunikasi/informasi dan komunikasi (TIK) internasional telah berubah secara signifikan, dari sudut pandang teknis, peraturan dan kebijakan, dan bahwa hal tersebut terus berubah secara cepat;
- j)* bahwa kemajuan-kemajuan dalam teknologi telah menghasilkan suatu peningkatan prasarana yang memungkinkan penggunaan IP serta layanan-layanan dan aplikasi-aplikasi yang berbasis IP yang memberikan kesempatan-kesempatan maupun tantangan-tantangan untuk Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor;
- k)* bahwa, sebagaimana teknologi berubah, Negara-negara Anggota yang sedang mengevaluasi pendekatan-pendekatan kebijakan dan regulasi mereka untuk memastikan suatu lingkungan yang memungkinkan yang mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung, transparan, pro-persaingan dan dapat diprediksi, sebagaimana juga kerangka-kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang mengatur insentif-insentif yang sesuai untuk investasi di, dan pengembangan dari, masyarakat informasi;
- l)* bahwa ITU harus memainkan suatu peran penting dalam menyelesaikan isu-isu baru dan yang sedang timbul, termasuk isu-isu yang timbul dari lingkungan telekomunikasi/TIK internasional yang berubah secara global;
- m)* bahwa terdapat suatu kebutuhan untuk mengembangkan konsensus luas mengenai apa yang dapat dicakup dengan layak dalam kerangka perjanjian ITU berkenaan dengan kegiatan-kegiatannya di bidang-bidang peraturan, pengembangan dan standardisasi;
- n)* bahwa penting untuk memastikan bahwa ITRs ditinjau kembali dan, apabila dianggap sesuai, direvisi dan dimutakhirkan pada waktu yang tepat dalam rangka untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi diantara Negara-negara Anggota dan untuk mencerminkan secara akurat hubungan-hubungan antara Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan badan-badan penyelenggara yang diakui;
- o)* bahwa semua wilayah akan mendapatkan manfaat dari peninjauan kembali WCIT-12's dan CWG-WCIT 12's mengenai ITRs dan rekomendasi-rekomendasi, resolusi-resolusi dan pendapat-pendapat

yang terkait dari Konferensi Telegraf dan Telepon Administrasi Dunia (WATTC-88),

memutuskan

- 1 bahwa CWG-WCIT-12 melanjutkan persiapan WCIT-12;
- 2 bahwa agenda dan tanggal-tanggal untuk konferensi ditetapkan dalam Resolusi Dewan 1317 diterima untuk pekerjaan WCIT-12;
- 3 bahwa CWG-WCIT-12, sesuai dengan Resolusi 1312 Dewan, wajib membentuk proses persiapan untuk WCIT-12, dengan mempertimbangkan hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan persiapan regional, sebagaimana sesuai,

memutuskan lebih lanjut

sebagai tambahan terhadap pekerjaan yang disebutkan dalam, dan tanpa mengurangi arti, Resolusi Dewan 1312:

- 1 untuk menimbang dan mempelajari semua kerja dan hasil kerja yang relevan yang telah dikembangkan dalam ITU mengenai ITRs;
- 2 untuk membicarakan dan memeriksa semua pengajuan untuk direvisi sesuai dengan ITRs, termasuk pengajuan-pengajuan untuk tambahan isu-isu baru dan timbul, untuk memutakhirkan dan penghapusan ketentuan-ketentuan dan/atau untuk dihentikan sebagaimana sesuai;
- 3 untuk membahas dan memeriksa semua usulan untuk direvisi sesuai dengan ITRs, dengan syarat bahwa usulan-usulan tersebut:
 - i) konsisten dengan maksud-maksud Perhimpunan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Konstitusi;
 - ii) sejalan dengan cakupan dan maksud ITRs sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1nya, dengan pemahaman bahwa CWG-WCIT-12 dapat mempertimbangkan usulan-usulan untuk direvisi sesuai dengan Pasal 1 ITRs;
 - iii) mencerminkan, antara lain, prinsip-prinsip strategis dan kebijakan, dengan maksud untuk memastikan fleksibilitas dalam rangka untuk mengakomodasi kemajuan-kemajuan teknologi;
 - iv) memiliki relevansi untuk dimasukkan dalam suatu perjanjian internasional;
- 4 untuk menyiapkan suatu laporan akhir, berdasarkan pada, dan mengkonsolidasikan, masukan-masukan dan laporan-laporan dari semua kegiatan-kegiatan persiapan, termasuk pertemuan-pertemuan persiapan regional, yang memaparkan semua pilihan dan pandangan untuk WCIT-12, empat bulan sebelum WCIT agar Negara-negara Anggota, dan terutama negara-negara berkembang, menyiapkan WCIT-12,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk mencatat pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam resolusi ini dalam pekerjaan untuk mempersiapkan WCIT-12 untuk meninjau kembali ITRs;
- 2 untuk mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang sesuai dengan batasan-batasan keuangan yang ditetapkan oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh;
- 3 untuk melapor kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai kemajuan yang telah dilakukan dalam melaksanakan resolusi ini dan untuk menganalisa keperluan-keperluan untuk peninjauan kembali secara berkala atas ITRs,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk mendukung setiap pertemuan regional, melalui koordinasi dengan organisasi-organisasi telekomunikasi regional untuk masing-masing wilayah, yang dapat diadakan sebelum penyelenggaraan WCIT-12;
- 2 untuk menyebarkan kepada Negara-negara Anggota laporan akhir dari CWG-WCIT-12, sebagaimana diuraikan dalam Aturan Umum konferensi, sidang dan pertemuan Perhimpunan, empat bulan sebelum WCIT-12;
- 3 menyerahkan laporan terakhir dari CWG-WCIT-12 kepada WCIT-12, sebagaimana diuraikan dalam Resolusi Dewan 1312,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro

- 1 untuk menyediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi ini;
- 2 untuk melakukan pengaturan-pengaturan persiapan dan administratif yang diperlukan untuk WCIT sesuai dengan Resolusi Dewan 1317 dan sesuai dengan peraturan-peraturan dan tata cara ITU yang berlaku;
- 3 untuk mendukung CWG-WCIT-12 dengan menyediakan, sesuai dengan bidang kompetensinya, masukan-masukan yang diperlukan untuk persiapan WCIT, sebagaimana sesuai,

mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

untuk memberikan kontribusi bagi pekerjaan persiapan bagi WCIT-12, termasuk pertemuan-pertemuan regional, sebagaimana sesuai.

RESOLUSI 172 (Guadalajara, 2010)
Peninjauan kembali menyeluruh dari pelaksanaan hasil Konferensi
Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 73 (Minneapolis, 1998) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, yang mencapai sasaran-sasarannya dengan memperhatikan penyelenggaraan kedua fase Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS);
- b) Resolusi 140 (Rev. Guadalajara, 2010) konferensi ini, mengenai peran ITU dalam melaksanakan hasil-hasil WSIS,

mengingat lebih lanjut

- a) Deklarasi Prinsip Jenewa dan Rencana Aksi Jenewa, diterima pada tahun 2003, serta Komitmen Tunis dan Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi, diterima pada tahun 2005, dimana semua disahkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa;
- b) bahwa butir 111 Agenda Tunis meminta Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk membuat peninjauan kembali menyeluruh dari pelaksanaan hasil-hasil WSIS pada tahun 2015;
- c) bahwa Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, dalam Resolusi 60/252 nya, memutuskan untuk melakukan peninjauan kembali menyeluruh dari pelaksanaan hasil-hasil Sidang Tingkat Tinggi pada tahun 2015,

menimbang

- a) ketentuan-ketentuan Konstitusi ITU dan Konvensi ITU mengenai peran Perhimpunan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi;
- b) resolusi-resolusi yang diterima oleh konferensi ini mengenai WSIS;
- c) peran khusus yang dilaksanakan oleh ITU dalam memulai dan memimpin pengelolaan WSIS;
- d) mandat-mandat yang diberikan kepada ITU dengan memperhatikan pelaksanaan keseluruhan dari hasil-hasil WSIS,

memperhatikan

- a) kemajuan yang dibuat pada pelaksanaan keseluruhan hasil-hasil WSIS;
- b) pelaksanaan dan tindak lanjut dari kerangka kerja proses yang ditetapkan oleh Agenda Tunis;

- c) pendekatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan dan tindak lanjut,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk memulai mempertimbangkan, pada Badan Eksekutif Pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi (CEB), untuk persiapan peninjauan kembali menyeluruh dari pelaksanaan hasil-hasil WSIS pada tahun 2015, sebagaimana diminta oleh Agenda Tunis (butir 111), termasuk kemungkinan menyelenggarakan suatu pertemuan tingkat tinggi pada tahun 2014/15;
- 2 untuk mengusulkan kepada CEB membuat persiapan-persiapan yang diperlukan berdasarkan pada pendekatan berbagai pemangku kepentingan;
- 3 untuk meneruskan koordinasi yang efisien dan efektif dengan semua pemangku kepentingan dalam menyiapkan peninjauan kembali menyeluruh;
- 4 untuk melapor kepada Dewan ITU mengenai hasil-hasil proses ini, untuk pertimbangan dan keputusannya,

memerintahkan Dewan

sejalan dengan hasil-hasil konsultasi ini:

- 1 untuk mempertimbangkan dan memutuskan peran Perhimpunan dalam dan kontribusi kepada proses peninjauan kembali menyeluruh;
- 2 untuk memeriksa cara-cara dan sarana-sarana untuk meningkatkan peran terdepan ITU dalam setiap proses persiapan relevan;
- 3 untuk meminta kepada Sekretaris Jenderal, di bawah proses persiapan, untuk menjalankan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan menyediakan mekanisme-mekanisme, termasuk kemungkinan menyelenggarakan konsultasi-konsultasi terbuka;
- 4 untuk mengevaluasi pada sesinya tahun 2011 beban keuangan untuk Perhimpunan yang dapat berakibat dari kontribusinya kepada proses persiapan;
- 5 untuk melapor kepada konferensi yang berkuasa penuh berikut mengenai persiapan-persiapan untuk peninjauan kembali menyeluruh akhir dari pelaksanaan hasil-hasil WSIS dan memformulasikan usulan-usulan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

RESOLUSI 173 (Guadalajara, 2010)
Pembajakan dan penyerangan terhadap jaringan telepon tetap dan selular di Libanon

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) prinsip-prinsip agung, maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia;
- b) usaha-usaha Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memajukan pembangunan yang berkelanjutan dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang relevan;
- c) maksud-maksud Perhimpunan sebagaimana diabadikan dalam Pasal 1 Konstitusi ITU;
- d) butir 16 Deklarasi Prinsip yang diterima oleh Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi;
- e) resolusi-resolusi terdahulu dari konferensi-konferensi yang berkuasa penuh, yaitu:
 - Resolusi 48 (Malaga-Torremolinos, 1973) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai penghancuran kabel-kabel bawah laut di Mediterania Timur;
 - Resolusi 74 (Nairobi, 1982) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai Israel dan bantuan kepada Libanon;
 - Resolusi 64 (Nice, 1989) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai pengutukan praktik-praktik Israel di wilayah-wilayah Arab yang didudukinya;
 - Resolusi 159 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, yang terkait dengan dukungan kepada Libanon untuk membangun kembali jaringan telekomunikasinya, dan mengingat bahwa Libanon belum menerima, hingga hari ini, jumlah moneter dari kerusakan-kerusakan apapun yang diperkirakan oleh ahli-ahli ITU sebesar USD 547 juta pada masa itu,

mengakui

- a) bahwa jaringan telekomunikasi yang dapat diandalkan yang tidak tergantikan untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi negara-negara, khususnya bagi yang mengalami penderitaan dari aksi-aksi Israel;
- b) bahwa fasilitas-fasilitas telekomunikasi Libanon telah dan masih menjadi sasaran pembajakan, campur tangan dan interupsi, serta hasutan oleh Israel terhadap jaringan-jaringan telepon tetap dan selular Libanon;

- c) bahwa kerusakan yang diakibatkan terhadap telekomunikasi Libanon seharusnya menjadi masalah perhatian untuk keseluruhan komunitas internasional, khususnya ITU, sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa untuk telekomunikasi;
- d) hak penuh Libanon bagi kompensasi untuk kerusakan-kerusakan yang diakibatkan terhadap jaringan telekomunikasinya,

mengingat lebih lanjut

bahwa setiap Negara Anggota ITU harus menghormati prinsip-prinsip fundamental yang ditetapkan dalam Mukadimah Konstitusi dan dalam Nomor-nomor 5, 6 dan 7 Konstitusi.

memutuskan

untuk mengutuk semua serangan dan pelanggaran oleh Negara Anggota ITU manapun terhadap jaringan-jaringan telekomunikasi di Negara-negara Anggota lain manapun, yang mengganggu keamanan nasional negara tersebut, antara lain, yang dilanggar oleh Israel terhadap Libanon,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro

untuk mengawasi penghentian dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas atau transmisi-transmisi lintas perbatasan yang mengganggu dan melapor kepada Dewan mengenai hal ini.

RESOLUSI 174 (Guadalajara, 2010)
Peran ITU dengan memperhatikan kebijakan publik internasional yang terkait dengan resiko penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang melanggar hukum

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menyadari

- a) bahwa penemuan teknologi yang didorong oleh teknologi-teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah secara signifikan memodifikasi cara-cara dimana orang-orang mengakses telekomunikasi;
- b) bahwa penggunaan TIK yang melanggar hukum dapat memiliki dampak merugikan pada prasarana, keamanan nasional dan pembangunan ekonomi Negara Anggota.
- c) bahwa definisi “telekomunikasi”, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi ITU, menyatakan sebagai berikut: “*Setiap transmisi, emisi atau penerimaan dari tanda-tanda-sinyal-sinyal, tulisan, gambar-gambar dan suara-suara atau inteligensi dalam sifat apapun dari sistem-sistem kawat, radio, optikal atau elektromagnetik lain*”.

menegaskan

- a) Resolusi 55/63 dan 56/121 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, yang menetapkan kerangka kerja hukum dalam menghadapi penyalahgunaan kriminal dari teknologi-teknologi informasi;
- b) Resolusi 57/239 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, mengenai penciptaan budaya global keamanan dunia maya;
- c) Resolusi 58/199 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, mengenai penciptaan budaya global keamanan dunia maya dan perlindungan prasarana-prasarana informasi yang sangat penting;
- d) Resolusi 41/65 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, mengenai prinsip-prinsip yang terkait dengan penginderaan Bumi jarak jauh dari luar angkasa,

menimbang

- a) bahwa, dalam Deklarasi Prinsip Jenewa, Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) (Jenewa, 2003) mendukung kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mencegah kemungkinan penggunaan TIK untuk maksud-maksud yang tidak konsisten dengan tujuan-tujuan memelihara stabilitas dan keamanan internasional, dan dapat berdampak buruk terhadap integritas prasarana dalam Negara-negara, yang merugikan keamanan mereka; dan bahwasanya perlu untuk mencegah penggunaan sumber daya dan teknologi informasi untuk tujuan kriminal dan teroris, seraya

menghormati hak-hak asasi manusia (butir 36, Deklarasi Prinsip Jenewa WSIS);

- b) bahwa Garis Aksi C5 (Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK) Rencana Aksi Jenewa mencantumkan sebagai berikut: *“Para pemerintah, melalui kerja sama dengan sektor swasta, harus mencegah, mendeteksi dan menanggapi kejahatan dunia maya serta penyalahgunaan TIK dengan: mengembangkan pedoman yang memperhatikan usaha-usaha yang berjalan di bidang-bidang ini, dengan mempertimbangkan undang-undang yang membolehkan penyelidikan yang efektif dan penuntutan terhadap penyalahgunaan tersebut; meningkatkan usaha-usaha bantuan bersama yang efektif, memperkuat dukungan lembaga-lembaga pada tingkat internasional untuk mencegah, mendeteksi dan memulihkan dari kejadian-kejadian tersebut, serta mendorong pendidikan dan meningkatkan kesadaran”*.

menimbang lebih lanjut

Bahwa WSIS (Tunis, 2005) mengidentifikasi ITU sebagai moderator untuk pelaksanaan Garis Aksi C5 (Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK),

mengingat

- a) Resolusi 130 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai penguatan peran ITU dalam membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK;
- b) Resolusi 102 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai peran ITU dengan memperhatikan isu-isu kebijakan publik internasional yang terkait dengan Internet dan pengelolaan sumber-sumber daya Internet, termasuk nama-nama dan alamat-alamat domain;
- c) Resolusi 71 (Rev. Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, khususnya sasaran strategis 4: *“Alat-alat pengembangan, berdasarkan kontribusi-kontribusi dari keanggotaan, untuk memajukan kepercayaan pengguna akhir, dan untuk menjamin keamanan efisiensi, keamanan, integritas dan kemampuan saling beroperasi dari jaringan-jaringan”*;
- d) Resolusi 1282 dan 1305 Dewan ITU, yang terakhir yang membuat daftar isu-isu yang terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan Internet di antara tugas-tugas utama dari peran Kelompok Yang Berdedikasi dalam mengenali isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan Internet internasional;
- e) Resolusi 45 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai mekanisme-mekanisme untuk memperbaiki kerja sama dalam keamanan dunia maya, termasuk menghadapi dan memerangi surel sampah (spam);

- f) Deklarasi Hyderabad yang diterima oleh WTDC, khususnya Program 2 (Keamanan dunia maya, aplikasi-aplikasi TIK dan isu-isu terkait jaringan berbasis IP);
- g) Resolusi 50 dan 52 (Rev. Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia, mengenai keamanan dunia maya serta menghadapi dan memerangi surel sampah (spam),

mengakui lebih lanjut

- a) bahwa kerja sama dan kolaborasi global antara organisasi-organisasi internasional perlu dalam rangka mengatasi dan mencegah penggunaan TIK yang melanggar hukum;
- b) peran yang memoderasi dan memfasilitasi yang ditugaskan kepada Perhimpunan di bawah Garis Aksi C5 sebagaimana dirujuk di atas,

memperhatikan

- a) pentingnya TIK, termasuk telekomunikasi, untuk pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara khususnya negara-negara berkembang, melalui penciptaan layanan-layanan publik yang baru yang memfasilitasi akses publik terhadap informasi dan meningkatkan transparansi di dalam administrasi-administrasi publik serta dapat membantu untuk mengawasi dan memperhatikan perubahan iklim, pengelolaan sumber-sumber daya alam dan pengurangan resiko bencana-bencana alam;
- b) kerentanan prasarana-prasarana nasional yang kritis, peningkatan ketergantungan mereka pada TIK-TIK dan ancaman-ancaman yang dihasilkan dari penggunaan TIK-TIK yang melanggar hukum,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam rangka untuk:

- i) meningkatkan kesadaran Negara-negara Anggota mengenai dampak buruk sebagai akibat penggunaan sumber-sumber daya informasi dan komunikasi yang melanggar hukum;
- ii) memelihara peran ITU untuk bekerja sama di dalam mandatnya dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang lain dalam memerangi penggunaan TIK-TIK yang melanggar hukum,

meminta Sekretaris Jenderal

dalam kapasitasnya sebagai fasilitator untuk Garis Aksi C5 mengenai membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK, untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan Negara-negara Anggota dan para pemangku kepentingan TIK yang relevan, termasuk penyedia-penyedia layanan *geo angkasa (geospatial)* dan informasi, untuk membicarakan

pendekatan-pendekatan alternatif terhadap solusi-solusi untuk membahas dan mencegah pemakaian TIK-TIK yang melanggar hukum, seraya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan keseluruhan dalam industri TIK,

mengundang Negara-negara Anggota dan para pemangku kepentingan TIK yang relevan

untuk melanjutkan dialog mereka pada tingkat-tingkat regional dan nasional dalam rangka mencari solusi-solusi yang dapat diterima bersama,

mengundang Sekretaris Jenderal

untuk mengumpulkan praktik-praktik terbaik yang berhubungan dengan aksi-aksi yang diambil oleh Negara-negara Anggota untuk mencegah penggunaan TIK-TIK yang melanggar hukum dan untuk menyediakan bantuan kepada Negara-negara Anggota yang berkepentingan, sebagaimana sesuai,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk melapor kepada Dewan dan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai pelaksanaan resolusi ini,

mengundang Negara-negara Anggota

untuk memberi dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan resolusi ini.

RESOLUSI 175 (Guadalajara, 2010)
Aksesibilitas telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi
untuk penyandang disabilitas, termasuk disabilitas yang terkait dengan
umur

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengakui

- a) Resolusi 70 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia, mengenai aksesibilitas telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk penyandang disabilitas, serta studi-studi, inisiatif-inisiatif dan acara-acara terkini mengenai isu tersebut yang dilaksanakan oleh Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) dan kelompok-kelompok studinya, khususnya Kelompok Studi 2 dan Kelompok Studi 16, berkolaborasi dengan Kegiatan Koordinasi Bersama mengenai Aksesibilitas dan Faktor Manusia (JCA-AHF);
- b) Resolusi 58 (Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia, mengenai akses terhadap TIK untuk penyandang disabilitas, termasuk disabilitas yang terkait dengan umur, berdasarkan pada kerja inisiatif khusus Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) yang dilaksanakan melalui studi-studi yang dilakukan di dalam kerangka kerja Pertanyaan 20/1 Kelompok Studi 1, dimulai pada September 2006 dan mengusulkan susunan kata resolusi tersebut dan, demikian pula, inisiatif ITU-D pada pengembangan perangkat e-aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, melalui kolaborasi dan kemitraan dengan Inisiatif Global untuk TIK-TIK Inklusif (G3ict);
- c) upaya yang sedang berjalan dalam, Sektor Komunikasi Radio (ITU-R), ITU-T dan ITU-D untuk menjembatani kesenjangan disabilitas digital;
- d) hasil-hasil Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS), menyerukan perhatian khusus diberikan kepada penyandang disabilitas, termasuk disabilitas yang terkait umur;
- e) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang berlaku pada 3 Mei 2008 dan yang menyaratkan Negara-negara Pihak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk akses bagi para penyandang disabilitas pada landasan kesetaraan dengan yang lain pada TIK, layanan-layanan dalam keadaan darurat dan layanan-layanan Internet,

menimbang

- a) Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa sepuluh persen populasi dunia (lebih dari 650 juta orang) adalah para penyandang disabilitas, dan bahwa persentasi ini dapat bertambah disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketersediaan perawatan kesehatan yang lebih banyak dan harapan hidup yang lebih lama, serta juga karena dapat

- menjadi penyandang disabilitas karena penuaan umur, kecelakaan-kecelakaan, perang-perang dan keadaan-keadaan kemiskinan;
- b) bahwa telah lebih dari 60 tahun, pendekatan kepada disabilitas yang diterima oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa, dan oleh banyak Negara Anggota (melalui perubahan penekanan pada hukum, pengaturan-pengaturan, kebijakan-kebijakan dan program-program mereka), telah bergeser dari perspektif kesehatan dan kesejahteraan kepada pendekatan yang berdasarkan pada hak-hak asasi manusia, yang mengakui bahwa penyandang disabilitas pertama adalah manusia, dan bahwa tindakan-tindakan sosial telah, dalam contoh-contoh tertentu, menempatkan hambatan-hambatan terhadap mereka yang bertentangan dengan disabilitas mereka, termasuk sasaran keikutsertaan penuh dari penyandang disabilitas dalam masyarakat;
 - c) bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang berlaku pada 3 Mei 2008, memerlukan Negara-negara Pihak, berdasarkan Pasal 9 mengenai aksesibilitas, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai termasuk:
 - i) 9(2) (g) *“untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas pada teknologi-teknologi serta sistem-sistem informasi dan komunikasi baru, termasuk Internet”*;
 - ii) 9(2)(h) *“untuk memajukan desain, pembangunan, produksi dan distribusi dari teknologi-teknologi serta sistem-sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses pada tahap awal, sehingga teknologi-teknologi dan sistem-sistem ini dapat diakses dengan biaya minimal”*;
 - d) pentingnya kerja sama antara para pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi yang relevan untuk menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk akses dengan biaya rendah,

mengingat

- a) Butir 18 Komitmen Tunis, dibuat pada fase kedua WSIS (Tunis, 2005) *“Kami wajib berusaha tanpa putus, oleh karenanya, untuk memajukan akses terhadap TIK-TIK yang universal, dimana-mana, seimbang dan terjangkau, termasuk desain universal dan teknologi-teknologi bantuan, untuk semua orang, khususnya yang menyandang disabilitas, dimanapun, untuk memastikan bahwa manfaat-manfaat didistribusikan lebih merata antara dan di dalam masyarakat-masyarakat, dan untuk menjembatani kesenjangan digital dalam rangka menciptakan kesempatan-kesempatan digital untuk semua dan manfaat dari potensi yang ditawarkan oleh TIK-TIK untuk pembangunan”*;
- b) Deklarasi Phuket mengenai Kesiapan Tsunami untuk Penyandang Disabilitas (Phuket, 2007), yang menekankan kebutuhan untuk peringatan keadaan darurat inklusif dan sistem-sistem pengelolaan bencana menggunakan fasilitas-fasilitas telekomunikasi/TIK yang berdasarkan pada standar-standar terbuka, non-kepemilikan (non-proprietary), global;

- c) Resolusi GSC-14/27 menyetujui bahwa pertemuan Kolaborasi Standar Global ke-14(Jenewa, 2009), yang mendorong kolaborasi yang lebih besar antara badan-badan regional global dan badan-badan standardisasi nasional sebagai basis untuk menentukan dan/atau memperkuat kegiatan-kegiatan dan inisiatif-inisiatif yang mengenai penggunaan aksesibilitas telekomunikasi/TIK untuk penyandang disabilitas,

memutuskan

untuk memperhatikan penyandang disabilitas dalam kerja ITU, dan untuk berkolaborasi dalam menerima rencana aksi yang menyeluruh dalam rangka memperluas akses terhadap telekomunikasi/TIK-TIK kepada penyandang disabilitas, berkolaborasi dengan entitas-entitas dan badan-badan eksternal yang terkait dengan subyek ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal, dalam konsultasi dengan Direktur-direktur Biro

- 1 untuk mengoordinasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aksesibilitas antara ITU-R, ITU-T dan ITU-D, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi dan entitas-entitas relevan yang lain dimana sesuai, dalam rangka menghindari penggandaan dan untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas diperhatikan;
- 2 untuk mempertimbangkan dampak-dampak keuangan terhadap ITU akibat dari menyediakan informasi yang dapat diakses melalui TIK-TIK dan akses terhadap fasilitas-fasilitas, layanan dan program-program ITU untuk para peserta dengan disabilitas penglihatan, pendengaran atau fisik, termasuk penayangan (*captioning*) pada pertemuan-pertemuan, akses terhadap informasi cetak dan situs ITU, akses terhadap bangunan-bangunan ITU dan fasilitas-fasilitas pertemuan, serta penerimaan praktik-praktik perekrutan dan kepegawaian ITU yang dapat diakses;
- 3 untuk mendorong dan meningkatkan perwakilan oleh penyandang disabilitas sehingga memastikan bahwa pengalaman-pengalaman, pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat mereka diperhatikan pada saat mengembangkan dan memajukan kerja ITU;
- 4 untuk mempertimbangkan memperluas program beasiswa dalam rangka memungkinkan delegasi dengan penyandang disabilitas, di dalam batasan-batasan anggaran yang ada, untuk ikut serta dalam kerja ITU;
- 5 untuk mengidentifikasi, dokumen-dokumen dan menyebarluaskan contoh-contoh dari praktik-praktik terbaik untuk aksesibilitas dalam bidang telekomunikasi/TIK-TIK di antara Negara-negara Anggota ITU dan Anggota-anggota sektor;
- 6 untuk bekerja secara kolaboratif pada kegiatan-kegiatan yang terkait aksesibilitas dengan ITU-R, ITU-T dan ITU-D, khususnya mengenai kesadaran dan pengarusutamaan standar-standar aksesibilitas

telekomunikasi/TIK dan dalam mengembangkan program-program yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk memperkenalkan layanan-layanan yang memungkinkan penyandang disabilitas menggunakan layanan-layanan telekomunikasi/TIK secara efektif,

- 7 untuk bekerja secara kolaboratif dan kooperatif dengan organisasi-organisasi dan entitas-entitas relevan lainnya, khususnya dengan kepentingan untuk memastikan bahwa kerja yang sedang berjalan di bidang aksesibilitas diperhatikan;
- 8 untuk bekerja secara kolaboratif dan kooperatif dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas di semua wilayah untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dari penyandang disabilitas diperhatikan;
- 9 untuk meninjau kembali layanan-layanan dan fasilitas-fasilitas ITU terkini, termasuk pertemuan-pertemuan dan acara-acara, dalam rangka membuatnya tersedia bagi penyandang disabilitas, dan untuk berusaha membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki aksesibilitas, dimana sesuai dan memungkinkan secara ekonomi, menurut Resolusi 61/106 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.
- 10 untuk mempertimbangkan standar-standar dan pedoman aksesibilitas bilamana menjalankan renovasi-renovasi atau merubah penggunaan ruangan pada suatu fasilitas, sehingga fitur-fitur aksesibilitas dipelihara dan hambatan-hambatan lainnya tidak dilaksanakan dengan kurang hati-hati;
- 11 untuk menyiapkan laporan untuk diserahkan pada setiap sesi tahunan Dewan mengenai pelaksanaan resolusi ini dengan memperhatikan alokasi anggaran untuk maksud ini;
- 12 untuk menyerahkan laporan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melaksanakan resolusi ini,

mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

- 1 untuk mempertimbangkan pengembangan, di dalam kerangka hukum nasional mereka, pedoman atau mekanisme-mekanisme lain untuk meningkatkan aksesibilitas, kompatibilitas dan penggunaan layanan-layanan, produk-produk dan terminal-terminal telekomunikasi/TIK, dan untuk menawarkan dukungan kepada inisiatif-inisiatif regional yang terkait dengan isu ini;
- 2 untuk mempertimbangkan pengenalan layanan-layanan telekomunikasi/TIK yang sesuai dalam rangka memungkinkan penyandang disabilitas untuk menggunakan layanan-layanan ini berdasarkan kesetaraan dengan lainnya, dan untuk memajukan kerja sama internasional dalam hal ini;
- 3 untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan/studi-studi yang terkait dengan aksesibilitas dalam ITU-R, ITU-T dan ITU-D, termasuk ikut serta secara aktif dalam kerja kelompok-kelompok studi yang terkait, dan untuk mendorong dan meningkatkan perwakilan oleh

penyandang disabilitas sehingga memastikan bahwa pengalaman-pengalaman, pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat mereka diperhatikan;

- 4 untuk memperhatikan *menimbang c) ii) dan d) di atas*, dan manfaat-manfaat dari keterjangkauan biaya untuk perlengkapan dan layanan-layanan untuk penyandang disabilitas, termasuk desain universal;
- 5 untuk mendorong komunitas internasional untuk memberikan kontribusi-kontribusi sukarela kepada dana bantuan khusus yang dibentuk oleh ITU untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan resolusi ini.

RESOLUSI 176 (Guadalajara, 2010)
Kerawanan (*exposure*) manusia terhadap dan pengukuran medan elektromagnetik

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 72 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia, mengenai pengukuran yang terkait dengan kerawanan (*exposure*) manusia terhadap medan-medan elektromagnetik (EMF);
- b) Resolusi 62 (Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia, mengenai pengukuran yang terkait dengan kerawanan (*exposure*) manusia terhadap EMF;
- c) resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dari Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R) dan Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T);
- d) bahwa ada upaya yang sedang berjalan dalam ketiga Sektor yang terkait pada kerawanan (*exposure*) manusia terhadap medan-medan elektromagnetik, dan bahwa perwakilan dan kolaborasi antara Sektor-Sektor dan dengan organisasi-organisasi ahli lainnya adalah penting, dalam rangka mencegah penggandaan upaya,

menimbang

- a) bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Komisi Internasional mengenai Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP) memiliki keahlian kesehatan khusus dan kompetensi untuk mengukur dampak gelombang radio pada tubuh manusia;
- b) bahwa ITU memiliki keahlian dalam menghitung dan mengukur kekuatan medan dan kerapatan daya dari sinyal-sinyal radio;
- c) tingginya harga peralatan yang digunakan untuk mengukur dan menentukan kerawanan (*exposure*) manusia terhadap EMF;
- d) bahwa pengembangan yang cukup banyak dalam penggunaan spektrum radio telah menghasilkan berbagai sumber emisi-emisi EMF di dalam wilayah geografis manapun;
- e) kebutuhan mendesak untuk badan-badan regulasi di banyak negara berkembang untuk memperoleh informasi mengenai metodologi-metodologi pengukuran EMF dengan memperhatikan kerawanan (*exposure*) manusia terhadap energi frekuensi radio, dalam rangka menetapkan peraturan-peraturan nasional untuk melindungi warga negaranya;

- f) bahwa pedoman mengenai batas-batas kerawanan (*exposure*) terhadap EMF telah ditetapkan oleh ICNIRP¹, Institut Insinyur Elektrik dan Elektronik (IEEE)² serta Organisasi Internasional untuk Standardisasi/Komisi Teknik Elektro Internasional (ISO/IEC) dan bahwa banyak administrator telah menerima pengaturan-pengaturan nasional berdasarkan pedoman ini,

memutuskan untuk memerintahkan Direktur ketiga Biro

untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang terkait kerawanan (*exposure*) terhadap EMF, termasuk metodologi-metodologi pengukuran EMF, dalam rangka membantu administrasi-administrasi nasional, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mengembangkan peraturan-peraturan nasional yang sesuai,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi, berkolaborasi dengan Direktur Biro Komunikasi Radio dan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

- 1 untuk memastikan persyaratan untuk, dan sebagaimana sesuai menyelenggarakan, seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya regional dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang dan untuk membangun sumber-sumber daya manusia dengan memperhatikan pengukuran EMF yang terkait dengan kerawanan (*exposure*) manusia terhadap medan-medan ini;
- 2 untuk mendorong Negara-negara Anggota di berbagai wilayah untuk bekerja sama dalam membagi keahlian dan sumber-sumber daya serta mengidentifikasi titik kontak (*focal point*) atau mekanisme kerja sama regional, termasuk apabila diperlukan suatu pusat regional, sehingga membantu semua Negara Anggota dalam wilayah dalam pengukuran dan pelatihan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal, dalam konsultasi dengan Direktur-direktur ketiga Biro

- 1 untuk menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan resolusi ini untuk diserahkan kepada Dewan ITU pada setiap sesi tahunannya;
- 2 untuk menyediakan laporan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil untuk melaksanakan resolusi ini.

¹ Pedoman untuk membatasi kerawanan (*exposure*) medan-medan elektrik, magnetik dan elektromagnetik yang bervariasi dalam waktu (sampai 300 GHz) - <http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf>.

² IEEE Std C95.1™-2005, standar IEEE untuk tingkatan-tingkatan keselamatan bagi kerawanan (*exposure*) manusia terhadap medan elektromagnetik frekuensi radio, 3 kHz sampai 300 GHz.

RESOLUSI 177 (Guadalajara, 2010)
Kesesuaian dan kemampuan untuk saling beroperasi

Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengakui

- a) bahwa Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia menerima Resolusi 76 (Johannesburg, 2008);
- b) bahwa Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia menerima Resolusi 47 (Rev. Hyderabad, 2010);
- c) bahwa, pada sesinya tahun 2009, Dewan ITU mengesahkan rekomendasi-rekomendasi berikut dari Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi (TSB) (Dokumen C09/28):
 - 1) pelaksanaan program penilaian kesesuaian yang diajukan
 - 2) pelaksanaan program acara-acara yang diajukan terkait kemampuan saling beroperasi
 - 3) pelaksanaan peningkatan sumber-sumber daya manusia yang diajukan;
 - 4) pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan untuk membantu dalam pendirian fasilitas-fasilitas pengujian di negara-negara berkembang;
 - 5) bahwa Direktur TSB seharusnya melapor kepada sesi Dewan di masa depan mengenai pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi 1) dan 2) di atas, dan bersama dengan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT) mengenai rekomendasi-rekomendasi 3) dan 4) di atas, serta pada rencana bisnis yang diajukan untuk pelaksanaan jangka panjang dari program-program;
- d) laporan-laporan kemajuan oleh Direktur TSB yang dibuat untuk Dewan pada sesi-sesi tahun 2009 dan 2010 dan untuk konferensi yang berkuasa penuh tahun 2010,

memutuskan

- 1 untuk mengesahkan tujuan-tujuan kedua Resolusi 76 (Johannesburg, 2008) dan Resolusi 47 (rev. Hyderabad, 2010) dan rekomendasi-rekomendasi dari Direktur TSB yang disahkan oleh Dewan pada sesinya tahun 2009;
- 2 bahwa program kerja ini dilaksanakan secara paralel tanpa penundaan apapun, termasuk basis data kesesuaian percontohan informatif dan pengembangannya menjadi basis data yang berfungsi penuh; dengan mengingat kebutuhan untuk suatu rencana bisnis yang dikembangkan secara cepat oleh Direktur TSB, dan disetujui oleh Dewan, untuk pelaksanaan jangka panjangnya, dalam konsultasi dengan setiap wilayah, dengan memperhatikan a) hasil dan dampak yang dimiliki basis data kesesuaian percontohan mengenai Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan para pemangku kepentingan (misal

organisasi-organisasi pengembangan standar-standar lainnya (SDOs)), b) dampak yang dimiliki basis data pada penjembatanan kesenjangan standarisasi sebagaimana relevan bagi setiap wilayah, c) isu-isu pertanggungjawaban yang potensial untuk ITU dan untuk Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan para pemangku kepentingan; dan dengan memperhatikan hasil-hasil dari konsultasi-konsultasi kesesuaian dan kemampuan saling beroperasi ITU di tingkat regional;

- 3 untuk membantu negara-negara berkembang dalam mendirikan pusat-pusat kesesuaian dan kemampuan saling beroperasi di tingkat regional atau subregional yang sesuai untuk melaksanakan pengujian kemampuan saling beroperasi sebagaimana sesuai,

memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

- 1 untuk melanjutkan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan di semua wilayah, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan setiap wilayah, mengenai pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang disahkan oleh Dewan, termasuk, berkolaborasi dengan Direktur BDT, rekomendasi-rekomendasi mengenai pengembangan sumber-sumber daya manusia dan bantuan dalam mendirikan fasilitas-fasilitas pengujian di negara-negara berkembang;
- 2 untuk melanjutkan pelaksanaan studi-studi yang diperlukan dengan maksud untuk memperkenalkan penggunaan Tanda (*Mark*) ITU untuk kemungkinan program Tanda (*Mark*) ITU di masa depan, sebagai program sukarela yang mengizinkan pabrik-pabrik dan penyedia-penyedia layanan untuk membuat pernyataan yang jelas bahwa peralatan mereka sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang dapat diterapkan dari Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU dan meningkatkan kemungkinan kemampuan saling beroperasi, dan untuk mempertimbangkan kemungkinan pemakaiannya sebagai indikasi tingkat kemampuan saling beroperasi di masa depan;
- 3 untuk meningkatkan dan memperbaiki proses-proses penentuan standar-standar dalam rangka memperbaiki kemampuan saling beroperasi melalui kesesuaian;
- 4 untuk menyiapkan rencana bisnis bagi pelaksanaan jangka panjang resolusi ini;
- 5 untuk menyediakan kepada Dewan laporan-laporan kemajuan, termasuk hasil-hasil studi, terkait dengan pelaksanaan resolusi ini,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi, berkolaborasi erat dengan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi dan Direktur Biro Komunikasi Radio

- 1 untuk memajukan pelaksanaan Resolusi 47 (Rev. Hyderabad, 2010) dan untuk melapor kepada Dewan;
- 2 untuk membantu Negara-negara Anggota dalam membahas perhatian mereka terhadap perlengkapan palsu,

memerintahkan Dewan

- 1 untuk mempertimbangkan laporan-laporan Direktur TSB dan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan sehingga memberi kontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan resolusi ini;
- 2 untuk melapor pada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai kemajuan yang dibuat dengan memperhatikan resolusi ini,

mengundang Anggota-anggota Sektor

- 1 untuk mengisi basis data kesesuaian percontohan dengan uraian-uraian produk-produk yang telah diuji sesuai rekomendasi-rekomendasi ITU-T yang dapat diterapkan dalam laboratorium-laboratorium pengujian yang terakreditasi (pihak pertama, kedua atau ketiga), atau oleh badan-badan sertifikasi yang terakreditasi, atau sesuai dengan prosedur-prosedur yang diterima oleh organisasi pengembangan standar-standar atau forum yang memenuhi syarat sesuai dengan Rekomendasi ITU-T A.5:
- 2 untuk ikut serta dalam acara-acara terkait kemampuan saling beroperasi yang difasilitasi ITU;
- 3 untuk mengambil peran aktif dalam membangun kapasitas negara-negara berkembang dalam pengujian kesesuaian dan kemampuan saling beroperasi, termasuk pelatihan dalam pekerjaan, khususnya sebagai bagian dari setiap kontrak pasokan untuk perlengkapan, layanan-layanan dan sistem-sistem telekomunikasi untuk negara-negara ini,

mengundang organisasi-organisasi yang memenuhi syarat sesuai dengan Rekomendasi ITU-T A.5

- 1 untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan basis data kesesuaian percontohan ITU dan, berbagi tautan-tautan pada kepentingan bersama, untuk memperkaya perluasannya dengan merujuk lebih banyak rekomendasi-rekomendasi dan standar-standar di dalam suatu produk, dan untuk membolehkan pengenalan yang lebih banyak dari produk-produk penjual dan memperluas portfolio seleksi kepada para pengguna;
- 2 untuk ikut serta dalam mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang difasilitasi oleh TSB dan BDT, khususnya menawarkan kesempatan-kesempatan untuk ahli-ahli dari negara-negara berkembang – khususnya dari para operator – untuk mendapatkan pengalaman dalam pekerjaan,

mengundang Negara-negara Anggota

- 1 untuk memberi kontribusi pada pelaksanaan resolusi ini;
- 2 untuk mendorong entitas-entitas pengujian nasional dan regional untuk membantu ITU dalam melaksanakan resolusi ini;
- 3 untuk menerima rezim-rezim dan prosedur-prosedur penilaian kesesuaian berdasarkan pada rekomendasi-rekomendasi ITU-T yang diterapkan, menyebabkan kualitas layanan/kualitas pengalaman yang lebih baik, dan pada kemungkinan yang lebih banyak dari kemampuan untuk saling beroperasi dari perlengkapan, layanan-layanan dan sistem-sistem,

lebih lanjut mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

untuk memperhatikan kerangka-kerangka hukum dan regulasi dari negara-negara lain mengenai perlengkapan yang berdampak negatif terhadap kualitas prasarana telekomunikasi mereka, khususnya mengakui perhatian negara-negara anggota dengan memperhatikan perlengkapan palsu,

lebih lanjut mengundang Negara-negara Anggota

untuk memberi kontribusi pada sidang komunikasi radio berikutnya di tahun 2012 agar mereka mempertimbangkan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap sesuai.

RESOLUSI 178 (Guadalajara, 2010)
Peran ITU dalam mengatur kerja pada aspek teknis jaringan telekomunikasi untuk mendukung Internet

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) bahwa pembangunan masyarakat informasi menuntut kerja sama yang menentukan dan keterlibatan seluruh dunia, sebagaimana konsolidasinya tentu akan menghasilkan dampak positif terhadap penjembitan kesenjangan digital;
- b) bahwa satu dari langkah-langkah pertama untuk dilaksanakan adalah untuk membangun suatu lingkungan untuk Negara-negara Anggota ITU dan Anggota-anggota Sektor untuk menjelajahi cara-cara untuk maju dalam proses menuju perbaikan kerja sama di dalam ITU serta membahas dan menjabarkan mekanisme-mekanisme baru untuk menyelesaikan peran dan tanggung jawab-tanggung jawab yang muncul.

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa bagian yang krusial dari Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi terdapat pada bagian “Pelaksanaan dan tindak lanjut”, dimana tempat-tempat, pedoman dan kegiatan-kegiatan dari Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) dinyatakan secara jelas;
- b) bahwa ITU telah ditunjuk dalam bagian “Pelaksanaan dan tindak lanjut” Agenda Tunis sebagai salah satu dari moderator dan fasilitator yang memungkinkan untuk garis-garis aksi yang ditetapkan oleh WSIS;
- c) bahwa kedua Konferensi Pengembangan Telekomunikasi (Doha, 2006) dan Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006) mengakui peran terdepan yang wajib dimainkan oleh ITU dengan memperhatikan Garis-garis Aksi WSIS C2 (Prasarana informasi dan komunikasi) dan C5 (Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK-TIK)),

memperhatikan

- a) kebutuhan untuk menguatkan Perhimpunan dengan struktur-struktur yang membolehkan perbaikan berkesinambungan dari kerjanya sebagai fasilitator petunjuk-petunjuk WSIS;
- b) pentingnya jaringan-jaringan dan layanan-layanan telekomunikasi sebagai dukungan terhadap kemampuan saling beroperasi Internet;
- c) sumber-sumber historis Perhimpunan untuk membawa bersama berbagai badan sektor telekomunikasi, misal administrasi-administrasi

dan entitas-entitas swasta, dalam pengembangan rekomendasi-rekomendasi teknis untuk jaringan-jaringan telekomunikasi;

- d) kebutuhan untuk menentukan titik-titik kontak (*focal point*) dalam Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) untuk garis-garis aksi WSIS yang relevan (menurut pada Resolusi 75 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA)), sehingga memungkinkan semua anggota ITU untuk bekerja, dengan cara yang terkoordinasi dan transparan, terhadap pengembangan aspek-aspek teknis dari jaringan-jaringan telekomunikasi untuk mendukung Internet, dalam rangka membantu memajukan evolusi, kapasitas, kesinambungan, kemampuan saling beroperasi dan keamanan dari jaringan, melalui kerja yang berbasis kontribusi,

mengingat

- a) Pasal 17 Konstitusi ITU, yang menggarisbawahi fungsi-fungsi ITU-T: “Fungsi-fungsi Sektor Standardisasi Telekomunikasi adalah, mengingat perhatian-perhatian khusus dari negara-negara berkembang, untuk memenuhi maksud-maksud Perhimpunan yang terkait dengan standardisasi telekomunikasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Konstitusi ini, dengan mempelajari pertanyaan-pertanyaan teknis, pengoperasian dan tarif serta menerima rekomendasi-rekomendasi mengenainya dengan maksud untuk menstandardisasikan telekomunikasi seluruh dunia”;
- b) Pasal 13 Konvensi ITU, yang menetapkan tanggung jawab-tanggung jawab WTSA, menjelaskan bahwa:

"3 Sesuai dengan Konstitusi No. 104, sidang wajib:

...

- f) memutuskan mengenai kebutuhan untuk mempertahankan, menghentikan atau membentuk kelompok-kelompok baru dan menunjuk ketua dan wakil ketua mereka;

- g) menetapkan kerangka acuan untuk kelompok-kelompok sebagaimana disebutkan dalam No. 191A di atas; kelompok-kelompok serupa tidak boleh menerima pertanyaan-pertanyaan atau rekomendasi-rekomendasi”,

memutuskan

bahwa ITU wajib melanjutkan untuk menyesuaikan, bekerja dengan cara yang terkoordinasi dan transparan mengenai pengembangan aspek-aspek teknis jaringan-jaringan telekomunikasi untuk mendukung Internet, dalam rangka membantu memajukan evolusi, kapasitas, kesinambungan, kemampuan saling beroperasi dan keamanan dari jaringan, melalui kerja yang berbasis kontribusi,

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro

untuk terus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu bagi ITU untuk memenuhi perannya dalam mengatur kerja mengenai aspek-aspek jaringan-jaringan telekomunikasi untuk mendukung Internet,

memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi, berkonsultasi dengan kelompok Penasihat Standardisasi Telekomunikasi

- 1 untuk mengadakan konsultasi-konsultasi terbuka mengenai kontribusi-kontribusi yang dapat diberikan oleh ITU-T kepada pelaksanaan WSIS;
- 2 untuk mengevaluasi dan memberikan usulan mengenai penyesuaian-penyediaan terhadap struktur terkini ITU-T, dalam rangka memenuhi petunjuk yang ditetapkan dalam *memutuskan* di atas, mungkin dengan menyarankan pendirian kelompok studi khusus atau kelompok lain dalam hal ini;
- 3 untuk menyerahkan, bagi WTSA-12, kesimpulan evaluasi yang disebutkan dalam butir 2 di atas,

mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

untuk ikut serta dalam dan memberikan kontribusi-kontribusi yang berhubungan dengan evaluasi yang disebutkan dalam *memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi, berkonsultasi dengan Kelompok 2 Penasihat Standardisasi Telekomunikasi* di atas,

mengundang sidang standardisasi telekomunikasi dunia tahun 2012

- 1 untuk menganalisa laporan oleh Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi dan Kelompok Penasihat Standardisasi Telekomunikasi serta kontribusi-kontribusi dari Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, dan memutuskan mengenai penyesuaian-penyediaan terhadap struktur ITU-T, dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kerja teknis, di dalam ITU-T, mengenai pengembangan

aspek-aspek teknis jaringan-jaringan telekomunikasi untuk mendukung Internet;

- 2 untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, sebagaimana sesuai, mengenai pendirian kelompok studi atau kelompok sesuai lainnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam *memutuskan* di atas.

RESOLUSI 179 (Guadalajara, 2010)
Peran ITU dalam perlindungan *online* anak

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010)

menimbang

- a) bahwa Internet memainkan peran yang semakin penting dan berharga dalam penyediaan pendidikan untuk anak, memperkaya kurikulum dan membantu menjembatani hambatan bahasa dan hambatan-hambatan lain antara anak-anak di semua negara;
- b) bahwa Internet telah menjadi landasan utama untuk berbagai macam kegiatan pendidikan, budaya dan hiburan untuk anak-anak;
- c) bahwa anak-anak adalah salah satu peserta *online* yang paling aktif;
- d) bahwa para orangtua, wali dan pendidik tidak selalu menyadari kegiatan-kegiatan anak-anak pada Internet;
- e) bahwa ada kebutuhan mendesak dan permintaan global untuk perlindungan anak-anak dari eksploitasi dan kerawanan (*exposure*) terhadap bahaya dan penipuan bila menggunakan Internet atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengingat bahwa anak-anak yang masih polos ini mewakili masa depan umat manusia;
- f) perkembangan, diversifikasi dan penyebaran akses terhadap TIK-TIK di seluruh dunia yang tumbuh, khususnya Internet, dan penggunaan yang semakin meluas oleh anak-anak, pada waktu-waktu yang tanpa pengawasan atau bimbingan;
- g) bahwa, dalam rangka menangani isu keamanan dunia maya untuk anak-anak, adalah sangat penting bahwa langkah-langkah pro aktif dijalankan untuk melindungi online anak-anak pada tingkat internasional;
- h) persyaratan untuk pendekatan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memajukan tanggung jawab sosial dalam sektor TIK sehingga secara efektif menggunakan berbagai peralatan yang tersedia untuk membangun kepercayaan dalam penggunaan jaringan-jaringan dan layanan-layanan TIK, mengurangi resiko-resiko yang diidentifikasi untuk anak-anak;
- i) bahwa perlindungan *online* anak adalah subyek kepentingan global internasional yang berlaku dan wajib dimasukkan dalam daftar prioritas agenda global komunitas dunia;
- j) bahwa perlindungan *online* anak melibatkan jaringan kolaboratif internasional, dalam hubungan dengan badan-badan dan mitra-mitra Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, bagi tindakan untuk memajukan perlindungan online anak-anak seluruh dunia dengan memberikan panduan mengenai perilaku *online* yang aman;

- k) bahwa beberapa pemerintah dan organisasi-organisasi regional sedang aktif mempromosikan dan bekerja untuk menciptakan lingkungan Internet yang aman untuk anak-anak,

mengingat

- a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (1989), Deklarasi Hak Anak yang diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan mengakui Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, dan semua resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan mengenai perlindungan anak dan perlindungan *online* anak;
- b) bahwa, di dalam kerangka kerja Konvensi Hak Anak, Kelompok-kelompok negara menjalankan perlindungan anak dari semua bentuk-bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual, dan untuk maksud tersebut, khususnya, untuk mengambil semua kebijakan nasional, bilateral dan multilateral yang sesuai untuk mencegah a) pembujukan atau pemaksaan anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum; b) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual yang melanggar hukum c) penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan materi-materi pornografi (Pasal 34);
- c) Pasal 17 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak, yang disetujui oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989, mengenai akses terhadap informasi oleh anak-anak dan perlindungan dari informasi dan materi berbahaya terhadap kesejahteraan mereka;
- d) bahwa, menurut Pasal 10 Protokol Fakultatif dari Konvensi Hak Anak (New York, 2000) mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, Kelompok-kelompok Negara wajib mengambil semua langkah yang dianggap perlu untuk menguatkan kerjasama internasional melalui pengaturan-pengaturan multilateral, regional dan bilateral untuk pencegahan, pendeteksian, penyelidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi semua yang bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan yang melibatkan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak; serta juga wajib memajukan kerjasama dan koordinasi internasional di antara otoritas-otoritas mereka, organisasi-organisasi non pemerintah nasional dan internasional serta organisasi-organisasi internasional;
- e) bahwa Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSISI), dalam Komitmen Tunis tahun 2005 (butir 24), mengakui peran TIK-TIK dalam perlindungan anak-anak dan dalam memajukan perkembangan anak-anak, mendesak negara-negara Anggota untuk menguatkan aksi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan membela hak-hak mereka dalam konteks TIK-TIK, menekankan bahwa kepentingan-kepentingan terbaik dari anak adalah pertimbangan utama;

oleh karenanya, Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi (butir 90 q) menetapkan komitmen untuk menggunakan TIK-TIK sebagai alat untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pengembangan yang telah disetujui secara internasional, termasuk Sasaran-sasaran Pengembangan Milenium, oleh, antara lain, regulasi inkorporasi, swa regulasi dan kebijakan-kebijakan dan kerangka-kerangka kerja lain yang efektif untuk melindungi anak dan kaum muda dari kekerasan dan eksploitasi melalui TIK-TIK ke dalam rencana-rencana aksi nasional dan e- strategi-strategi;

- f) nota kesepahaman antara sekretariat Perhimpunan dan Saluran Pertolongan Internasional untuk Anak (CHI);
- g) bahwa Resolusi 1305 yang diterima oleh Dewan pada sesinya tahun 2009, mengenai peran Kelompok yang Berdedikasi dalam mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan Internet internasional, terdapat dalam Lampiran 1 mengidentifikasi melindungi anak-anak dan kaum muda dari kekerasan dan eksploitasi sebagai satu dari isu-isu kebijakan publik yang masuk dalam cakupan kerja ITU mengenai masalah-masalah kebijakan publik yang terkait Internet internasional;
- h) Resolusi 1306 yang diterima oleh Dewan pada sesinya tahun 2009, dimana ketika kelompok kerja perlindungan *online* anak didirikan, dengan keikutsertaan Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor, serta mandatnya dirinci oleh anggota-anggota ITU dalam kolaborasi erat dengan sekretariat Perhimpunan;
- i) Resolusi 67 (Hyderabad, 2010) dari Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai peran Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU dalam perlindungan *online* anak;
- j) Resolusi 45 (Rev. Hyderabad, 2010) dari WTDC, tentang mekanisme untuk meningkatkan kerjasama keamanan dunia maya, termasuk menghadapi dan melawan surel sampah (*spam*), yang menyangkut perlindungan *online* anak;

mengakui

- a) bahwa ITU adalah moderator/fasilitator untuk Garis Aksi C5 (Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK);
- b) bahwa inisiatif Perlindungan *Online* Anak (COP) disampaikan kepada Segmen Tingkat Tinggi Dewan tahun 2008, dimana hal ini disahkan oleh Kepala-kepala Negara, menteri-menteri dan kepala-kepala organisasi internasional secara global;
- c) bahwa Seruan untuk Aksi sepanjang setahun yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal ITU pada 18 Mei 2009 untuk mempertimbangkan tahun 2009-2010 menjadi tahun keamanan *online* anak;
- d) bahwa ITU, berkolaborasi dengan anggota-anggota COP nya, telah menciptakan empat rangkaian pedoman untuk perlindungan anak dalam dunia maya, sebagai contoh: Pedoman untuk anak-anak,

Pedoman untuk para orangtua, para wali dan pendidik, Pedoman untuk industri dan Pedoman untuk pada pembuat kebijakan;

- e) bahwa, walaupun lebih dikehendaki untuk memiliki nomor telepon global untuk perlindungan *online* anak, justru karena kesulitan-kesulitan teknis saat ini, satu nomor yang diselaraskan secara global tidaklah mungkin, sebagaimana dijelaskan dalam Rekomendasi ITU-T E. 164/Suppl.5 (11/2009),

memperhatikan

- a) diskusi-diskusi dan observasi-observasi yang dibuat pada pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Dewan mengenai Perlindungan *Online* Anak (WG-COP);
- b) bahwa Hari Telekomunikasi Masyarakat Informasi Dunia tahun 2009 (WTISD-09) dirayakan di bawah tema “Melindungi anak-anak dalam dunia maya”, dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran global untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mengakses Internet secara aman,

memutuskan

- 1 bahwa ITU seharusnya melanjutkan inisiatif COP sebagai landasan untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu keamanan *online* anak;
- 2 bahwa ITU seharusnya terus memberikan bantuan dan dukungan kepada Negara-negara Anggota, khususnya negara-negara berkembang, dalam mengembangkan dan melaksanakan peta-peta jalan untuk inisiatif COP;
- 3 bahwa seharusnya ada koordinasi di antara semua kelompok ITU yang relevan mengenai isu-isu yang terkait kepada perlindungan anak *online*,

meminta kepada Dewan

untuk mempertahankan WG-COP, dalam rangka memfasilitasi masukan panduan keanggotan mengenai peran ITU dalam perlindungan *online* anak,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk meluncurkan upaya-upaya yang lebih besar untuk meyakinkan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa lain dalam domain ini, dan untuk berkoordinasi dengan mereka secara sesuai, dengan tujuan membangun kemitraan untuk memaksimalkan dan mensinergikan usaha-usaha di wilayah penting ini;
- 2 untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan ITU juga dengan inisiatif-inisiatif serupa lainnya yang dijalankan pada tingkat-tingkat nasional,

regional dan internasional, dalam rangka menghilangkan adanya kemungkinan tumpang tindih;

- 3 untuk membawa resolusi ini kepada perhatian anggota-anggota COP lainnya dan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan meningkatkan keterlibatan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam perlindungan *online* anak;
- 4 untuk menyerahkan laporan kemajuan mengenai hasil-hasil pelaksanaan resolusi ini kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

- 1 untuk menjalankan kegiatan-kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Resolusi 67 (Hyderabad, 2010), dan untuk melapor setiap tahun, sebagaimana sesuai, kepada Dewan;
- 2 untuk berkolaborasi secara erat dengan WG-COP, dengan tujuan untuk menghindari tumpang tindih upaya-upaya dan memaksimalkan keluaran-keluaran yang relevan untuk melindungi anak-anak *online*,

memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

untuk mendorong Kelompok Studi 2 dari Sektor Standardisasi Telekomunikasi (ITU-T) untuk terus mendalami pilihan mengenalkan nomor telepon tunggal yang diselaraskan secara global di masa depan, dan Negara-negara Anggota, untuk sementara, mengalokasikan suatu nomor telepon dalam basis regional untuk perlindungan *online* anak,

mengundang Negara-negara Anggota

- 1 untuk bergabung dan ikut serta secara aktif dalam WG-COP dan kegiatan-kegiatan ITU yang terkait, untuk maksud-maksud diskusi menyeluruh dan pertukaran informasi mengenai isu-isu hukum, teknis, organisasi dan prosedural, sebagaimana juga pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama internasional untuk melindungi anak-anak *online*;
- 2 untuk mengembangkan informasi, untuk mendidik dan untuk menciptakan kampanye-kampanye kesadaran konsumen yang ditujukan pada para orangtua, guru, industri dan populasi pada umumnya, dalam rangka membuat anak-anak sadar akan resiko-resiko yang dapat dihadapi saat *online*,

mengundang Anggota-anggota Sektor

untuk ikut serta secara aktif dalam WG-COP dan kegiatan-kegiatan ITU lainnya, dengan tujuan untuk menginformasikan keanggotaan ITU tentang solusi-solusi teknologi untuk melindungi anak-anak *online*.

RESOLUSI 180 (Guadalajara, 2010)
Memfasilitasi transisi dari IPv4 menjadi IPv6

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) Resolusi 64 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia, yang mendorong peluncuran IPv6;
- b) Opini 5 (Lisbon, 2009) Forum Kebijakan Telekomunikasi Dunia, mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung penerimaan IPv6;
- c) Resolusi 63 (Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi dunia, mengenai pengalokasian alamat IP dan mendorong peluncuran IPv6 di negara-negara berkembang,

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa Internet telah menjadi faktor terdepan dalam pengembangan sosial dan ekonomi serta alat yang sangat penting untuk inovasi komunikasi dan teknologi, menciptakan pergeseran paradigma sangat besar dalam sektor telekomunikasi dan teknologi informasi;
- b) bahwa memandang penghabisan tak terhindarkan dari alamat-alamat IPv4 dan dalam rangka memastikan stabilitas, pertumbuhan dan pengembangan Internet, tindakan-tindakan khusus harus ditentukan untuk transisi kepada IPv6,

memperhatikan

keputusan yang diambil oleh Dewan pada sesinya tahun 2009 untuk menetapkan kelompok kerja IPv6 (lihat Dokumen CO9/93),

mengakui

- a) bahwa peluncuran IPv6 memberikan kesempatan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan bahwa penerimaan awalnya adalah cara yang terbaik untuk menghindari kelangkaan alamat-alamat dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat diakibatkan dari habisnya alamat-alamat IPv4, termasuk biaya-biaya tinggi;
- b) bahwa para pemerintah memainkan peran penting sebagai pendorong untuk transisi kepada IPv6,

memutuskan

- 1 untuk menjelajahi cara-cara dan sarana-sarana untuk kolaborasi dan koordinasi yang lebih besar antara ITU dan organisasi-organisasi yang

relevan¹ yang terlibat dalam pengembangan jaringan-jaringan berbasis IP dan internet masa depan, melalui persetujuan-persetujuan kerjasama, sebagaimana sesuai, dalam rangka meningkatkan peran ITU dalam pengaturan Internet sehingga memastikan manfaat-manfaat maksimal untuk komunitas global;

- 2 untuk meningkatkan pertukaran pengalaman-pengalaman dan informasi dengan semua pemangku kepentingan mengenai penerimaan IPv6, dengan sasaran untuk menciptakan kesempatan-kesempatan untuk upaya-upaya kolaborasi, dan untuk memastikan bahwa ada umpan balik untuk memperkaya upaya-upaya mendukung transisi kepada IPv6;
- 3 untuk berkolaborasi erat dengan mitra-mitra relevan yang diakui secara internasional, termasuk komunitas Internet (misal registrasi Internet regional (RIR), Satuan Tugas Teknis Internet (IETF) dan lain-lainnya), dalam rangka mendorong peluncuran IPv6 dengan meningkatkan kesadaran dan melalui pengembangan sumber daya manusia;
- 4 untuk membantu Negara-negara Anggota yang, sesuai dengan kebijakan-kebijakan alokasi yang ada, memerlukan dukungan dalam pengelolaan dan alokasi sumber-sumber IPv6, mengikuti resolusi-resolusi yang relevan;
- 5 bahwa kelompok IPv6 menjalankan studi-studi rinci mengenai alokasi alamat IP sebagaimana diminta oleh Kelompok yang Berdedikasi mengenai isu-isu kebijakan publik yang berhubungan dengan Internet internasional, baik untuk alamat-alamat IPv4 maupun untuk alamat-alamat IPv6,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi berkoordinasi dengan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

- 1 untuk menjalankan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan di bawah *memutuskan* di atas dalam rangka kelompok studi Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) yang relevan dapat menjalankan kerjanya;
- 2 seraya membantu Negara-negara anggota yang memerlukan dukungan dalam pengelolaan dan alokasi sumber-sumber IPv6, untuk memonitor mekanisme-mekanisme alokasi saat ini (termasuk penyebaran setara dari alamat-alamat) untuk Negara-negara Anggota ITU dan Anggota-anggota Sektor, dan untuk mengidentifikasi dan menunjuk kesalahan-kesalahan apapun yang berada di dalam mekanisme-mekanisme alokasi saat ini;
- 3 untuk mengomunikasikan usulan-usulan untuk perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan yang ada, apabila diidentifikasi di bawah studi-studi di atas, sesuai dengan proses pengembangan kebijakan yang ada;

¹ termasuk namun tidak terbatas pada, Perusahaan Internet untuk Penetapan Nama-nama and Nomor-nomor (ICANN), Pencatat-pencatat Internet regional (RIRs), Gugus Tugas Rekayasa Internet (IETF), Masyarakat Internet (ISOC) dan Konsorsium Situs Seluruh Dunia (W3C), atas dasar timbale-balik.

- 4 untuk mengembangkan statistik-statistik mengenai kemajuan yang dibuat dengan transisi, berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan secara regional melalui kolaborasi dengan organisasi-organisasi regional,

mengundang Negara-negara Anggota

- 1 melalui pengetahuan yang didapat dalam *memutuskan 2*, untuk memajukan inisiatif-inisiatif khusus pada tingkat nasional, yang memajukan interaksi dengan entitas-entitas pemerintah, swasta dan pendidikan serta masyarakat sipil untuk tujuan-tujuan pertukaran informasi yang diperlukan untuk peluncuran IPv6 di masing-masing negara;
- 2 untuk mendorong, dengan dukungan dari kantor-kantor regional ITU, registrasi Internet regional (RIRs) dan organisasi-organisasi regional lainnya dalam tindakan-tindakan penelitian, penyebarluasan dan pelatihan yang terkoordinasi dengan peran serta dari pemerintah-pemerintah, industri dan komunitas pendidikan dalam rangka memfasilitasi peluncuran IPv6 di dalam negara-negara dan dalam wilayah, serta untuk mengoordinasikan inisiatif-inisiatif antara wilayah-wilayah untuk memajukan peluncurannya di seluruh dunia;
- 3 untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan nasional untuk memajukan pembaharuan sistem teknologi dalam rangka memastikan bahwa layanan-layanan publik yang disediakan menggunakan protokol IP dan prasarana komunikasi serta aplikasi-aplikasi relevan dari Negara-negara Anggota adalah sesuai dengan IPv6;
- 4 untuk memastikan, dalam tindakan-tindakan yang dijalankan mengenai perlengkapan komunikasi dan komputer, bahwa kebijakan-kebijakan yang diperlukan diambil sehingga perlengkapan baru memiliki kapasitas IPv6, dengan memperhatikan periode yang diperlukan untuk transisi dari IPv4 ke IPv6,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk menyebarluaskan, sebagaimana sesuai, kepada keanggotaan ITU dan komunitas Internet, informasi mengenai kemajuan yang dicapai mengenai pelaksanaan resolusi ini

RESOLUSI 181 (Guadalajara, 2010)
Definisi dan peristilahan yang berhubungan dengan pembangunan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengingat

- a) Resolusi 45 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC);
- b) Resolusi 130 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, yang memutuskan untuk memberikan prioritas tinggi kepada peran ITU dalam membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK-TIK);
- c) ketentuan-ketentuan dari Komitmen Tunis dan Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi yang terkait dengan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK;
- d) hasil-hasil dari kedua fase Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (WSIS) mengenai isu ini,
- e) bahwa, sesuai dengan Garis Aksi C5 WSIS, Resolusi 149 (Antalya, 2006) Konferensi Yang Berkuasa Penuh memerintahkan Dewan ITU untuk mendirikan suatu kelompok kerja, terbuka kepada semua Negara Anggota dan Anggota Sektor, untuk mempelajari peristilahan yang terkait dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK, dan untuk mengembangkan definisi-definisi dan perincian mengenai hal ini;
- f) Program 2 (Keamanan dunia maya, aplikasi-aplikasi TIK dan isu-isu yang terkait jaringan berbasis IP) Rencana Aksi Hyderabad yang diterima oleh WTDC-10,

menyadari

- a) bahwa salah satu dari tujuan-tujuan Perhimpunan adalah untuk mempertahankan dan memperluas kerja sama internasional di antara semua Negara Anggota untuk peningkatan dan penggunaan rasional dari semua jenis telekomunikasi;
- b) bahwa tujuan-tujuan lain dari Perhimpunan adalah untuk memajukan pengembangan fasilitas-fasilitas teknik dan operasinya yang paling efisien dengan maksud untuk memperbaiki efisiensi layanan-layanan telekomunikasi, meningkatkan kegunaan mereka,

menimbang

- a) kebutuhan untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan telekomunikasi/TIK-TIK dengan menguatkan kerangka

kerja yang dipercaya (butir 39 Agenda Tunis) dan kebutuhan untuk pemerintah-pemerintah, dalam kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang lain, dalam peran masing-masing, untuk mengembangkan perundang-undangan yang diperlukan untuk penyelidikan dan penuntutan kejahatan dunia maya, pada tingkat nasional, regional dan internasional;

- b) bahwa Resolusi 64/211 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengundang Negara-negara Anggota untuk menggunakan, apabila dan saat dianggap sesuai, alat swa-penaksiran sukarela yang dilampirkan kepada resolusi tersebut untuk upaya-upaya nasional;
- c) alasan-alasan di belakang penerimaan Resolusi 37 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC, mengenai penjembatanaan kesenjangan digital, dengan memperhatikan pentingnya pelaksanaan para pemangku kepentingan pada tingkat internasional terhadap garis-garis aksi yang disebutkan dalam butir 108 Agenda Tunis, termasuk “Membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK”,

memperhatikan

- a) pentingnya membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK sebagaimana digarisbawahi dalam WSIS;
- b) bahwa ada kebutuhan untuk mempertahankan peristilahan umum yang terkait dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK;
- c) kerja yang sedang berlangsung yang dijalankan oleh organisasi-organisasi seperti Organisasi untuk Standardisasi Internasional (ISO) dan Gugus Tugas Teknis Internet (IETF) dalam hubungan dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK;
- d) bahwa Resolusi 50 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia (WTSA), mengenai keamanan dunia maya, dan Resolusi 52 (Rev. Johannesburg, 2008) WTSA, perihal menghadapi dan memerangi surel sampah (*spam*), termasuk studi mengenai aspek-aspek teknis untuk mengurangi dampak fenomena ini,

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa di bidang keamanan, Kelompok Studi 17 Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) bertanggungjawab untuk mengembangkan rekomendasi-rekomendasi inti mengenai keamanan telekomunikasi dan TIK, seperti arsitektur dan kerangka-kerangka kerja keamanan; fundamental-fundamental perlindungan, termasuk ancaman-ancaman, kerentanan dan resiko-resiko; pengelolaan otentikasi dan identitas, penanganan dan forensik kejadian, serta aspek-aspek keamanan dari aplikasi-aplikasi komunikasi;

- b) bahwa Rekomendasi ITU-T X.1205 (2008), mengenai tinjauan keseluruhan keamanan dunia maya, memberikan definisi peristilahan keamanan dunia maya;
- c) bahwa kelompok Kerja Dewan mengenai studi definisi-definisi dan peristilahan yang terkait dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK (WG-Def), yang didirikan oleh Resolusi 149 (Antalya, 2006), meneliti beberapa usulan dan mencapai kesepakatan mengenai definisi “keamanan dunia maya” dalam Rekomendasi ITU-T X.1205 (2008);
- d) bahwa kelompok Dewan sebagaimana disebut di atas, dalam laporan akhirnya pada sesi Dewan tahun 2009, mengajukan dua pilihan yang terkait dengan definisi untuk keamanan dunia maya, sebagaimana direproduksi di bawah:

Pilihan 1

- 1a. Mengenalkan kata “keamanan dunia maya”, dalam Pasal 1 Konstitusi dan menjabarkan hal ini dalam Lampiran Konstitusi, berdasarkan definisi yang telah disetujui, atau
- 1b. Mengenalkan kata “keamanan dunia maya” dalam pasal yang relevan dalam Konvensi dan menjabarkan hal ini dalam Lampiran Konvensi;

Pilihan 2

- 2. menerima resolusi oleh Konferensi Yang Berkuasa Penuh mengenai definisi ini,

mengakui

- a) kerja yang sedang berlangsung oleh ITU-T dan Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK;
- b) pentingnya mempelajari isu peristilahan yang terkait dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK, dan mengenai penelitian serta pengembangan definisi-definisi dan deskripsi-deskripsi mengenai perihal ini, sebagaimana sesuai;
- c) bahwa seperangkat landasan ini perlu mencakup isu-isu penting lainnya sebagai tambahan terhadap keamanan dunia maya,

mengakui lebih lanjut

- a) bahwa, sehubungan dengan lingkungan teknologi yang terus berubah serta potensi kemunculan resiko-resiko dan kerentanan-kerentanan yang baru dan tidak terduga sebelumnya, terkait dengan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK, serta untuk alasan-alasan lain, yang mungkin menjadi perlu bagi Kelompok Studi 17 ITU-T untuk memutakhirkan definisi keamanan dunia maya yang dipaparkan dalam Rekomendasi ITU-T X.1205;

- b) bahwa definisi keamanan dunia maya kemungkinan perlu dimodifikasi dari waktu ke waktu untuk mencerminkan perubahan-perubahan dalam kebijakan;
- c) kerja Kelompok Studi 17 ITU-T (Keamanan) mengenai prasarana-prasarana penentu publik, pengelolaan identitas, tanda tangan-tanda tangan digital, panduan keamanan, peta jalan standar-standar keamanan dan kerangka kerja pertukaran informasi keamanan dunia maya;
- d) bahwa kerja sebagaimana tersebut di atas berlanjut dalam Kelompok Studi 17 ITU-T dalam rangka mengembangkan lebih lanjut perangkat definisi yang disebutkan di atas dengan memperhatikan pengembangan yang berkelanjutan dalam teknologi TIK;
- e) bahwa pencakupan definisi apapun yang terkait dengan TIK, yang merupakan isu yang terus berubah, seperti definisi keamanan dunia maya, dalam Konstitusi yang stabil adalah tidak konsisten dengan dasar prinsip-prinsip dimana Konstitusi yang stabil akan didirikan,

memutuskan

- 1 untuk memperhatikan definisi “keamanan dunia maya” yang disetujui dalam Rekomendasi ITU-T X.1205¹ untuk penggunaan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK;
- 2 bahwa catatan kaki di atas merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari resolusi ini,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

menjadikan resolusi ini untuk diperhatikan oleh organisasi-organisasi internasional dan entitas-entitas lain yang relevan yang berhubungan dengan keamanan telekomunikasi/TIK-TIK untuk menjadi pertimbangan dan tindakan apapun yang diperlukan, sebagaimana sesuai,

¹ Rekomendasi ITU-T X.1205, "Keamanan dunia maya: Keamanan dunia maya adalah kumpulan dari alat-alat, kebijakan-kebijakan, konsep-konsep keamanan, pengamanan-pengamanan keamanan, pedoman-pedoman, pendekatan-pendekatan pengelolaan resiko, aksi-aksi, pelatihan-pelatihan, praktik-praktik keberhasilan, jaminan dan teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan dunia maya dan organisasi dan asset-aset pengguna. Organisasi dan asset-aset pengguna termasuk perangkat-perangkat komputer tersambung, personil, prasarana, aplikasi-aplikasi, layanan-layanan, sistem-sistem telekomunikasi, dan keseluruhan dari informasi terkirim dan/atau tersimpan dalam lingkungan dunia maya. Keamanan dunia maya berjuang untuk memastikan perolehan dan pemeliharaan dari kepemilikan-kepemilikan keamanan dari organisasi dan asset-aset pengguna melawan resiko-resiko keamanan yang relevan dalam lingkungan dunia maya. Maksud-maksud keamanan secara umum terdiri dari hal-hal berikut:

- Ketersediaan
- Integritas, yang dapat termasuk keaslian dan non-penolakan
- Kerahasiaan"

memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Direktur-direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi dan Biro Pengembangan Telekomunikasi

untuk memperhatikan definisi “keamanan dunia maya” yang diterima dalam Rekomendasi ITU-T X.1205 untuk penggunaan kegiatan-kegiatan ITU yang terkait dengan membangun kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK,

memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

untuk melapor kepada Dewan mengenai rekomendasi-rekomendasi apapun yang baru atau direvisi yang diterima oleh ITU-T yang terkait kepada atau mempengaruhi peristilahan dan definisi-definisi yang terkait dengan keamanan dunia maya atau definisi-definisi lain mengenai kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK,

mengundang Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

untuk ikut serta secara aktif dalam kelompok-kelompok studi yang relevan yang berurusan dengan isu-isu yang terkait dengan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan TIK-TIK.

RESOLUSI 182 (Guadalajara, 2010)
Peran telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi sehubungan dengan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

mengakui

- a) Resolusi 136 (Rev. Guadalajara, 2010) Konferensi Yang Berkuasa Penuh, mengenai penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK-TIK) untuk pemantauan dan pengelolaan dalam keadaan-keadaan darurat dan bencana untuk peringatan dini, pencegahan, mitigasi dan pemulihan;
- b) resolusi-resolusi relevan dari konferensi-konferensi komunikasi radio dan sidang-sidang komunikasi radio, seperti Resolusi 646 (WRC-03), mengenai perlindungan publik dan pemulihan bencana; Resolusi 644 (Rev. WRC-07), mengenai sumber-sumber komunikasi radio untuk peringatan dini, mitigasi bencana dan operasi pemulihan; atau Resolusi 673 (WRC-07), mengenai penggunaan komunikasi radio untuk observasi Bumi, berkolaborasi dengan Organisasi Meteorologi dunia (WMO);
- c) Resolusi 73 (Johannesburg, 2008) Sidang Standardisasi Telekomunikasi Dunia, mengenai TIK-TIK dan perubahan iklim, yang dihasilkan dari kerja sukses dari kelompok fokus yang didirikan tahun 2007 oleh Kelompok Penasihat Standardisasi Telekomunikasi untuk mengidentifikasi peran Sektor Standardisasi Telekomunikasi ITU (ITU-T) dengan memperhatikan isu ini, dan telah diterima sebagai tanggapan dari kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasi dalam kontribusi-kontribusi yang relevan terhadap WTSA-08 oleh kelompok-kelompok regional ITU;
- d) Resolusi 66 (Rev. Hyderabad, 2010) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC), mengenai TIK dan perubahan iklim;
- e) Resolusi 54 (Rev. Hyderabad, 2010) WTDC, mengenai aplikasi-aplikasi TIK;
- f) Resolusi 1307 yang diterima oleh Dewan ITU pada sesinya tahun 2009, mengenai TIK-TIK dan perubahan iklim,

mengakui lebih lanjut

- a) butir 20 Garis Aksi C7 (E-lingkungan) Rencana Aksi Jenewa dari Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Masyarakat Informasi (Jenewa, 2003), yang menyerukan untuk pembentukan sistem-sistem pemantauan menggunakan TIK-TIK untuk memprakiraan dan memantau dampak bencana-bencana alam dan bencana akibat perbuatan manusia, khususnya di negara-negara berkembang;
- b) Opini 3 Forum Kebijakan Telekomunikasi Dunia tahun 2009, mengenai TIK dan lingkungan, yang mengakui bahwa telekomunikasi/TIK-TIK

dapat membuat kontribusi secara substansial terhadap mitigasi dan menyesuaikan dampak-dampak perubahan iklim, dan menyerukan untuk memformulasikan penemuan-penemuan dan upaya-upaya di masa depan untuk membahas perubahan iklim secara efektif;

- c) hasil-hasil dari konferensi-konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Indonesia pada bulan Desember 2007 dan di Copenhagen pada bulan Desember 2009;
- d) Deklarasi Nairobi mengenai Pengelolaan Sampah Listrik dan Elektronik yang Aman bagi Lingkungan, dan penerimaan oleh Konferensi Kesembilan dari Kelompok-kelompok pada Konvensi Basel mengenai Rencana Kerja untuk Pengelolaan E-sampah yang Aman bagi Lingkungan, memfokuskan pada kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam masa transisi,

menimbang

- a) bahwa Majelis Antarpemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan bahwa emisi-emisi dari gas rumah kaca global (GHG) telah meningkat lebih dari 70 persen sejak tahun 1970, memiliki dampak pada pemanasan global, perubahan pola-pola cuaca, meningkatnya ketinggian air laut, penggurunan, menciutnya lapisan es dan dampak-dampak jangka panjang lainnya;
- b) bahwa perubahan iklim diketahui sebagai ancaman potensial terhadap semua negara dan memerlukan suatu tanggapan global;
- c) bahwa konsekuensi-konsekuensi dari kurangnya persiapan negara-negara berkembang di masa lalu sekarang telah berkurang, dan bahwa negara-negara ini akan terekspos terhadap bahaya-bahaya yang tidak dapat dihitungkan dan kerugian-kerugian yang sangat banyak, termasuk konsekuensi-konsekuensi dari meningkatnya ketinggian air laut di banyak wilayah pantai di negara-negara berkembang;
- d) Program 5 Rencana Aksi Hyderabad untuk negara-negara terbelakang, negara-negara dengan kebutuhan khusus (negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara berpantai rendah dan negara-negara berkembang daratan), telekomunikasi darurat dan adaptasi perubahan iklim,

menimbang

- a) bahwa telekomunikasi/TIK-TIK memainkan peran yang penting dalam melindungi lingkungan dan dalam memajukan kegiatan-kegiatan pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan yang memiliki resiko rendah terhadap lingkungan;
- b) bahwa peran telekomunikasi/TIK dalam menghadapi tantangan perubahan iklim mencakup berbagai kegiatan yang luas, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: memajukan telekomunikasi/TIK-TIK sebagai

alternatif terhadap teknologi-teknologi lain yang mengonsumsi lebih banyak energi; pengembangan peralatan, aplikasi-aplikasi dan jaringan-jaringan yang efisien energi; pengembangan metode-metode kerja yang efisien energi, pelaksanaan landasan-landasan satelit dan sensor jarak jauh berbasis daratan untuk observasi lingkungan, termasuk pemantauan cuaca; dan penggunaan telekomunikasi/TIK-TIK untuk memperingatkan publik terhadap kejadian-kejadian cuaca berbahaya dan memberikan dukungan komunikasi untuk organisasi pemerintah dan non pemerintah penyedia bantuan untuk memberikan kontribusi kepada pengurangan emisi-emisi GHG;

- c) bahwa aplikasi-aplikasi sensor jarak jauh pada satelit-satelit dan sistem-sistem komunikasi radio lain adalah peralatan yang penting untuk pemantauan iklim, observasi lingkungan, prakiraan bencana, deteksi penebangan hutan liar, serta deteksi dan mitigasi bagi dampak-dampak negatif dari perubahan iklim;
- d) ITU dapat berperan dalam memajukan penggunaan TIK-TIK untuk mitigasi dampak-dampak perubahan iklim, dan bahwa rencana strategis untuk Perhimpunan di tahun 2012-2015 memberi prioritas jelas terhadap memerangi perubahan iklim menggunakan TIK-TIK;
- e) bahwa penggunaan telekomunikasi/TIK-TIK memberi peningkatan kesempatan-kesempatan untuk mengurangi emisi-emisi GHG yang dihasilkan oleh sektor-sektor non TIK melalui penggunaan telekomunikasi/TIK-TIK dengan cara-cara yang menggantikan layanan-layanan atau meningkatkan efisiensi sektor-sektor yang terkait,

menyadari

- a) bahwa telekomunikasi/TIK-TIK juga memberi kontribusi kepada emisi-emisi GHG, kontribusi yang, walaupun relatif kecil, akan bertumbuh sejalan dengan peningkatan penggunaan telekomunikasi/TIK-TIK, dan bahwa prioritas penting harus diberikan untuk mengurangi emisi-emisi GHG;
- b) bahwa negara-negara berkembang menghadapi tantangan-tantangan tambahan dalam menyelesaikan dampak-dampak perubahan iklim, termasuk bencana-bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim,

mengingat

- a) bahwa negara-negara telah meratifikasi Protokol Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) dan telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat-tingkat emisi GHGnya untuk sasaran-sasaran yang terutama ditentukan di bawah tingkat-tingkat emisi tahun 1990;
- b) bahwa negara-negara yang telah menyerahkan rencana-rencana dalam tanggapan terhadap Copenhagen Accord telah merinci langkah-langkah mana yang akan siap mereka lakukan untuk mengurangi intensitas karbon dalam dekade saat ini,

memperhatikan

- a) bahwa Kelompok Studi 5 ITU-T saat ini adalah kelompok studi ITU-T utama yang bertanggungjawab untuk studi-studi mengenai metodologi-metodologi untuk mengevaluasi dampak-dampak telekomunikasi/TIK terhadap perubahan iklim, untuk menerbitkan pedoman untuk penggunaan TIK-TIK yang ramah lingkungan, untuk mempelajari efisiensi energi dari sistem-sistem catu-daya, untuk mempelajari aspek-aspek lingkungan dari fenomena elektromagnetik TIK, dan untuk mempelajari, menaksir dan menganalisa sirkulasi ulang sosial dari peralatan telekomunikasi/TIK yang aman dan berbiaya rendah, melalui daur ulang dan pemakaian ulang;
- b) Pertanyaan 24/2 Kelompok Studi 2 dari Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D), mengenai TIK-TIK dan perubahan iklim, yang diterima oleh WTDC-10;
- c) bahwa rekomendasi-rekomendasi ITU yang berfokus pada sistem-sistem dan aplikasi-aplikasi penghematan energi dapat memainkan peran penentu dalam pengembangan telekomunikasi/TIK-TIK, dengan memajukan penerimaan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan telekomunikasi/TIK untuk berperan sebagai alat jalan pintas yang efektif untuk mengukur dan mengurangi emisi-emisi GHG di seluruh kegiatan ekonomi dan sosial;
- d) kepemimpinan Sektor Komunikasi Radio ITU (ITU-R), berkolaborasi dengan keanggotaan ITU, dalam kelanjutannya untuk mendukung studi-studi mengenai penggunaan sistem-sistem komunikasi radio, termasuk aplikasi-aplikasi sensor jarak jauh, untuk memperbaiki pemantauan iklim serta prakiraan, deteksi dan pemulihan bencana;
- e) bahwa ada badan-badan internasional lain yang sedang bekerja untuk isu-isu perubahan iklim, termasuk UNFCCC, dan bahwa ITU seharusnya berkolaborasi, dalam mandatnya, dengan entitas-entitas tersebut;
- f) bahwa beberapa negara telah berkomitmen untuk mengurangi 20 persen emisi-emisi GHG dalam sektor TIK-TIK maupun dalam penggunaan TIK di sektor-sektor lain pada tahun 2020, terhadap tingkat-tingkat tahun 1990,

memutuskan

bahwa ITU, di dalam mandatnya dan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain, akan menunjukkan kepemimpinannya dalam menerapkan telekomunikasi/TIK-TIK untuk menangani penyebab-penyebab dan dampak-dampak perubahan iklim melalui sebagai berikut:

- 1 untuk terus dan lebih lanjut mengembangkan kegiatan-kegiatan ITU mengenai telekomunikasi/TIK-TIK dan perubahan iklim dalam rangka memberikan kontribusi bagi upaya-upaya global yang lebih luas yang sedang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;

- 2 untuk mendorong efisiensi energi telekomunikasi/TIK-Tik dalam rangka mengurangi emisi-emisi GHG yang dihasilkan oleh sektor telekomunikasi/TIK;
- 3 untuk mendorong sektor telekomunikasi/TIK untuk memberikan kontribusi, melalui perbaikan efisiensi energinya sendiri dan dalam penggunaan TIK-TIK di dalam bagian-bagian perekonomian lainnya, untuk mengurangi emisi-emisi GHG setiap tahun;
- 4 untuk melaporkan pada tingkat dimana sektor TIK telah berkontribusi melalui suatu pengurangan emisi-emisi GHG di sektor-sektor lain melalui pengurangan konsumsi energinya dengan menerapkan TIK-TIK;
- 5 untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan yang terkait dengan desain perlengkapan telekomunikasi/TIK dan mendorong efisiensi energi dan penggunaan bahan-bahan dalam desain dan pabrikasi perlengkapan telekomunikasi/TIK dalam rangka meningkatkan lingkungan yang bersih dan aman;
- 6 untuk mencakup, sebagai prioritas, bantuan untuk negara-negara berkembang sedemikian rupa sehingga menguatkan sumber-sumber daya manusia dan kelebihannya dalam meningkatkan penggunaan telekomunikasi/TIK-TIK untuk mengatasi perubahan iklim, sebagaimana juga di bidang-bidang seperti kebutuhan oleh komunitas-komunitas untuk menyesuaikan terhadap perubahan iklim, sebagai elemen penentu bagi perencanaan pengelolaan bencana,

memerintahkan Sekretaris Jenderal, berkolaborasi dengan Direktur-direktur tiga Biro

- 1 untuk merumuskan suatu rencana aksi bagi peran ITU, dengan memperhatikan semua resolusi ITU yang relevan, yang berkaitan dengan badan-badan/kelompok-kelompok ahli yang relevan lainnya, dan memperhatikan mandat khusus dari ketiga Sektor ITU tersebut;
- 2 untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok studi ITU relevan yang bertanggung jawab untuk TIK-TIK dan perubahan iklim melaksanakan rencana aksi sebagaimana dirujuk pada *memerintahkan Sekretaris Jenderal, berkolaborasi dengan Direktur dari ketiga Biro* 1 di atas;
- 3 untuk menghubungkan dengan organisasi-organisasi relevan lainnya dalam rangka menghindari duplikasi kerja dan mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya;
- 4 untuk memastikan bahwa ITU menyelenggarakan lokakarya-lokakarya, seminar-seminar dan kursus-kursus pelatihan di negara-negara berkembang di tingkat regional dengan maksud meningkatkan kesadaran dan mengidentifikasi isu-isu penentu dalam rangka menghasilkan pedoman-pedoman praktik terbaik;
- 5 untuk terus mengambil kebijakan yang sesuai di dalam Perhimpunan untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan jejak karbon (misal pertemuan-pertemuan tanpa kertas, konferensi-konferensi video, dll.)

- 6 untuk melaporkan setiap tahun kepada Dewan dan kepada konferensi yang berkuasa penuh berikutnya mengenai kemajuan yang telah dilakukan oleh ITU mengenai pelaksanaan resolusi ini;
- 7 untuk menyerahkan resolusi ini dan hasil-hasil kegiatan-kegiatan ITU lain yang sesuai kepada pertemuan-pertemuan dari organisasi-organisasi yang relevan, termasuk UNFCCC, dalam rangka mengulangi pernyataan komitmen Perhimpunan terhadap pertumbuhan global yang berkelanjutan; dan untuk memastikan pengakuan pentingnya telekomunikasi/TIK-TIK dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi sebagaimana juga peran penentu ITU dalam perihal ini,

memerintahkan Direktur-direktur dari ketiga Biro, sesuai batas mandat-mandatnya

- 1 untuk melanjutkan pengembangan praktik-praktik dan pedoman-pedoman terbaik yang akan membantu para pemerintah dalam pengembangan langkah-langkah kebijakan yang dapat digunakan untuk mendukung sektor TIK dalam mengurangi emisi-emisi GHG dan meningkatkan TIK-TIK di sektor-sektor lain;
- 2 untuk membantu meningkatkan penelitian dan pengembangan:
 - untuk meningkatkan efisiensi energi perlengkapan TIK
 - untuk mengukur perubahan iklim
 - untuk memitigasi dampak-dampak perubahan iklim
 - untuk menyesuaikan terhadap dampak-dampak perubahan iklim,

memerintahkan Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi

- 1 untuk membantu kelompok studi ITU-T utama mengenai TIK-TIK dan perubahan iklim (pada saat ini Kelompok Studi 5 ITU-T), berkolaborasi dengan badan-badan lain, dalam pengembangan metodologi-metodologi untuk menilai:
 - i) tingkat efisiensi energi dalam sektor TIK dan penerapan telekomunikasi/TIK-TIK dalam sektor-sektor non TIK;
 - ii) siklus kehidupan emisi-emisi GHG perlengkapan telekomunikasi/TIK yang lengkap, berkolaborasi dengan badan-badan relevan lainnya, dalam rangka menetapkan praktik terbaik di sektor-sektor terhadap serangkaian metrik yang disepakati yang memungkinkan manfaat-manfaat penggunaan kembali, pembaharuan dan daur ulang yang akan diukur dalam rangka membantu mencapai pengurangan-pengurangan emisi-emisi GHG baik di sektor telekomunikasi/TIK maupun dalam penggunaan TIK-TIK di sektor-sektor lainnya;
- 2 untuk meningkatkan kerja ITU dan bekerja sama dengan entitas-entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan lain dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim, bekerja mencapai pengurangan penggunaan energi dan emisi-emisi GHG yang progresif dan dapat diukur sepanjang umur perangkat telekomunikasi/TIK;

- 3 untuk memanfaatkan Kegiatan Koordinasi Bersama terkini mengenai TIK dan pada perubahan iklim dalam diskusi-diskusi ahli dan khusus dengan industri-industri lainnya, mengambil dari keahlian yang ada di forum-forum, sektor-sektor industrial (dan forum-forum yang relevannya) dan akademisi lainnya dalam rangka untuk:
 - i) menunjukkan kepemimpinan ITU dalam pengurangan-pengurangan GHG dan penghematan-penghematan energi dalam sektor TIK;
 - ii) memastikan bahwa ITU secara aktif memimpin dalam penerapan TIK-TIK di industri-industri lain dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi-emisi GHG,

mengundang Negara-negara Anggota, Anggota-anggota Sektor dan Asosiat-asosiat

- 1 untuk terus memberikan kontribusi secara aktif kepada ITU mengenai TIK-TIK dan perubahan iklim;
- 2 untuk melanjutkan atau menginisiasi program-program publik dan swasta yang mencakup TIK-TIK dan perubahan iklim, dengan mempertimbangkan inisiatif-inisiatif ITU yang relevan;
- 3 untuk mendukung dan memberi kontribusi kepada proses Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih luas mengenai perubahan iklim;
- 4 untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak-dampak perubahan iklim dengan mengembangkan dan menggunakan lebih banyak alat-alat, aplikasi-aplikasi dan jaringan-jaringan TIK yang lebih hemat energi melalui penerapan TIK-TIK di bidang-bidang lain;
- 5 untuk meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali perangkat telekomunikasi/TIK;
- 6 untuk terus mendukung kerja ITU-R dalam sensor jarak jauh (aktif dan pasif) untuk observasi lingkungan dan sistem-sistem komunikasi radio lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pemantauan iklim, prakiraan bencana, peringatan dan tanggapan sesuai dengan resolusi-resolusi relevan yang diterima oleh sidang-sidang komunikasi radio dan konferensi-konferensi komunikasi radio dunia.

RESOLUSI 183 (Guadalajara, 2010)
Aplikasi telekomunikasi/TIK untuk e-kesehatan

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) definisi e-kesehatan yang dibuat oleh Resolusi 58/28 Sidang Kesehatan Dunia, Jenewa 2005 sebagai "... penggunaan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi yang berbiaya efektif dan aman dalam mendukung bidang-bidang kesehatan dan yang terkait kesehatan, termasuk layanan-layanan perawatan kesehatan, pengawasan kesehatan, literatur kesehatan, serta pendidikan, pengetahuan dan penelitian kesehatan";
- b) bahwa Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC) (Doha, 2006) merekomendasikan bahwa ITU terus mempelajari mengenai potensi penggunaan telekomunikasi untuk e-kesehatan dalam rangka menemui kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang;
- c) Resolusi 65 (Hyderabad, 2010) WTDC, mengenai memperbaiki akses terhadap layanan-layanan perawatan kesehatan dengan menggunakan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi (TIK-TIK),

menimbang lebih lanjut

- a) bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan ITU memiliki suatu peran penentu untuk meningkatkan koordinasi yang lebih kuat di antara para pemain kunci di seluruh bidang teknis standardisasi e-kesehatan;
- b) kebutuhan untuk menyediakan klinik perawatan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien dengan menggunakan TIK-TIK e-kesehatan;
- c) bahwa aplikasi-aplikasi e-kesehatan dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK yang mendukungnya telah banyak, tetapi jauh dari optimalisasi dan keterpaduan yang penuh;
- d) pentingnya mempertahankan momentum demikian yang berpotensi memberikan manfaat teknologi telekomunikasi/TIK di sektor perawatan kesehatan didukung oleh kerangka-kerangka kerja pengaturan, hukum dan kebijakan yang sesuai di sektor-sektor telekomunikasi maupun sektor kesehatan,

mengakui

- a) pekerjaan yang sedang berjalan dari Kelompok Studi 2 Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D) melalui Pertanyaan 14-3/2, mengenai informasi dan telekomunikasi untuk e-kesehatan;
- b) bahwa terdapat inisiatif-inisiatif kawasan Eropa untuk berbagi praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan e-aplikasi, termasuk e-kesehatan;

- c) bahwa standar-standar TIK perawatan kesehatan dipertimbangkan sebagai suatu subyek dengan kepentingan tinggi oleh Kolaborasi Standar-standar Global (GSC-13);
- d) bahwa standar-standar TIK perawatan kesehatan perlu disesuaikan, apabila perlu, untuk menyesuaikan konteks dari setiap Negara Anggota, dan bahwa hal ini mensyaratkan menguatkan pengembangan dan dukungan sumber daya manusia;
- e) kerja yang sedang berlangsung dalam ITU-D untuk menjembatani kesenjangan digital e-kesehatan;
- f) publikasi di bawah Kelompok Studi 2 ITU-D Pertanyaan 14-2/2 yang berjudul “Solusi e-kesehatan bergerak untuk negara berkembang”,

memutuskan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal

- 1 untuk memberi pertimbangan prioritas terhadap perluasan inisiatif-inisiatif telekomunikasi/TIK untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan e-kesehatan antara Sektor Komunikasi Radio (ITU-R) dan Sektor Standardisasi Telekomunikasi (ITU-T), ITU-D dan organisasi-organisasi relevan lainnya;
- 2 untuk terus dan lebih lanjut mengembangkan kegiatan-kegiatan ITU pada aplikasi-aplikasi telekomunikasi/TIK untuk e-kesehatan dalam rangka memberikan kontribusi bagi upaya-upaya global yang lebih luas mengenai e-kesehatan,

memerintahkan Sekretaris Jenderal, berkonsultasi dengan Direktur-direktur Biro

- 1 untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan contoh-contoh dari praktik terbaik untuk e-kesehatan di bidang telekomunikasi/TIK untuk penyebarluasan di antara Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor ITU;
- 2 untuk melaporkan informasi dan perkembangan-perkembangan kepada Negara-negara Anggota melalui suatu mekanisme yang sesuai;
- 3 untuk berkoordinasi kegiatan-kegiatan yang terkait e-kesehatan dengan ITU-R, ITU-T dan ITU-D, dan terutama untuk meningkatkan kesadaran, pengarusutamaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penciptaan standar-standar telekomunikasi/TIK e-kesehatan, melaporkan temuan-temuan kepada Dewan apabila sesuai;
- 4 untuk bekerja secara kolaboratif mengenai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan e-kesehatan dengan WHO dan ITU-R, ITU-T dan ITU-D, serta, terutama, mengembangkan program-program yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengenalkan layanan-layanan e-kesehatan secara aman dan secara efektif,

mengundang Negara-negara Anggota

untuk mempertimbangkan mengembangkan perundang-undangan, peraturan-peraturan, standar-standar, kode-kode etik dan pedoman-pedoman yang sesuai untuk meningkatkan pengembangan dan penerapan layanan-layanan, produk-produk dan terminal-terminal telekomunikasi/TIK e-kesehatan,

mendorong Negara-negara Anggota dan Anggota-anggota Sektor

Untuk berpartisipasi secara aktif dalam kajian-kajian studi-studi yang terkait e-kesehatan dalam ITU-R, ITU-T dan ITU-D melalui kontribusi-kontribusi dan cara-cara yang sesuai lainnya.

RESOLUSI 184 (Guadalajara, 2010)
Fasilitasi inisiatif inklusi digital untuk masyarakat madani

Konferensi Yang Berkuasa Penuh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Guadalajara, 2010),

menimbang

- a) bahwa Resolusi 46 (Doha, 2006) Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC) mengakui pentingnya isu-isu yang berkenaan dengan masyarakat madani di seluruh dunia dalam menentukan kegiatan-kegiatan prioritas bagi Sektor Pengembangan Telekomunikasi ITU (ITU-D), dan meminta Sekretaris Jenderal untuk membawa bantuan yang disediakan oleh Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT) bagi masyarakat madani melalui kegiatan-kegiatannya untuk menjadi perhatian Konferensi Yang Berkuasa Penuh (Antalya, 2006), dengan maksud untuk menyediakan sumber keuangan dan sumber daya manusia yang sesuai untuk aksi-aksi dan proyek-proyek yang relevan untuk dilaksanakan dalam kerangka kerja sektor telekomunikasi tersebut;
- b) bahwa Resolusi 68 (Hyderabad, 2010) WTDC memutuskan untuk mendukung inklusi digital bagi masyarakat madani secara umumnya, dan khususnya keikutsertaan mereka dalam lokakarya-lokakarya, seminar-seminar, forum-forum serta pelatihan mengenai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pengembangan sosial dan ekonomi, serta memerintahkan Direktur BDT untuk menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan inisiatif khusus bagi masyarakat madani, membentuk mekanisme-mekanisme kolaborasi dengan Negara-negara Anggota, organisasi-organisasi regional dan internasional dan badan-badan kerja sama relevan lainnya;
- c) bahwa Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi menetapkan, sebagai suatu prioritas, pencapaian sasaran-sasarannya berkenaan dengan masyarakat madani dan komunitas-komunitasnya;
- d) bahwa Pasal 16 Deklarasi Hak Masyarakat Madani dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sebagai berikut: “Masyarakat Madani memiliki hak untuk mendirikan medianya sendiri dalam bahasanya sendiri dan mempunyai akses terhadap semua bentuk media non-madani tanpa diskriminasi”;
- e) bahwa Laporan Keadaan Masyarakat Madani Dunia pertama (2010) memuat data-data statistik yang mengkhawatirkan mengenai keadaan orang-orang ini di bidang kesehatan, hak-hak asasi manusia, pendidikan dan pekerjaan, di antara aspek-aspek lainnya, menempatkannya dalam situasi yang serupa dengan negara-negara terbelakang (LDCs), meskipun kenyataannya bahwa beberapa dari orang-orang tersebut ditemukan di area dalam wilayah negara-negara maju;
- f) aturan-aturan ITU untuk pemberian beasiswa,

mengingat

- a) bahwa Pasal 41 dari deklarasi sebagaimana tersebut di atas menyebutkan bahwa “Badan-badan dan badan-badan khusus dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antarpemerintah lainnya wajib berkontribusi kepada realisasi penuh dari ketentuan-ketentuan Deklarasi ini melalui mobilisasi, antara lain, kerja sama keuangan dan bantuan teknis”;
- b) komitmen ITU dan Negara-negara Anggotanya untuk mencapai Sasaran-sasaran Pengembangan Milenium,

mengamati

bahwa, dalam pelaksanaan proyek-proyek untuk masyarakat madani, kesulitan-kesulitan telah ditanggulangi dalam menempatkan beasiswa untuk orang-orang ini,

memutuskan

- 1 untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang mengatur bantuan-bantuan keuangan ITU kepada inisiatif-inisiatif ITU-D untuk inklusi digital, dan memperluas ketentuan beasiswa ITU kepada masyarakat madani, dengan mempertimbangkan bahwa keadaan khusus mereka adalah setara dengan LDC, sehingga mereka dapat menghadiri lokakarya-lokakarya, seminar-seminar, acara-acara atau acara-acara semacam pengembangan sumberdaya manusia lainnya yang diselenggarakan oleh ITU bagikelompok-kelompok khusus ini untuk memfasilitasi inklusi digitalnya;
- 2 untuk membentuk mekanisme-mekanisme kolaborasi dan validasi dengan administrasi-administrasi dan organisasi-organisasi lain yang relevan di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana juga dengan organisasi-organisasi regional dan nasional manapun yang berhubungan dengan masyarakat madani, dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Resolusi 46 (Doha, 2006) dan 68 (Hyderabad, 2010) dan mengidentifikasi dengan lebih baik peserta-peserta madani dalam kegiatan-kegiatan ITU yang berpotensi memberi manfaat dari beasiswa tersebut,

memerintahkan Sekretaris Jenderal

untuk memberitahukan Dewan mengenai pelaksanaan resolusi ini,

memerintahkan Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi

untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan sepenuhnya Resolusi 46 (Doha, 2006) dan 68 (Hyderabad, 2010), berkenaan dengan keikutsertaan masyarakat madani di lokakarya-lokakarya, seminar-seminar, forum-forum dan pelatihan-pelatihan mengenai TIK,

mengundang Negara-negara Anggota

untuk meningkatkan dan memungkinkan keikutsertaan masyarakat madani dalam lokakarya-lokakarya, seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan ITU, serta selanjutnya memfasilitasi inklusi digitalnya.

**DAFTAR RESOLUSI YANG DICABUT OLEH KONFERENSI YANG
BERKUASA PENUH**
(Guadalajara, 2010)

- SUP RESOLUSI 47 (Rev. Minneapolis, 1998)
Perihal Kompensasi
- SUP RESOLUSI 49 (Kyoto, 1994)
Struktur organisasi dan penilaian dalam ITU
- SUP RESOLUSI 52 (Rev. Minneapolis, 1998)
**Rehabilitasi Dana Perlindungan untuk Dana-dana
Superannuation dan Dana Sukarela Staf ITU**
- SUP KEPUTUSAN 10 (ANTALYA, 2006)
**Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tambahan yang
berhubungan dengan penggantian biaya untuk pendaftaran
jaringan satelit**
- SUP RESOLUSI 67 (Kyoto, 1994)
Pemutakhiran definisi
- SUP RESOLUSI 88 (Rev. Marrakesh, 2002)
**Biaya pemrosesan untuk pendaftaran jaringan satelit dan
prosedur administratif**
- SUP RESOLUSI 107 (Marrakesh, 2002)
Perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan ITU
- SUP RESOLUSI 108 (Marrakesh, 2002)
**Perbaikan pelaksanaan Komite Koordinasi, termasuk tugas
Wakil Sekretaris Jenderal dan peran pejabat-pejabat terpilih
lainnya**
- SUP RESOLUSI 110 (Marrakesh, 2002)
**Peninjauan kembali kontribusi Anggota Sektor untuk membiayai
pengeluaran Perhimpunan Telekomunikasi Internasional**
- SUP RESOLUSI 112 (Marrakesh, 2002)
Persiapan regional untuk konferensi yang berkuasa penuh
- SUP RESOLUSI 134 (Antalya, 2006)
Jumlah Negara Anggota Dewan
- SUP RESOLUSI 141 (Antalya, 2006)
**Studi mengenai keikutsertaan semua pemangku kepentingan
yang relevan dalam kegiatan Perhimpunan terkait dengan
Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat
Informasi**

- SUP RESOLUSI 142 (Antalya, 2006)
**Peninjauan kembali mengenai terminologi yang digunakan
dalam Konstitusi dan Konvensi ITU**
- SUP RESOLUSI 147 (Antalya, 2006)
Studi mengenai pengelolaan dan pelaksanaan Perhimpunan
- SUP RESOLUSI 149 (Antalya, 2006)
**Studi mengenai definisi dan terminologi yang terkait dengan
pembangunan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi**
- SUP RESOLUSI 155 (Antalya, 2006)
Pembentukan kelompok pengelolaan dan anggaran Dewan
- SUP RESOLUSI 156 (Antalya, 2006)
Penjadwalan konferensi